

# Pemerintah Kota Pasuruan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah SWT*, atas *taufiq, hidayah*, dan pertolongan-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, secara tepat waktu.

Agar *progress report* dapat tersaji lebih jelas, maka LKPj Walikota Pasuruan tahun 2019 ini, lebih fokus pada akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, obyek analisis pada bab III merupakan capaian indikator kinerja urusan dan program. Harapannya, LKPj akan lebih ringkas dan mudah untuk dipahami.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas pembangunan di Kota Pasuruan.

Terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

Pasuruan, Maret 2020
WAKIL WALIKOTA PASURUAN

**RAHARTO TENO PRASETYO** 

i

# **DAFTAR ISI**

KATA	A PENGAN	ITAR	
DAF1	TAR ISI		ii
DAF1	AR TABEL		vi
DAF1	AR GRAFI	K	xii
DAF1	TAR GAME	BAR	XV
BAB I	PENDAH	HULUAN	I-1
1.1.	Dasar	Hukum	I-1
1.2.	Visi da	n Misi	-4
	1.2.1.	Visi Kota Pasuruan	
	1.2.2.	Misi Pembangunan Daerah	
	1.2.3.	Tujuan Pembangunan Daerah	
	1.2.4.	Sasaran Pembangunan Daerah	
	1.2.5.	Prioritas Pembangunan	
1.3.	Gamba	aran Umum	
	1.3.1.	Kondisi Geografis Daerah	I-13
	1.3.2.	Kondisi Demografi	
	1.3.3.	Potensi Ekonomi Daerah	
	1.3.4.	Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan	I-24
	1.3.5.	Penduduk Miskin	_
BABI		ARAN APBD	
2.1.	Penge	Iolaan Pendapatan Daerah	
	2.1.1.		
	2.1.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
	2.1.3.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	
	2.1.4.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	
	2.1.5.	Permasalahan Pendapatan dan Solusi	II-14
2.2.	Penge	lolaan Belanja Daerah	II-1 <i>6</i>
	2.2.1.	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	II-1 <i>6</i>
	2.2.2.	Arah Kebijakan Umum Belanja Daerah	II-18
	2.2.3.	Anggaran dan Realisasi Belanja	II-20
	2.2.4.	Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah	
2.3.	Peneri	maan Pembiayaan Daerah	
	2.3.1.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-27
	2.3.2.	Penerimaan Pembiayaan	11-28
	2.3.3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
BAB I	II HASILI	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MI	ENJADI
KEW	ENANGA	N DAERAH	III-1
3.1.	•	ın Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
1.		/ajib Pelayanan Dasar	
		san Pendidikan	
	1.2. Uru	san Kesehatan	III-15

	1.3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	111-30
	1.4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	III-35
	1.5.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	
		Masyarakat	III-41
		Urusan Sosial	
2.	Urus	an Wajib Bukan Pelayanan Dasar	III-66
		Urusan Tenaga Kerja	
	2.2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111-72
		Urusan Pangan	
	2.4.	Urusan Pertanahan	111-84
	2.5.	Urusan Lingkungan Hidup	III-86
	2.6.	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	111-94
	2.7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-99
		Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		. Urusan Perhubungan	
	2.11	. Urusan Komunikasi Dan Informatika	III-118
	2.12	. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	III-124
		. Urusan Penanaman Modal	
	2.14	. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga	III-134
		. Urusan Statistik	
	2.16	. Urusan Kebudayaan	III-145
	2.17	. Urusan Perpustakaan	III-150
	2.18	. Urusan Kearsipan	III-155
3.	Urusa	ın Pilihan	III-159
	3.1.	Urusan Kelautan Dan Perikanan	III-159
	3.2.	Urusan Pariwisata	III-164
	3.3.	Urusan Pertanian	III-167
	3.6.	Urusan Perdagangan	III-174
	3.7.	Urusan Perindustrian	III-182
	3.9.	Urusan Transmigrasi	III-185
4.	Urusa	ın Pemerintahan Fungsi Penunjang	III-188
		Urusan Administrasi Pemerintahan	
	4.2.	Urusan Pengawasan	III-213
	4.3.	Urusan Perencanaan	III-217
	4.4.	Urusan Keuangan	III-223
		Urusan Kepegawaian	
		Urusan Penelitian dan Pengembangan	
3.2.		rategi dan Arah Kebijakan Daerah	
		.1. Strategi	
		.2. Arah Kebijakan	
		.3. Prioritas Pembangunan Daerah	
3.3.		ndak Lanjut Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2018	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
		,	

3.	Urusan PilihanI	11-260
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi PenunjangI	II-262
	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
BAB V	PENUTUP	IV-1

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Pemetaan Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Pasuruan	I-10
Tabel 1.2	Pemetaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan	
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Kota Pasuruan Berdasarkan Kecamatan dan	
	Kelurahan	I-14
Tabel 1.4	Pola Guna Lahan eksisting di Kota Pasuruan Tahun 2019	I-14
Tabel 1.5	Nama dan Panjang Sungai di Kota Pasuruan	I-16
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Menurut	
	Jenis Kelamin	I-17
Tabel 1.7	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Menurut	
	Tingkat Pendidikan	I-18
Tabel 1.8	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Berdasarkan	
	Lapangan Pekerjaan	I-19
Tabel 1.9	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	
	Kota Pasuruan Tahun 2016-2019*	I-20
Tabel 1.10	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kota	
	Pasuruan Tahun 2016-2019	I-21
Tabel 1.11	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto	
	Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	
	Kota Pasuruan Tahun 2016–2019	I-21
Tabel 1.12	Kinerja Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu & Hasil Hutan	
	dan Sub Sektor Industri Logam Kota Pasuruan Tahun 2016–2019 .	I-22
Tabel 1.13	Kinerja Pasar Tradisional di Kota Pasuruan Tahun 2016–2019	23
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	
	Tahun Anggaran 2019	
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapat	
	Tahun Anggaran 2019	II-8
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019	
	Menurut Jenis Pajak	II-9
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019	
	Menurut Jenis Retribusi	II-9
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
	yang Dipisahkan Tahun 2019 Menurut Bagian Laba atas	
	Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	II-10
Tabel 2.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain	
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019	
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2019	II-11
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
	Tahun Anggaran 2019	II-12
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum	
	Tahun Anggaran 2019	II-12

Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus	
	Tahun Anggaran 2019	. II-12
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
	Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019 2019	. II-13
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2019	. II-13
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	
	Tahun Anggaran 2019	. II-13
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	Tahun Anggaran 2019	. II-14
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tahun	
	Anggaran 2019	. II-14
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	. II-20
Tabel 2.17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	
	Tahun Anggaran 2019	. II-21
Tabel 2.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	
	Tahun Anggaran 2019	. II-22
Tabel 2.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	
	Tahun Anggaran 2019	. II-22
Tabel 2.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan	
	Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun	
	Anggaran 2019	. II-23
Tabel 2.21	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun	
	Anggaran 2019	. II-23
Tabel 2.22	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung	
	Tahun Anggaran 2019	. II-24
Tabel 2.23	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	
	Tahun Anggaran 2019	. II-24
Tabel 2.24	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun	
	Anggaran 2019	. II-24
Tabel 2.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal	
	Tahun Anggaran 2019	. II-25
Tabel 2.26	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah	
	Tahun Anggaran 2019	. II-29
T 1 124		
Tabel 3.1	Daftar Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan dan Perangkat Daera	
T	Pengelolanya	
Tabel 3.2	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendic	
Tabel 3.3	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusa	
Tabel 3.5	Pendidikan	
Tabel 3.4	Penghargaan yang diterima oleh lembaga pendidikan selama tahu	
	2019	
Tabel 3.5	Penghargaan yang diterima oleh Perorangan selama tahun 2019	
Tabel 3.6	Penghargaan yang diterima oleh dalam Bidang Kebudayaan selan	
	tahun 2019	

Penghargaan yang diterima oleh Perorangan bidang kebudayaan selama tahun 2019 III-14
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Capaian Target Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan KesehatanIII-26
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIII-30
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIII-32
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman III-36
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan MasyarakatIII-45
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Sosial
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja III-68
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Tenaga KerjaIII-71
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak III-74
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PanganIII-79
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan III-80
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan III-84
Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan III-85
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup III-88
Capaian Target Indikator Kinerja Program
Urusan Lingkungan Hidup III-91

Tabel 3.28	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
	Administrasi Kependudukan dan Catatan SipilIII-95
Tabel 3.29	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan SipilIII-97
Tabel 3.30	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
	Pemberdayaan Masyarakat dan DesaIII-100
Tabel 3.31	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaIII-104
Tabel 3.32	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIII-108
Tabel 3.33	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga BerencanaIII-112
Tabel 3.34	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
	PerhubunganIII-115
Tabel 3.35	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan
	PerhubunganIII-117
Tabel 3.36	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi
	InformatikaIII-119
Tabel 3.37	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Program Urusan
	Komunikasi dan InformatikaIII-122
Tabel 3.38	Capain Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan
	Usaha MikroIII-124
Tabel 3.39	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi
	dan Usaha MikroIII-125
Tabel 3.40	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan Penanaman
	ModalIII-128
Tabel 3.41	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan
	Kegiatan Urusan Penanaman ModalIII-131
Tabel 3.42	Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan OlahragaIII-135
Tabel 3.43	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan
	Kepemudaan dan OlahragaIII-137
Tabel 3.44	Rekapitulasi Hasil Kejuaraan Semester I Dan II Tahun 2019III-141
Tabel 3.45	Rekapitulasi Hasil Kejuaraan Pospeda Tahun 2019III-142
Tabel 3.46	Hasil Kejuaraan Atletik Event Olahraga Penyandang
	Difabel Yang Diselenggarakan Npci (Nasional Paralympian
	Comitte INDONESIA) Propinsi Jawa Timur Tahun 2019III-142
Tabel 3.47	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
	Urusan StatistikIII-143
Tabel 3.48	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Program Urusan
	StatistikIII-144
Tabel 3.49	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
	III-147
Tabel 3.50	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan
	KebudayaanIII-148

Tabel 3.51	Penghargaan yang diterima oleh urusan wajib kebudayaan dan Kota PasuruanIII-149
Tabel 3.52	Penghargaan yang diterima oleh Perorangan selama tahun 2019III-150
Tabel 3.53	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PerpustakaanIII-151
Tabel 3.54	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PerpustakaanIII-153
Tabel 3.55	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan KearsipanIII-156
Tabel 3.56	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan KearsipanIII-157
Tabel 3.57	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan PerikananIII-160
Tabel 3.58	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program III-161
Tabel 3.59	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PariwisataIII-165
Tabel 3.60	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PariwisataIII-165
Tabel 3.61	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Urusan PertanianIII-168
Tabel 3.62	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PertanianIII-170
Tabel 3.63	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PerdaganganIII-176
Tabel 3.64	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PerdaganganIII-176
Tabel 3.65	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PerindustrianIII-183
Tabel 3.66	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PerindustrianIII-184
Tabel 3.67	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan TransmigrasiIII-186
Tabel 3.68	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan TransmigrasiIII-186
Tabel 3.69	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan III-189
Tabel 3.70	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan KegiatanIII-202
Tabel 3.71	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan
Tabel 3.72	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PengawasanIII-216
Tabel 3.73	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PerencanaanIII-218

Tabel 3.74	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Program Urusan
	PerencanaanIII-220
Tabel 3.75	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan KeuanganIII-225
Tabel 3.76	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan KeuanganIII-228
Tabel 3.77	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan KepegawaianIII-231
Tabel 3.78	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan KepegawaianIII-233
Tabel 3.79	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PerencanaanIII-235
Tabel 3.80	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan PerencanaanIII-236
Tabel 3.81	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan Tahun 2019III-243

# **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Menurut Kelompok UsiaI	-18
Grafik 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan	
	Nasional Tahun 2016-2019*l	-19
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan (ADHK) Kota	
	PasuruanI	-23
Grafik 1.4	PDRB ADHK dan PDRB ADHK Kota Pasuruan tahun 2016-2019I	-24
Grafik 1.5	Perkembangan Indeks Gini Kota Pasuruan Tahun 2016-2019*	-25
Grafik 1.6	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2016-2019*I	-25
Grafik 1.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2016-2019* I	-26
Grafik 1.8	Tingkat Kemiskinan (%) Kota Pasuruan tahun 2016-2019*I	-27
Grafik 1.9	Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruai	n
	Tahun 2016-2018I	-27
Grafik 1.10	Garis Kemiskinan Kota Pasuruan (Rp/kapita/bulan)I	-28
Grafik 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2019	
Grafik 2.2	Prosentase Realisasi Dana Perimbangan 2019II	-11

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan	I-	13	3
Gambar 1.2 Peta Resiko Bencana Banjir Kota Pasuruan	I-	17	7

# BAB I PENDAHULUAN

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan begitu mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ Walikota Pasuruan tahun anggaran 2019, memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Adapun ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

LKPJ disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan dokumen LKPJ menjadi bahan DPRD untuk menyampaikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pasuruan dimasa mendatang.

Penyusunan LKPJ Walikota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan bila ada di tahun 2019.

## 1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pasuruan adalah:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
- 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
- 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

- 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019;
- 17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2019;
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2019;

## 1.2. Visi dan Misi

## 1.2.1. Visi Kota Pasuruan

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam periode waktu tertentu. Visi pembangunan daerah Kota Pasuruan untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

# "Kota Pasuruan lebih sejahtera mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri"

Berdasarkan visi pembangunan yang hendak dicapai, maka dalam perumusan dan penjelasannya, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan sebagai berikut:

- Kota Pasuruan lebih sejahtera: Tema "sejahtera" yang menjadi cita-cita pembangunan Kota Pasuruan 5 tahun ke depan, merupakan konsekuensi dari amanat pembukaan UUD 1945 pada alinea IV. Visi pembangunan nasional 2015 2019 secara implisit mengangkat tema kesejahteraan. Sementara visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014 -2019, secara eksplisit menuliskan tema kesejahteraan.
  - Sejahtera adalah suatu kondisi yang berdimesi jasmani dan rohani, sehingga memungkinkan manusia untuk menjadi insan yang utuh, guna menggapai citacita kehidupan yang ideal, dalam tata kehidupan yang aman dan tentram.

2. Kota Pasuruan lebih mandiri: Cita-cita untuk mewujudkan pembangunan yang mampu memberdayakan potensi lokal, adalah hal yang melatarbelakangi tema "kemadirian" dalam visi pembangunan Kota Pasuruan. Dalam pada itu, kemandirian menjadi tema yang secara tersurat dikandung dalam visi pembangunan nasioal 2015 – 2019 dan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014 -2019.

Mandiri adalah suatu kondisi yang mengindikasikan keberdayaan untuk membangun dan memelihara kelangsungan hidup dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki sendiri. Kemandirian juga membawa pesan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara mandiri. Artinya, dalam pembangunan harus ada upaya untuk menggali dan memberdayakan segenap potensi lokal yang dimiliki. Dalam konteks sosial, membangun kemandirian bukan berarti menjadi asosial. Namun, mengerahkan segenap potensi diri untuk melepaskan hambatan struktural yang menjerat potensi, baik potensi ekonomi maupun sosial-budaya.

3. Kota Pasuruan lebih berdaya saing: Keterbukaan hubungan antar negara, yang lajunya dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi, menjadikan persaingan adalah sebuah keniscayaan. Daya saing menjadi hal yang strategis dan relevan dalam pelaksanaan pembangunan hingga 5 tahun ke depan. Daya saing menjadi salah satu poin dalam 7 misi dan nawacita pembangunan nasional 2015 – 2019. Daya saing juga menjadi poin penting dalam uraian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2015 – 2019.

Daya saing adalah kondisi keunggulan, baik secara komparatif (comparative advantage) maupun kompetitif (competitive advantage), dalam sebuah perbandingan. Era regionalisasi ekonomi, misal pemberlakuan pasar tunggal dengan label masyarakat ekonomi ASEAN, menjadikan daya saing merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh pelaku usaha di Kota Pasuruan, baik pada aspek permodalan, sumberdaya, produksi hingga pemasaran.

Dalam konteks budaya, daya saing budaya lokal menjadi relevan dalam kondisi interaksi budaya antar bangsa yang bebas. Kebudayaan daerah yang merupakan ragam kebudayaan bangsa harus terus dipelihara, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi budaya asing, termasuk sosio-kultural ASEAN.

Kearifan lokal sebagai identitas budaya, yang dapat mewujud berupa pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius). Kearifan lokal sebagai unsur budaya (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai modal pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan.

4. Perdagangan, Jasa dan Industri: Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sektor perdagangan, jasa dan industri telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Kota Pasuruan. Kondisi ini mencerminkan karakteristik perekonomian wilayah perkotaan, yang mana sektor sekunder dan tersier menunjukkan dominasinya dibandingkan dengan sektor primer. Dominasi ini cukup wajar mengingat, antara lain, luas wilayah perkotaan yang relatif kecil, ditambah lagi dengan laju alih fungsi lahan pertanian yang cukup cepat.

Tanpa mengesampingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, ke depan, perekonomian Kota Pasuruan masih bertumpu pada tiga sektor utama ini. Sinergitas antar sektor ekonomi, diharapkan semakin memberikan peluang kepada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan peran pelaku usaha kelompok mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

Dalam dinamika ekonomi Kota Pasuruan, UMKM memiliki peran yang cukup besar, khususnya di sektor ekonomi utama. Sektor industri pengolahan kayu didominasi oleh kelompok industri kerajinan rumah tangga, dengan skala mikro hingga kecil. Begitu pun dengan sektor industri cor logam, hingga industri olahan makanan dan minuman. Kinerja sektor perdagangan di Kota Pasuruan

tidak bisa dilepaskan dari kiprah pedagang-pedagang dengan skala usaha mikro-kecil, baik di pasar tradisional maupun yang tersebar sebagai toko pracangan di rumah-rumah.

# 1.2.2. Misi Pembangunan Daerah

Perwujudan Visi Pembangunan Kota Pasuruan yang telah ditetapkan diatas, dilaksanakan melalui Misi pembangunan Kota Pasuruan 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan layanan kualitas pendidikan, yang mengarah pada pendidikan yang berkeadilan bagi semua warga.

Peningkatan layanan kualitas pendidikan dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pembebasan biaya pendidikan pada berbagai jenjang, 2) pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin; 3) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium dan perpustakaan; serta 4) peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

## 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari **sisi kesehatan** ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

1) pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan puskesmas pembantu;

2) penambahan jam layanan kesehatan puskesmas, yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai;

3) peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan, khususnya di puskesmas dan jaringannya;

4) peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin;

5) meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan sinergitas Posyandu, Pos Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap keluarahan; serta 6) peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. Soedarsono.

# 3. Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan ketenagakerjaan dan iklim usaha, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja.

Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pemerataan kesempatan memperoleh pelatihan ketenagakerjaan bagi pengangguran, 2) mengembangkan jejaring kerja untuk pemagangan dan penempatan kerja; 3) mengembangkan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru; serta 4) meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru.

# 4. Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi ekonomi ditempuh melalui penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri untuk mendukung pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), secara mandiri dan berdaya saing. Peran ini utamanya diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang bergerak di sektor-sektor ekonomi utama.

Penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) percepatan pemecahan masalah pasokan bahan baku kayu yang dihadapi oleh IKM mebel, 2) peningkatan upaya fasilitasi standarisasi produk IKM, terutama produk mebel dan logam, 3) peningkatan kelayakan sarana dan prasarana pasar tradisional; serta 4) penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonom kerakyatan.

# 5. Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataaan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataaan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik, 2) percepatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara, 3) peningkatan cakupan layanan sanitasi, persampahan dan permakaman, 4) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, antara lain melalui: pembangunan ekowisata mangrove, dan taman pendidikan; 5) peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau; serta 6) peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan.

# 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari **sisi birokrasi dan pelayanan publik**, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

# 7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan, yang mengarah pada terbangunnya kohesi sosial.

Kohesi sosial adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang "rukun agawe guyub" dengan modal sosial (social capital), antara lain terejawantah sebagai nilai-nilai kearifan lokal, yang menjadi perekatnya. Misi ini mendukung perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi kohesi sosial, mengingat tanpa kerukunan (harmoni sosial) dan keguyuban (kesalehan sosial), mustahil pembangunan dapat terlaksana.

# 1.2.3. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sementara sasaran pembangunan adalah uraian terukur dari tujuan pembangunan. Tabel 1.1 menyajikan pemetaan misi dan tujuan pembangunan tahun 2019 Kota Pasuruan.

Tabel 1.1
Pemetaan Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Pasuruan

remetaan Misi dan Tujuan rembangunan Kota rasuruan			
	Misi	Tujuan	
MISI I	Meningkatkkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	
MISI II	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	
MISI III	Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	
MISI IV	Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	
MISI V	Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	
MISI VI	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	
MISI VII	Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

# 1.2.4. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang merujuk kepada tujuan dan misi yang hendak dicapai. Tabel 1.2 menyajikan pemetaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pasuruan.

Tabel 1.2
Pemetaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan

Pemetaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan					
Tujuan		Sasaran			
Mengembangkan kualitas dan	1 2	Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau			
pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			
Meningkatkan kualitas	1	Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak			
pelayanan kesehatan	2	Meningkatnya gelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal			
untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	3	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan			
Meningkatkan	1	Menurunnya tingkat pengangguran			
produktivitas dan	2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis			
akses masyarakat	3	Menurunnya angka kemiskinan			
terhadap penghidupan	4	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			
yang layak untuk	5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan			
membangun	6	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)			
keberdayaan sosial	7	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga			
dan ekonomi	8	Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan			
Mengembangkan	1	Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian			
sektor-sektor ekonomi	1	Meningkatnya kinerja perdagangan			
potensial, yang	2	Meningkatnya upaya perlindungan konsumen			
didukung dengan pengembangan iklim	3	Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga			
usaha ekonomi kreatif	4	Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan			
	1	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan,			
	4	perkebunan, peternakan dan perikanan)			
	1 2	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat Meningkatnya penyerapan pangan			
Maningkatkan					
Meningkatkan ketersediaan dan	1 2	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase			
kualitas infrastruktur	3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak			
		Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup			
yang didukung dengan penataan ruang yang	4 5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestahan lingkungan nidup  Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah			
ramah lingkungan	5	lingkungan			
untuk mewujudkan		iliykuliyali			
pembangunan yang					
berkelanjutan					
Memantapkan	1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan			
pelaksanaan reformasi	2	Meningkatnya akuntabintas kedangan dan kinerja pemerintan kota i asurdan Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
polariounidan reformasi		morningkaarija kaantao polajanan pablik			

Tujuan		Sasaran
birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	3	Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
Mengembangkan	1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
aktualisasi nilai-nilai	2	Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib
keagamaan dan kearifan lokal, untuk	3	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana
membangun harmoni sosial dan kesalehan	4	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan
sosial dalam kehidupan bermasyarakat	5	Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

## 1.2.5. Prioritas Pembangunan

Mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2016-2021, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya, maka prioritas pembangunan Kota Pasuruan sebagai berikut:

- Pemantapan aksesbilitas layanan kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 2. Pemerataan kualitas layanan pendidikan, untuk memantapkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun;
- Peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat;
- 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan peran ekonomi kerakyatan dengan didukung iklim usaha yang kondusif;
- 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 6. Peningkatan ketersediaan dan aksesbilitas prasarana sarana infrastruktur wilayah secara layak;
- 7. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan; serta

8. Peningkatan aktuasi nilai-nilai kearifan lokal dan kesalehan sosial untuk mendukung ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat.

## 1.3. Gambaran Umum

# 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

#### A. Batas Administrasi

Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak antara 112°45¹–112°55¹ Bujur Timur dan 7°35¹–7°45¹ Lintang Selatan. Secara geografis, sebagaimana tersaji pada gambar 1.1, berlokasi di Pulau Jawa, dengan bagian utara dibatasi Laut Jawa, sedangkan bagian lainnya berhadapan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan: Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek

Kabupaten Pasuruan

Secara administrasif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Kota Pasuruan terdiri atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan.

SELAT MADURA

SE

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan, diolah

# B. Luas Wilayah dan Pemanfaatan lahan

Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 35,29 km2 yang terbagi atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan, yang secara terperinci disajikan pada Tabel 1.1. Dengan

luas wilayah tersebut, Kota Pasuruan merupakan daerah terkecil kelima di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, (16,46 km2), Kota Probolinggo (25,24 km2), Kota Blitar (32,58 km2) dan Kota Madiun (33,23 km2).

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Kota Pasuruan Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

	Kecamatan	Luas	Kecamatan		Luas Kecamatan Bugul		Luas	Kecamatan		Luas	
	Gadingrejo	(km²)		Purworejo	(km²)		Kidul	(km²)	F	anggungrejo	(km²)
1.	Kel. Krapyakrejo	1,74	1.	Kel. Pohjentrek	1,90	1.	Kel. Bakalan	1,78	1.	Kel. Ngemplakrejo	1,05
2.	Kel. Bukir	0,66	2.	Kel. Wirogunan	0,61	2.	Kel. Krampyangan	0,55	2.	Kel. Mayangan	0,28
3.	Kel. Sebani	0,87	3.	Kel. Tembokrejo	1,03	3.		3,97	3.	Kel. Trajeng	1,13
4.		0,69	4.	Kel. Purutrejo <sup>*</sup>	1,15	4.	•	2,54	4.	Kel. Bangilan	0,17
5.		1,33	5.	Kel. Kebonagung	0,86	5.	Kel. Bugul Kidul	0,95	5.	Kel. Kebonsari	0,80
6.	Kel. Petahunan	0,97	6.	Kel. Purworejo	1,05	6.	Kel. Tapaan	1,15	6.	Kel. Karanganyar	0,56
7.	Kel. Randusari	0,34	7.	Kel Sekargadung	1,51		·		7.	Kel. Kandangsapi	0,46
8.	Kel. Karangketug	1,88							8.	Kel. Pekuncen	0,80
	0 0								9.	Kel. Panggungrejo	1,99
									10.	Kel. Mandaranrejo	0,58
									11.	Kel. Tambaan	0,36
									12.	Kel. Petamanan	0,42
									13.	Kel. Bugul Lor	0,96

Sumber: www.pasuruankota.go.id

Pola penggunaan lahan di Kota Pasuruan terbagi dua, yakni: kawasan lindung dengan luas mencapai 100,59 ha atau 2,75% dari luas total dan kawasan budidaya dengan luas mencapai 3557,29 ha atau 97,25% dari luas total. Kawasan lindung terdiri atas hutan mangrove dan sungai, sementara kawasan budidaya terdiri atas 11 jenis penggunaan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4
Pola Guna Lahan eksisting di Kota Pasuruan Tahun 2019

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
	Kawasan Konservasi	98,68	2,75%
1	Hutan Bakau	71,77	2,00%
2	Sungai	26,91	0,75%
II	Kawasan Budidaya	3.489,61	97,25%
1	Permukiman	1.083,98	30,21%
2	Fasilitas Umum	51,31	1,43%
3	Perdagangan dan Jasa	51,67	1,44%
4	Perkantoran	33,01	0,92%
5	Industri dan Pergudangan	132,05	3,68%

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
6	Kawasan Militer	6,46	0,18%
7	Ruang Terbuka Hijau	883,80	24,63%
8	Sawah	117,02	3,26%
9	Tegalan/Ladang	534,66	14,90%
10	Tambak/Empang	593,86	16,55%
11	Prasarana Transportasi	1,79	0,05%
	Jumlah	3.588,29	100,00%

Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2011 – 2031, diolah

# C. Kondisi Topografi

Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, dengan ketinggian daratan rata-rata ±4 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1%, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: sungai Gembong, sungai Petung dan sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan, yang berasal dari daerah vulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah bukit lipatan dan batuan endapan berkapur Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur. Dengan demikian sifat batuannya adalah intermedier sampai agak basis.

#### D. Kondisi Geologi

Kondisi tanah bertekstur liat, sehingga dalam keadaan basah akan mengembang dan bersifat lekat, sedangkan kalau kering mengkerut, membentuk celah yang keras. Kadar unsur Na dan CI yang tinggi di bagian utara membuat tanah ini kurang sesuai untuk budidaya tanaman pertanian, tetapi sangat sesuai untuk budidaya tambak dan penggaraman. Tanaman utama pertanian di Kota Pasuruan adalah padi, yang biasa ditanam baik pada musim penghujan maupun kemarau. Sementara budidaya tambak lebih banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian timur dibanding pada bagian barat.

# E. Kondisi hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar, yang berhulu di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: Sungai Welang, Sungai Petung dan Sungai Gembong. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.

Tabel 1.5
Nama dan Panjang Sungai di Kota Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Kali Welang	1,00
2.	Kali Gembong	7,50
3.	Kali Petung	6,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pasuruan, 2018

Mutu air tanah di Kota Pasuruan cukup baik, di mana airnya berasal dari daerah vulkanis yang kaya akan mineral dan unsur hara sehingga kondisi tanahnya relatif subur, kondisi lahan yang demikian sangat cocok dengan pengelolaan lahan pengairan teknis yang dapat diolah setiap waktu.

Iklim Kota Pasuruan termasuk tipe D.2, dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.024 mm. Musim kemarau berlangsung selama 4 (empat) bulan, yaitu bulan Juli sampai Oktober dan musim penghujan tertinggi selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Desember, Januari dan Februari.

# F. Wilayah Rawan Bencana

Keberadaaan tiga sungai besar yang bermuara dan melintas di wilayah Kota Pasuruan, ditambah dengan kondisi kemiringan dan ketinggian permukaan tanah wilayahnya, maka potensi ancaman bencana yang terbesar adalah banjir. Baik yang disebabkan oleh naiknya debit air sungai maupun naiknya permukaan air laut.

RECAMATAN POLIENTERK
REGURATEN PASURUAN

RECAMATAN POLIENTERK
RABUPATEN PASURUAN

Gambar 1.2
Peta Resiko Bencana Banjir Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2019

Sebagaimana terlihat pada gambar 1.2, kawasan rawan bencana banjir Kota Pasuruan ditunjukkan oleh warna orange (intensitas tinggi) dan hijau (intensitas rendah), yang tersebar sepanjang jalur sungai-sungai besar (warna biru), yaitu: Sungai Welang, Sungai Petung dan Sungai Gembong.

# 1.3.2. Kondisi Demografi

### A. Klasifikasi Kependudukan

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan tahun 2019 adalah sebanyak 211.008 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 65.668 rumah tangga. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah di Kecamatan Panggungrejo, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Bugulkidul.

Tabel 1.6

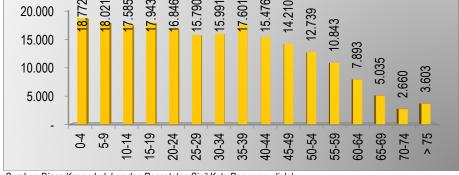
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin

NO	Kecamatan	Per	nduduk	- Jumlah	Jumlah KK	
NO	Recalliatan	Laki-Laki	Perempuan	- Juillian	Juilliali KK	
1	Gadingrejo	24.473	48262	48.262	14.803	
2	Purworejo	30.922	61868	61.868	19.122	
3	Bugulkidul	15.809	31828	31.828	9.827	
4	Panggungrejo	34.288	69050	69.050	21.916	
	KOTA PASURUAN	104.953	105.492	211.008	65.668	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diolah

Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda, sebagaimana tersaji pada grafik 1.1, yang didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 65,13%. Sisanya sebesar 34,87%, merupakan penduduk tidak produktif, dengan rentang usia

0-14 tahun dan 60-75 tahun. Kondisi ini menginformasikan bahwa Kota Pasuruan masih berpotensi menikmati bonus demografi, yaitu peluang sekaligus ancaman ketika proporsi penduduk usia produktif lebih mendominasi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

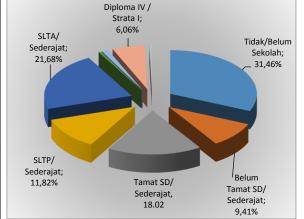


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diolah

Sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kota Pasuruan adalah SLTA/ sederajat, yakni 21,68%. Kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat sebesar 17,46% dan SLTP sebesar 11,82%. Kota Pasuruan masih memiliki potensi penduduk yang akan menamatkan pendidikan menegah keatas sampai pendidikan tinggi cukup besar, yakni 29,85%. Potensi tersebut setiap tahunnya akan terus berkembang seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi.

**Tabel 1.7**Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	66.385	31,46%
2	Belum Tamat SD/	19.859	9,41%
	Sederajat		
3	Tamat SD/Sederajat	36.843	17,46%
4	SLTP/ Sederajat	24.943	11,82%
5	SLTA/ Sederajat	45.746	21,68%
6	Diploma I / II	991	0,47%
7	Akademi /Diploma III/	2.564	1,22%
	S. Muda		,
8	Diploma IV / Strata I	12.791	6,06%
9	Strata II	858	0,41%
10	Strata III	28	0,01%
	Kota Pasuruan	211.008	100%



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diolah

# A.1. Ketenagakerjaan

**Tabel 1.8**Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%	Jasa Pemerintaha
1	Belum/Tidak Bekerja	119.907	56,83%	Indo <b>smasyarak</b> a n; 4,74% Swasta; tan; <mark>3,42% 17,31</mark> %
2	Pelajar/Mahasiswa	18.153	8,60%	,,,,,
3	Pertanian/Peternakan/	3.839	1,82%	Konstruksi
	Perikanan			
4	Perdagangan	5.163	2,45%	Podemon
5	Industri	1.404	0,67%	Perdagangan
6	Jasa Kemasyarakatan	7.206	3,42%	
7	Konstruksi	181	0,09%	Pelajar/Maha Wiraswasta;
8	Pemerintahan	9.998	4,74%	siswa; 8,60% 3,77%
9	Swasta	36.520	17,31%	
10	Wiraswasta	7.958	3,77%	
11	Lainnya	679	0,32%	Belum/Tidak Lainnya; 0,32%
	Kota Pasuruan	211.008	100%	Bekerja; 56,83%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diolah

Sebagian besar, 17,31%, penduduk Kota Pasuruan bermata pencaharian sebagai pegawai/buruh di sektor swasta. Kemudian disusul dengan mata pencaharian di bidang Jasa Kemasyarakatan sebesar 3,42%. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kota Pasuruan, masih cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari prosentase penduduk yang bekerja yang mencapai sebesar 43,17%, sedangkan sisanya adalah belum/tidak bekerja mencapai sebesar 56,83% dan masih berstatus pelajar sebesar 8,60%.

Grafik 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2019\*



Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah \*) Data tahun 2019 adalah angka sementara Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Satistik, kondisi ketenagakerjaan di Kota Pasuruan menunjukan kondisi yang cukup baik. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pasuruan tahun 2019 sebesar 5,06% angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur. Naiknya TPT Kota Pasuruan tahun 2019 disebabkan adanya kenaikan TPT perempuan, hal tersebut terjadi karena cakupan perhitungan TPT perempuan yang sebagian besar masuk dalam kategori mengurus rumah tangga.

#### A.2. Pendidikan

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan bagi penyelenggaraan urusan pendidikan, yang antara lain dipergunakan untuk perbaikan kualitas tenaga pengajar, penambahan tenaga guru, perbaikan fasilitas penunjang pengajaran seperti penambahan ruang kelas dan perbaikan ruang kelas baik berat maupun sedang serta pembenahan yang lainnya.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Capaian indikator pendidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.9.

**Tabel 1.9**Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kota Pasuruan
Tahun 2016-2019\*

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019*
1	Angka partisipasi kasar				
	SD/MI	108,17	106,39	109.39	125,99
	SMP/MTs	92,54	92,22	93,15	161,51
	SMA/MA/SMK	81,23	81,47	81,78	
2	Angka partisipasi murni				
	SD/MI	97,49	97,77	97,81	115,36
	SMP/MTs	81,35	81,52	81,67	129,73
	SMA/MA/SMK	60,76	61,49	61,55	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2018 diolah

## A.3. Kesehatan

Salah satu indikator yang komprehensif untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup (AHH). Secara kuantitas, AHH ditentukan

oleh angka kematian bayi lahir dan angka kematian ibu melahirkan. Tabel 1.10 merincikan kinerja indikator-indikator tersebut sepanjang tahun 2016-2019.

Tabel 1.10

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kota Pasuruan Tahun 2016-2019

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian bayi lahir	8,36	4,31	4,3	8,24
2	Angka Kematian ibu melahirkan	1,67	1,54	1,52	0,88
3	Prosentase KEP pada balita	2,4	1,25	1.22	1,64
4	Angka Harapan Hidup	66,79	70.93	71,25	71,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2019 diolah

## 1.3.3. Potensi Ekonomi Daerah

## A. Potensi Unggulan

Suatu sektor dikatakan unggulan apabila nilai PDRB sektor tersebut dari waktu ke waktu secara konsisten berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB. Berdasarkan data perkembangan kontribusi sektor terhadap nilai PDRB Kota Pasuruan selama 2016-2019, sebagaimana tersaji pada tabel 1.11, diketahui bahwa sektor yang secara konsisten memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB adalah sektor perdagangan (29,46%), sektor industri pengolahan (20,04%) dan sektor jasa (15,57%).

Tabel 1.11
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2016–2019

No	Sektor Ekonomi	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian	2,52	2,36	2,29	2,14
2	Pertambangan dan penggalian	0,03	0,03	0,03	0,02
3	Industri pengolahan	20,6	20,36	20,14	20,04
4	Pengadaan listrik, gas dan air bersih	0,06	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan air, pengolahan sampah & limbah	0,24	0,24	0,25	0,22
6	Konstruksi	6,29	6,45	6,48	6,18
7	Perdagangan besar dan eceran	28,3	28,7	28,98	29,46
8	Transportasi dan pergudangan	5,78	5,96	5,98	6,12
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,33	5,49	5,51	5,6
10	Informasi dan komunikasi	7,65	7,68	7,49	7,61
11	Jasa keuangan	7,76	7,62	7,51	7,24
12	Real estat	2,56	2,48	2,49	2,52
13	Jasa perusahaan	0,6	0,6	0,58	0,63
14	Administrasi pemerintahan	4,34	4,24	4,23	4,45
15	Jasa pendidikan	4,15	4,07	4,07	4,06
16	Jasa kesehatan	0,85	0,84	0,83	0,84
17	Jasa lainnya	2,89	2,81	2,8	2,8
	Total	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

<sup>\*)</sup> Data tahun 2019 adalah angka sementara

Industri di Kota Pasuruan didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sebagian besar pelakunya, bergerak di sub sektor usaha pengolahan kayu atau lebih tepatnya sebagai pengrajin mebel. Sementara sebagian sisanya, tersebar di sub sektor industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam elektronika, dan industri kerajinan. Jumlah IKM di Kota Pasuruan pada tahun 2019 sebanyak 4.138 unit usaha mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 4.084 unit usaha.

Sebagaimana pada umumnya, industri kecil di Kota Pasuruan juga bersifat padat karya. Industri kecil skala rumah tangga atau sering disebut IKRT industri kecil rumah tangga (IKRT), rata-rata menyerap tenaga kerja 1-4 orang. Sementara industri kecil rata-rata menyerap tenaga kerja 5-19 orang. Dengan karakteristik padat karya, sektor industri mampu menyerap 14,43% tenaga kerja di Kota Pasuruan pada tahun 2019, jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,35%.

Walaupun tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Pasuruan, industri kerajinan rumah tangga (IKRT) mebel terkonsentrasi pada beberapa lokasi utama, yakni: Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bukir dan Kelurahan Petahunan. Sementara IKRT logam sebagian terkonsentrasi di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng. kinerja IKRT mebel dan logam Kota Pasuruan Tahun 2016–2019, dapat diliha dari tabel berikut.

Tabel 1.12
Kinerja Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu & Hasil Hutan dan Sub Sektor Industri Logam Kota Pasuruan Tahun 2016–2019

No.	Keterangan	2016	2017	2018*)	2019**
1	Kontribusi dalam PDRB (Rp.juta)				_
	- Industri Pengolahan	1.352	1.450	1.555	1.660
2	Jumlah pelaku usaha (unit)				
	- Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	2.354	2.376	2.429	2.452
	- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	1.552	1.613	1.655	1.686
3	Nilai Produksi (Rp.juta)				
	- Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	2.175.698	2.177.098	2.189.988	2.198.309
	- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	2.021.938	2.034.353	2.040.404	2.067.222
4	Nilai Investasi (Rp.juta)				
	- Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	253.969	254.239	255.205	255.823
	- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	130.872	131.984	132.648	135.192
5	Jumlah Tenaga Kerja				
	- Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	17.763	17.885	18.024	18.160
	- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	11.682	11.988	12.085	12.281

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BPS Kota Pasuruan 2019, diolah

Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Tabel 1.13 merincikan kinerja 6 pasar tradisional di Kota Pasuruan. Rencana pengembangan pasar tradisional yang sudah ada, akan diarahkan pada peningkatan kelayakan sarana-prasarana perniagaan di dalam pasar. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kenyamanan pedagang dengan pembeli dalam bertransaksi di pasar tradisional.

Tabel 1.13
Kinerja Pasar Tradisional di Kota Pasuruan Tahun 2016–2019

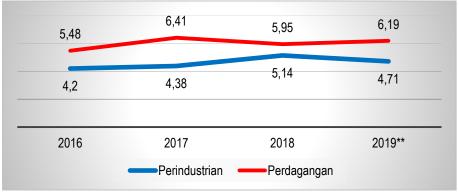
No	Pasar	2016	2017	2018*)	2019**
1	Jumlah sarana perniagaan				_
	- Los (unit)	1.006	1.077	1.077	1.077
	- Kios (unit)	1.995	1.984	1.984	1.984
	- Toko (unit)	36	36	36	36
2	Jumlah pedagang (orang)	3.362	3.465	4.465	3.604
3	Nilai retribusi (Rp.juta)	1.670	1.727	1.725	1.747

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, diolah

Dua sektor ekonomi utama Kota Pasuruan mengalami kecenderungan pertumbuhan yang berbeda, sepanjang 2016-2018. Sektor industri pengolahan mengalami cenderung stagnan pada kisaran 5,49-5,51. Sedangkan sektor perdagangan mengalami fluktuasi dengan tren positif, hal dikarenakan aktifitas ekonomi sektor perdagangan terus digalakkan dengan menstimulus berbagai program dan kegiatan yang mendorong tumbuhnya transaksi perdagangan sektor riil, sebagaimana tersaji pada grafik 1.3.

Grafik 1.3

Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan (ADHK) Kota Pasuruan
Tahun 2016–2019



Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

#### 1.3.4. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan

# 1.3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto

Pada tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatatkan nilai sebesar Rp.5,965 triliun, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukan nilai sebesar Rp.8,288 triliun. Jika diamati dari perkembangan PDRB, kondisi perekonomian di Kota Pasuruan menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

8.288.680,94 7.707.887.37 7.105.188.52 6.559.009,28 5.965.297,00 5.650.854.76 354.088,55 5.076.353,71 2019 2016 2017 2018 ■ PDRB ADHB ■ PDRB ADHK

Grafik 1.4 PDRB ADHK dan PDRB ADHK Kota Pasuruan tahun 2016-2019

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

Apabila nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk, maka akan diperoleh pendapatan per kapita per tahun. Perkembangan pendapatan per kapita (Rp.ribu/org/tahun), menujukkan kecenderungan yang positif, Rp.31.841,25 pada tahun 2016, meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp.33.430,05, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.35.097,75.

Pemerataan pendapatan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penyajian pendapatan per kapita. Mengingat pendapatan per kapita belum menggambarkan tingkat kesenjangan yang terjadi. Artinya, boleh jadi besaran pendapatan per kapita belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyajian indeks gini sebagai parameter tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan. Perkembangan indeks gini Kota Pasuruan tahun 2016-2019\* disajikan pada grafik 1.5.

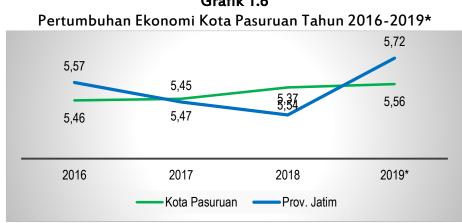
Perkembangan Indeks Gini Kota Pasuruan Tahun 2016-2019\* 0,40 0,39 0,40 0,40 0.38 0,38 0,36 0,4 0,31 0,3 0.2 0,1 2016 2017 2018 2019\* ■ Provinsi Jawa Timur ■ Kota Pasuruan

Grafik 1.5

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

#### 1.3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukan prospek yang positif dalam kurun 5 tahun terakhir. Meski lajunya menunjukkan tingkat yang fluktuatif, sebagai dampak kondisi perekonomian global; namun pertumbuhan ekonomi masih mencatatkan nilai yang positif. Mesin ekonomi yang bertumpu pada usaha mikro dan kecil, dikenal bandel ketika perekonomian mengalami kontraksi. Penyebabnya adalah fleksibilitas skala usaha yang dimiliki usaha mikro dan kecil. Ketika perekonomian menunjukkan gejala kelesuan dan permintaan pasar melemah, usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah menurunkan skala usaha, misalnya mereka dapat mengurangi karyawan untuk menurunkan produksi, tanpa menimbulkan gejolak signifikan.



Grafik 1.6

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

#### 1.3.4.3. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Grafik 1.7 menyajikan indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2016-2019\* 76,00 75,25 74,78 74,39 74.11 74,00 71,50 70,77 72,00 70.27 69,74 70,00 68,00 66,00 2017 2019\* 2016 2018 ■ Pasuruan
■ Jawa Timur

**Grafik 1.7** Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2016-2019\*

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

Pencapaian IPM Kota Pasuruan tahun 2019 adalah sebesar 75,25 dan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 74,78. Kondisi IPM Kota Pasuruan mulai tahun 2016-2019 memperlihatkan tren yang meningkat, artinya kinerja pembangunan daerah semakin dirasakan dan memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat utamanya pada bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli.

#### 1.3.5. Penduduk Miskin

Sepanjang tahun 2016–2019, menurut data BPS, angka kemiskinan Kota Pasuruan cenderung menurun. Berdasarkan data pada tahun 2016, penduduk miskin tercatat sebesar 14.930 jiwa, dan pada tahun 2017 sebesar 14.852 jiwa, tahun 2018 sebesar 13.450 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 12.920 jiwa. Hal tersebut

dikarenakan meningkatnya kualitas penanganan kemiskinan dan program yang dilaksanakan cukup mengenai sasaran. Grafik 1.8 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2016-2019.

15 12.05 11,77 10,98 10,92 10 7,62 7,53 6,77 6,46 5 0 2017 2018 2016 2019\* ■ Jawa Timur ■ Kota Pasuruan

Grafik 1.8
Tingkat Kemiskinan (%) Kota Pasuruan tahun 2016-2019\*

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah \*) Data tahun 2019 adalah angka sementara

Tingkat kesenjangan penduduk miskin dapat diketahui melalui indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Grafik 1.9 menunjukkan perkembangan indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan.



Grafik 1.9
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Pasuruan Tahun 2016-2018

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah \*) Data tahun 2019 adalah angka sementara Garis kemiskinan menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan, sebagai batas untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Apabila tingkat pengeluaran per bulan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikatakan miskin. Umumnya, wilayah dengan karakteristik perkotaan, memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Grafik 1.10 menunjukkan perkembangan garis kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2016-2019.

Garis Kemiskinan Kota Pasuruan (Rp/kapita/bulan)

434.435

415.171

2016

2017

2018

2019

Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah

Grafik 1.10
Garis Kemiskinan Kota Pasuruan (Rp/kapita/bulan)

\*) Data tahun 2019 adalah angka sementara

# BAB II PENJABARAN APBD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) merupakan titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah dan atau untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Dengan demikian daerah diberikan keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya secara luas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta kearifan lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial untuk memulai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Pasuruan tahun anggaran 2019 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bernomor 900/3100/423.201/2018; 900/800/423.040/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 bernomor 900/1508/423.201/2019; 900/712/423.040/2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

#### 2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

Bagi daerah otonom, peningkatan pendapatan daerah senantiasa menjadi isu yang relevan dan aktual, khususnya menyangkut keberadaan dan kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak terkecuali bagi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Sebab makin besar nilai dan porsi PAD dalam struktur pendapatannya, maka ruang fiskal yang tersedia bagi daerah pun menjadi besar pula. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih terbuka bagi manifestasi otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah yang lebih baik.

Hasil yang diperoleh dari upaya untuk mencapai target penerimaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, antara lain meliputi:

- a. Melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, dalam batasan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melainkan memberi ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi.
- b. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas

- pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan penataan, serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan secara lebih proporsional.
- e. Melakukan upaya penggalian potensi baru terhadap obyek PAD dan non PAD.

# 2.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kota Pasuruan pada tahun 2019 bertujuan untuk:

- menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kota Pasuruan;
- menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3. meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran pembangunan daerah;

- 4. kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang; dan
- peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan realisasi investasi serta kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan kondusifitas dan stabilitas nasional dan daerah. Beberapa permasalahan pada bidang Ekonomi Keuangan di Kota Pasuruan adalah:

- 1. Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD;
- 2. Lambatnya revitalisasi sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa;
- 3. Rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif;
- 4. Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial yang menjadi sektor unggulan;
- 5. Kurangnya kreatifitas, inovasi dan etos kerja.

Dalam upaya mewujudkan "Masyarakat Kota Pasuruan yang Sejahtera", sumber pembiayaan perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan lain, serta dengan melakukan efisiensi dan efektifitas belanja.

#### 2.1.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

 Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;

- 2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mencapai hal tersebut Pertama dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/PD. Kedua dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan peraturan daerah, Pengembangan jenis dan obyek pajak; dan
- 3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan dana transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari:

- 1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
- 2. Dana Alokasi Umum; dan
- 3. Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya berada di luar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Besarnya penerimaan dari dana perimbangan sangat tergantung dari capaian penerimaan negara.

Realisasi pendapatan daerah Kota Pasuruan cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun 2016-2019, berturut-turut: pada tahun 2016 mencapai 789 milyar rupiah, tahun 2017 terealisasi Rp.839 milyar, tahun 2018 terealisasi Rp.899 milyar, sedangkan tahun 2019 mencapai 874 milyar rupiah.



Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2019

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019, diolah

Sepanjang tahun 2016-2019 realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif, berturut-turut : tahun 2016 senilai 147,38 milyar rupiah, tahun 2017 senilai 165,78 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 153,02 milyar rupiah, dan tahun 2019 senilai 156,55 milyar rupiah.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah yaitu; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Di samping kesembilan jenis pajak ini terdapat pula retribusi yaitu, Retribusi Jasa Umum meliputi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan Kebersihan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Pasar, dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi Jasa Usaha meliputi Pemakaian Kekayaan Daerah, Rumah Potong Hewan, Tempat Khusus Parkir, dan Terminal. Retribusi perizinan tertentu meliputi Izin Trayek, Izin Gangguan/keramaian, dan Izin Mendirikan Bangunan.

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD dan belum maksimalnya sebagai penghasil PAD.

upaya penanganan permasalahan, maka Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- d. meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

#### 2.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Pasuruan menargetkan pendapatan sebesar Rp.909.414.379.627,84 dan terealisasi sebesar Rp.874.696.792,106.46 atau 96,18%.

Kontribusi Pendapatan Daerah tahun 2019 sebesar 96,18% masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.658.941.543.556,00 dan terealisasi sebesar Rp.607.472.096.931,00 atau 92,19%, begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.143.936.741.210,84 dan terealisasi sebesar Rp.156.559.184.293,46 atau 108,77%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp.106.536.094.861,00 terealisasi sebesar Rp.110.665.510.882,00 atau sebesar 103,88%. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kota Pasuruan kepada

Pemerintah Pusat masih sangat besar. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini:

**Tabel 2.1**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	143.936.741.210,84	156.559.184.293,46	108,77
1.2	Dana Perimbangan	658.941.543.556,00	607.472.096.931,00	92,19
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	106.536.094.861,00	110.665.510.882,00	103,88
	JUMLAH	909.414.379.627,84	874.696.792.106.46	96,18

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

# 2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2019 pada tabel 2.2. adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2019

	<del> </del>				
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.639.383.600,00	39.691.436.092,00	114,58	
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.072.602.540,00	8.113.608.743,00	105,11	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.996.033.677,10	4.996.033.676,87	100,00	
1.4	Lain-lain Pendapat an Asli Daerah Yang Sah	96.228.721.393.74	103.758.105.781,59	107,82	
	JUMLAH	143.936.741.210,84	156.559.184.293.46	108.77	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total anggaran PAD Tahun 2019 sebesar Rp.143.936.741.210,84 dan terealisasi sebesar Rp.156.559.184.293.46 atau 108.77%. Dari empat komponen PAD tersebut di atas, Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar, yaitu sebesar 114,58%, sedangkan yang berkontribusi pada urutan terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang memberikan kontribusi sebesar 107,82%. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.34.639.383.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.39.691.436.092,00 atau 114,58%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah

Kota Pasuruan Tahun 2019 adalah Pajak Penerangan Jalan yang dianggarkan sebesar Rp.15.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.019.093.002,00 atau 102,69%, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya dianggarkan sebesar Rp.32.016.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.955.902,00 atau 131,05%. Rincian Anggaran dan realisasi Pajak Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 Menurut Jenis Pajak

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pajak Hotel	599.796.000,00	834.616.750,00	139,15
2	Pajak Restoran	1.777.488.000,00	2.992.517.121,00	168,36
3	Pajak Hiburan	117.600.000,00	172.868.783,00	147,00
4	Pajak Reklame	760.000.000,00	777.160.363,00	102,26
5	Pajak Penerangan Jalan	15.600.000.000,00	16.019.093.002,00	102,69
6	Pajak Parkir	32.016.000,00	41.955.902,00	131,05
7	Pajak Air Tanah	102.483.600,00	115.554.896,00	112,75
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.650.000.000,00	3.877.701.833,00	106.24
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000,00	14.859.967.442,00	123,83
	(BPHTB)			
	JUMLAH	34.639.383.600,00	39.691.436.092,00	114,58

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### B. Hasil Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.8.072.602.540,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.113.608.743,00 atau 100,51%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp.5.379.682.279,00 atau 107,65% dari anggaran sebesar Rp.4.997.403.840,00 Sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Perijinan Tertentu yaitu sebesar Rp.372.437.064,00 atau 65,45% dari anggaran Rp.569.040.500,00. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 Menurut Jenis Retribusi

	<del></del>			
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	4.997.403.840,00	5.379.682.279,00	107,65
2	Retribusi Jasa Usaha	2.506.158.200,00	2.361.489.400,00	94,23
3	Retribusi Perizinan Tertentu	569.040.500,00	372.437.064,00	65,45
	JUMLAH	8.072.602.540,00	8.113.608.743,00	100,51

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh semua Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu sebesar 100% yaitu dengan anggaran sebesar Rp.4.996.033.677,10 dan realisasi sebesar Rp.4.996.033.676,87. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
2019 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah
(BUMD)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik	4.996.033.677,10	4.996.033.676,87	100
	Daerah/BUMD			
	JUMLAH	4.996.033.677,10	4.996.033.676,87	100

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.96.228.721.393,74 dan realisasinya sebesar Rp.103.758.105.781,59 atau 107,82%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp.75.214.191.750,86 atau 103,51% dari sebesar anggaran Rp.72.664.009.923,72, sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, memberikan kontribusi Anggaran sebesar Rp.79.300.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp.79.300.005,00 atau sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6**Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	389.154.000,00	393.373.000,00	101,08
2	Penerimaan Jasa Giro	1.180.000.000,00	1.143.811.464,53	96,93
3	Penerimaan Bunga	8.303.487.900,00	14.048.333.020,18	169,19
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.961.606,00	277.318.675,00	1.643,98
5	Pendapatan Dari Pengembalian	1.198.701.752,89	1.260.126.493,02	105,12
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	409.318.000,00	422.958.000,00	103,33
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	79.300.000,00	79.300.005,00	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
8	Pendapatan BLUD		75.214.191.750,86	103,51
		72.664.009.923,72		
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	513.494.952,00	199.069.461,00	38,77
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		10.177.789.252,00	89,71
	·	11.344.968.000,00		
11	Penerimaan Lain-lain	129.325.259,13	541.834.660,00	418,97
	JUMLAH		103.758.105.781,59	107,82
		96.228.721.393,74		

# 2.1.1.2. Dana Perimbangan

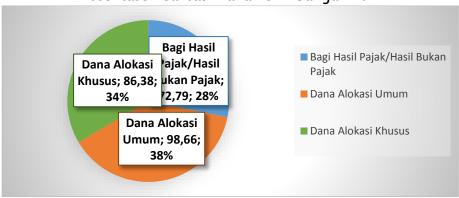
Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, anggaran dan realisasi dana
perimbangan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	121.996.051.550,00	88.798.733.433,00
2	Dana Alokasi Umum	446.869.099.000,00	440.869.102.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	90.076.393.006,00	77.804.261.498,00
-	JUMLAH	658.941.543.556,00	607.472.096.931,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

**Grafik 2.2**Prosentase Realisasi Dana Perimbangan 2019



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

# A. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.121.996.051,550,00 dan terealisasi sebesar Rp.88.798.733.433,00 atau 72,79%.

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya Bagi Hasil Pajak dan Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bagi Hasil Pajak	38.550.897,550,00	32.200.056,884,00	83,53
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	83.445.154.000,00	56.598.676.549,00	67,83
	JUMLAH	121.996.051.550,00	88.798.733.433,00	72,79

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2019

#### B. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2019 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.446.859.099.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.440.869.102.000,00 atau 98,66%. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

**Tabel 2.9**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)		
1	Dana Alokasi Umum	446.859.099.000,00	440.869.102.000,00	98,66		
	JUMLAH	446.859.099.000,00	440.869.102.000,00	98,66		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### C. Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2019 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.90.076.393.006,00 dan terealisasi sebesar Rp.77.804.261.498,00 atau 86,38%. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

**Tabel 2.10**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	29.878.590.000,00	24.434.162.300,00	81,78
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	56.339.423.000,00	49.695.897.998,00	88,21
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	3.858.380.006,00	3.674.201.200,00	95,23
	JUMLAH	90.076.393.006,00	124.354.364.356,00	97,80

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### 2.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.106.536.094.861,00 dan terealisasi sebesar Rp.110.665.510.882,00 atau 108,88%.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya memberikan kontribusi yang terbesar yaitu dengan anggaran sebesar Rp.53.000.777,861,00 terealisasi sebesar Rp.77.906.027.882,00 atau sebesar 146,99%, Gambaran anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Menurut Jenis
Pendapatan Tahun Anggaran 2019

_	<b>!</b>			
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	53.000.777.861,00	77.906.027.882,00	146,99
	Daerah Lainnya			
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29.759.988.000,00	14.879.994.000,00	50,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	3.369.929.000,00	2.825.729.000,00	83,85,
	Daerah Lainnya			
4	Pendapatan Hibah	20.405.400.000,00	15.053.760.000,00	73,77
	JUMLAH	106.536.094.861,00	110.665.510.882,00	103,88

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

# A. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibahyang dianggarkan sebesar Rp.20.405.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.053.760.000,00 atau 73,77%. Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

**Tabel 2.12** Anggaran dan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2	Hibah Dana BOS	18.905.400.000,00	15.053.760.000,00	79,63
	JUMLAH	20.405.400.000,00	15.053.760.000,00	92,24

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

# B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnyayang dianggarkan sebesar Rp.53.000.777.861,00 dan terealisasi sebesar Rp.77.906.027.882,00 atau 146,99%. Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019

	<b>33</b>	 	<del></del>	
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi	53.000.777.861,00	77.906.027.882,00	146,99
	JUMI AH	53 000 777 861 00	77 906 027 882 00	146 99

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp.29.759.988.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.879.994.000,00atau 50,00%, Dana penyesuaian dan otonomi khusus berasal dari dana penyesuaian. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Penyesuaian	29.759.988.000,00	14.879.994.000,00	50,00
	JUMLAH	29.759.988.000,00	14.879.994.000,00	50,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

# D. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya

Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.3.369.929.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.825.729.000,00 atau 83,85%. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:

**Tabel 2.15**Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tahun Anggaran 2019

	<i>33</i>			
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	3.369.929.000,00	2.704.700.000,00	83.85
	JUMLAH	<b>3.369</b> .929.000,00	2.704.700.000,00	83,85

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

#### 2.1.5. Permasalahan Pendapatan dan Solusi

Dalam perjalanan pengelolaan pendapatan daerah, beberapa permasalahan signifikan yang muncul antara lain adalah:

- a. Kecermatan perencanaan penerimaan pendapatan daerah
- b. Terbatasnya dana perimbangan
- c. Rendahnya potensi sumber daya alam Kota Pasuruan
- d. Menurunnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak, bantuan keuangan dan hibah dari provinsi.

Terkait permasalahan-permasalahan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya solutif yang diambil antara lain adalah:

- a. Melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pasal retribusi daerah untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, namun dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- b. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/ deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang/saham maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna optimasi pemanfaatan aset daerah.
- e. Meningkatkan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah.
- f. Mengupayakan peningkatan dana bagi hasil pajak dari provinsi.
- q. Tempat pelayanan lebih representatif
- h. Piranti pendukung/sarana/prasarana yang memadai
- i. Melakukan pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan SDM.
- j. Terbatasnya kualitas pelayanan dan kualitas SDM

#### 2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program-program strategis. Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kota Pasuruan, meskipun terjadi dinamika ekonomi global dan domestik.

Belanja daerah dikelola berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas layanan pemerintah yang berkualitas, memiliki konsekuensi logis yaitu meningkatnya kualitas belanja daerah. Disamping itu inovasi-inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis dan volume kegiatan.

#### 2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kota Pasuruan, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- Program dan kegiatan PD disusun dengan pendekatan money follow program artinya alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kinerja program dan kegiatan yang terukur.
- 2. Seluruh PD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (*outcome*) yang lebih terukur dan berkesinambungan (*sustainable*).

- 3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan PD supaya lebih fokus terhadap upaya pemantapan kelayakan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.
- 4. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap PD ada interkoneksitasnya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.
- 5. Mengarahkan kepada seluruh PD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private* domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.
- 6. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
- 7. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- 8. Untuk mendorong masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat melalui dana kelurahan utamanya dalam kegiatan pembangunan sarana-prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- 9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
- 10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

- pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

# 2.2.2. Arah Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah, karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan dana. Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, selanjutnya dialokasikan untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dilakukan secara rasional dan memperhatikan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi mengedepankan prinsip **efisiensi dan efektifitas** penggunaan anggaran dengan memperhatikan: penerapan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin dicapai dan prioritas

kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 antara lain:

- 1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai dengan asumsi kenaikan gaji pegawai 5-15%, akres 2,5 persen untuk kenaikan gaji berkala, tunjangan-tunjangan, dan mutasi, pemberian gaji ke 13 dan 14 yang diberikan setiap tahunnya, luran Askes PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNSD, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- 3. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4. Bantuan keuangan, dianggarkan untuk bantuan kepada partai politik; dan
- 5. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik dengan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan daerah, maka Belanja Langsung diarahkan untuk:

 Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

- Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas PD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah; dan
- 3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# 2.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.
- Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD).

Total anggaran belanja daerah Tahun 2019 sebesar Rp.1.151.120.187.307,83 dan terealisasi sebesar Rp.809.437.611.037,98 atau 74,97%, dialokasikan untuk belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp.492.673.139.996,46 dan terealisasi sebesar Rp.371.939.049.665,00 atau 75,49% dan untuk belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp.658.447.047.311,37 terealisasi sebesar Rp.491.066.922.221,00 atau 74,58%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16 di bawah ini:

**Tabel 2.16**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	492.673.139.996,46	371.939.049.665,00	75,49
1.1	Belanja Pegawai	379.758.361.236,82	306.375.741.194,00	85,05
1.2	Belanja Hibah	43.641.836.500,00	37.595.549.387,00	88,67
1.3	Belanja Bantuan Sosial	15.504.604.000,00	9.820.484.243,00	61,61
1.4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	6.541.027.040,00	6.648.047.040,00	7,85
	Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa			
1.5.	Belanja Tidak Terduga	47.227.311.219,64	192.496.694,00	0,41

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
2	Belanja Langsung	658.447.047.311,37	491.066.922.221,00	74,58
2,1,	Belanja Pegawai	80.528.080.655,00	70.269.793.602,00	87,26
2,2,	Belanja Barang dan Jasa	324.780.227.895,37	257.602.360.390,00	79,32
2,3,	Belanja Modal	253.138.738.761,00	163.194.768.229,00	64,47
	JUMLAH	1.151.120.187.307,83	809.437.611.037,98	74,97

#### 2.1.1.4. Belanja Tidak Langsung

Rincian per komponen belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuanga kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat dilihat pada penjelasan berikut:

#### A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.379.758.361.236,82 dan terealisasi sebesar Rp.306.375.741.194,00 atau 85,05%. Alokasi terbesar belanja pegawai masih digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp.262.228.619.206,82 dan terealisasi sebesar Rp.247.740.593.420,00 atau 94,48%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut:

Tabel 2.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	262.228.619.206,82	247.740.593.420,00	94,48
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	111.140.799.451,00	69.488.822.030,00	62,52
Belanja Penerimaan Lainnya Pempinan dan Anggota DPRD	4.320.000.000,00	4.075.500.000,00	94,34
Serta KDH/WKDH			
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.656.489.180,00	1.514.579.856,00	91,43
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	412.453.399,00	165.185.056,00	40,05
JUMLAH	379.758.361.236,82	306.375.741.194,00	85,05

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Pebruari 2019

#### B. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.43.641.836.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.595.549.387,00 atau dengan capaian 88,67%. Alokasi terbesar belanja hibah masih digunakan untuk Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi yang dianggarkan sebesar Rp.32.111.393.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.28.786.123.500,00 atau 98,12%, sedangkan alokasi terkecil dengan penyerapan terendah adalah belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat yaitu dengan anggaran sebesar Rp.2.762.495.000,00 terealisasi sebesar

Rp.1.881.295.000,00 atau sebesar 68,10%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel 2.18. berikut:

Tabel 2.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.200.748.000,00	3.140.592.000,00	98,12
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisas	32.111.393.500,00	28.786.123.500,00	89,64
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.762.495.000,00	1.881.295.000,00	68,10
BOP PAUD Masyrakat /Swasta	5.567.200.000,00	4.887.900.000,00	87,80
JUMLAH	43.641.836.500,00	37.595.549.387,00	88,67

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Pebruari 2019

#### C. Belanja Bantuan Sosial

Sosial 2019 Belanja Bantuan Tahun dianggarkan sebesar Rp.15.504.604.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.552.435.069,00 atau 61,61%. Alokasi terbesar belanja bantuan sosial yang digunakan untuk Belanja Sosial yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp.13.154.604.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.867.975.800,00 atau 67,41%, sedangkan alokasi terkecil dengan penyerapan terbesar adalah Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yaitu dengan anggaran sebesar Rp.2.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.684.459.269,00 atau sebesar 29,13%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel 2.19. berikut:

Tabel 2.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial	13.154.604.000,00	8.867.975.800,00	67,41
Kemasyarakatan			
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.350.000.000,00	684.459.269,00	29,13
JUMLAH	15.504.604.000,00	9.552.435.069,00	61,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2019

# D. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemeritahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemeritahan Desa Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.6.541.027.040,00 dan terealisasi sebesar Rp.513.527.040,00 atau 7,85%. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemeritahan Desa digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi dan Belanja Bantuan kepada Partai politik. Adapun rincian

anggaran dan realisasi belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemeritahan Desa dapat dilihat pada tabel 2.20. berikut:

Tabel 2.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	6.027.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan kepada Partai politik	513.527.040,00	513.527.040,00	100,00
JUMLAH	6.541.027.040,00	513.527.040,00	7,85

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2019

# E. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.47.227.311.219,64 pada belanja tidak terduga realisasi sebesar Rp.192.496.694,00 atau sebesar 0,41% Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel 2.21. berikut:

Tabel 2.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Tidak Terduga	47.227.311.219,64	192.496.694,00	0,41
JUMLAH	47.227.311.219,64	192.496.694,00	0,41

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2019

#### 2.1.1.5. Belanja Langsung

Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2019 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.658.447.047.311,37 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.80.528.080.655,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.324.780.227.895,37 Belanja Modal sebesar Rp.253.138.738.761,00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.491.066.922.221,00 atau 74,58%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 terlihat pada tabel 2.22. berikut:

Tabel 2.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	80.528.080.655,00	70.269.793.602,00	87,26
Belanja Barang dan Jasa	324.780.227.895,37	257.602.360.390,00	79,32
Belanja Modal	253.138.738.761,00	163.194.768.229,00	64,47
JUMLAH	658.447.047.311,37	491.066.922.221,00	74,58

#### A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, meliputi: belanja Honorarium PNS, belanja Honorarium Non PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Pegawai Dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD. Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2019 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.80.528.080.655,00 yang dialokasikan untuk Honorarium PNS sebesar Rp.1.854.244.850,00 Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp.61.513.144.725,00 Uang lembur sebesar Rp.1.162.555.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS sebesar Rp.4.295.121.000,00 dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.11.703.015.080,00. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 terlihat pada tabel 2.23. berikut:

Tabel 2.23 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019

33	, ,	<i>3 3</i>	
Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Honorarium PNS	1.854.244.850,00	571.782.200,00	30,84
Honorarium Non PNS	61.513.144.725,00	55.100.005.275,00	89,57
Uang Lembur	1.162.555.000,00	146.280.000,00	12,58
Belanja Pegawai Dana BOS	4.295.121.000,00	4.293.996.000,00	99,97
Belanja Pegawai BLUD	11.703.015.080,00	10.157.730.127,00	86,80
JUMLAH	80.528.080.655,00	70.269.793.602,00	87,26

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2019

# B. Belanja Barang dan Jasa

Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2019 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.255.109.711.264,48. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 terlihat pada tabel 2.24. berikut:

Tabel 2.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

	, 3	<i>J J</i>	
Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Bahan Pakai Habis	22.935.243.853,00	18.608.991.005,00	81,14
Belanja Bahan/Material	13.213.896.625,00	11.698.696.694,00	88,53
Belanja Jasa Kantor	36.447.845.625,00	28.612.055.507,00	78,50
Belanja Premi Asuransi	18.884.809.665,00	18.490.512.312,00	97,91
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.543.119.455,00	4.526.130.538,00	81,65
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.182.205.123,00	7.976.026.915,00	86,86

Harden.	A	D!!!	(0/ \
Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	8.064.730.000,00	6.671.670.031,00	82,73
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.548.665.000,00	1.111.519.500,00	43,61
Belanja Sewa Alat Berat	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.271.198.000,00	2.183.135.000,00	66,74
Belanja Makan dan Minum	21.220.681.500,00	15.550.215.900,00	73,28
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	675.020.000,00	620.755.850,00	91,96
Belanja Pakaian Kerja	2.714.092.500,00	2.610.994.000,00	96,20
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	14.599.053.000,00	4.568.236.000,00	31,29
Belanja Perjalanan Dinas	32.357.420.150,00	25.666.533.429,00	79,32
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.622.310.000,00	3.139.847.000,00	67,93
Belanja Pemeliharaan	11.319.473.832,00	9.800.947.664,00	86,58
Belanja Jasa Konsultasi	5.137.468.300,00	3.189.294.550,00	62,08
Belanja Barang dan Jasa BOS	12.651.120.400,00	12.651.120.400,00	100,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	8.709.214.800,00	4.133.342.168,00	47,46
masyarakat/Fihak Ketiga			
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.226.100.000,00	1.686.640.511,00	75,77
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non	2.163.000.000,00	1.191.108.500,00	55,07
PNS			
Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.906.292.000,00	3.158.849.570,00	80,87
Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.521.625.567,37	57.211.218.346,00	87,32
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	15.543.965.000,00	11.576.744.000,00	74,48
Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.313.677.500,00	960.075.000,00	73,08
JUMLAH	324.780.227.895,37	257.602.360.390,00	79,32

# C. Belanja Modal

Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2019 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.253.138.738.761,00 dengan realisasi sebesar Rp.163.194.768.229,00 atau sebesar 75,11%. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 terlihat pada tabel 2.25. berikut:

Tabel 2.25
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	30.496.525.900,00	716.798.891,00	2,35
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	5.456.375.000,00	4.971.075.000,00	91,11
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat	18.790.306.250,00	14.029.412.897,00	74,66
Bermotor			
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat	782.802.500,00	768.983.950,00	98,23
tidak Bermotor			
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di	78.820.000,00	33.946.000,00	43,07
atas Air Tidak bermotor			
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	577.488.200,00	501.155.000,00	86,78
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan	106.880.000,00	6.480.000,00	6,06
Pertanian dan Peternakan			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.504.551.192,00	2.151.870.216,00	85,92
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.750.724.200,00	1.357.379.575,00	77,53
Belanja Pengadaan Komputer	11.312.592.790,00	10.697.992.128,00	94,57
Melanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.067.168.990,00	2.503.330.080,00	81,62
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	414.743.500,00	290.730.000,00	70,10

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	1.259.296.400,00	1.066.709.141,00	84,71
Rumah Tangga			
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.101.983.325,00	1.812.414.750,00	86,22
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.341.312.300,00	3.464.460.460,00	79,80
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	147.380.000,00	133.660.500,00	90,69
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.217.797.900,00	8.351.994.941,00	90,61
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.521.457.950,00	1.335.661.800,00	87,79
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	24.121.253.560,00	14.889.007.232,00	61,73
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	125.000.000,00	122.774.050,00	98,22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	39.244.029.200,00	27.940.866.051,00	71,20
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.364.961.000,00	5.041.133.498,00	93,96
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	299.753.600,00	246.905.279,00	82,37
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	77.694.697.226,00	53.103.184.798,00	68,35
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	163.198.000,00	154.876.500,00	94,90
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak, Kesenian, Kebudayaan	131.570.600,00	114.080.900,00	86,71
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	48.675.000,00	46.985.000,00	96,53
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan Keamanan	582.261.300,00	568.003.500,00	97,55
Belanja ModalPengadaan Alat-alat Olahraga	62.031.000,00	42.650.000,00	68,76
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Lalu	394.776.000,00	390.096.850,00	98,81
Lintas			, -
Belanja Modal PengadaanTaman	7.024.510.730,00	4.387.107.894,00	62,45
Belanja Modal Peralatan Permainan	317.476.023,00	193.721.400,00	61,02
Belanja Modal BLUD	3.636.339.125,00	1.759.319.948,00	48,38
JUMLAH Sumber: Beden Pengelelen Kouppen den Acet Keta Reguruen lan	245.323.591.650,77	184.267.409.696.59	75,11

# 2.2.4. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Dalam perjalanan pengelolaan belanja daerah, beberapa permasalahan signifikan yang muncul antara lain adalah:

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Permasalahan dana perimbangan.
- d. Besarnya Silpa akibat dari rendahnya penyerapan anggaran
- e. Proses pengganggaran melalui SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Terkait permasalahan-permasalahan dalam hal pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya solutif yang diambil antara lain adalah:

- a. Mensinkronkan waktu pelaksanan kegiatan dengan penetapan anggaran.
- b. Kesesuaian anggaran transfer dengan pencairan dana transfer kedaerah.
- c. Kebutuhan penggunaan sesuai dengan peruntukannya.

- d. Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan anggaran daerah.
- e. Verifikasi dan pengesahan RKA dan DPA serta DPPA tidak terlalu lama dengan penetapan APBD/APBD Perubahan.
- f. Salah satu penyebab terjadinya Silpa yang besar adalah keterlambatan lelang pekerjaan, sehingga waktu pelaksanaan dirasakan tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan dan terlambatnya perencanaan teknis, untuk itu proses lelang hedaknya di sederhanakan agar menghemat waktu.
- g. Dengan adanya SIMDA diharapkan sistem penganggaran menjadi cepat, tepat dan akurat, untuk itu ketelitian dan keakurasian dalam menginput data pada SIMDA harus menjadi perhatian yang serius.
- h. Pertanggungjawaban anggaran agar tepat waktu.

#### 2.3. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### 2.3.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;

- 2. jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
- 3. jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan ke depan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2017 adalah:

- menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
- menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
- 3. menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD; dan
- melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### 2.3.2. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.246.207.299.379,39 dan terealisasi sebesar Rp.216.122.937.134,51 atau 87,78%, yang terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.216.036.213.640,51 dan terealisasi sebesar Rp.216.036.213.640,51 atau 100,00%
- b. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00%

c. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp.171.085.738,88 dengan realisasi sebesar Rp.86.723.494,00 atau sebesar 50,69%.

# 2.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.5.230.036.699,40 dan terealisasi sebesar Rp.1.355.000.000,00 atau 25,91%, yang terdiri dari :

Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		J	
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Α	Penerimaan Pembiayaan Daerah	246.207.299.379,39	216.122.937.134,51	87,78
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	216.036.213.640,51	216.036.213.640,51	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	171.085.738,88	86.723.494,00	50,69
В	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.230.036.699,40	1.355.000.000,00	25,91
1	Pembentukan Dana Cadangan	3.875.036.699,40	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	90,33
Jum	ılah pembiayaan netto	240.977.262.679,99	214.767.937.134,51	89,12
Sisa	ı lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	244.456.434.262,97	-	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2019

# BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

# 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2019 menyelenggarakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 7 urusan pilihan, dan 6 urusan pemerintahan fungsi penunjang, sedangkan pengelolaannya diampu oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun urusan Pemerintahan Kota Pasuruan dan perangkat daerah pengelolanya terurai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan dan Perangkat Daerah Pengelolanya

NO.	URUSAN	PD PENGELOLA		
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DA			
1.1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.2	Kesehatan	Dinas Kesehatan		
1.2	Noonatan	RSUD dr. R. Soedarsono		
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Ruang			
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman		
1.5	Ketentraman dan Ketertiban	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Umum serta Perlindungan	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		
	Masyarakat	Badan Penaggulangan Bencana Daerah		
1.6	Sosial	Dinas Sosial		
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYA	ANAN DASAR		
2.1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja		
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
	Perlindungan Anak	Berencana		
2.3	Pangan	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan		
2.4	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan		
		Sekretariat Daerah:		
		- Bagian Administrasi Pemerintahan		
		Kecamatan Panggungrejo		
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset		

NO.	URUSAN	PD PENGELOLA			
2.5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan			
2.6	Administrasi Kependudukan dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Pencatatan Sipil				
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Kecamatan Gadingrejo Kecamatan Panggungrejo Kecamatan Bugul Kidul			
0.0	B B	Kecamatan Purworejo			
2.8	Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
2.0	Keluarga Berencana	Berencana Dines Perhubungan			
2.9 2.10	Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan	Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Dinas koperasi dan Usaha Mikro			
2.11	Menengah	Dilias Ropelasi dali Osalia Mikio			
2.12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
2.14	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2.15	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.16	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.17	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
III	URUSAN PILIHAN	D' D. 'I			
3.1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan			
3.2	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
3.3 3.4	Pertanian Kehutanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
3.5	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3.6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3.7	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja			
IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNG				
4.1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah			
		- Bagian Administrasi Pemerintahan			
		- Bagian Administrasi Pembangunan			
		- Bagian Administrasi Perekonomian & SDA			
		- Bagian Administrasi Kesra & Kemas			
		- Bagian Administrasi Umum			
		- Bagian Hukum			
		- Bagian Organisasi			
		- Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan			
		- Bagian Layanan Pengadaan			
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
		Kecamatan Gadingrejo Kecamatan Panggungrejo			
		Kecamatan Panggungrejo Kecamatan Bugul Kidul			
		Kecamatan Purworejo			
4.2	Pengawasan	Inspektorat			
4.3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
4.4	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset			
		Badan Pendapatan Daerah			
4.5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah			
4.6	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah			

# 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar didukung oleh 6 (enam) urusan yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial, dengan penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

## 1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan derajat pendidikan, urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

#### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke I yaitu meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau. Indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tahun anggaran 2019 antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru terhadap murid baik itu di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7–12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar (SD/MI) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah. Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Sekolah jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) yang ditargetkan sebesar 99,77% terealisasi sebesar 123,38% atau tercapai sebesar 123,66%, hal ini didukung oleh partisipasi masyarakat.

Sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah yang ditargetkan sebesar 31,75% terealisasi sebesar 49,74% atau tercapai sebesar 156,66%, hal tersebut terjadi karena jumlah penduduk usia pendidikan dasar pada tahun 2019 mengalami penurunan tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Dan untuk rasio guru terhadap murid yang ditargetkan 56,65% terealisasi sebesar 65,55% atau tercapai sebesar 115,71%, Sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam pemetaan data kekurangan guru sehingga di tahun 2019 ada penambahan guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Serta pada jenjang pendidikan menengah (SMP/MTs) untuk angka partisipasi sekolah yang ditargetkan sebesar 98,42% terealisasi sebesar 135,16% atau tercapai sebesar 137,33%, hal ini disebabkan adanya peran serta Pemerintah Kota dalam memfasilitasi dan meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik sehingga minat serta daya tarik masyarakat untuk bersekolah di Kota Pasuruan sangat tinggi dan tingginya kesadaran orang tua untuk mensekolahkan anaknya

sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah yang ditarget sebesar 32,78% terealisasi sebesar 58% atau tercapai sebesar 176,94%, hal tersebut terjadi karena jumlah penduduk usia pendidikan menengah pada tahun 2019 mengalami penurunan tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Dan untuk rasio guru terhadap murid yang ditargetkan sebesar 82,71% terealisasi sebesar 97,56% atau tercapai sebesar 117,95%, Sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam pemetaan data kekurangan guru sehingga di tahun 2019 ada penambahan guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

capaian ranger manacer kinenja i engelenggaraan enasan i enaranan					
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pendidikan Dasar (SD/MI)				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Per 1.000	99,77	123,38	123,66
2.	Rasio ketersediaan sekolah	Per 10.000/anak usia SD	31,75	49,74	156,66
3.	Rasio guru terhadap murid	Per 1.000/siswa SD	56,65	65,55	115,71

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pendidikan Menengah (SMP/ MTs)				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Per 1.000	98,42	135,16	137,33
2.	Rasio ketersediaan sekolah	Per 10.000/anak usia SLTP	32,78	58	176,94
3.	Rasio guru terhadap murid	Per 1.000/ siswa SLTP	82,71	97,56	117,95

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2019, dimana pelaksanaannya didukung oleh 6 program yang terdiri dari 240 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.60.201.711.850,00 dan serapan anggaran sebesar Rp.48.938.760.891,00 atau sebesar 81,29%.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator yaitu jumlah peserta didik PAUD yang ditargetkan 10.427 anak, terealisasi sebesar 9.315 anak atau tercapai sebesar 89,34%, Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi yang ditargetkan 12,77%, terealisasi sebesar 19,57% atau tercapai sebesar 153,28%, Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C yang ditargetkan 500 WB, terealisasi sebesar 999 WB atau tercapai sebesar 199,8% , Jumlah masyarakat yang mengikuti Kursus yang ditargetkan 250 Orang, terealisasi sebesar 200 Orang atau tercapai sebesar 80% dan Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca al-qur'an dengan nilai minimal 70 yang di targetkan 400 siswa/siswi, terealisasi sebesar 692 atau tercapai sebesar 173%, pada indikator peserta didik PAUD yang tidak melampaui target tersebut dikarenakan pada usia anak 3-6 tahun ada selisih jumlah 10,66% dikarenakan jumlah penduduk usia 1-2 tahun belum masuk data pokok kependidikan hanya terlayani di Posyandu dan untuk jumlah masyarakat yang mengikuti kursus yang tidak melampaui target dikarenakan lembaga kursus yang program studi kurang mengena pada dunia usaha dan industry kurang diminati oleh masyarakat usia produktif, untuk . Adapun Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Penyelenggaraan PAUD, Penyelenggaraan Kejar Paket dan Pelaksanaan Ujian Nasional Kejar

- Paket A, B dan C, Fasilitasi dan Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Penyelenggaraan Kompetensi Baca Al Qur'an dan Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Pendidik Keagamaan
- 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilaksanakan guna mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berprestasi Adapun Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SD, Peningkatan Mutu Pendidikan SMP dan Rehabilitasi/ Pembangunan Prasarana Belajar SD dan SMP dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 115,36%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 152%, Angka Kelulusan SD/MI sebesar 95,85% dan Angka Kelulusan SMP/MTs sebesar 97,97%, hal ini menunjukan kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Untuk tahun 2019 Guru yang bersertifikat pendidik sebanyak 1.069 Guru dan telah mencapai target sebesar 97,89% dari target sebanyak 1.092 Guru dan target sebesar 100%. Adapun kegiatan dan peningkatan Guru yang bersertifikat pendidik didukung berbagai kegiatan antara lain Penyelenggaraan uji kompetensi guru sebagai pembinaan dan pemantapan bagi Guru yang akan mengikuti program sertifikasi Guru, Pembinaan KKG SD/MI sebagai wadah bagi Guru Sekolah Dasar untuk sharing dan tukar pikiran pelaksanaan pembelajaran di kelas serta keaktifan Guru pada Aplikasi Dapodik dan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Penyelenggaraan MGMP sebagai wadah bagi Guru Sekolah Menengah Pertama untuk sharing dan tukar pikiran pelaksanaan pembelajaran di kelas serta keaktifan Guru pada Aplikasi Dapodik dan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Untuk jumlah guru yang berprestasi sebanyak 18 Guru dan telah mencapai target sebesar 200% dari target sebanyak 9 Guru dan target sebesar 100%. Adapun kegiatan penunjang untuk Guru berprestasi antara lain kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Berprestasi untuk menghasilkan Guru berprestasi tingkat Kota, Seleksi Olimpiade Guru Nasional untuk Guru Kelas SD dan Guru Mata Pelajaran SMP untuk mengahasilkan Guru beprestasi dalam bidang Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran tingkat Kota, Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar Pendidik PAUD. Dan tercapainya target untuk Guru bersertifikat pendidik dan Guru berprestasi didukung oleh ketersediaan anggaran yang ada pada masing-masing kegiatan untuk Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta koordinasi yang intensif untuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Guru dan Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4. Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar dilaksanakan guna mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berprestasi dengan target kinerja program Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yang ditargetkan 100%, terealisasi sebesar 115,36% atau tercapai sebesar 115,36% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang ditargetkan 85,35%, terealisasi sebesar 129,73% atau tercapai sebesar 152%. Hal ini didukung dengan adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Komitmen Pemeritah Kota Pasuruan dalam memberikan BOSDA untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu sekolah. Sehingga menarik minat masyarakat dalam mensekolahkan anaknya.
- 5. Program Sekolah Berwawasan Lingkungan dilaksanakan untuk mendukung Sekolah Adiwiyata tingkat kota menuju adiwiyata tingkat propinsi dan nasional, jumlah pendidikan dasar berprestasi dalam adiwiyata tingkat Provinsi/Nasional yang ditargetkan 72 lembaga, terealisasi sebesar 93 lembaga atau tercapai sebesar 129,17%. Hal ini disebabkan meningkatnya status sekolah adiwiyata tingkat Kota. Perolehan dan peningkatan status sekolah adiwiyata dari tingkat kota menjadi tingkat propinsi maupun tingkat nasional, hal ini tidak lepas dari Komitmen Pemerintah Kota Pasuruan terhadap lingkungan. Pada tahun 2019

- khusus Pengembangan Adiwiyata Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengganggarkan Rp.1.490.000.000,00
- 6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yang ditargetkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 115,36% atau tercapai sebesar 115,36% sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang ditargetkan 85,35%, terealisasi sebesar 129,73% atau tercapai sebesar 152%. Besarnya alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Rp.800.000 siswa/tahun dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp.1.000.000 siswa/tahun sesuai dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019, hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik dan mengurangi angka putus sekolah sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi murni (APM) baik pada jenjang SD maupun SMP.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pendidikan

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pendidikan				
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini				
	Outcome :				
	Jumlah peserta didik PAUD	anak	10427	9.315	89,34
	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	%	12,77	19,57	153,28
	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C	WB	500	999	199,8
	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kursus	Orang	250	200	80
	Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca al-qur'an dengan nilai minimal 70	siswa/siswi	400	692	173
	Anggaran	Rp.	5.158.728.500	4.669.470.078	90,52
	Program Wajib Belajar Pendidikan				
	Dasar Sembilan Tahun				
	Outcome :				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100	115,36	115,36
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	85,35	129,73	152
	Angka Kelulusan SD/MI	%	97,32	93,28	95,85
	Angka Kelulusan SMP/MTS	%	99,23	97,22	97,97
	Anggaran	Rp.	21.257.175.850,00	12.302.490.059,00	57,87

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
III	Program Peningkatan Mutu Pendidik				
	dan Tenaga Kependidikan				
	Outcome :				
	Jumlah guru bersertifikat pendidik	Guru	1092	1069	98
	Jumlah guru berprestasi	Guru	9	18	200
	Anggaran	Rp	5.720.790.000	5.277.140.000	92,24
IV	Program Penunjang Kegiatan Belajar				
	Mengajar Sekolah Dasar				
	Outcome :				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100	115,36	115,36
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	85,35	129,73	152
	Anggaran	Rp	6.941.072.500	6.491.231.954	93,52
٧	Program Sekolah Berwawasan				
	Lingkungan				
	Outcome :		70	00	400.47
	Jumlah pendidikan dasar berprestasi	Lembaga	72	93	129,17
	dalam adiwiyata tingkat Provinsi/Nasional	Б	4 400 000 000	4 400 000 000	00.55
	Anggaran	Rp	1.490.000.000	1.438.608.800	96,55
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan				
	Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar				
	Outcome:	0/	100	115.06	115.00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI	%	100	115,36	115,36
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs	% D=	85,35	129,73	152
	Anggaran	Rp	19.633.945.000	18.759.820.000	95,55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019 dxiolah

## C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan pendidikan, antara lain:

- Belum dilaksanakannya rekomendasi penilaian mutu sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
- Belum tercapainya target Kompetensi Guru Bersertifikat Pendidik, disebabkan menyesuaikan Jadwal pelaksanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

3) Adanya masyarakat pada keluarga kurang mampu yang berminat untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui program pendidikan luar sekolah (Kejar Paket A, B, C).

## C.2. Solusi

Berdasarkan kendala dan permasalahan diatas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikkan layanan yakni :

- 1) Rekomendasi penilaian mutu perlu dilaksanakan sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menyusun rencana aksi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar mutu pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri;
- Perlu dilakukan percepatan pemenuhan target kompetensi sertifikasi guru melalui koordinasi dengan kementerian terkait kuota dengan konsekuensi penyediaan pembiayaan dari daerah.
- 3) Perlunya penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang berminat mengikuti peningkatan derajat pendidikan melalui program kejar paket A, B, C.

#### D. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima pada urusan pendidikan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penghargaan yang diterima oleh lembaga pendidikan selama tahun 2019

No	Prestasi/ penghargaan	Tahun 2019
LEN	IBAGA	
1.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional UPT SDN Tembokrejo I (Tingkat Nasional)
2.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional UPT SMPN 7 Pasuruan (Tingkat Nasional)
3.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur UPT SDN Wirogunan (Tingkat Provinsi)
4.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur UPT SDN Randusari (Tingkat Provinsi)
5.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur UPT SDN Bugul Lor (Tingkat Provinsi)

No	Prestasi/ penghargaan	Tahun 2019
6.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur UPT
	Propinsi Jawa Timur	SDN Bugul Kidul II (Tingkat Provinsi)
~ .	D: D !!!!   K     0010	

Tabel 3.5
Penghargaan yang diterima oleh Perorangan selama tahun 2019

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penerima Penghargaan / Prestasi	Juara	Tingkat
GUR		D. O. I. W. J.	OMB NEOEDLO	E' P	T' l . (
1.	INOBEL	Drs. Seto Wardono	SMP NEGERI 2	Finalis	Tingkat Nasional
2.	PENULIS BUKU ANTOLOGI "Allah Tidak Salah Mencipta"	Endang Kusumaningtyas, S.Pd.,M.Pd	SMP NEGERI 2	Penghargaan	Tingkat Nasional
3.	MINI TOURNAMENT PETANQUE	Budi Utomo	SMP Negeri 6	III	Tingkat Propinsi
SISV	VA PERORANGAN				
1.	Kejurnas Finswimming Nomor Kolam 2019 ( 4x50 m Estafet Bifin KU E Pa)	Alfiansyah Imam Mustafa	UPT SDN Bakalan	I	Tingkat Nasional
2.	Kejuaraan Nasional Pencak Silat Malang Championship 1 2019	Ghilman Faliq Fauzan	UPT SDN Purutrejo I	II	Tingkat Nasional
3.	Kejuaraan Nasional Karate Jombang Open Piala Gubernur Jawa Timur XV	M. Raihan Fadhilah	SDN Purutrejo II	II KATA Perorangan Pra Pemula Putra	Tingkat Nasional
4.	Kejuaraan Karate UBALAN CHAMPIONSHIP RYU KARATE- DO OPEN TOURNAMENT antar Pelajar se-Jawa Timur	Bagus Putra Bachtiar	SDN Purutrejo II	I KATA Eksebisi Pra Pemula Putra	Tingkat Propinsi
5.	Divisi SD Non Brass Gitapati Kirab Drum Band "Pemuda Cup XIX/2019" Propinsi Jawa Timur	Nadhifa Maulida Safira	UPT SDN Purworejo 1	I	Tingkat Propinsi
6.	Penghargaan Kejuaraan Pelajar Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Timur	Muhammad Fahri Naafi Firdaus	SDN Wirogunan	Juara I	Tingkat Propinsi
7.	Penghargaan Kejuaraan Karate UBALAN CHAMPIONSHIP KHUSIN RYU KARATE-DO OPEN TOURNAMENT antar Pelajar Se Jawa Timur	Achat Zaky Fisabilillah	SDN Wirogunan	Juara I	Tingkat Propinsi
8.	Kejuaraan Nasional Karate	Riko Akbar Putra Veldi	SDN Randusari	II	Tingkat Nasional
9.	Lomba Tari Kreasi	Fatimatuz Zahra	SDN Karanganyar	Juara Kategori Tim Berbakat	Tingkat Propinsi
10.	Lomba Tari Kreasi	Karunia Lailatul Izza	SDN Karanganyar	Juara Kategori Tim Berbakat	Tingkat Propinsi
11.	Lomba Tari Kreasi	Alicia Diana Putri	SDN Karanganyar	Juara Kategori Tim Berbakat	Tingkat Propinsi
12.	Lomba Tari Kreasi	Nayla Salsabila	SDN Karanganyar	Juara Kategori Tim Berbakat	Tingkat Propinsi

13. Lomba Tari Kreasi Cintya Salsabila SDN Juara Kategori Karanganyar Tim Berbakat  14. Kejurprov Catur Jatim Nafisah Hanum SDN Kebonsari Juara I Kelas E Putri  15. Lomba Bercerita Bagi Siswa/Siswi M. Rizal Bakhri SDN Kebonsari Harapan 1  16. Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1 Alfarisi  17. Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1  18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani Tournament Pencak Silat of Kota Pahlawan Championship 1 2019	Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi
<ul> <li>14. Kejurprov Catur Jatim Nafisah Hanum SDN Kebonsari Juara I Kelas E Putri</li> <li>15. Lomba Bercerita Bagi Siswa/Siswi SD/MI</li> <li>16. Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1 Alfarisi</li> <li>17. Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1</li> <li>18. Penghargaan National Open Tournament Pencak Silat of Kota</li> </ul> <ul> <li>Nafisah Hanum SDN Kebonsari SDN Kebonsari Harapan 1</li> <li>SDN Bangilan Juara 1</li> <li>SDN Bangilan Juara 1</li> <li>UPT SDN 1</li> <li>Ngemplakrejo</li> </ul>	Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi Tingkat
Putri 15. Lomba Bercerita Bagi Siswa/Siswi M. Rizal Bakhri SDN Kebonsari Harapan 1  SD/MI 16. Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1 Alfarisi 17. Kejuaraan nasional pencak silat Erfin Tri Yugo SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1  18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1 Tournament Pencak Silat of Kota	Propinsi Tingkat Propinsi Tingkat
<ul> <li>Lomba Bercerita Bagi Siswa/Siswi SD/MI</li> <li>Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1</li> <li>Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1</li> <li>Kejuaraan nasional pencak silat Erfin Tri Yugo SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1</li> <li>Penghargaan National Open Tournament Pencak Silat of Kota</li> </ul>	Tingkat Propinsi Tingkat
SD/MI  16. Kejuaraan nasional pencak silat Ahmad Salman SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1 Alfarisi  17. Kejuaraan nasional pencak silat Erfin Tri Yugo SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1  18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1 Tournament Pencak Silat of Kota Ngemplakrejo	Propinsi Tingkat
<ul> <li>16. Kejuaraan nasional pencak silat malang championship 1 Alfarisi</li> <li>17. Kejuaraan nasional pencak silat Erfin Tri Yugo SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1</li> <li>18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1 Tournament Pencak Silat of Kota</li> </ul>	Tingkat
malang championship 1 Alfarisi 17. Kejuaraan nasional pencak silat Erfin Tri Yugo SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1 18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1 Tournament Pencak Silat of Kota Ngemplakrejo	
<ul> <li>17. Kejuaraan nasional pencak silat Erfin Tri Yugo SDN Bangilan Juara 1 malang championship 1</li> <li>18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1 Tournament Pencak Silat of Kota Ngemplakrejo</li> </ul>	
malang championship 1  18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1  Tournament Pencak Silat of Kota Ngemplakrejo	Tingkat
18. Penghargaan National Open Syahrul Ramdani UPT SDN 1 Tournament Pencak Silat of Kota Ngemplakrejo	Propinsi
Tournament Pencak Silat of Kota Ngemplakrejo	Tingkat
	Nasional
r aniawan Onampionanip i 2013	
19. Penghargaan National Open Mukhammad Alif SDN 2	Tingkat
Tournament Pencak Silat of Kota Filla Ngemplakrejo	Nasional
Pahlawan Championship 1 2019	
20. Top Model Keysia Aulia SDN Pekuncen I	Tingkat
Sibrina	Propinsi
21. Olimpiade Sains Ika Zuliana T SDN Pekuncen I	Tingkat
22. Olimpiade Matematika Ika Zuliana T SDN Pekuncen III	Propinsi
22. Olimpiade Matematika Ika Zuliana T SDN Pekuncen III	Tingkat Propinsi
23. Mewarnai Ashilatuz Zahra SDN Pekuncen III	Tingkat
20. Wowallar Foliate Zaria Con Garage	Propinsi
24. Olimpiade Matematika Lalu Zavier R.A SDN Pekuncen I Grand Final	Tingkat
	Nasional
25. Olimpiade B. Inggris Lalu Shaquille R.A SDN Pekuncen I Grand Final	Tingkat
	Nasional
26. Matematika Almira Aiko Kirana SDN Pekuncen I	Tingkat
07 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Propinsi
27. Renang 50m gaya kupu-kupu Laras Ayu Aprilian SDN Pekuncen II	Tingkat
28. Renang 50m gaya bebas M. Baihagi Al Farizi SDN Pekuncen II	Propinsi
28. Renang 50m gaya bebas M. Baihaqi Al Farizi SDN Pekuncen II	Tingkat Propinsi
29. Renang 100m gaya dada Dimas Adji F. SDN Pekuncen III	Tingkat
23. Renaing from gaya dada — Billias Auji i . — GDN i Gidilicon — III	Propinsi
30. Ajang Prestasi Anak Negri III se FADIL SDN Petamanan I	Tingkat
JAWA - BALI (semifinal) FAJARSYAH	Nasional
OLIMPIADE MATEMATIKA ATMAJA	
31. Ajang Prestasi Anak Negri III se HILWA NUR SDN Petamanan I	Tingkat
JAWA - BALI (semifinal) ARIFAH ILMIAH	Nasional
OLIMPIADE SAINS	
32. Ajang Prestasi Anak Negri III se ARINI EKA SDN Petamanan II	Tingkat
JAWA - BALI (semifinal) RAHMAWATI	Nasional
OLIMPIADE SAINS	Timelant
33. Ajang Prestasi Anak Negri III se TALITA ZAFIRAH SDN Petamanan III	Tingkat Nasional
JAWA - BALI (semifinal) FITRI OLIMPIADE MEWARNAI	Nasionai
34. Kejuaraan Daerah Senam Artistik Inayah Nisa Kanita SDN III	Tingkat
Alat Lantai Tingkat Jawa Timur Mandaranrejo 1	Propinsi
35. Kejuaraan Daerah Senam Aerobic Nabila Hafnaulia SDN III	Tingkat
Gymnastic Tingkat Jawa Timur Putri Mandaranrejo 1	Propinsi

			Asal Sekolah		
		Nama Penerima	Penerima		
NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Penghargaan /	Penghargaan /	Juara	Tingkat
		Prestasi	Prestasi		
36.	PORPROV Jawa Timur VI Senam	Mazzaluna Tirtania	SDN	III	Tingkat
	Ritmik Alat Gada Tahun 2019		Mandaranrejo 1		Propinsi
37.	PORPROV Jawa Timur VI Senam	Inayah Nisa Kanita	SDN	III	Tingkat
20	Artistik Alat Lantai Tahun 2019	Intan Nuraini	Mandaranrejo 1	luara 1 Katagari	Propinsi
38.	Kejurnas Pencak Silat Yogyakarta Championship 5 Tahun 2019	intan Nuraini	SDN Mandaranrejo II	Juara 1 Kategori Tanding	Tingkat Nasional
39.	Kejurnas Pencak Silat Yogyakarta	Magfirotul Ilahi	SDN	Juara II Kategori	Tingkat
55.	Championship 5 Tahun 2019	Wardah	Mandaranrejo II	Tanding	Nasional
40.	National Open Tournament	MOCH IQBAL	SDN	Juara 1 Tanding	Tingkat
	Pencak Silat of Kota Pahlawan		Mandaranrejo II	Putra Tingkat SD/ Usia Dini	Nasional
41.	National Open Tournament	HASAN SOLEH	SDN	Juara 1 Tanding	Tingkat
• • • •	Pencak Silat of Kota Pahlawan	11/10/11/ 002211	Mandaranrejo II	Putra Tingkat SD/ Usia Dini	Nasional
42.	National Open Tournament	M ALBAR	SDN	Juara 1 Tanding	Tingkat
	Pencak Silat of Kota Pahlawan	SYA"BANA P	Mandaranrejo II	Putra Tingkat SD/ Pra Usia Dini	Nasional
43.	National Open Tournament	NABILAH	SDN	Juara II Tanding	Tingkat
	Pencak Silat of Kota Pahlawan		Mandaranrejo II	Putri Tingkat SD/ Usia Dini	Nasional
44.	National Open Tournament	NAURAH	SDN	Juara III Tanding	Tingkat
	Pencak Silat of Kota Pahlawan	SYAFIRAH A	Mandaranrejo II	Putri Tingkat SD/ Usia Dini	Nasional
45.	PMR	Neisya Azka Putri	UPT SMP Negeri	1	Tingkat
40	DMD	Prayoga	1 Pasuruan	0	Propinsi
46.	PMR	Ananta Eka Novita Sari	UPT SMP Negeri 1 Pasuruan	2	Tingkat Propinsi
47.	PMR	Ratu Aulia Nisa	UPT SMP Negeri	3	Tingkat
77.	THIC	Nata Nalia Nisa	1 Pasuruan	v	Propinsi
48.	Kumite Perorangan -76 Kg Junior	Yunan Pramuditya	SMPN 2	Juara III	Tingkat
	Putra, Kejurda INKANAS ke-IV se- Jatim Piala Kapolda 2019	·	PASURUAN		Propinsi
49.	Kejurnas Pencak Silat Yogyakarta	Satrio Hadi	SMPN 2	Juara 1	Tingkat
	Championship Kategori TANDING	Pamungkas	Pasuruan		Nasional
50.	Kejuaraan Nasional Pencak silat	SYARIFATUZ	SMPN 5	3	Tingkat
	Malang Championship 1 Tahun 2019 yang diselenggarakan Tanggal 22-23 Juni 2019 di GOR	ZAHRA'	Pasuruan		Nasional
F.4	Ken Arok Malang-Jawa Timur	ANINIADELLA	OMPN	•	Time Last
51.	Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional XX/2020 Cabang	ANNABELLA PUTRI YOHANA	SMPN 5 Pasuruan	3	Tingkat Nasional
	Olahraga Biliar Disiplin Pool Putri	PUTRITORANA	Fasuluali		Masional
	21-30 Agustus 2019 di Puslatnas POBSI-Jakarta				
52.	Piala Danyonif Para Raider 502 /	SYAHRUL FAJAR	SMPN 5	2	Tingkat
	UY Kostrad yang disenggarakan di	RAMADHANI	Pasuruan	_	Propinsi
	gedung Serba Guna Soegondo				•
	Yonif Para Raider 502 / Kostrad				
	Jabung Kabupaten Malang pada				
	tanggal 19-20 Januari 2019				

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penerima Penghargaan / Prestasi	Juara	Tingkat
53.	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VI Tahun 2019 Cabang Olahraga Wushu 6-13 Juli 2019 di Kab Gersik, Lamongan,	ROBIATUL ADAWIYAH	SMPN 5 Pasuruan	2	Tingkat Propinsi
	Bojonegoro, Tuban				
54.	PORPROV JAWA TIMUR VI	Muhammad	SMPN 6	III	Tingkat
		Nafiudin	Pasuruan		Propinsi
55.	PORPROV JAWA TIMUR VI	Hanum Najwa	SMPN 6	II	Tingkat
			Pasuruan		Propinsi
56.	KEJUARAAN KARATE UBALA	HANUM FITRA	SMPN 8	JUARA I	Tingkat
	CHAMPION KKI antar Pelajar Se-		Pasuruan	KUMITE - 45	Propinsi
57.	Jatim	MAULIDIANA	SMPN 8	JUARA 2	Tingkat
			Pasuruan	KUMITE - 45	Propinsi
58.		FILSA N FIKA	SMPN 8	JUARA II	Tingkat
			Pasuruan	KUMITE + 45	Propinsi
59.	LOMBA BIOGRAFI BUNG KARNO	MAHMUDAH	SMPN 8	JUARA	Tingkat
	DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA		Pasuruan	HARAPAN 3	Propinsi
60.	KEJUARAAN KARATE JOMBANG	SATRIO DEWA	SMPN 8	JUARA II	Tingkat
	OPEN		Pasuruan	KUMITE - 41 Kg	Propinsi

Tabel 3.6 Penghargaan yang diterima oleh dalam Bidang Kebudayaan selama tahun 2019

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Tahun 2019	Tingkat
1	Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Kota Pasuruan	Juara Harapan II Lomba	Tingkat
	Dalam Rangka Pekan Cipta Seni Provinsi Jawa Timur		Propinsi
	Tahun 2019 Lomba Seni Tari Kategori Usia 16-18 Tahun		
2	Piagam Penghargaan Anugrah Duta Seni Budaya Jawa	Kategori Abyakta Budaya	Tingkat
	Timur Tahun 2019 Diberikan Kepada Pemerintah Kota	(Keberhasilan Dalam	Propinsi
	Pasuruan	Meregenerasi Seniman)	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Tabel 3.7
Penghargaan yang diterima oleh Perorangan bidang kebudayaan selama tahun 2019

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penerima Penghargaan / Prestasi	Juara	Tingkat
1	Dalam Rangka Pekan Cipta Seni Provinsi Jawa Timur	Parrisca Indra		3 Penata Musik Terbaik	Tingkat Propinsi
		Perdana, S.Pd.,			Propinsi
	Lomba Seni Musik Tradisi Kategori Usia 16-18 Tahun	M.Pd.		Non Rangking	
2	Dalam Rangka Pekan Cipta	Rizki Dewi		Penari Putri	Tingkat
	Seni Provinsi Jawa Timur	Khasanah		Terbaik	Propinsi
	Lomba Seni Tari Kategori Usia				•
	16-18 Tahun				

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penerima Penghargaan / Prestasi	Juara	Tingkat
3	Dalam Rangka Audisi Penari	Maudy Berliannita		Kategori 15	Tingkat
	Jawa Timur			Penari Terbaik	Propinsi
4	Dalam Rangka Audisi Penari	Ratih Anggraeni		Kategori 25	Tingkat
	Jawa Timur			Penari	Propinsi
				Unggulan	•

#### 1.2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan manajemen pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah, urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Soedharsono, melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan manajemen pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah, urusan Kesehatan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi 11 yaitu dengan Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan Mayarakat.

Dinas Kesehatan Kota Pasuruan didukung 9 UPT yaitu 8 UPT puskesmas dengan 29 puskesmas pembantu dan 1 Unit Perbekalan Kefarmasian sebagai pusat pelayanan masyarakat. Dan ditunjang UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) diantaranya 297 Posyandu Balita, 158 posyandu Lansia, 21 UKK, dan 16 Poskestren.

Untuk melihat Kinerja pelayanan di bidang kesehatan maka ditetapkan beberapa indikator Urusan wajib pelayanan dasar pada Urusan Kesehatan yaitu Rasio Posyandu per satuan balita, Rasio Puskesmas,poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk, Rasio Rumah sakit per satuan penduduk, Rasio Dokter umum per satuan penduduk, dan Rasio Ahli Kesehatan per satuan penduduk. Hasil evaluasi indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Tahun 2019 antara lain:

- Rasio Posyandu per satuan balita pada tahun 2019 memiliki target 1,82 per 100 balita dan realisasi sebesar 1,81 per 100 balita. Dengan total posyandu sebanyak 297 pos dengan jumlah balita tahun 2019 sebanyak 16.417 balita, maka rasio posyandu ini memiliki prosentase capaian yaitu 99.45%. Hal tersebut didukung dengan terbentuknya 6 posyandu balita baru pada tahun 2019.
- 2. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk pada tahun 2019 memiliki target 28,33 dan realisasi sebesar 26,4 per 100.000 penduduk. Tahun 2019 terdapat 8 puskesmas dengan 29 pustu (puskesmas pembantu) dan jumlah poliklinik (termasuk klinik bersalin) yaitu sejumlah 16 klinik. Dibandingkan dengan targetnya, prosentase capaian rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin ini mendekati target yaitu 93,19%. Layanan Kesehatan pada Puskesmas dan klinik didukung dengan adanya akreditasi fasilitas kesehatan, dimana pada tahun 2019 ada 1 klinik yang terakreditasi dan juga 8 Puskesmas di Kota Pasuruan semua telah terakreditasi.
- 3. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2019 memiliki target 0,495 per 100.000 penduduk, dan realisasinya yaitu sebesar 0,99 per 100.000 penduduk. Perlu diketahui bahwa sampai tahun 2017 Kota pasuruan hanya memiliki 1 Rumah Sakit saja yaitu RSUD Soedarsono, sedangkan mulai tahun 2018 sudah ada 2 Rumah sakit, yaitu 1 RSUD Soedarsono dan 1 RS swasta yaitu RS Graha Sehat medika. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit didukung juga dengan adanya akreditasi Rumah Sakit dimana Rumah sakit Graha Sehat Medika juga sudah terakreditasi pada tahun 2019, dengan kata lain semua RS di Kota Pasuruan telah terakreditasi sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Pasuruan dengan lebih baik.
- 4. Rasio Dokter umum per satuan penduduk pada tahun 2019 memiliki target 29,92 per 100.000 penduduk dan realisasinya sebesar 45,4 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019 ada 91 Dokter Umum yang memberikan pelayanan kesehatan. Capaian sudah diatas 100% yaitu sebesar 151,74% .Hal ini didukung

- dengan adanya penambahan formasi dokter umum pada penerimaan CPNS tahun 2019.
- 5. Rasio Ahli kesehatan di Kota Pasuruan kami definisikan sebagai Jumlah Dokter Spesialis di Kota Pasuruan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Realisasi Rasio Ahli kesehatan masyarakat tahun 2019 adalah 17,96 per 100.000 penduduk sedangkan target tahun 2019 adalah 7,97 per 100.000 penduduk. Prosentase capaian dari indikator ini sudah melebihi target yaitu 225,35%. Jumlah Ahli Kesehatan dalam hal ini adalah dokter spesialis tahun 2019 ada 36 orang.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan wajib pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Soedarsono, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ini, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 5 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.101.007.638.372,37. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.83.077.360.501,00 atau tingkat serapannya mencapai 82,25%.

Pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat diukur dengan indikator cakupan pelayanan ambulan gratis dan persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi klasifikasi kelas C. Pada tahun 2019, indikator cakupan pelayanan ambulan gratis ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 26,65% atau tercapai berdasarkan target sebesar 26,65%. Ketidak tercapaiannya indikator cakupan pelayanan ambulan gratis disebabkan karena lebih dari 80% masyarakat Kota Pasuruan telah terdaftar BPJS maupun SKTM sesuai dengan program *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Pasuruan, sedangkan layanan ini hanya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS maupun SKTM, sehingga cakupan pelayanan ambulan menjadi lebih sedikit dibandingkan yang ditargetkan. Meskipun belum mencapai target namun capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 6,79%, hal tersebut menunjukkan adanya

upaya rumah sakit dalam mensukseskan program Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kota Pasuruan.

Indikator kedua dari program upaya kesehatan masyarakat yaitu persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi klasifikasi kelas C yang ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100,00% atau tercapai berdasarkan target sebesar 100,00%. Ketercapaian tersebut didukung oleh terealisasinya pembangunan gedung OK central seluas 1.425 m² dengan menggunakan sumber pembiayaan dari DAK menjadi APBD untuk bangunan konstruksi dan jasa konsultasi pengawasan gedung OK central tahap III, pengalihan sumber dana dilaksanakan karena terjadi keterlambatan lelang dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan input kontrak di Omspan sebelum tanggal 22 juli 2019 jika menggunakan sumber pendanaan DAK. Tercapaianya target capaian juga didukung dengan terealisasinya pembelian 2 set peralatan penunjang Bedah Central (OK Central) diantaranya instalasi AC central, Hepa Central dan MOT (Modular Operating Theatre). Kegiatan lain yang juga turut mendukung program upaya kesehatan masyarakat yaitu kegiatan penyediaan alat kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi dengan target output pengadaan peralatan kesehatan sejumlah 20 unit dan tercapai sebesar 100%.

Pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial diukur dengan indikator ketersediaan peralatan kedokteran rumah sakit kelas C dengan target 100% dan terealisasi sebesar 81,54%. Tidak tercapaiannya indikator tersebut disebabkan karena tidak terlaksananya pembangunan rehabilitasi ruang ICU, berdampak pada tidak terserapnya pengadaan alat penunjang untuk ruang ICU sejumlah 10 unit.

Pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD diukur dengan 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

1. Cost Recovery Rate (CRR) yang ditargetkan 93,87% terealisasi sebesar 108,97% atau tercapai berdasarkan target sebesar 116,09%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan selama satu tahun. Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan pelaksanaan akreditasi rumah sakit, pemberdayaan

- komite rumah sakit, pembinaan kerohanian bagi aparatur dan pasien, penggantian biaya pelayanan pihak ketiga, pelayanan pemulasaran jenazah, serta penyediaan makan minum pasien.
- 2. Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, dan NDR). Pada tahun 2019, persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, dan NDR) ditargetkan 83,33% dan terealisasi 83,33% atau tercapai berdasarkan target sebesar 100%. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan alat-alat kesehatan/ kedokteran/ instrument/ inventaris, penyediaan perlengkapan perawatan pasien, pelaksanaan proteksi dini bagi tenaga kerja rumah sakit yang beresiko tinggi, serta pemantauan kualitas lingkungan rumah sakit. Berdasarkan hasil analisis dari 6 indikator pelayanan rumah sakit hanya terdapat 1 indikator yang belum sesuai standart yaitu indikator Bed Turn Over (BTO). BTO (Bed Turn Over) merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali, namun pada tahun 2019 satu tempat tidur rata-rata dipakai 74 kali. Meskipun pemakaian tempat tidur yang melebihi kapasitas dapat menyebabkan adanya kerusakan tempat tidur, namun capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 66,67% capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien.
- 3. Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan keperawatan ditargetkan 84,75% dan terealisasi 92,31% atau tercapai berdasarkan target sebesar 108,92%, dari 26 indikator 24 indikator yang tercapai tahun 2019. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan pembinaan dan kredensial perawat dan bidan, serta penyelenggaraan supervisi pelayanan rawat inap. Capaian

indikator mutu keperawatan menjadi tolak ukur indikator mutu pelayanan di rumah sakit, sehingga peningkatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa RSUD dr. R. Soedarsono terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien dan masyarakat. Meskipun mengalami peningkatan, indikator yang belum mencapai target juga menjadi perhatian RSUD dr. R. Soedarsono guna mempertahankan capaian dan meningkatkan mutu layanan rumah sakit kepada masyarakat. Indikator mutu pelayanan keperawatan yang belum tercapai yaitu masih adanya kejadian pasien jatuh dan kepuasan pasien terhadap pelayanan perawat yaitu 77,7% kurang dari angka harapan sebesar 90,4%. Pasien merasakan kenyamanan dan keamanan selama berada di Rumah Sakit dikarenakan tenaga medis yang dirasakan cukup kompeten dibidangnya sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman selama berkunjung dan berobat di Rumah Sakit. Namun, keramahan petugas Rumah Sakit menjadi catatan bagi pengunjung karena dirasa belum memberikan pelayanan yang ramah (senyum, salam, sapa).

- 4. Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan/pelatihan minimal 20 jam yang ditargetkan 23,09% dan terealisasi sebesar 11,87% atau tercapai berdasarkan target sebesar 51,41%, tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan efisiensi anggaran yang dilakukan rumah sakit karena penundaan pembayaran klaim dari BPJS, sehingga rumah sakit memprioritaskan anggaran untuk pembiayaan operasional rutin yang lebih fokus pada pelayanan kepada pasien. Guna tetap meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di rumah sakit, diselenggarakan pelatihan/ pendidikan/ sejenisnya secara internal, sehingga waktu lamanya pelatihan tidak bisa menyesuaikan dengan capaian target karena kurang dari 20 jam.
- Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%, sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 149 pengaduan dari masyarakat dan keseluruhan telah ditindak lanjuti oleh pihak

- RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh kegiataan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
- 6. Nilai SAKIP RSUD tahun 2019 ditargetkan BB dan tercapai BB. Tercapainya indikator nilai SAKIP RSUD didukung oleh kegiatan pelaksanaan audit sektor publik, penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit, penyusunan dokumen pelaporan rumah sakit, serta pembinaan/ pendampingan kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas.
- 7. Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran dari target 91,14% terealisasi 89,28% atau tercapai sebesar 97,26%, hal tersebut disebabkan RSUD dr. R. Soedarsono pada tahun 2019 melakukan pengurangan belanja. Indikator presentase kebutuhan administrasi perkantoran didukung oleh beberapa keqiatan diantaranya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas, penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan dan pemasangan jaringan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, penyedian makanan dan minuman, penyediaan mebelair, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), penilaian angka kredit tenaga fungsional, penyediaan jasa pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan gaji tenaga BLUD, serta pengadaan pakaian dinas.
- 8. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak dari target 93,85% terealisasi 97,61% atau tercapai sebesar 104,01%. Indikator ini didukung oleh kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala ruang pelayanan dan pendukungnya, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, ambulans dan jenset, pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan ruang pelayanan dan kantor, serta pemeliharaan rutin/berkala mebelair rumah sakit. Hal tersebut

menunjukkan adanya upaya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi layak melebihi dari target yang ditentukan.

Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD terdapat 1 (satu) kegiatan utama yaitu pelayanan kesehatan BLUD dengan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 87,16%. Penyerapan yang tidak maksimal tersebut disebabkan karena adanya belanja operasional rumah sakit yang menyesuaikan dengan jumlah pendapatan yang diterima, mengingat pada tahun 2019 terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS sehingga menyebabkan penurunan pada pendapatan rumah sakit. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1,82	1,81	99,45
2	Rasio Puskesmas,poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	28,33	26,4	93,19
3	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,495	0,99	200
4	Rasio Dokter umum per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	29,92	45,4	151,74
5	Rasio Ahli Kesehatan per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	7,97	17,96	225,35

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2019, pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ini, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 5 program dan 84 kegiatan (program selain yang ada di sekretariat terdiri dari 4 Program pada 4 Bidang, dan 1 Program BLUD/AKPER), dengan anggaran belanja diluar program rutin senilai Rp.57.576.244.757,00. Sampai dengan Desember tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.49.695.429.891,00 atau tingkat serapannya mencapai 86,31%.

Capaian kinerja indikator urusan kesehatan baik program dan kegiatan yang mendukung, berikut akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2019 yaitu:

- 1. Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan masyarakat diukur dengan indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI/AKB ini merupakan indikator yang bernilai negatif, jadi semakin berada dibawah target, maka kinerja program semakin bagus. Target yang ditentukan adalah target maksimal baik untuk Kematian Ibu maupun Kematian Bayi.
  - Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2019 memiliki target 2,4 per 1000 a. LH sedangkan realisasi AKI adalah 0,88 per 1000 LH dengan jumlah kasus 3 kasus kematian ibu. Dilihat dari realisasi AKI, maka prosentase capaian indikator tersebut sebesar 163,33%. Keberhasilan program didukung oleh kegiatan yang secara intensif dilaksanakan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Kegiatan yang dimaksud adalah bintek kelas ibu hamil, audit maternal perinatal, pemeriksaan ibu hamil berkala, kunjungan rumah bagi ibu hamil resiko tinggi, rujukan bagi ibu hamil resiko tinggi, pemberian PMT bagi ibu hamil (terutama ibu hamil KEK), kegiatan promotif/penyuluhan, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 memiliki target 7 per 1000 LH sedangka realisasinya adalah 8,24 per 1000 LH dengan kasus 28 kematian bayi. Dilihat dari realisasi AKB, maka prosentase capaian indikator tersebut adalah 82,86%. Meskipun demikian AKB di Kota Pasuruan masih dibawah target Provinsi Jawa Timur.
- Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit diukur dengan indikator presentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan serta indikator presentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan. Pada tahun 2019, prosentase capaian kedua indikator ini 100%.

- Indikator presentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan a. dikendalikan memiliki target 100% dan realisasinya juga 100%. Hal tersebut didukung dengan kerjasama lintas program maupun lintas sektor misalnya untuk penjaringan terduga TB yang melakukan pemeriksaan dahak di fasilitas kesehatan tingkat pertama, faskes rujukan Rumah sakit pemerintah maupun swasta telah terintegrasi dengan layanan TB DOTS Kementrian Kesehatan RI. Untuk penanggulangan HIV kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan LAPAS berjalan baik, dan juga untuk lintas program dengan adanya Program sinergi TB-HIV/AIDS. Penanganan Kasus DBD juga telah dicegah dan dikendalikan dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan maksimalnya Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dalam pemeriksaan jentik Berkala di rumah-rumah. Penanganan kasus wabah dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif sebelum 24 jam kasus dilaporkan/ditemukan. Sedangkan pelayanan kesehatan CJH juga telah terintegrasi dengan lintas sektor yang prima antara Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kementrian Agama dan KBIH di Kota Pasuruan. Adanya Kegiatan Penunjang pada kegiatan vaksinasi seperti RCA, BIAS, Sweeping, Pematauan Rantai vaksin / EVM dan kegiatan pemantauan KIPI serius dan Non-Serius. Kegiatan dari lintas sektoral juga tergambar dalam kinerja KOMDA KIPI yang telah terbentuk dan berjalan baik di Kota Pasuruan
- b. Indikator Presentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan memiliki target 100% dan realisasinya juga 100%. Keberhasilan indikator ini didukung dengan dibentuknya kerjasama lintas sektor dalam penanganan ODGJ dalam Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM). Pemantauan Faktor Risiko PTM sejak dini melalui kegiatan Posbindu PTM, Pelaksanaan Tes IVA dan SADANIS yang rutin dan gratis. Disamping itu juga telah dilaksanakan kegiatan UKGM dan UKGS

yang telah terintegrasi dalam kegiatan UKS secara lintras sektor dan lintas program.

- 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial diukur dengan indikator presentase sarana dan prasarana puskesmas yang laik. Dari realisasi tahun 2019 tercapai 97,77% yang berarti sudah mencapai target yang ditentukan. Dari sarana dan prasarana yang laik yaitu 1.186 sarana dibandingkan 1.213 sarana yang tersedia. Keberhasilan program didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai yaitu adanya dana DBHCHT yang membiayai dua kegiatan di Dinas Kesehatan yaitu Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
- 4. Pada Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dalam hal ini adalah Akper diukur dengan indikator presentase peningkatan kualitas mahasiswa. Indikator ini memiliki target 90%, dan realisasi nya sebesar 30% sehingga prosentase capaiannya adalah 33,33%. Hal ini dikarenakan pengalihan status AKPER yang semula sebagai UPT Dinas Kesehatan beralih ke UNIVERSITAS NEGERI JEMBER terhitung mulai tanggal 4 mei 2019 sesuai dengan berita acara serah terima dari AKPER ke UNEJ sehingga capaian indikator kinerja dihitung sampai bulan April tahun 2019.
- 5. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar dan khusus tahun 2019 diukur dengan indikator yaitu presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Realisasi di tahun 2019 yaitu sebesar 42,3% yang berarti sudah mencapai target yang sudah ditentukan. Data pada tahun 2019 ada 11 faskes yang terakreditasi dan jumlah faskes yaitu 26 faskes yang dalam hal ini adalah Puskesmas, Rumah sakit, klinik umum, klinik kecantikan dan klinik bersalin. Keadaan ini didukung oleh ketersediaan dana, kerjasama tim teknis secara horizontal maupun vertikal yang optimal untuk mengembangkan tata kelola administrasi terutama terkait dengan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9**Capaian Target Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No.	apaian Target Indikator Kinerja Pi Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program upaya Kesehatan Masyarakat		<b>y</b>		
	Outcome :				
	Angka kematian Ibu (AKI)	per 1000 LH	2.4	0.88	163.33
	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 LH	7	8.24	82.86
	Anggaran:	Rp	10,400,941,200	9,084,022,202	87.34
II	Program pencegahan & penanggulangan				
	penyakit				
	Outcome :	%			
	Persentase penyakit menular potensial yang	%	100	100	100
	dapat dicegah dan dikendalikan	70	100	100	100
	Persentase penyakit tidak menular yang	%	100	100	100
	dapat dicegah dan dikendalikan				
	Anggaran :	Rp	3,012,402,200	2,461,204,908	81.70
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				
	Persentase sarana dan prasarana	%	90	97.77	108.63
	puskesmas yang laik				
	Anggaran	Rp.ribu	2,887,680,000	2,756,774,780	95.47
IV	Program peningkatan mutu pelayanan				
	kesehatan BLUD	0/	00	20	22.22
	Persentase peningkatan kualitas mahasiswa	% Do ribu	90 2,254,422,200	30 618,496,100	33.33
٧	Anggaran	Rp.ribu	2,254,422,200	018,490,100	27.43
V	Program pelayanan Kesehatan dasar dan khusus				
	Outcome :	%			
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	25	42.3	169.2
	Anggaran :	Rp	39,020,799,157	35,393,428,001	90.70
	/ Inggaran .	ıγ	00,020,700,107	00,000,420,001	30.70
	RSUD				
ı	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Outcome:				
	a. Cakupan pelayanan ambulan gratis	Persen	100	26,65	26,65
	b. Persentase ketersediaan sarana dan	Persen	100	100,00	100,00
	prasarana yang memenuhi klasifikasi				
	kelas C				
	Anggaran	Rp.Ribu	12.999.803	7.387.699	56,83
II	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				
	Outcome: Persentase ketersediaan peralatan	Persen	100	81,54	81,54
	kedokteran rumah sakit kelas C				
	Anggaran	Rp.Ribu	9.401.278	7.179.890	76,37
III	Program Peningkatan Mutu Pelayanan				
	Kesehatan BLUD 89,68				
	Outcome:	_			
	a. CRR (Cost Recovery Rate)	Persen	93,87	108,97	116,09
	b. Persentase indikator pelayanan rumah	Persen	83,33	83,33	100,00
	sakit yang tercapai sesuai standar (BOR,				
	BTO, Av Los, TOI, GDR, dan NDR)				

No. Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
c. Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan keperawatan	Persen	84,75	92,31	108,92
<ul> <li>d. Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan/ pelatihan minimal 20 jam</li> </ul>	Persen	23,09	11,87	51,41
e. Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00
f. Nilai SAKIP RSUD	Nilai	BB	BB	100,00
g. Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran	Persen	91,14	89,28	97,26
h. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak	Persen	93,85	97,61	104,01
Anggaran	Rp.Ribu	78.606.558	68.509.772	87,16

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Soedarsono, 2019

## C. Permasalahan dan Solusi Urusan

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan kesehatan, antara lain:

- Penatalaksanaan rujukan ibu bersalin dan bayi baru lahir tidak sesuai standar rujukan (misalnya ketidakpatuhan ibu hamil dan keluarganya terhadap saran/rujukan yang direkomendasikan).
- 2. Masih belum terpenuhinya 3 indikator PHBS yaitu Masyarakat yang tidak merokok, Cakupan ASI Ekslusif dan juga Akses terhadap jamban sehat
- 3. Masih rendahnya cakupan penjaringan terduga TB dan cakupan terduga TB yang melakukan pemeriksaan dahak, masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan layanan TB DOTS, belum optimalnya rujukan horizontal terkait penanganan penderita TB, serta masih rendahnya angka capaian penemuan pneumonia
- 4. Masih belum maksimalnya penjaringan populasi kunci WPS dan LSL

- 5. Masih rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan terutama PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dan lingkungan sekitar penderita DBD masih tidak kooperatif saat pelaksanaan fogging.
- 6. Masih ada nya orang tua yang menolak untuk imunisasi dan masih belum semua bayi yang diimunisasi tercatat dan terlaporakn di kohort bayi dan baduta
- 7. Masih adanya masyarakat yang menolak untuk pengambilan sampel kasus penyakit, dan masih kurangnya partisipasi CJH dalam melaksanakan pembinaan kesehatan (pengukuran kebugaran, dll)
- 8. Kurangnya peran lintas sektor untuk penanganan ODGJ, masih tingginya angka prevalensi Hipertensi dan DM karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk kontol rutin dan memeriksakan kesehatannya.
- 9. Tertundanya pembayaran klaim dari BPJS menghambat pembiayaan operasional rumah sakit termasuk jasa medis.
- 10. Belum optimalnya pelayanan prima.

#### C.2. Solusi:

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini solusi yang diupayakan untuk perbaikan layanan kesehatan , yakni:

- Mengadakan lokakarya Analisi Maternal Perinatal (AMP) dengan materi pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penatalaksanaan rujukan maternal neonatal.
- 2. Peningkatan cakupan ASI Ekslusif, akses jamban sehat dan masyarakat yang tidak merokok.
- Intensifikasi penjaringan TB baik secara pasif intensif maupun aktif masif, memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemeriksaan dahak , advokasi kepada fasilitas kesehatan swasta terkait TB DOTS, kerjasama lintas program untuk optimalisasi rujukan horizontal TB
- 4. Melakukan Bimtek ISPA, dan Pneumonia pada tahun 2020
- 5. Meningkatkan promosi pencegahan dan pengendalian HIV serta meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan.

- 6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DBD dan KIE mengenai pemberantasan sarang nyamuk
- 7. Sosialisasi dan pendekatan bersama lintas sektor kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini terhadap kasus yang berpotensial wabah, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi CJH
- 8. Meningkatakan peran lintas sektor dengan meningkatkan peran TPKJM, Meningkatkan promosi pencegahan dan pengendalian DM, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pemeriksaan kesehatan secara dini, melaksanakan bimtek PTM bagi kader, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pemeriksaan kesehatan secara dini dan kontrol rutin
- Perlu adanya kebijakan penyediaan sumber dana alternatif untuk menutup sementara klaim BPJS yang belum terbayar, dengan demikian pembiayaan operasional rumah sakit sesuai yang di targetkan, sehingga pelayanan rumah sakit lebih optimal.
- 10. Meningkatkan manajemen rumah sakit dengan sasaran peningkatan profesional SDM (pelayanan), dengan meningkatkan mutu SDM yang terstandarisasi dan penerapan reward dan punishment yang tegas.

#### D. Penghargaan

Forum Komunikasi Kota Sehat memperoleh Swasti Saba Wistara

- 1. Predikat terbaik I kompetisi inovasi pelayanan publik Tingkat Kota Pasuruan
- 2. Predikat terbaik 6 Penilaian unit pelayanan publik Kota Pasuruan
- 3. TOP 45 Jawa Timur Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
- 4. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik dengan Catatan" oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2019. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan capaian yang telah diperoleh oleh RSUD dr. R. Soedarsono sebagai unit penyelenggara pelayanan publik.
- 5. Unit pelayanan publik terbaik ke 1 oleh pemerintah kota Pasuruan tahun 2019.

# 1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur dasar jalan/jembatan, irigasi ,drainase dan pemanfaatan serta pengendalaian ruang guna menopang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perkonomian serta menarik investasi, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

### A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur dasar jalan/jembatan, irigasi ,drainase dan pemanfaatan serta pengendalaian ruang guna menopang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perkonomian serta menarik investasi, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke V yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan sasaran beserta indikatornya yang diuraikan sebagai berikut.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase, dengan sasaran indikator, - Persentase jalan dalam kondisi baik, - Persentase drainase dalam kondisi baik, - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	67,58	79,79	118,07
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	86,50	81,77	94,53

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar	%	92,26	89,79	97,32
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata	%	91,00	89,77	98,65
	ruang				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

Hasil evaluasi indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 antara lain :

- Adanya perubahan SK Walikota Nomor 188/237/423.011/2018 tentang status jalan kota, dimana sepanjang 12.582 m Menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Panjang jalan awal semula yang ditangani oleh bidang Bina Marga 91.515 m' menjadi 78.933 m'
- 2. Drainase kota dalam kondisi baik mencapai 11.474 m' sebesar 81,77% dari panjang drainase kota 14.032 m'.
- 3. Pelayanan air irigasi yang terlayani secara optimal mencapai 97,32% dari seluruh luas lahan pertanian 1.065 Ha. Tidak tercapainya target dikarenakan saluran irigasi kurang berfungsi optimal untuk melayani lahan pertanian seluas 29 Ha.
- 4. Kesesuaian pemanfaatan ruang dari penataan ruang sebagaimana perda RTRW adalah 91%.

#### B. Evaluasi indikator program

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2019, dimana pelaksanaannya didukung oleh 7 (tujuh) Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.66.317.242.400,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.41.565.469.792,00 atau sebesar 62,68 persen.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Rp.	18.677.439.700	12.146.792.058	65,03%
	Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan				
	Pelengkapnya				
а	Indikator Presentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%	68,95	79,79	115,72%
2	Program Pembangunan Infrastruktur Jalan,	Rp.	3.474.867.500	2.556.974.350	73,58%
	Jembatan dan bangunan pelengkapnya				
а	Indikator Persentase Ketersediaan Jalan dan	%	45,13	43,16	95,63%
	Bangunan Pelengkapnya				
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan	Rp.	6.412.495.000	5.231.154.573	81,58%
	Pengendalian Air Irigasi				
а	Indikator Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi	%	76,65	76,02	95,63%
_	baik dan sedang	_			
4	Program Pembangunan dan Pemeliharaan	Rp.	11.968.277.200	9.710.005.209	81,13%
	Drainase Kota	•			
а	Indikator Persentase Wilayah yang terlayani sistem	%	98,86	98,80	99,94%
	jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi				
-	genangan	р.,	0 000 700 000	674 525 000	05.000/
5	Program Penataan Ruang	Rp.	2.689.703.000	674.535.800	<b>25,08%</b>
а	Indikator Persentase pemanfaatan ruang yang	%	99,84	98,65	98,81%
c	sesuai dengan rencana tata ruang	Dn	22.960.460.000	11.131.719.002	48,48%
6	Program Peningkatan Bangunan Gedung	Rp. %	82,68	82,28	•
а	Indikator Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	/0	02,00	02,20	99,52%
7	Program Peningkatan Sistem Informasi Jasa	Rp.	134.000.000	114.288.800	85,29%
'	Konstruksi	ı.γ.	137.000.000	114.200.000	00,2970
а	Indikator Persentase Ketersediaan Informasi	%	70	70	100%
u	Layanan Jasa Konstruksi	/0	10	70	100 /0
	Disea Delegiase University des Desertes Diseas 2010				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

1. Program Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. dilaksanakan guna mempertahankan kondisi jalan yang mantap dan aman untuk pengendara lalu lintas, adapun Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Jalan, Pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan capaian indikator 115,72 persen, menunjukan kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah beban kendaraan yang berlebih (tidak sesuai dengan klas jalan), solusi yang diupayakan adalah koordinasi dan penindakan yang harus dilakukan secara intensif oleh pemangku kepentingan.

- 2. Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan dilaksanakan untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah. Kinerja program ini didukung antara lain melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ruang Milik Jalan, Pembangunan Median, Trotoar dan Drainase dengan kinerja program yang dicapai sebesar 95,63%, menunjukan kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Air Irigasi dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi, kegiatan Koordinasi, monitoring, evaluasi pengendalian pemanfaatan sumberdaya air, Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi, Pembinaan Kelompok Petani Pemakai Air dan Inventarisasi data Sumber Daya Air dan Drainase yang menghasilkan capaian indikator Program 95,63%, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini didukung kinerja tim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 4. Program Pemeliharaan Drainase Kota dilaksanakan untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi drainase kota. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Drainase Kota, Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Drainase Kota dan kegiatan Pemeliharaan Rutin Drainase Kota dengan capaian persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sebesar 99,94%, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini didukung ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Program Penataan Ruang dilaksanakan untuk melaksanakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota. Dimana telah dihasilkan output berupa Dokumen Revisi RTRW, Informasi Penataan Ruang (IPR) Kota Pasuruan dengan capaian Program indikator 98,81 persen. Sedangkan

- kendala yang dihadapi terdapat revisi Perda RTRW masih dalam proses perubahan.
- 6. Program Peningkatan Bangunan Gedung dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bangunan Gedung Negara melalui kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat; Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Kesehatan Masyarakat; Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Negara Lainnya; Rehabilitasi Sarana Pendidikan Dasar (SD-SMP); Pembangunan Gedung Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pasuruan; Rehabilitasi Sarana Perdagangan; serta Pendampingan Rancang Bangun dan Konstruksi, dengan capaian indikator 99,52%. Hal ini dikarenakan dari rencana 3 (tiga) bangunan gedung negara baru yang akan dibangun hanya 2 (dua) gedung negara baru yang dapat terbangun. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan program adalah koordinasi yang efektif dan intensif antara pihak pihak terkait pelaksana kegiatan.
- 7. Program Sistem Informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan untuk melengkapi 7 (tujuh) data jasa konstruksi sebagai bahan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum serta peningkatan pengetahuan kekonstruksian para pelaku jasa konstruksi. Dukungan kinerja program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi SIPJAKI; Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi, serta Penyusunan Standar Harga Upah, Bahan dan HSBGN. Output yang dihasilkan berupa terupgradenya data SIPJAKI; terselenggaranya pelatihan bagi tenaga kerja terampil dan petugas K3 Konstruksi, serta tersedianya HSBGN Kota Pasuruan, dengan pencapaian indikator 100%. Keadaan ini didukung oleh ketersediaan dana, kerjasama personal pelaksana kegiatan, serta telah terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan pihak Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya.

#### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:

- 1. Dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur masih didapati kurangnya koordinasi antara rekanan dan konsultan pengawas dalam beberapa kegiatan;
- pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas dalam beberapa kegiatan belum optimal sehingga berpengaruh terhadap kualitas fisik hasil pekerjaan;
- 3. Masih adanya bangunan milik warga yang melanggar ruang milik jalan dan sempadan saluran, sehingga menghambat proses pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan jalan dan saluran;

#### C.2. Solusi

Sedangkan *solusi* yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens terhadap penyedia jasa pelaksana pekerjaan;
- 2. Melakukan koordinasi secara intens dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan penyelenggaraan fisik proyek;
- 3. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan ruang milik jalan dan sempadan sungai/ saluran;

## 1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kebutuhan akan perumahan serta tempat tinggal yang layak, dengan lingkungan yang bersih dan sehat, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perumahan serta tempat tinggal yang layak, dengan lingkungan yang bersih dan sehat, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung Misi ke V "Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan".

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan permukiman

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pelayanan air minum	%	100	86,61	86,61
2	Cakupan pelayanan sanitasi	%	100	87,38	87,38
3	Persentase kawasan kumuh	%	0	97,42	97,42
4	Persentase penanganan sampah	%	67,03	98,45	146,87

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 2019

Evaluasi kinerja pada penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2019 didapat melalui Capaian indikator Kinerja cakupan pelayanan air minum sebesar 86,61%. Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan sanitasi sebesar 87,38%. Dalam upaya penurunan prosentase kawasan kumuh masih terdapatnya wilayah kawasan kumuh sebesar 5,98% dan capaian indikator persentase penanganan sampah adalah 146,87%.

Capaian kinerja Indikator cakupan pelayanan air minum di bawah target 100% karena kurangnya ketersediaan pembiayaan; belum terselesaikannya jaringan pipa PDAB proyek SPAM Umbulan, dan ada 1 paket pekerjaan yang gagal lelang.

Capaian kinerja Indikator cakupan pelayanan sanitasi di bawah 100% karena kurangnya ketersediaan pembiayaan, belum adanya pembangunan IPLT (Instalasi Pembuangan Limbah Tinja) dan ada sebagian warga yang menolak untuk pembangunan sanitasi karena terbatasnya lahan yang dimiliki serta ada warga yang sudah membangun sendiri.

Capaian kinerja Indikator persentase kawasan kumuh, dari target 0%, masih menyisakan 2,58% walaupun secara nomerik oleh Pemerintah telah dinyatakan 0%. Dari total luas kawasan permukiman yang tersebar 34 kelurahan, luas lahan kumuh yang tersisa adalah 27,99 ha. Ketercapaian kinerja indikator tersebut didukung oleh Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan program USAID-IWINS pada tahun 2015 sampai 2017 dengan kegiatan pembinaan kepada kelompok masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan program NUSP dan NSUP pada tahun 2015 sampai 2018.

Capaian kinerja Indikator persentase penanganan sampah sebesar 146,87%. Capaian target indikator yang cukup tinggi ini, diperoleh karena sampah yang terdapat di semua TPS sudah terangkut semuanya ke TPA. Juga karena keberadaan bank sampah unit (BSU) yang menyebabkan berkurangnya timbunan sampah dimasyarakat serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 14 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.32.631.243.500,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.25.006.192.775,00 (dua puluh lima milyar enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau tingkat serapan mencapai 76,63%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.13**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan permukiman

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Perumahan				
	Outcome : 1. persentase rumah tidak layak	%	8.84	4.74	53.62%
	huni yang ditangani				
	Outcome :2. persentase prasarana, sarana	%	22.28	16.03	71.95%
	dan utilitas umum (PSU) perumahan yang				
	layak.				
	Anggaran	Rp.	4,429,458,000.00	3,739,472,125.00	84.42%
2	Program Pembangunan dan peningkatan				
	sarpras Lingkungan Permukiman				
	Outcome: 1. persentase prasarana, sarana	%	86.07	87.49	101.65%
	dan utilitas umum (PSU) kawasan				
	permukiman yang layak				
	Outcome : 2. persentase areal pemakaman	%	85	84	98.82%
	yang memadai	_	04 050 000 500 00	40 005 057 450 00	<b>70</b> 400/
	Anggaran	Rp.	24,852,229,500.00	19,665,657,150.00	79.13%
3	Program Pengembangan Kinerja				
	Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0.4	20 = 1	22.24	07.050
	Outcome: 1. persentase rumah tangga yang	%	88.51	86.61	97.85%
	mendapatkan akses air minum yang aman	0.4	20.50	07.00	00.000/
	Outcome : 2. persentase rumah tangga yang	%	88.59	87.38	98.63%
	terlayani sistem air limbah yang memadai	_	0.040.550.000.00	4 004 000 500 00	47.0004
	Anggaran	Rp.	3,349,556,000.00	1,601,063,500.00	47.80%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 2019

Kinerja program dan kegiatan penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2019, sebagaimana table 1.4.2 secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program pengembangan perumahan dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas perumahan. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni melalui dana APBN (DAK) yang menghasilkan output jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi sebanyak 112 rumah dari target 130 rumah atau capaian indikator 86,15 persen. Hal ini didukung kinerja stakeholder terkait, serta kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
- 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dilaksanakan untuk mengembangkan layanan air minum dan air limbah. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity system* penyediaan air minum (SPAM) yang dibiayai

(DAK penugasan) yang menghasilkan output panjang jaringan pipa pipa air minum yang terbangun sepanjang 7.718.86 m' dari target 12.029 m' atau capaian indikator 64,17%. Belum tercapainya target dikarenakan ada satu paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang. Selain itu didukung adanya ketersediaan dana APBN dengan program hibah air minum. Kinerja program ini didukung kegiatan pembangunan System Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/ atau pedesaan dengan sumber anggaran dari DAK regular dengan output jumlah septictank komunal dan individu yang terbangun sebanyak 195 SR dari target 295 SR atau capaian indikator 66,10%. Tidak tercapainya target karena ada 2 lokasi yang tidak terlaksana di kelurahan kepel dan kelurahan randusari serta tidak adanya lokasi pengganti dan KSM tidak siap. Program ini cukup mencapai sasaran dengan bukti bertambahnya kelurahan yang bebas ODF (dari 12 kelurahan menjadi 18 kelurahan ditahun 2019), Program ini mendukung program 100% akses sanitasi.

3. Program pembangunan dan peningkatan sarpras lingkungan permukiman dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan pembangunan sarana prasarana permukiman (DID) yang menghasilkan output jumlah luas jalan yang terbangun sepanjang 5.521,028 m2 dari target 2.388 m2 atau capaian indikator 231,20%; drainase yang terbangun sepanjang 4.130,3 m' dari target 3.768 m' atau capaian indikator 109,62% dan jumlah titik lokasi PJL yang terbangun sebanyak 230 titik dari target 141 titik atau capaian indikator 163.12%.

Selain program dan kegiatan diatas, penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman didukung pula dengan kinerja dan program kegiatan lainnya. Dari capaian kinerja program dan kegiatan dalam bentuk indikator keluaran (output) yang teralisasi dengan rata-rata 87,09%. Hasil (outcome) yang dicapai adalah berkurangnya rumah tidak layak huni; meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak;meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak; meningkatnya areal pemakaman yang

memadai; meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman dan meningkatnya rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Ada beberapa kegiatan yang capaian indikator keluaran tidak bisa terealisasi, hal ini terjadi pada kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN/DAK yang disebabkan adanya perubahan juknis di akhir tahun anggaran, tidak terpenuhinya kualifikasi yang ditentukan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan kegiatan yang bersumber dari anggaran P-APBD yang disebabkan waktu pelaksanaan yang tidak cukup waktu sehingga tidak bisa dilaksanakan.

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

# C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, antara lain:

- 1. Masih belum tercatatnya aset tanah bawah jalan dan PSU perumahan.
- 2. Pelaksanaan pembangunan konstruksi, waktu menentukan perencanaan lokasi berdasarkan usulan/persetujuan yang akan dibangun tetapi pada saat pelaksanaan warga menolak lokasi tersebut sehingga ada perubahan lokasi.
- 3. Kurangnya kesadaran pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar.
- 4. Masih adanya pengembang perumahan yang belum menyerahlan PSU-nya kepada Pemerintah Kota.
- 5. Masih banyaknya kebutuhan akan hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

6. Pertumbuhan penyediaan makam (TPU) yang tidak sebanding dengan angka kematian penduduk dan masih banyaknya makam di wilayah kelurahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

#### C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah aset.
- 2. Untuk usulan lokasi pembangunan dibuat surat pernyataan (Berita Acara) dari warga sehingga tidak ada perubahan lokasi lagi.
- 3. Melaksanakan sosialisasi kepada pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar.
- 4. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait bersama pengembang perumahan agar segera menyerahlan PSU-nya kepada Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pemerintah Kota Pasuruan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengajukan usulan rusunawa, BSPS ataupun RTLH demi peningkatan ketersediaan rumah layak huni.
- Melakukan pengembangan/perluasan TPU serta melaksanakan koordinasi dengan lurah dan masyarakat agar makam di wilayah kelurahannya untuk dapat diserahkan ke Pemerintah Kota untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

# 1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, diarahkan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tertib dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 4 Kecamatan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman, tertib dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke VII Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa, Berbudaya Yang Diliputi Harmoni Sosial Dan Kesalehan Sosial

Pada tahun 2019, telah dilakukan Pemilihan Presiden dan legislatif. Di tahun tersebut, tingkat partisipasi dalam PEMILU ditargetkan sebesar 74,95% dan terealisasi sebesar 84,81% atau tercapai sebesar 113,16%. Angka realisasi tersebut didapat dari perhitungan jumlah pengguna hak pilih PILPRES dan PILEG tahun 2019 sebesar 125.097 hak pilih dibagi dengan Jumlah DPT PILPRES tahun 2019 sebesar 147.500 dikalikan 100%. Capaian sebesar 113,16% sehingga dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif cukup tinggi.

Indikator Persentase LSM ber-SKT ditahun 2019 ditargetkan sebesar 15% terealisasi sebesar 21,43% atau tercapai sebesar 142,86%. Realisasi tersebut didapat dari perhitungan Jumlah LSM yang ber-SKT pada tahun 2019 sejumlah 3 LSM. Jumlah LSM yang ber-SKT sampai dengan tahun 2019 sebesar 14 LSM. Data LSM di Kota Pasuruan sebanyak 29 LSM.

Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan suasana yang kondusif ditengah tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan target 6 jenis pelanggaran Perda yang dapat dicegah dan terealisasi 4 jenis perda yang dapat dicegah dengan capaian 66,67%. Pada tahun 2019 gangguan/pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kota Pasuruan relatif baik,

pada tahun 2019 jenis pelanggaran Peraturan daerah ada 2 jenis yang berpotensi dilanggar oleh masyarakat antara lain:

- 1. Pelanggaran perda Reklame dan
- 2. Pelanggaran Perda Ketertiban Umum (terutama mengenai pedagang kaki lima).

Pelanggaran Perda yang sering terjadi merupakan pelanggaran yang selalu ada tiap tahun, yaitu permasalahan reklame dikarenakan tidak berijin atau masa jatuh tempo telah habis akan tetapi tetap terpasang. Sedangkan pelanggaran pada ketertiban umum yang sering terjadi adalah permasalahan PKL yang mengganggu ketertiban umum.

Beberapa jenis penegakan Peraturan daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

- 1. Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum;
- 2. Peraturan Daerah (Perda) Reklame;
- 3. Peraturan Daerah (Perda) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 4. Peraturan Daerah (Perda) Romadhon;
- 5. Peraturan Daerah (Perda) Trotoar;
- 6. Peraturan Daerah (Perda) Irigasi;
- 7. Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 8. Peraturan Daerah (Perda) Warnet/rental video;
- 9. Peraturan Daerah (Perda) Pengaturan pasar modern;
- 10. Peraturan Daerah (Perda) Minuman keras;
- 11. Peraturan Daerah (Perda) Ijin pengeringan lahan;
- 12. Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggara pemondokan;
- 13. Peraturan Daerah (Perda) Pemberdayaan penataan pedagang kaki lima;
- 14. Peraturan Daerah (Perda) Restoran (pajak);
- 15. Peraturan Daerah (Perda) Pajak hiburan.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional maka dalam hal ini pemerintah kota pasuruan melaksanakan program kedaruratan bencana sebagai upaya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kedaruratan bencana pada saat tanggap darurat bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan adalah unsur Pelaksana Teknis (OPD) Pemerintah Kota Pasuruan yang bertugas dan berwenang untuk melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah dibidang Kedaruratan Bencana.

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita diterima, pengiriman pasukan dan sarana penanganan bencana lokasi sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi penanganan bencana. BPBD Kota Pasuruan menentukan Response time sebesar 15 menit. Direncanakan penentuan lokasi sarana/prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan response time 15 menit. Dalam realisasinya Pemerintah Kota Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana dapat merealisasikan melampaui target yang direncanakan yaitu rata-rata waktu tanggap (Respone time) selama 11 menit atau capaiannya sebesar 136% dari target yang dicanangkan. Keberhasilan ini dikarenakan dukungan dari personil yang mempunyai kemampuan serta kesigapan dari personil yang dimiliki oleh BPBD di bidang penangganan bencana.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pelayanan Dasar ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Bidang Kebencanaan ini, antara lain didukung oleh 3 program dan 20 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.628.720.000,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp.2.442.714.500 atau sebesar 92,92 persen.

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time tidak menutup ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sarana/prasarana penanggulangan bencana telah memadai. Karena semakin cepat response time berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja Pemerintah Daerah

dalam melayani masyarakat. Hal yang berhubungan dengan Response time adalah berapa ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi wilayah manajemen lokasi bencana dan kapasitas kemampuan yang ada kesadaran dan persepsi terhadap response time termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana penanganan bencana menuju lokasi. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Kesbangpol				
1	Tingkat partisipasi dalam PEMILU				
	Pemilu Presiden	%	74,95	84,81	113,16
	Pemilu Legislatif	%	74,95	84,81	113,16
2	Persentase LSM ber-SKT	%	15	21,43	142,86
	Satpol PP				
1	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	6	4	66,67
	BPBD				
1	Waktu Tanggap Penanggulangan Bencana	Menit	11	11	100%

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, 2019

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Penyelenggaraan Program

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ini didukung oleh 2 program yaitu Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik Dan Pendidikan Politik Masyarakat serta Program Penguatan Ketahanan Bangsa. Indikator Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik Dan Pendidikan Politik Masyarakat adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu dengan target sebesar 5%, terealisasi sebesar 2,45% atau tercapai sebesar 48,8%.

Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik Dan Pendidikan Politik Masyarakat dalam mencapai target Indikator Kinerja "Tingkat Partisipasi dalam PEMILU" didukung kegiatan:

- 1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2019 dengan anggaran senilai Rp.304.410.000,00. Anggaran ini terealisasi sebesar Rp.279.386.600,00 atau tingkat serapannya mencapai 92%, dengan output jumlah petugas monitoring TPS dan koordinator kelurahan dan kecamatan sebanyak 663 petugas serta jumlah spanduk, baliho sosialisasi sebanyak 21 unit.
- 2. Kegiatan Pembinaan Politik bagi Masyarakat dengan anggaran senilai Rp.37.633.000,00, terealisasi sebesar Rp.35.028.000,00 atau serapannya mencapai 93%. Output yang dihasilkan jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat sebanyak 80 orang.

Program Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Bangsa memiliki 2 indikator program, yaitu Persentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif dengan target 85% dan terealisasi sebesar 91,67% atau tercapai sebesar 107,84%. Sedangkan Persentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber-SKT memiliki target sebesar 5% dan terealisasi 5,11% atau tercapai sebesar 102,15%.

Program Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Bangsa dalam mencapai target Indikator Kinerja "Persentase LSM ber-SKT" didukung kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Sarasehan Organisasi Masyarakat dengan anggaran senilai Rp.103.900.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, terealisasi sebesar Rp.101.778.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 98%. Output yang dihasilkan jumlah peserta sarasehan organisasi masyarakat sebanyak 80 ormas dan jumlah pembinaan yang ditayangkan media elektronik (TV) sebanyak 1 kegiatan.
- 2. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dengan anggaran senilai Rp.407.878.500,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, terealisasi sebesar Rp.384.651.475,00 atau tingkat serapannya mencapai 94%. Output yang dihasilkan adalah jumlah peserta Pemberdayaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 201 orang dan Jumlah

frekuensi pertemuan dengan LSM 1 kali serta Jumlah Organisasi Masyarakat yang dimonitoring & dievaluasi 113 Lembaga.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program (Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dengan 4 kegiatan dan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan 7 kegiatan). Anggaran untuk Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat senilai Rp.2.302.040.370,00 terealisasi sebesar Rp.2.158.172.800,00 atau tingkat serapannya mencapai 93,75% sedangkan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat senilai Rp.1.057.288.690,00 terealisasi sebesar Rp.860.129.062,00 atau tingkat serapannya mencapai 81.35%.

Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diukur dengan indikator :

- (1) Prosentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan target 80% dan terealisasi sebesar 80% atau tercapai 100%, menunjukkan kinerja yang baik, hal ini didukung adanya kerjasama dan koordinasi dengan aparat terkait;
- (2) Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 64% atau tercapai 91,4%, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini didukung oleh informasi yang jelas dan cepatnya reaksi penanganan pengaduan. melalui kegiatan penertiban Pelanggar Peraturan daerah di tahun 2019, jumlah penanganan pengaduan sebesar 513 yang ditindaklanjuti sebesar 469;
- (3) Prosentase SDM aparatur yang terlatih ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi sebesar 50% atau tercapai 100% menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini disebabkan kegiatan berlangsung baik dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku jumlah sdm aparatur yang telah dilatih kesamaptaan sebesar 55 dari 55 aparatur satpol pp.

Pelaksanaan program Peningkatan Perlindungan Masyarakat diukur dengan indikator:

- (1) Jumlah RT yang memiliki siskamling aktif ditargetkan sebesar 227 RT dan terealisasi sebesar 217 RT atau tercapai 95,59% menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini disebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan yang terjaga cukup baik.
- (2) Meningkatnya perlindungan masyarakat ditargetkan sebesar 77,4% dan terealisasi sebesar 77,4% atau tercapai 100% menunjukkan kinerja yang baik, hal tersebut didukung Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas.
- (3) Prosentase tenaga satlinmas dalam siaga bencana ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar 40% atau tercapai 100% menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut:

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita diterima, pengiriman pasukan dan sarana penanganan bencana lokasi sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi penanganan bencana . BPBD Kota pasuruan menentukan Response time sebesar 11 menit. Direncanakan penentuan lokasi sarana/ prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan response time 11 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti response time ditentukan kurang dari 11 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sara/prasarana penanggulangan Bencana telah memadai. Karena semakin cepat response time berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja DPK dalam melayani masyarakat.

waktu yang dihitung dalam Response time ini adalah waktu pengiriman pasukan dan sarana, waktu perjalanan menuju lokasi kejadian bencana dan waktu

menggelar sarana sampai siap untuk oprasi penanganan bencana. Hal yang berhubungan dengan Response time adalah berapa Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi Wilayah Manajemen Lokasi bencana dan kapasitas kemampuan yang ada kesadaran dan persepsi terhadap response time termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana penanganan bencana menuju lokasi.

Pelaksanaan Penentuan Response time 11 menit ini adalah bahwa berawal dari response time ini maka direncanakan penentuan lokasi sarana/ prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan response time 11 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti response time ditentukan kurang dari 11 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sarana/prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai. Karena semakin cepat response time berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja DPK dalam melayani masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Program Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo didukung oleh pelaksanaan 17 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.527.467.000,00. terealisasi sebesar Rp.373.510.800,00 atau tingkat serapannya mencapai 70,81%, diukur dengan indikator persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%, didukung dengan memaksimalkan fungsi-fungsi di kecamatan terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat. Jumlah pengaduan keamanan dan ketertiban sebanyak 26 telah ditindaklanjuti.

2. Dalam penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo didukung oleh pelaksanaan 1 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.102.630.000,00. terealisasi sebesar Rp.17.590.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 17,14%, diukur dengan indikator persentase kejadian bencana yang ditanggulangi dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% didukung dengan penanganan pertama penanggulangan bencana alam. Semua kejadian bencana alam yang terjadi dapat ditangani karena koordinasi yang dijalin antara BPBD, Kecamatan dan masyarakat sehingga dapat memperlancar pendistribusian bantuan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Panggungrejo didukung oleh pelaksanaan 24 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.656.354.000,00. terealisasi sebesar Rp.483.139.300,00 atau tingkat serapannya mencapai 73,61%, diukur dengan indikator persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%, didukung dengan memaksimalkan fungsi-fungsi di kecamatan terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat. Jumlah pengaduan keamanan dan ketertiban sebanyak 19 telah ditindaklanjuti.
- 2. Dalam penyelenggaraan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo didukung oleh pelaksanaan 1 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.25.000.000,00. terealisasi sebesar Rp.14.954.300,00 atau tingkat serapannya mencapai 59,82%, diukur dengan indikator persentase kejadian bencana yang ditanggulangi dengan target 100% terealisasi sebesar

100% dengan capaian 100% didukung dengan penanganan pertama penanggulangan bencana alam. Semua kejadian bencana alam yang terjadi dapat ditangani karena koordinasi yang dijalin antara BPBD, Kecamatan dan masyarakat sehingga dapat memperlancar pendistribusian bantuan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul kidul, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan Program Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul didukung oleh pelaksanaan 11 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.378.566.500,00. terealisasi sebesar Rp.307.811.650,00 atau tingkat serapannya mencapai 81,31%, diukur dengan indikator persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%, didukung dengan memaksimalkan fungsi-fungsi di kecamatan terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat. Jumlah pengaduan keamanan dan ketertiban sebanyak 24 telah ditindaklanjuti.
- Dalam penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul didukung oleh pelaksanaan 1 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.45.000.000,. terealisasi sebesar Rp.20.288.500,00 atau tingkat serapannya mencapai 45,09%, diukur dengan indikator persentase kejadian bencana yang ditanggulangi dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% didukung dengan penanganan pertama penanggulangan bencana alam. Semua kejadian bencana alam yang terjadi dapat ditangani karena koordinasi yang dijalin antara BPBD, Kecamatan dan masyarakat sehingga dapat memperlancar pendistribusian bantuan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Purworejo didukung oleh pelaksanaan 11 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.368.635.000,00. terealisasi sebesar Rp.315.608.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 85,62%, diukur dengan indikator persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%, didukung dengan memaksimalkan fungsi-fungsi di kecamatan terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat. Jumlah pengaduan keamanan dan ketertiban sebanyak 9 telah ditindaklanjuti.
- 2. Dalam penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo didukung oleh pelaksanaan 1 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.55.750.000,00. terealisasi sebesar Rp.26.447.500,00 atau tingkat serapannya mencapai 47,44%, diukur dengan indikator persentase kejadian bencana yang ditanggulangi dengan target 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% didukung dengan penanganan pertama penanggulangan bencana alam. Semua kejadian bencana alam yang terjadi dapat ditangani karena koordinasi yang dijalin antara BPBD, Kecamatan dan masyarakat sehingga dapat memperlancar pendistribusian bantuan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat

	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat					
No	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
	Kesbangpol					
1	Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah		_			
	Outcome : Persentase peningkatan partisipasi	%	5	10,73	214,67	
	pemilih pemula dalam pemilu	ъ	005 400 000	577 444 400	00.00	
•	Anggaran	Rp.	625.402.800	577.441.400	92,33	
2	Program Peningkatan dan Penguatan					
	Ketahanan Bangsa	0/	0.5	04.07	400	
	Outcome: Persentase tokoh agama anggota	%	85	91.67	108	
	forum keagamaan yang aktif Outcome : Persentase Organisasi	%	5	5.11	102,15	
		70	o o	5.11	102,15	
	Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT					
	Anggaran	Rp.	1.727.008.900	1.350.180.275	78,18	
	Satpol PP	rγ.	1.727.000.900	1.330.100.273	70,10	
1	Program Peningkatan Perlindungan					
'	Masyarakat					
	Jumlah RT yang memiliki siskamling aktif	Rt	227	217	95.59	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	%	77,4	77,4	100	
	Prosentase tenaga Satlinmas dalam siaga	%	40	40	100	
	bencana	70	40	40	100	
	Anggaran	Rp.ribu	2.302.040,37	2.158.172,80	93,75	
2.	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan	тъльи	2.002.040,07	2.100.172,00	30,70	
۷.	Ketentraman Masyarakat					
	Prosentase pelanggaran Perda yang	%	80	80	100	
	ditindaklanjuti	, ,	00	00	.00	
	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	70	64	91,4	
	Prosentase SDM aparatur yang terlatih	%	50	50	100	
	Anggaran	Rp.ribu	1.057.288,69	860.129,062	81,35	
	BPBD		,	,	<u> </u>	
1	Program Kesiagaan dan Pencegahan Dini					
	Bencana					
	Outcome:					
	Jumlah kelurahan tangguh bencana,	%	75	75	100	
	Jumlah Tim Sar yang berkulitas baik dan	%	75	75	100	
	jumlah kelompok masyarakat peduli bencana	%	75	82	109,33	
	Anggaran	Rp.	547.970.000	481.381.491	87,84	
2	Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi					
	dan Rekontruksi Akibat Bencana					
	Outcome:					
	Persantase Bencana yang Dipulihkan	%	75	75	100	
	Anggaran	Rp.	40.000.000	34.667.500	86,67	
1	Program Peningkatan Pelayanan					
	Penanggulangan Kedaruratan					
	Outcome:					
	Persentase Peenuhan Logistik Penagnan	%	75	80	106,66	
	Bencana					
	Tingkat Waktu Tanggap ( Renspon Time )	waktu	11	11	100	
	Anggaran	Rp		5.40.0=0.00=	<b></b> .=	
			577.857.500	540.056.200	93,45	

N <sub>a</sub>	Drogram / Kanistan / Indikatan	Cotura	Toract	Dealises:	Consier
No	Program / Kegiatan / Indikator Kecamatan Gadingrejo	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penanggulangan Bencana Alam				
•	Kecamatan Gadingrejo				
	Outcome : Persentase kejadian bencana yang	Persen	100	100	100
	ditanggulangi	. 0.00			
	Anggaran	Rp	102.630.000	17.590.000	17,14
2	Program Peningkatan Keamanan dan	•			,
	Ketertiban Lingkungan Kecamatan				
	Gadingrejo				
	Outcome: Prosentase pengaduan trantib yang	Persen	100	100	100
	ditangani secara tepat waktu				
	Anggaran	Rp	527.467.000	373.510.800	70,81
	Kecamatan Panggungrejo				
1	Program Peningkatan Keamanan dan				
	Kenyamanan Lingkungan Kecamatan				
	Panggungrejo				
	Outcome:				
	Persentase pengaduan tramtib yang ditangani	Persen	100	100	100
	secara tepat waktu				
_	Anggaran	Rp.	656.354.000	483.139.300	73,61
2	Program Pencegahan dini dan				
	Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan				
	Panggungrejo				
	Outcome:	Davasa	100	100	100
	Persentase kejadian bencana yang ditangani	Persen	100	100	100
	sesuai waktu tanggap Anggaran	Rp.	25.000.000	14.954.300	59,82
	Kecamatan Bugul Kidul	Iγp.	23.000.000	14.334.300	39,02
1	Program Peningkatan Keamanan dan				
'	Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul				
	Kidul				
	Outcome :				
	Persentase pengaduan tramtib yang ditangani	Persen	100%	100%	100%
	secara tepat waktu				.0070
	Anggaran	Rp.	378.566.500	307.811.650	81,31
2	Program Penanggulangan Bencana Alam				- 1,0 1
	Kecamatan Bugul Kidul				
	Outcome :				
	Persentase kejadian bencana yang ditangani	Persen	100	100	100
	sesuai waktu tanggap				
	Anggaran	Rp.	45.000.000	20.288.500	45,09
	Kecamatan Purworejo				
1	Program Penanggulangan Bencana Alam		<del></del>	<u></u>	
	Outcome :				
	Prosentase Kejadian Bencana yang ditangani	Persen	100%	100%	100%
	sesuasi waktu tanggap				
	Anggaran	Rp.	55.750.000	26.447.500	47,44
2	Program Peningkatan Keamanan dan				
	Ketertiban Lingkungan Kecamatan Purworejo				
	Outcome:	Б.	40001	40001	40001
	Persentase pengaduan tramtib yang ditangani	Persen	100%	100%	100%
	secara tepat waktu	Б.	200 005 202	045 000 000	05.00
	Anggaran	Rp.	368.635.000	315.608.000	85,62

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD dan Kecamatan, 2019

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar secara resmi di BAKESBANGPOL Kota Pasuruan hingga akhir 2019 sebanyak 370 ormas, dimana pada tahun 2018 sejumlah 341 ormas pada akhir tahun 2019 sehingga persentase capaiannya adalah 4,9%.

Sedangkan untuk tokoh agama anggota forum yang selama ini dibina dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berjumlah 90 anggota, dimana terdiri dari 72 anggota dari tingkat kecamatan dan 18 anggota pengurus tingkat kota, yang terdiri dari ketua organisasi keagamaan, ketua ta'mir masjid/mushola, pimpinan gereja, pimpinan pura, pimpinan vihara, pimpinan klenteng dan penyuluh agama.

Kegiatan Penertiban Pelanggar Peraturan daerah akan menurunkan jumlah pelanggar peraturan Daerah, sehingga berkontribusi dalam menangani pengaduan yang ditindak lanjuti. Pada tahun 2017, Jumlah Pelanggar Peraturan daerah Mencapai 543 Kasus, melalui kegiatan penertiban Pelanggar Peraturan daerah di tahun 2018, jumlah Pelanggaran peraturan daerah menurun menjadi 532 kasus dalam satu tahun.

Jenis Pelanggaran Peraturan daerah yang sering ditangani oleh satuan polisi pamong Praja terbagi dalam beberapa pelanggaran pada tahun 2019 antara lain

- 1. Pelanggaran perda Reklame Sebanyak 251 kasus;
- 2. Pelanggaran perda IMB sebanyak 12 Kasus;
- 3. Pelanggaran Perda Ramadan sebanyak 30 Kasus;
- 4. Sisanya masih didominasi oleh pelanggaran Pedagang kaki Lima sebanyak ±239 Kasus.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, selaku penyelenggara Perlindungan Masyarakat, senantiasa meningkatkan layanan bagi masyarakat khususnya dalam urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masuarakat. Pemenuhan salah satu hak Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, baik melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Tenaga Satlinmas sebagai iplementasi upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bagi anggota satlinmas telah terselenggara dengan baik. Kegiatan telah teranggarkan

pada APBD II tahun 2018 sebesar Rp.85.947.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.72.123.200,00 atau sebesar 83%. Dengan target kinerja 40 orang satlinmas dan telah terealisasi 100%.

Pada tahun 2018, pengadaan seragam satlinmas dipersiapkan untuk penyelenggaraan pengamanan PEMILIHAN UMUM Tahun 2019 (Pemilihan Presiden Wakil Persiden dan Pemilihan Legislatif). Dari penghitungan Jumlah anggota Satlinmas di seluruh wilayah Kota Pasuruan 1.250 orang. Sehingga didapat target sebanyak 1.250 orang.

Anggaran kegiatan pengadaan seragam satlinmas sejumlah 1.250 stel teranggarkan dan tertuang dalam APBD Perubahan 2018 sebesar Rp.1.809.375.000,00 (Satu Milyard Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.31.598.000,00 atau tercapai sebesar 1,75%.

Dapat dijelaskan bahwa Pengadaan Seragam Satlinmas teranggarkan dalam APBD Perubahan 2018 adalah tidak cukup waktu sehingga tidak memungkinan untuk dilaksanakan tender/pengadaan barang/jasa Seragam Satlinmas. Dengan kondisi keterbatasan waktu maka Pengadaan Seragam Satlinmas tidak dilaksanakan pada tahun 2018 dan dianggarkan kembali pada APBD 2019, akan tetapi tetap menyiapkan dokumen pengadaan dengan melaksanakan uji laboratorium bahan/barang dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehingga terserap anggaran sebesar Rp.31.598.000.-atau tercapai sebesar 1,75% sehingga ini sangat berimbas pada prosentase realisasi serapan anggaran maupun pada capaian kinerja program keseluruhan.

Capaian kinerja indikator urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat adalah akumulasi dari pencapaian Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini, Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Akibat Bencana dan program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan, yang secara total didukung oleh 16 kegiatan, yang lebih terperinci disajikan pada lampiran. Pada bagian berikut,

akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan Kedaruratan Bencana pada tahun 2019. Analisis ini didasarkan, antara lain, dari kinerja kegiatan yang diduga memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat dari kegiatan – kegiatan pada program kedaruratan bencana.

Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini pada tahun 2019 diawali dengan kegiatan Kesiagaan Menghadapi Ancaman Bencana dan Pengelolaan Pusat Data Informasi Bencana, dilanjut Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan Tim Penanggulangan Bencana Kota Pasuruan. kegiatan Sosialisasi Kesiagaan dan Pencegahan Dini Bencana, kegiatan Pelatihan Kesamaptaan Tim Penanggulangan Bencana, Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pengurangan Resiko Bencana bagi Kelurahan Tangguh Bencana, Kegiatan Gelar Relawan dan Gladi Lapang Penanganan Darurat Bencana, Kegiatan Gelar Relawan dan Gladi Lapang Pengurangan Resiko Bencana, dan kegiatan Updating Peta Potensi Bencana. Dimana capaian indikator kinerja Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini adalah terbentuknya kelurahan tangguh bencana sebanyak 16 kelurahan, jumlah anggota Tim SAR yang punya ketrampilan dan berkualitas sebanyak 30 orang, serta jumlah kelompok masyarakat yang peduli bencana sebanyak 16 kelompok. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp.547.970.000,00 dan terserap 87,85% sebesar atau Rp.481.381.491,00.

Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi didukung oleh kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana Umum Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana, kegiatan Pelayanan Rekonstruksi Sosial Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Rekontruksi Akibat Bencana. Capaian indikator kinerja program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah prosentase luasan dampak bencana yang direhabilitasi sebesar 75% dari luasan yang terdampak bencana. Capaian ini tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp.40.000.000,00 dan terserap 86,67% atau sebesar Rp.34.667.500,00.

Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan didukung oleh Kegiatan Oprasi Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pengelolaan Pusat Pengendalian Oprasi (PUSDALOP), kegiatan Pengadaan Logistik Penanganan Bencana, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana dan Kebakaran, kegiatan Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana dan Pemadam Kebakaran, kegiatan Pelatihan Rutin dan Uji Kesamaptaan PMK, serta kegiatan Operasi Pelayanan Penanganan Pemadam Kebakaran. Capaian indikator kinerja Program Kedaruratan Bencana adalah tingkat waktu tanggap (respone time rate) yang mencapai 7,45 menit atau mencapai dari target yang dicanangkan dalam SPM yaitu sekitar 11 menit. Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp.557.857.500,00 dan terserap 93,46% atau sebesar Rp.540.056.200,00.

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019, yakni:

- 1) Masih belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- 3) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- 4) Masih tersebarnya dan belum terbangun Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 5) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
- 7) Belum terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 8) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- 9) Tidak tersedianya hidrand di permukiman padat penduduk dimana mobil damkar tidak bisa masuk
- 10) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 11) Belum memiliki SOP ( Standart Operational Procedure ) Penanggulangan Bencana
- 12) Belum optimalnya penanganan bencana dikecamatan terkait Pemenuhan kebutuhan makanan siap santap yang kurang maksimal, terhambat dengan penyedia makanan siap santap yang terbatas sedangkan kebutuhan dan waktunya tidak bisa di perkirakan;
- 13) Masih kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap laporan trantib secara tertulis sebagimana prosedur yang ada;

#### C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- Perlu penyediaan lokasi-lokasi strategis untuk penempatan pedagang kaki lima
   (PKL)
- Peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antara aparat dengan masyarakat.

- 3) Dibutuhkanya Hidrand di setiap permukiman padat penduduk yang Mobil damkar tidak bisa masuk ke gang kecil lokasi kebakaran.
- 4) Mengoptimalkan koordinasi untuk pelaksanaan penanggulangan darurat bencana dengan instansi terkait dan masyarakat.
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang tersedia dengan kursus kursus kebencanaan, pelatihan pelatihan kebencanaan, untuk kondisi pra bencana, bencana terjadi dan pasca bencana.
- 6) Kerjasama yang baik dengan pihak pihak yang terkait dalam segala bidang dan segala hal.
- 7) Perlu dibangun Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
- 8) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk pelaksanaan penanganan bencana
- 9) Di usulkan pembangunan hidrand di beberapa permukiman padat penduduk.
- 10) Diperlukan sarana dan prasarana sesuai standart dalam penanganan bencana.
- 11) Akan segera di susun SOP penanggulangan bencana
- 12) Penyelenggaraan penanganan bencana harus di selaraskan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat dan harus berjalan secara menyeluruh;
- 13) Peningkatan kualitas pelayanan penanganan bencana terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan siap santap;
- 14) Mensosialisasikan manfaat adanya laporan trantib kepada masyarakat.

## 1.6. Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial, diarahkan untuk pengendalian dan menurunkan angka kemiskinan, melalui penanganan dan pengentasan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Sosial dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan menurunkan angka kemiskinan, melalui penanganan dan pengentasan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke IV Meningkatkan Pengembangan Perdagangan Jasa dan Industri untuk Pemenuhan Hidup Masyarakat Secara Layak yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan dengan sasaran penanganan kesejahteraan sosial baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Urusan sosial terkait kebutuhan masyarakat utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu berupa jaminan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial yang terdiri dari prosentase PMKS dengan jumlah penduduk dan prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan.

Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menjalankan urusan sosial pada Tahun 2019 menargetkan dua indikator yang pertama adalah prosentase PMKS dengan jumlah penduduk yang ditargetkan sebesar 4,81% sedangkan data jumlah penduduk Tahun 2019 sebesar 211.008 jiwa. Dalam pelaksanannya jumlah PMKS yang ada terdiri dari penyandang disabilitas sebanyak 18 jiwa, anak jalanan sebanyak 46 jiwa, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 30 jiwa, lanjut usia potensial sebanyak 19 jiwa, lanjut usia terlantar sebanyak 49 jiwa, dhuafa sebanyak 58 jiwa, anak yatim sebanyak 350 jiwa, anak terlantar sebanyak 4 jiwa, Korban Tindak Kekerasan sebanyak 0 jiwa, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 5 jiwa dan fakir miskin sebanyak 8.783 jiwa. Jumlah PMKS di Kota Pasuruan yang ditangani pada tahun 2019 sejumlah 9.362 jiwa, sehingga realisasi prosentase PMKS dengan jumlah penduduk Tahun 2019 sebesar 4,46% dengan capaian prosentase PMKS dengan jumlah penduduk sebesar 92,72%.

Indikator yang kedua adalah prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan di Kota Pasuruan yang ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 11,82% sedangkan data jumlah penduduk miskin BDT Tahun 2019 sebesar 50.654 jiwa. Dalam

pelaksanannya realisasi prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan di Kota Pasuruan Tahun 2019 sebesar 18,51% dengan capaian prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan sebesar 156,59%. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.16**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PMKS dengan jumlah penduduk	%	4,81	4,46	92,72
2	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	%	11,82	18,51	156,59

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2019.

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 Program Urusan Sosial, dan 1 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam rangka pelayanan dan penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pasuruan.

Program pembinaan penyandang penyakit sosial diukur dengan indikator persentase Kelompok PMKS yang bisa menjalankan aktifitas sosialnya dan PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonomi. Pada Tahun 2019 indikator persentase Kelompok PMKS yang bisa menjalankan aktifitas sosialnya ditargetkan 46% dan tercapai 27% atau sebesar 58,69%. Target dan indikator PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonomi sebesar 9,45% tercapai 2,69% atau sebesar 28,46%.

Tidak tercapainya target persentase PMKS yang bisa menjalankan aktifitas sosialnya Tahun 2019 sebesar 58,69% didapat dari pelayanan:

- 1. Fasilitasi Operasional kegiatan 35 kelompok Karang Werda
- 2. Pembinaan kepada 350 orang pengurus karang werda kelurahan sekota pasuruan.
- 3. Pembinaan rohani kepada 136 orang lansia baik muslim maupun non muslim.
- 4. Sarasehan HALUN sebanyak 225 orang lansia.
- 5. Pembinaa/jambore kepada eks ODGJ bersama pendamping 100 orang.
- 6. Pembinaan Management Usaha bagi 40 orang penyandang disabilitas.

- 7. Pembinaan anak jalanan 50 anak
- 8. Pelatihan ketrampilan anak jalanan 10 orang
- 9. Pemberian bantuan kebutuhan dasar 4 orang anak terlantar.
- 10. Pendampingan sosial kepada 5 anak yang berhadapan dengan hukum.
- 11. Bantuan sosial kepada 356 anak yatim.
- 12. Bantuan sosial kepada 58 orang.
- 13. Pemberian bantuan tangan palsu kepada 1 orang disabilitas.

Sedangkan pada indikator kinerja kedua yaitu prosentase PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonominya tahun 2019 hanya tercapai 28,46%, ini didapat dari :

- Pemberian bantuan sosial modal usaha kepada 30 orang wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
- 2. Pemberian bantuan sosial modal usaha kepada 2 orang penyandang disabilitas.
- 3. Pemberian bantuan alat ketrampilan kepada 10 anak jalanan.
- 4. Pemberian bantuan sosial modal usaha kepada 19 orang lanjut usia potensial.
- 5. Pemberian bantuan alat ketrampilan kepada 10 orang eks ODGJ.

Target tersebut tidak tercapai dikarenakan setelah divalidasi ulang terdapat:

- 1. Data usulan banyak yang tidak masuk data PMKS
- 2. Data usulan banyak yang tidak masuk data BDT
- 3. Data usulan ada yang tidak diketemukan
- 4. Data usulan ada yg sudah pindah rumah.
- 5. Data usulan ada yang meninggal dunia.
- 6. Data usulan sudah berubah status ekonominya (kaya)

Saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali implementasi sistem usulan dari masyarakat sesuai Permensos nomer 8 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolahan data PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), dimana disalah satu klausulnya menyatakan bahwa data PMKS sebagai dasar pelaksanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial diukur dengan indikator Persentase Penduduk miskin yang mendapat bantuan Program PKH yang mampu menjalankan usaha ekonomi ditargetkan sebesar 1,72% teralisasi sebesar 0,87% dengan capaian 50,58% capaian ini berdasarkan jumlah penerima bantuan PKH yang mampu menjalankan usaha ekonomi sebanyak 41 KPM dibandingkan jumlah seluruh penerima PKH sebanyak 4.701 KPM. Rendahnya capaian indikator disebabkan karena tingkat kesadaran dan kemampuan KPM yang masih rendah untuk mandiri secara ekonomi. Minimnya capaian indikator disebabkan tingkat kesadaran KPM yang masih rendah untuk merubah diri menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan kurang mampu mengelola bantuan yang dimaksud. Penanganan bantuan program PKH didapatkan dari *update* data KPM yang mendapatkan batuan sosial.

Untuk indikator yang kedua diukur dengan persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan pangannya ditargetkan sebesar 51,66% dan terealisasi 25% dengan capaian 48,39%. Indikator yang ketiga yaitu diukur dengan persentase korban bencana sosial yang tertangani dengan target 0% dan realisasinya tidak ada korban bencana sosial di Kota Pasuruan. Tidak tercapainya indikator pertama dan kedua disebabkan karena sepanjang tahun anggaran 2019 tidak ada kegiatan distribusi kebutuhan pangan untuk korban bencana dan disebabkan pula bencana yang terjadi belum mengharuskan adanya distribusi kebutuhan pangan. Penanganan korban bencana alam didapatkan dari penyaluran bantuan. Tidak tercapainya indikator disebabkan karena sepanjang tahun anggaran 2019 tidak ada kegiatan distribusi kebutuhan pangan atau membuka/menyediakan dapur umum untuk korban bencana, karena bencana yang terjadi tidak mengharuskan adanya distribusi kebutuhan pangan penanganan korban bencana alam. Penanganan korban bencana alam didapatkan dari bantuan sosial.

Pencapaian target persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya tahun 2019 sebesar 62,05% didapatkan dari penyaluran bantuan sosial RTLH sebanyak 279 penerima (167 dinsos, 112 dprkp), penyaluran bansos berupa uang pembelian bahan pangan sebanyak 1.286 penerima dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pusat sebanyak 7.330 KPM/penerima yang dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin / BDT tahun 2015 sebanyak 14.336 Rumah Tangga.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Sosial

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I.	Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial	Jatuali	raiget	itealisasi	Japaiali
	Outcome :				
	Persentase Kelompok PMKS yang mampu	%	9,45	2,69	28,46
	menjalankan usaha ekonomi		-,	_,	,
	Persentase Kelompok PMKS bisa menjalankan aktifitas	%	46	27	58,69
	sosialnya				,
	Anggaran	rupiah	1.078.203.000	562.594.760	52,18
II.	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial				
	Outcome:				
	Persentase Penduduk miskin yang mendapat bantuan	%	1,72	0,87	50,58
	program PKH yang mampu menjalankan usaha ekonomi			_	
	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan	%	51,66	0	0
	pangan	Б.	700 004 000	500 005 700	70.07
	Anggaran	Rp.	706.994.600	522.985.700	73,97
III.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan				
	Penyandang Masalah Sosial Outcome :				
	Persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	46,24	40,08	86,68
	hidupnya	70	40,24	40,00	00,00
	Anggaran	Rp.	1.011.654.000	920.220.000	90,96
IV.	Program Pemberdayaan Kelembagaan	ıτρ.	1.011.004.000	320.220.000	30,30
•••	Kesejahteraan Sosial				
	Outcome :				
	Persentase Lembaga atau Kelompok yang memperoleh	%	0,53	0,53	100,00
	program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan		,	•	,
	sosial				
	Anggaran	Rp.	59.296.500	42.166.500	71,11

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2019.

#### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Sosial beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan Sosial, antara lain:

- 1. Belum optimalnya Sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- 2. Kurangnya tenaga pekerja sosial professional;

- 3. Belum optimalnya Pelayanan santunan kematian;
- 4. Belum optimalnya Pelayanan Tanggap darurat;
- 5. Belum optimalnya penanganan (validasi data) PBI-JKN, PBI-D.

### C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan sosial di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- Mengoptimalkan sarana mobil UPSK secara berkala untuk mendekatkan akses kepada masyakarat dan supaya permasalahan sosial dimasyarakat cepat terlayani.
- 2. Menambah jumlah pekerja sosial professional dengan APBD.
- 3. Menyederhanakan mekanisme pencairan bantuan sosial santunan kematian.
- 4. Optimalisasi intensitas komunikasi lintas sektoral untuk memperoleh data tanggap darurat yang valid.
- Optimalisasi validitas data dengan stakeholder terkait penanganan PBI-JKN,
   PBI-D secara berkelanjutan.

# 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan wajib bukan pelayanan dasar didukung oleh 17 (tujuh belas) urusan yang terdiri dari urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyrakat desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan penanaman modal, urusan Kepemudaan dan Olah Raga, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan adapun penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

# 2.1. Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja, diarahkan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan derajat hidup yang layak serta meningkatnya kesempatan kerja, Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan dan derajat hidup yang layak serta meningkatnya kesempatan kerja, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi III yaitu menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan, diharapkan dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Dinas Tenaga Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, mempunyai tujuan terwujudnya kemandirian tenaga kerja dan hubungan industrial yang kondusif. Dinas Tenaga Kerja berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan tenaga kerja, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Pada tahun 2019 untuk indikator persentase tingkat partisipasi angkatan kerja ditargetkan 68,41% dengan realisasi sebesar 67,91%, atau tercapai sebesar 99,27%. Berdasarkan sumber data Sakernas Kemenaker, capaian tersebut dapat dilihat dari data jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebesar 102.622 orang, berbanding jumlah penduduk usia kerja sebanyak 151.116 orang. Hal tersebut

dikarenakan lowongan kerja yang tersedia masih ada yang tidak sesuai dengan pendidikan dan keahlian pencari kerja.

Sedangkan untuk indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 28,72% dengan realisasi sebesar 67,71%, atau tercapai sebesar 235,76%. capaian tersebut dapat dilihat dari data jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.145 orang, berbanding jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebanyak 1.691 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasinya melebihi target. Hal ini dikarenakan banyaknya pencari kerja yang ditempatkan diantaranya melalui job fair dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dilakukan bekerjasama dengan 10 Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Pasuruan.

Capain kedua indikator kinerja tersebut diatas diantaranya didukung oleh banyaknya minat masyarakat Kota Pasuruan selaku pencari kerja untuk mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan serta adanya beberapa perusahaan baik didalam maupun luar Kota Pasuruan yang membutuhkan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja (job fair) serta adanya Bursa Kerja Khusus yang dilakukan bersama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Pasuruan. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

		,			
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,41	67,91	99,27
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	28,72	67,71	235,76

Sumber: Sakemas Kemenaker dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2019.

### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2019 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.3.486.176.200,00. Sampai dengan akhir tahun 2019 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.2.886.421.144,00 atau tingkat serapannya mencapai 82,80%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja diukur dengan dua indikator yaitu:

- 1. persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketrampilan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 95,5% dan teralisasi sebesar 89% atau tercapai 93,19%. Hal ini sesuai data pencaker yang berhasil memperoleh sertifikat ketrampilan pelatihan ketrampilan yang diselengarakan oleh Disnaker Kota Pasuruan sebanyak 390 orang berbanding jumlah kuota peserta pelatihan ketrampilan sebanyak 440 orang. Pelaksanaan pelatihan ketrampilan tahun 2019 tersebut juga diikuti oleh sebanyak 5 orang Difabel. Pencapaian target indikator pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tersebut diatas didukung dengan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.081.577.500,00 terealisasi Rp.1.562.461.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 75,06%.
- 2. persentase pencari kerja yang sudah memiliki pekerjaan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 70% dan teralisasi sebesar 100,73% atau tercapai 143,9%. Hal ini sesuai data pencaker yang sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 275 orang dari target 273 orang. Pencapaian target dua indikator pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tersebut diatas didukung dengan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.081.577.500,00 sampai dengan akhir tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.562.461.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 75,06%.

Pelaksanaan Program kedua yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja diukur dengan satu indikator yaitu persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 91% dan terealisasi sebesar 169,1% atau tercapai 185,82%. Hal ini sesuai dengan data pencaker terdaftar/terjaring melalui job fair/bursa kerja sebanyak 1.691 orang dari target 1000 orang.

Pencapaian indikator pada program peningkatan kesempatan kerja tersebut diatas didukung oleh 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.954.297.600,00 sampai

dengan akhir tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.879.159.044,00 atau tingkat serapannya mencapai 92,13%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan diukur dengan tiga indikator yaitu :

- indikator pertama yaitu persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 125%. Dapat dilihat data jumlah kasus perselisihan yang ditangani sebanyak 15 kasus berbanding jumlah kasus yang masuk/terdaftar sebanyak 15 kasus.
- 2. Indikator kedua yaitu persentase perusahaan sesuai UMK pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 42,30% (150 perusahaan) dari 360 perusahaan yang ada di wilayah Kota Pasuruan, dengan realisasi sebesar 48.61% atau tercapai 114,92%. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan penerapan UMK Pasuruan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kota Pasuruan ada 175 perusahaan yang sesuai menerapkan UMK.
- 3. Indikator ketiga yaitu persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 55,6% (200 perusahaan) dengan realisasi sebesar 56,94% (205 perusahaan) atau tercapai 102,41%.

Pencapaian target indikator pada program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan tersebut diatas didukung dengan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.450.301.100,00 terealisasi Rp.444.801.100,00 atau tingkat serapannya mencapai 98,78%

Penyelenggaraan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan tersebut diatas sudah sesuai dengan Perda Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan diantaranya yaitu hubungan kerja, perlindungan dan pengupahan, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial serta pembinaan yang bertujuan menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun

bagi tenaga kerja/buruh serta menjaga hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.19**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Tenaga Kerja

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Ι	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	Outcome: Presentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketrampilan	%	95,5	89	93,19
	Outcome: Presentase pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan	%	70	100,73	143,9
	Anggaran	Rp.Ribu	2.081.577.500	1.562.461.000	75,06
II	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Outcome: Persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja	%	91	169	185,71
	Anggaran	Rp.Ribu	954.297.600	879.159.044	92,13
III	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	•			
	Outcome: Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani	%	80	100	125
	Outcome: Persentase Perusahaan sesuai UMK	%	42,30	48,61	114,92
	Outcome: Persentase Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	%	55,60	56,94	102,41
	Anggaran	Rp.Ribu	450.301.100	444.801.100	98,78

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2019.

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

## C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan ketenagakerjaan, antara lain:

 Masih banyaknya pencaker yang berminat menjadi peserta pelatihan maupun magang kerja yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Pasuruan, sedangkan kuota peserta yang tersedia terbatas

- 2) Masih adanya perusahaan yang tidak menyampaikan kebutuhan karyawan pada perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan
- Kurangnya kesadaran para pencaker yang sudah mendapatkan pekerjaan untuk melaporkan telah mendapatkan pekerjaan
- 4) Masih adanya perusahaan yang kurang memahami norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial

#### C.2. Solusi:

- Meningkatkan kuota peserta pelatihan dan menambah jenis pelatihan kerja serta pemagangan kerja yang diminati masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan
- 2) Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan perusahaan-perusahaan baik di wilayah Kota Pasuruan maupun di luar Kota Pasuruan, serta melaksanakan Job Fair secara rutin dengan melibatkan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan baik perusahaan yang berada diwilayah Kota Pasuruan maupun luar Kota Pasuruan.
- 3) Memberikan informasi kepada pencaker terdaftar untuk melaporkan bila sudah mendapatkan pekerjaan
- 4) Meningkatkan sosialisasi tentang norma-norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi perusahaan dan karyawan secara rutin.

## 2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diarahkan untuk peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak, melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kelembagaan perempuan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga berencana melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak, melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kelembagaan perempuan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak, yang tujuannya adalah mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, dengan sasarannya adalah menurunnya kemiskinan.

Pencapaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur dengan serangkaian indikator, antara lain Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta, dan rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga.

Untuk indeks pembangunan gender dengan target pada tahun 2019 yaitu 96,65 dan terealisasi 96,02 atau dengan capaian 99,35%. Indeks pemberdayaan gender dengan target 56,15 terealisasi 62,03 atau dengan capaian 110,47%.

Pencapaian target indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender didukung dengan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang antara lain bidang politik dengan meningkatkan peran perempuan terutama bagi anggota partai politik perempuan untuk ditingkatkan kesadarannya ikut andil dan berpartisipasi duduk di parlemen sehingga membawa perubahan keadaan di dalam kehidupan berdemokrasi, serta meningkatkan pendapatan perempuan melalui pelatihan ekonomi produktif dengan sasaran kepala keluarga perempuan.

Untuk indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dengan target 51,50% realisasinya 53,23% dengan capaian 103,36%. Sedangkan untuk indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga swaasta dengan target 71,16% dan realisasi 44,81% dengan capaian 62,97%. Capaian indikator ini didukung partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan yang mencerminkan persamaan akses dan peran perempuan dan laki-laki dalam lembaga pemerintahan. Dari total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 3.246 orang, berdasarkan jenis kelaminnya sebanyak 1.728 orang atau 53,23% adalah perempuan. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan target 71,16% terealisasi 44,81% dengan capaian indikator sebesar 62,97%, jumlah perempuan dalam dunia usaha tahun 2019 sebanyak 20.422 orang.

Untuk indikator rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga dengan target 10,78% terealisasi sebesar 5,61% atau dengan capaian 192,16%. Pencapaian ini didukung oleh jejaring kerja dan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terjalin dengan baik. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,65	96,02	99,35
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,15	62,03	110,47
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	51,50	53,23	103,36
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,16	44,81	62,97
5	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan	%	10,78	5,61	192,16
	rumah tangga				

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2019

#### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program yaitu (1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.

Dalam penyelenggaraan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan didukung oleh pelaksanaan 5 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.667.329.500,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.597.652.560,00 atau tingkat serapannya mencapai 89,56%.

Dalam penyelenggaraan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.648.237.400,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.587.983.600,00 atau tingkat serapannya mencapai 90,70%.

Pencapaian indikator 2 (dua) program telah menunjukkan trend positif yaitu capaiannnya diatas 100%. Capaian ini didukung program dan kegiatan dalam meningkatkan peran serta perempuan baik di dalam lembaga pemerintahan maupun dalam dunia usaha, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan maupun upaya preventif, sehingga kasus tindak kekerasan terhadap anak tidak mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 13 kasus. Semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat mendapatkan layanan penanganan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamatkan di Jl. Balai Kota No. 12 Pasuruan (Eks Bank Jatim).

Forum Anak sudah terbentuk mulai dari Forum Anak tingkat Kelurahan sebanyak 34, Kecamatan sebanyak 4 dan Kota sebanyak 1. Program kerja tahunan yang direncanakan oleh Forum Anak merupakan tolok ukur tingkat keaktifan Forum Anak dengan pembinaan secara intens dari Kepala Seksi Kelembagaan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan serta pembinaan dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Capaian kinerja indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, serta Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak tersebut di atas, antara lain merupakan kontribusi akumulasi dari 11 kegiatan yang lebih terperinci disajikan pada lampiran.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan	•			
	Gender dalam Pembangunan				
	Outcome :				
	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga	%	51,50	53,23	103,36
	pemerintahan				
	Persentase perempuan dalam dunia usaha	%	14,57	37,10	254,63
	Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan	%	100	100	100
	yang tertangani				
	Anggaran :	Rp.Ribu	667.330	597.652	89.56
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan				
	Gender dan Anak				
	Outcome :				
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang	%	100	100	100
	tertangani				
	Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum	%	90	90	100
	Anak dalam program/kegiatan				
	Persentase Forum Anak yang aktif	%	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan	%	100	100	100
	pemenuhan hak anak				
	Anggaran :	Rp.Ribu	648.237	587.984.	90.70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2019

#### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, yakni:

- Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- Belum optimalnya fasilitasi bagi Forum Anak untuk kegiatan Forum Anak di Tingkat Propinsi dan Nasional;
- 3. Kurangnya SDM yang mengikuti pelatihan konvensi Hak Anak (KHA).

#### C.2. Solusi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1. Peningkatan sarana dan penambahan kelengkapan prasarana P2TP2A;
- Peningkatan fasilitasi Forum Anak dalam kegiatan di Tingkat Propinsi dan Nasional;
- 3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang menangani perlindungan dan pemenuhan hak anak.

### D. Penghargaan

- 1. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya
- 2. Penghargaan sebagai Forum Anak Kelurahan Terbaik se-Indonesia.

# 2.3. Urusan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pangan, diarahkan untuk peningkatan upaya ketersediaan pangan saja, upaya penganeragaman pangan serta keamanan pangan, Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan upaya ketersediaan pangan saja, upaya penganeragaman pangan serta keamanan

pangan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak.

Ketahanan pangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Fokus ketahanan pangan adalah setiap manusia setiap saat mampu mengkonsumsi pangan dan gizi secara seimbang untuk memperoleh status gizi yang baik.

Skor pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi merupakan skor yang menggambarkan tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi, semakin besar pula skor PPH nya. Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, skor pola pangan harapan tingkat konsumsi ditargetkan sebesar 81 dan terealisasi sebesar 85,9 atau tercapai sebesar 106%. Dari capaian persentase tersebut, maka keberagaman konsumsi pangan tercapai melebihi target. Sedangkan skor pola pangan harapan tahun 2018 sebesar 81. Jika dibandingkan pada tahun 2018, skor pola pangan harapan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,9. Perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan skor pola pangan harapan tingkat konsumsi seperti salah satunya upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah melalui pemanfaatan pekarangan/lahan sempit seperti kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta penganekaragaman pangan yang ber B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman) terutama pangan lokal. Salah satu contoh, saat ini lahan pertanian semakin menurun serta ketergantungan beras dan terigu semakin tinggi permintaannya. Maka dari itu, perlu dilakukan inovasi seperti intensifikasi dan diversifikasi pangan lokal dari umbi-umbian. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor pola pangan harapan tingkat konsumsi	Nilai	81	85,9	106
2	Konsumsi protein per kapita	gr/kap/hari	52	62,73	121
3	Konsumsi energi per kapita	Kkal/kap/hari	2000	2059	103

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

Terdapat dua (2) indikator pada perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi yaitu konsumsi protein dan konsumsi energi. Pada tahun 2019, konsumsi protein per kapita ditargetkan sebesar 52 gram/kapita/hari (sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)) dan terealisasi sebesar 62,73 gram/kapita/hari atau tercapai sebesar 121%. Dari perhitungan persentase angka kecukupan protein (% AKP), maka dapat dilihat konsumsi protein telah melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan konsumsi energi per kapita ditargetkan sebesar 2000 kkal/kapita/hari (sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)) dan terealisasi sebesar 2059 kkal/kapita/hari atau tercapai sebesar 103%. Dari capaian persentase tersebut, maka angka konsumsi energi per kapita melebihi target yang telah ditetapkan dan angka ini sudah cukup baik. Perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan konsumsi pangan yang ber B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman). Salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan/lahan sempit seperti kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta penganekaragaman pangan terutama pangan lokal. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 skor PPH (pola pangan harapan) tingkat konsumsi berurut-urut sebesar 81,1; 81; dan 85,9. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi. Semakin tinggi tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi, semakin besar pula skor PPH nya.

#### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pangan ini, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 10 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.735.257.525,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.724.967.425,00 atau tingkat serapannya mencapai 98,60%.

Capaian kinerja indikator urusan pangan dan program peningkatan ketahanan pangan, antara lain, merupakan kontribusi akumulasi dari 16 kegiatan.. Pada bagian berikut, akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan pangan pada tahun 2019. Analisis ini didasarkan, antara lain, dari kinerja kegiatan yang memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan

No.	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
ı	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
	Anggaran	Rp.ribu	735.257,525	724.967.425	98,60
	Outcome:				
	1. Tingkat Konsumsi Pangan	Kkal/kap/hr	2000	2059	103
	Tingkat Ketersediaan Pangan	Kkal/kap/hr	2200	2236	102
	3. Prosentase Keamanan Pangan	%	85	100	118

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

Pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan diukur dengan tingkat konsumsi pangan, tingkat ketersediaan pangan, dan prosentase keamanan pangan. Tingkat konsumsi pangan diukur dengan tingkat konsumsi energi. Pada tahun 2019, Konsumsi energi per kapita ditargetkan sebesar 2000 kkal/kapita/hari (sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)) dan terealisasi sebesar 2059 kkal/kapita/hari atau tercapai sebesar 103%. Dari capaian persentase tersebut, maka angka konsumsi energi telah melebihi target dan nilai ini sudah cukup baik. Umbi-umbian merupakan kelompok pangan penyumbang energi (karbohidrat) selain beras dan terigu yang dianjurkan karena untuk mengurangi ketergantungan dari beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat konsumsi pangan sebesar 1978,23 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan pada tahun 2018, konsumsi pangan per kapita tahun 2019 meningkat sebesar 80,77 kkal/kapita/hari. Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung dalam peningkatan konsumsi pangan yaitu Promosi Gerakan Penganekaragaman Pangan, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Pangan.

Tingkat ketersediaan pangan diukur dengan tingkat ketersediaan energi. Pada tahun 2019, ketersediaan energi per kapita ditargetkan sebesar 2200 kkal/kapita/hari (sumber: WNPG) dan terealisasi sebesar 2236 kkal/kapita/hari atau tercapai sebesar 102%. Dari capaian persentase tersebut, maka tingkat ketersediaan energi melebihi target. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat ketersediaan pangan sebesar 2582 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan pada tahun 2018, tingkat ketersediaan pangan per kapita tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 346 kkal/kapita/hari. Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung dalam peningkatan ketersediaan pangan yaitu Pembinaan Kelembagaan Ketahanan Pangan, Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sempit untuk Tanaman Pangan, Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Tanaman Unggulan, dan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2019, prosentase keamanan pangan ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 118%. Prosentase keamanan pangan merupakan prosentase dari pembagian jumlah sampel pangan yang aman (bebas dari formalin, boraks dan pestisida) dengan jumlah sampel pangan yang dilakukan pengujian. Pangan yang dilakukan pengujian merupakan pangan segar maupun pangan olahan di Kota Pasuruan. Selain melalui pengujian, keamanan pangan juga dilakukan dengan pembinaan dan monitoring khususnya pada pedagang, kantin sekolah maupun produsen. Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung dalam peningkatan keamanan pangan yaitu Pengawasan Keamanan Produk Pangan, Penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin, Fasilitasi Pembinaan Forum Kelompok Ketahanan pangan, Monev Penanggulangan Kerawanan Pangan serta Analisis Data Skor Pola pangan Harapan. Sedangkan pada tahun 2018, prosentase keamanan pangan sebesar 100%. Jika dibandingkan pada tahun 2018, prosentase keamanan pangan tahun 2019 tidak mengalami perubahan. Tidak ditemukannya bahan berbahaya pada pangan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran para pedagang dan produsen pangan.

Capaian kinerja indikator urusan pangan dan program peningkatan ketahanan pangan, antara lain, merupakan kontribusi akumulasi dari 10 kegiatan, yang lebih terperinci disajikan pada Lampiran 4.2. Pada bagian berikut, akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan pangan pada tahun 2019. Analisis ini didasarkan, antara lain, dari kinerja kegiatan yang diduga memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan pada tahun 2019, yakni:

- 1. Lahan pertanian semakin menurun seiring berjalannya waktu karena pergeseran/alih fungsi lahan menjadi perumahan, industri dll sehingga produktifitas pangan menjadi menurun dan Produksi pangan di wilayah Kota Pasuruan sehingga tidak mencukupi permintaan konsumsi pangan masyarakat di wilayah Kota Pasuruan.
- 2. Konsumsi pangan masih di dominasi dan tergantung oleh kebutuhan pangan pokok yaitu Kelompok padi-padian (beras dan terigu). Dari hasil perhitungan kelompok padi-padian (beras dan terigu) menyumbang persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE) sebesar 61,1% melebihi standar sebesar 50%. Sedangkan kelompok umbian-umbian menyumbang sebesar 2,9% kurang dari standar sebesar 6%.

 Semakin banyak beredarnya produk pangan segar dan olahan yang masih mengandung bahan berbahaya / tidak aman seperti residu pestisida, formalin, dan boraks.

### C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka solusi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan urusan pangan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1. Perlu adanya pemanfaatan dan pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dengan tanaman sayuran, buah-buahan, dan ternak kecil serta ikan sebagai alternatif untuk menghasilkan produktifitas pangan seperti kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Karangkitri dan Hidroponik. Meningkatkan kemampuan penyediaan subtitusi bahan pangan pokok lokal kedua selain beras dan terigu seperti umbi-umbian.
- Peningkatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA melalui promosi, sosialisasi, dan pembinaan melalui tatap muka, media cetak, elektronik maupun event tertentu seperti lomba, pameran, serta kegiatan pada hari-hari besar yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat masyarakat, lembaga-lembaga, kelurahan, kecamatan, kota, dengan melibatkan birokrat, tokoh masyarakat, anak sekolah, ibu rumah tangga dan masyarakat luas. Selain itu, perlu peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pengembangan pangan lokal beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) non beras dan terigu sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi suatu produk.
- 3. Peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan dan pengujian keamanan produk pangan segar dan olahan secara kualitatif maupun kuantitatif secara periodik yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Peningkatan pembinaan keamanan pangan juga perlu dilakukan dengan melibatkan produsen, penyedia serta konsumen agar diperoleh pangan yang aman.

### D. Penghargaan

 Juara harapan II Tingkat Propinsi Jawa Timur pada SDN Bugul Lor II dalam rangka Lomba Kantin Sehat

### 2.4. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan, diarahkan untuk melegalkan penggunaan hak atas tanah yang akan digunakan, Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Pertanahan dilaksanakan dalam melegalkan penggunaan hak atas tanah yang akan digunakan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke V yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Indikator Persentase keterpenuhan tanah untuk fasilitas umum dengan target 55% terealisasi 26% dengan capaian 47,27%, belum tercapaianya target dikarenakan penetapan Lokasi untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara masih menunggu hasil revisi RTRW yang sampai dengan saat ini dalam tahap penyusunan dokumen kelengkapan administrasi untuk dikonsultasikan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan adalah meningkatkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.24**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisai	Capaian
1	Persentase keterpenuhan tanah untuk fasilitas umum	%	55	26	47,27%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

# B. Evaluasi indikator program

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan pertanahan, didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.31.636.400.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.985.452.891,00 atau sebesar 3,11%.

Program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan pada urusan Pertanahan, Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan untuk Melaksanakan fasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Kinerja program ini didukung antara lain Pelaksanaan kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menghasilkan patok batas tanah bagi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di 2 Kelurahan. Luas tanah Jalan Lingkar Utara sampai saat ini adalah seluas 41.253 m2 dari luasan 160.000 m2. Sehingga pencapaian pembebasan tanahnya adalah sebesar 25,78% dari luasan total yang direncanakan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

No	Program/Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program penataan penguasaan, pemilikan,	Rp.	31.636.400.000	985.452.891	3,11%
	penggunaan dan pemanfaatan tanah				
а	Indikator: Persentase penataan penguasaan,	%	29,83	26	87,16%
	pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk				
	kepentingan umum				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

#### C. Permasalahan dan Solusi :

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan pertanahan, antara lain:

- Sudah habis masa berlakunya Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/501/KPTS/013/2014 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. Sedangkan penyusunan penetapan lokasi yang baru masih menunggu perubahan trase pada Section 2.
- Belum didapatkannya persamaan persepsi antara Pemerintah Kota dengan warga di 3 Kelurahan dalam rangka mendapatkan kesepakatan trase pada Section-2 Jalan Lingkar Utara.

### C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Penetapan Lokasi atas tanah yang belum dibebaskan yang mendahului pembahasan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2. Perlunya dilaksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan persamaan persepsi antara Pemerintah Kota dengan warga di 3 Kelurahan dalam rangka mendapatkan kesepakatan trase pada Section-2 Jalan Lingkar Utara.

### 2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kenyamanan dan kebersihan lingkungan yang sehat dan indah, Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan kenyamanan dan kebersihan lingkungan yang sehat dan indah, Urusan Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke V yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Urusan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan pengendalian pencemaran, penyediaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah. Kelestarian lingkungan hidup akan berdampak terhadap kualitas kesehatan. Sedangkan kualitas kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada indeks pembangunan manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran indikator yaitu: Indeks Pencemaran Udara, Indeks Pencemaran Air dan Proporsi Ruang Terbuka hijau.
- 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran indikator yaitu: Proporsi Penanganan Sampah.

Indek Pencemaran Udara di Kota Pasuruan Tahun 2019 sebesar 75,66. Nilai ini menunjukkan kualitas udara di Kota Pasuruan masih cukup bagus berdasarkan *Standar Euorpean Union (EU) Directives* (100). Sedangkan indeks pencemaran air sebesar 81,00 berarti kualitas air sungai di Kota Pasuruan masih layak sesuai kelasnya, yaitu kelas III. Nilai ini jauh diatas target RPJMD, karena ada beberapa perubahan metode perhitungan dan perubahan jumlah titik lokasi yang dijadikan dasar perhitungan indeks pencemaran air. Oleh karena itu pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan perubahan dan penamaan indeks pencemaran air menjadi indeks kualitas air.

Indikator proporsi ruang terbuka hijau dengan target 23,72% terealisasi 24,63% dengan capaian indikator 103,84%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, lahan ruang terbuka hijau ditargetkan sebesar

30%. Untuk mencapai target sesuai ketentuan, akan dilaksanakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

Indikator proporsi penanganan sampah, dengan target 67,03%, terealisasi 28,23% dengan capaian 42,12%. Mengingat jumlah timbulan sampah mencapai 131,28 ton/hari dan jumlah reduksi sampah sebesar 37,06 ton/hari, maka keberhasilan capaian indikator ini sangat membutuhkan kontribusi dari unit pengelolaan sampah yang dinaungi seperti Bank Sampah dan TPS 3R serta juga peran masyarakat seperti Lapak dan TPS 3R yang dikelola oleh KSM.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.26**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

	1 3	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	75,03	75,66	100,84
2	Indeks Pencemaran Air	Indeks	45,27	81,00	178,93
3	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	Persen	23,72	24,63	103,84
4	Proporsi Penanganan Sampah	Persen	67,03	28,23	42,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, 2019

### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2019, dimana pelaksanaannya didukung oleh 6 program dan 35 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43.716.583.380,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.34.950.058.481,00 atau sebesar 79,9%.

Program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2019 dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut:

 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dengan jumlah anggaran Rp.24.847.211.600, dengan realisasi sebesar Rp.20.106.470.686,00 dengan capaian 80,92%. Capaian indikator persentase sampah yang tertangani mencapai 113,72%, Indikator sampah yang terolah di masyarakat mencapai 77,98% dan indikator sampah yang terolah di TPA mencapai 100%. Dukungan kegiatan untuk program ini antara lain kegiatan pengembangan sarana dan prasarana TPS, kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah, kegiatan pembangunan TPS 3R beserta pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal (DAK penugasan), kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPS, kegiatan pengelolaan sampah terpadu, kegiatan pengelolaan TPA, kegiatan pengangkutan sampah, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana TPA, kegiatan pengadaan alat angkut sampah dump Truck (DAK penugasan), kegiatan pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung (DAK penugasan). Keberhasilan program didukung bertambahnya jumlah sarana dan prasarana persarana pengangkut sampah seperti truk sampah, becak sampah dan tempat sampah terpilah yang ditempatkan diseluruh penjuru Kota Pasuruan, utamanya di tempat publik, seperti taman alun alun, taman kota dan jalan utama.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp.312.948.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.265.896.769,00 dengan capaian 84,97%. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA, kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih, kegiatan penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi, kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup, kegiatan penyusunan dokumen pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kegiatan pembuatan dan pemeliharaan sumur resapan dan biopori, kegiatan lomba Eco Office. Capaian Indikator persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi mencapai 97,88% dan persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yang dapat diakses masyarakat mencapai 85,71%. Keberhasilan program ini di dukung peningkatan jumlah pemasangan lobang biopori di lingkungan

- masyarakat, terlaksananya lomba lomba program kali bersih, dan lomba eco office yang diikuti oleh kantor kantor pemerintah.
- 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.781.367.230,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.631.255.276,00 dengan capaian 73,26%. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan penghijauan fasilitas umum dan permukiman masyarakat, kegiatan pengembangan prasarana dan sarana taman, kegiatan pemeliharaan pertamanan, kegiatan pembangunan dan peningkatan taman. Capaian indkator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) ini mencapai 100,53%. Keberhasilan kegiatan ini karena terpeliharanya taman taman yang ada di Kota Pasuruan. Selain itu adanya pembangunan taman seperti taman perumahan gadingrejo, peningkatan taman kota pasuruan, perbaikan playground alun alun, peningkatan taman agung melalui pemasangan atap jam agung.
- 4. Program Pengembangan Peduli Lingkungan Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.330.875.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.926.823.750,00 dengan capaian 69,64%. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan pelaksanaan hari lingkungan hidup (kemah hijau), kegiatan pembinaan Eco-Pesantren, kegiatan pembinaan kelurahan bersih dan lestari (BERSERI), kegiatan pembinaan masyarakat peduli lingkungan, kegiatan pembinaan penilaian program Adiwiyata. Hasil evaluasi kinerja program pengembangan peduli lingkungan ini mencapai 100,27%. Faktor keberhasilan program didukung oleh kinerja dari kader lingkungan kota pasuruan yang berada di 34 kelurahan sebanyak 100 orang. Serta adanya pengawasan dari tim 12 dalam setiap pelakasanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di kelurahan.

# 5. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.013.220.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.606.386.200,00 dengan capaian 59,85%. Kinerja program ini didukung kegiatan pengujian dan penyusunan laporan kualitas air, kegiatan pengawasan dan pembinaan pencemaran lingkungan hidup, kegiatan koordinasi pemberian rekomendasi UKL-UPL dan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (IPPLH), kegiatan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan, kegiatan penyusunan. laporan monitoring Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Pasuruan, kegiatan pemantauan kualitas lingkungan limbah udara dan cair. Hasil evaluasi kinerja program peningkatan kualitas lingkungan ini adalah indeks kualitas air permukaan mencapai 94,19% dan indeks kualitas udara ambien mencapai 87,98%. Keberhasilan program karena semakin meningkatnya pemahaman perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan dengan mengurus rekomendasi UKL UPL dan IPPLH untuk perusahaan kecil.

# 6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program ini dibiayai dari dana alokasi cukai, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan baik kualitas air permukaan maupun kualitas tanah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.430.960.550,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.413.225.800,00 dengan capaian 99,60%. Capaian indikator indeks kualitas air permukaan mencapai 94,19% dan indeks kualitas udara mencapai 87,98%. Keberhasilan program ini didukung antara lain kegiatan penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri (DBHCHT), serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah industri (DBHCHT).

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

	1 3	, ,		<u> </u>	
No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	24,847,211,600	20,106,470,686	80.92
	Persentase sampah yang tertangani	%	86.50	98,45	113,82

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase sampah yang terolah di masyarakat	%	36.20	28,23	77,98
	Persentase sampah yang terolah di TPA	%	100.00	100	100
2	Program Perlindungan dan Konservasi	Rp.	312,948,000	265,896,769	84.97
	Sumber Daya Alam	•			
	Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	57.09	55,88	97,88
	Persentase informasi SDA dan Lingkungan Hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	70.00	60	85,71
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	11,781,367,230	8,831,255,276	73.26
	Persentase luasan ruang terbuka hijau	%	23,72	24,63	100,53
4	Program Pengembangan Peduli Lingkungan	Rp.	1,330,875,500	926,823,750	69.64
	Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	%	14.83	14,87	100,27
5	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan	Rp.	1,013,220,500	606,386,200	59.85
	Indeks kualitas air permukaan	indeks	86	81	94,19
	Indeks kualitas udara	indeks	86	75,66	87,98
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp.	4,430,960,550	4,413,225,000	99.60
	Indeks kualitas air permukaan	indeks	86	81	94,19
	Indeks kualitas udara	indeks	86	75,66	87,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, 2019

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif, namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan:

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan lingkungan hidup, antara lain:

- Sarana-prasarana yang belum memadai dalam pelayanan terkait perijinan dan rekomendasi pengelolaan lingkungan, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pemerintah pusat.
- 2. Masih rendahnya peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan
- 3. Belum optimalnya tata kelola di sebagian taman.
- 4. Kurangnya sarana dalam pengelolaan pertamanan
- 5. Belum optimalnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan programprogram kepedulian lingkungan

### C.2. Solusi

Solusi yang diupayakan adalah:

- 1. Peningkatan sarana-prasarana yang memadai dalam pelayanan perijinan.
- 2. Peningkatan peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan.
- 3. Peningkatan tata kelola pemeliharaan taman secara intensif dan berkelanjutan.
- 4. Pemenuhan sarana pengelolaan pertamanan.
- 5. Peningkatan peran serta stakeholder dalam pengelolaan program peduli lingkungan.

### D. Penghargaan

Penghargaan yang diraih pada urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. ADIWIYATA

# Adiwiyata Tingkat Provinsi:

- 1. SDK Sang Timur
- 2. SDN Petahunan 1
- 3. SDN Gadingrejo 1
- 4. SMP Negeri 7

### Adiwiyata Tingkat Nasional:

- 1. SDN Tembokrejo 1
- 2. SMP Negeri 7
- 2. ADIPURA

Piala Adipura Periode 2018-2019

3. KELURAHAN BERSERI

Kelurahan BERSERI Tingkat Provinsi:

- 1. Kelurahan Tapaan (Kategori Pratama)
- 2. Kelurahan Wirogunan (Kategori Pratama)
- 4. NIRWASITA TANTRA (Penghargaan Dokumen IKPLHD)

# 2.6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan dokumen kependudukan yang maksimal, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pelayanan dokumen kependudukan yang maksimal, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, urusan tersebut didukung dengan misi ke VI Pemerintah Kota Pasuruan yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik". Dengan tujuan "Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik".

Dalam penyelenggaraan urusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Setiap perubahan data penduduk, warga diharapkan melaporkan dan mengurus dokumen kependudukan sesuai dengan kondisi terbaru, sehingga data kependudukan semakin valid.

Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Target indikator "Persentase penduduk ber-KTP" sebesar 87,20% dengan realisasi sebesar 97,54%. Capaian indikator tersebut melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 111,86%. Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik sebanyak 148.949 orang, dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 152.709 orang. Hal ini didukung dengan adanya layanan inovasi 3 in 1 (three in one), Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Sistem Jemput Bola, Pelayanan Mobile, Pelayanan Tiada Henti di hari sabtu dan minggu, serta Kado Perkawinan.

2. Target indikator "Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran" sebesar 98,94% dengan realisasi sebesar 99,88%. Realisasi capaian indikator tersebut melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,95%. Jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran sebanyak 2.446 anak, dari jumlah bayi berusia 0-1 tahun sebanyak 2.449 anak. Hal tersebut didukung adanya layanan Layanan Bangkit, Layanan Si Jempol, Layanan Sehat, Layanan Oke, Layanan OK, Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Braille, Salam Layanan 20 Menit, Gertak Bersama PKK, serta Getuk Tular.

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kepemilikan serta kebutuhan akan bukti dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja penyelengaraan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.28**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penduduk ber-KTP	%	87,20	97,54	111,86
2	Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	%	98,94	99,88	100,95

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program yang mendukung pelaksanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun anggaran 2019 didukung oleh 3 (tiga) program dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.2.102.849.250,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.704.198.204,00 atau sebesar 81,04 persen.

Evaluasi kinerja indikator program pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan terdiri dari 3 (tiga) indikator:
  - Target indikator "Persentase Penerbitan KK" sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%. Dari jumlah pengajuan dokumen Kartu Keluarga

sebanyak 17.620, dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga sebanyak 17.620. Hal ini didukung dengan kelengkapan berkas dokumen pengajuan, dokumen kependudukan tersedia, dan peralatan penerbitan dokumen yang dalam kondisi baik.

- Target indikator "Persentase penerbitan KTP elektronik" sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%. Dari jumlah pengajuan dokumen KTP elektronik sebanyak 24.284, dapat dilakukan penerbitan KTP elektronik sebanyak 24.284. Hal ini didukung dengan kelengkapan berkas dokumen pengajuan, dokumen kependudukan tersedia, dan peralatan penerbitan dokumen dalam kondisi baik.
- Target indikator "Persentase penerbitan KIA" sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%. Dari jumlah pengajuan dokumen KIA sebanyak 7.549, dapat dilakukan penerbitan KIA sebanyak 7.549. Hal ini didukung dengan kelengkapan berkas dokumen pengajuan, dokumen kependudukan tersedia, dan peralatan penerbitan dokumen dalam kondisi baik.
- 2. Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi. Target indikator "Persentase penduduk yang memiliki data tunggal" sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%. Dari jumlah penduduk sebanyak 211.008 orang, semua data penduduk tersebut sudah valid dan tunggal. Hal tersebut didukung dengan sinkronisasi data kependudukan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan Data Konsolidasi Bersih, serta beberapa instansi yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3. Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil terdiri dari 4 (empat) indikator:
  - Target indikator "Persentase penerbitan akta kelahiran anak (usia 0 sd 18 tahun)" sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 99,88%. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 62.517 anak, dari jumlah anak usia 0 sd

18 tahun sebanyak 62.592 anak. Realisasi kinerja pada indikator kurang memenuhi target, menurut data dari pengurus RT yang dihimpun disebabkan yang bersangkutan tidak ada di tempat karena bekerja di luar negeri sebagai TKW atau TKI, berada di luar daerah, pondok pesantren, bekerja, berdomisili di luar daerah tapi belum mengurus pindah secara resmi, dan tidak diketahui keberadaannya.

- Target indikator "Persentase penerbitan akta kematian)" sebesar 94%, dengan realisasi sebesar 95,36%. Jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 9.729 akta, dari jumlah kematian sebanyak 10.202 orang. Hal ini didukung dengan inovasi layanan Tamat Terbenam Bumi (Akta Kematian Terbit Sebelum Jenazah/Mayat Dikebumikan), AKI (Akta Kematian Keliling), OKE (Online di Kelurahan).
- Target indikator "Persentase penerbitan akta perkawinan)" sebesar 95%, dengan realisasi sebesar 96,16%. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 94.668 akta, dari jumlah perkawinan sebanyak 98.445 orang. Hal ini didukung dengan adanya update data perkawinan pada Kartu Keluarga yang terverifikasi dan sinkronisasi data perkawinan.
- Target indikator "Persentase penerbitan akta perceraian)" sebesar 80%, dengan realisasi sebesar 82,86%. Jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 3.625 akta, dari jumlah perceraian sebanyak 4.375 orang. Hal ini didukung dengan adanya update data perceraian pada Kartu Keluarga yang terverifikasi dan sinkronisasi data perceraian.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Administrasi	Rp.	837.064.000	714.913.079	85,41
	Kependudukan				
	Outcome :				
	Persentase penerbitan KK	%	100	100	100
	Persentase penerbitan KTP elektronik	%	100	100	100

No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penerbitan KIA	%	100	100	100
2	Program Peningkatan Pengelolaan	Rp.	398.435.250	313.778.250	78,75
	Data dan Informasi				
	Outcome :				
	Persentase penduduk yang memiliki data tunggal	%	100	100	100
3	Program Peningkatan Administrasi	Rp.	867.350.000	771.141.262	88,91
	Pencatatan Sipil	•			·
	Outcome :				
	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	100	99,88	99,88
	anak (usia 0 sd 18 tahun)				
	Persentase penerbitan akta kematian	%	94	95,36	101,45
	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	95	96,16	101,22
	Persentase penerbitan akta perceraian	%	80	82,86	103,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

- Masih ditemukannya data penduduk yang tidak sama antara akta kelahiran, surat nikah dan ijasah, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama dan kesulitan dalam menentukan nama yang benar dalam proses update data kartu keluarga.
- 2. Sesuai dengan Perpres nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan pengurusan dokumen pindah tanpa dipersyaratkan pengantar RT/RW maupun Kelurahan dan Kecamatan, hal tersebut menyebabkan ketidaksinkronan data penduduk di level RT/RW maupun Kelurahan dan Kecamatan.
- 3. Perubahan regulasi pencatatan sipil yang sangat cepat mengakibatkan kurangnya *update* pemahaman tentang pencatatan sipil akta kelahiran dan kematian pada petugas registrasi di kelurahan, sehingga mereka masih

menggunakan aturan lama dalam memproses setiap permohonan akta kelahiran dan kematian yang berakibat langsung pada ketepatan dan kecepatan proses penerbitan akta kelahiran dan kematian.

#### C.2. Solusi

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- Memberikan arahan kepada penduduk untuk melakukan perbaikan atas ketidaksamaan nama pada dokumen kependudukannya dengan merubah nama melalui sidang di pengadilan sebagi dasar atas penentuan nama yang benar untuk digunakan dalam data dokumen kependudukannya. Sehingga semua data dokumen yang dimilikinya akan sama dan valid
- 2) Mengupayakan pembangunan aplikasi mobile sebagai perangkat perantara antara pengguna data administrasi kependudukan (pengurus RT/RW, Kelurahan) dengan gudang data kependudukan (*data warehouse*).
- Perlu mengadakan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis untuk petugas registrasi di kelurahan.

### D. Penghargaan yang Diterima

 Piagam Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2019 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

### 2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan untuk Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh 4 (empat) kecamatan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Urusan tersebut didukung dengan misi ke VI Pemerintah Kota Pasuruan yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik".

Dalam upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan kelurahan, pemangku kepantingan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan melalui bentuk usulan. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program, koordinasi dalam pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan kelurahan. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa, serta melalui partisipasi kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakat yang ada dikelurahan. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah kelurahan dan kota dalam menjalankan roda pembangunan. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah LKM/BKM yang dibina	Unit	34	34	100

Sumber: 4 Kecamatan di Kota Pasuruan, 2019

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program yang mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh 4 Kecamatan serta 34 Kelurahan di Kota Pasuruan melalui.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Gadingrejo. didukung oleh pelaksanaan 41 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.2.887.263.000,00. terealisasi sebesar Rp.417.694.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 14,47%, diukur dengan indikator presentase usulan musrenbangcam yang dibahas dalam usulan PD dengan target 71% dan terealisasi sebesar 24,75% dengan capaian 34,86%, indikator kinerja tidak mencapai target dikarenakan banyaknya usulan yang tidak sesuai dengan tupoksi maupun kewenangan PD.
- 2. Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo didukung oleh pelaksanaan 15 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.101.398.000,00. terealisasi sebesar Rp.711.050.500,00 atau tingkat serapannya mencapai 64,56%, diukur dengan indikator presentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan target 85% dan terealisasi sebesar 95,23% dengan capaian 112,04%. Pencapaian indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan karena partisipasi aktif lembaga masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan dan kecamatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Panggungrejo. didukung oleh pelaksanaan 65 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.4.414.161.250,00. terealisasi sebesar Rp.2.039.177.250,00 atau tingkat serapannya mencapai 46,20 %, diukur dengan indikator presentase usulan musrenbangcam yang dibahas dalam usulan PD dengan target 72,9% dan terealisasi sebesar 72,81% dengan capaian 99,88%.
- 2. Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo didukung oleh pelaksanaan 32 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.2.162.181.550,00. terealisasi sebesar Rp.1.464.155.700,00 atau tingkat serapannya mencapai 67,72%, diukur dengan indikator presentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan target 90 % dan terealisasi sebesar 90 % dengan capaian 100%. Pencapaian indikator kinerja didukung dengan partisipasi aktif lembaga masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan dan kecamatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul kidul, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bugul Kidul. didukung oleh pelaksanaan 33 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.2.313.168.000,00. terealisasi sebesar Rp.414.934.018,00 atau tingkat serapannya mencapai 17,94 %, diukur dengan indikator presentase usulan musrenbangcam yang dibahas dalam usulan PD dengan target 75% dan terealisasi sebesar 83,33% dengan capaian 111,11%.

2. Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul didukung oleh pelaksanaan 10 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.809.560.140,00. terealisasi sebesar Rp.577.898.375,00 atau tingkat serapannya mencapai 71,38%, diukur dengan indikator presentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan target 70% dan terealisasi sebesar 64,38 % dengan capaian 91,97%. Pencapaian indikator kinerja didukung dengan partisipasi aktif lembaga masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan dan kecamatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo, adalah sebagai berikut:

Pencapaian penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat Umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo didukung dengan 2 program, adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Purworejo. didukung oleh pelaksanaan 36 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.2.441.541.000,00. terealisasi sebesar Rp.937.005.200,00 atau tingkat serapannya mencapai 38,38%, diukur dengan indikator presentase usulan musrenbangcam yang dibahas dalam usulan PD dengan target 72,90% dan terealisasi sebesar 50% dengan capaian 36,28%, indikator kinerja tidak mencapai target dikarenakan banyaknya usulan yang tidak sesuai dengan tupoksi maupun kewenangan PD.
- 2. Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo didukung oleh pelaksanaan 16 Kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.277.497.000,00. terealisasi sebesar Rp.862.094.500,00 atau tingkat serapannya mencapai 67,48%, diukur dengan indikator presentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan target 100% dan terealisasi sebesar 89,38 % dengan capaian 89,38%. Pencapaian indikator

kinerja didukung dengan partisipasi aktif lembaga masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan dan kecamatan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Na	Dragger / Outcome Setuan Torget Bealings Canaign						
No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1	Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Gadingrejo						
	Outcome : Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	Persen	71	24,75	34,86		
2	Anggaran Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo	Rp	2.887.263.000	417.694.000	14,47		
	Outcome : Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	Persen	85	95,23	112,04		
	Anggaran	Rp	1.101.398.000	711.050.500	64,56		
1	Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Panggungrejo						
	Outcome : Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	Persen	72,9	72,81	99,88		
2	Anggaran Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	Rp.	4.414.161.250	2.039.177.250	46,20		
	Outcome : Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	Persen	90	90	100		
	Anggaran	Rp	2.162.181.550	1.464.155.700	67,72		
1	Kecamatan Bugul Kidul Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul						
	Outcome : Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	Persen	75	83.33	100		
	Anggaran	Rp.	849.825.500	789.500.450	92,9		

No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul				
	Outcome : Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	Persen	70	68	97,14
	Anggaran	Rp	809.560.140	232.631.425	48,00
	Kecamatan Purworejo				
I	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Purworejo				
	Outcome : Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD		72,90	50	68,59
II	Anggaran Peningkatan Partisipasi Kelembagaan		2.441.541.000	937.005.200	38,38
	Masyarakat dan Kelurahan di				
	Kecamatan Purworejo Outcome : Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif		100	89,38	89,38
	Anggaran		1.277.497.000	862.094.500	67,48

Sumber: Kecamatan di Kota Pasuruan, 2019.

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

### C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2019, yakni:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan e-planning di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terjaring dalam musrenbang tingkat kelurahan ataupun kecamatan, serta masih minimnya pemahaman unsur kecamatan dan kelurahan terahadap tugas pokok dan kewenangan PD.
- 2) Belum optimalnya lembaga masyarakat yang ada yang disebabkan kurang kesadaran masyarakat terhadap kelembagaan.

#### C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan e-planning dalam pengusulan dan penjaringan usulan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman bagi unsur kecamatan dan kelurahan terkait tugas dan kewenangan PD.
- 2) Peningkatan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam kelembagaan.

# 2.9. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, diarahkan untuk menekan angka kelahiran dan jumlah penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan keluarga berencana melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

#### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam rangka upaya untuk menekan angka kelahiran dan jumlah penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi II yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan misi IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak.

TFR ( *Total Fertility rate*) / Angka Kelahiran Total adalah jumlah rata-rata anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya yaitu usia 15-49 tahun. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Pada Tahun 2019 TFR ditargetkan dengan indeks 2,06 dan terealisasi 2,12 atau tercapai sebesar 97,09%.

Dengan TFR 2,12 menunjukkan bahwa rata-rata wanita di Kota Pasuruan melahirkan 2 anak selama masa reproduksinya.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) merupakan salah satu sasaran strategis BKKBN dalam memenuhi program KB. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) KB merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menginginkan anak lagi dan menginginkan anak dengan jarak 2 tahun atau lebih tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kelompok ini merupakan sasaran yang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan program KB. Pada tahun 2019 persentase *unmetneed* 9,58% atau mencapai 106,99% dari target yang ditetapkan sebesar 10,30%. Hal ini disebabkan karena pencapaian peserta KB aktif mengalami kenaikan sehingga *Unmetneed* mengalami penurunan. Berkuranganya *Unmetneed* juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB.

Persentase capaian akseptor KB sebesar 116,68% dari target 13,31% atau terealisasi sebesar 15,53%. Hal ini dihitung dari jumlah peserta KB baru terhadap PUS ( Pasangan Usia Subur ). Penambahan akseptor KB baru telah terakomodasi dengan baik melalui sejumlah pelayanan Safari KB yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB selama tahun 2019.

Pada tahun 2019, persentase peserta KB aktif ditargetkan 80,34% dan terealisasi sebanyak 77,79% atau tercapai 96,83%. Dibandingkan dengan pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 77,27% maka pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2019 mengalami kenaikan.

Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan masyarakat sangat tergantung kepada kehidupan keluarga yang menjadi bagian inti dari masyarakat itu, sehingga keluarga memiliki nilai strategis

dalam pembangunan nasional serta menjadi tumpuan dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Tahun 2019, jumlah keluarga di Kota Pasuruan adalah sebesar 53.600 keluarga. Dari 53.600 keluarga, sejumlah 31.097 keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pasuruan sebesar 58,02% atau mencapai 19,08% dari target sebesar 32,07%. Pencapaian tahun 2019 untuk persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masuk kategori Kurang dan perlu upaya bersama dengan mitra kerja dan lintas sektor untuk menurunkan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.32**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,06	2,12	97,09
2	Unmetneed	%	10,30	9,58	106,99
3	Persentase akseptor KB	%	13,31	15,53	116,68
4	Persentase peserta KB aktif	%	80,34	77,79	96,83
5	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	32,07	58,02	19,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2019

### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggara urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung oleh pelaksanaan 4 program yaitu (1) Program Keluarga Berencana, (2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, (3) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargadan (4) Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana didukung oleh pelaksanaan 12 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.805.342.240,00. Sampai dengan akhir tahun 2019 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.560.533.890,00 tingkat serapannya mencapai 86.44%.

Pelaksanaan program keluarga berencana diukur dengan indikator jumlah peserta KB baru, persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana, dan persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana. Pada tahun 2019, jumlah peserta KB baru ditargetkan sebesar 4.480 peserta KB dan terealisasi sebesar 4.991 peserta KB atau tercapai 111,41%. Capaian indikator ini didukung oleh mitra kerja terkait, antara lain, fasilitas kesehatan KB, baik pemerintah maupun swasta, dokter/bidan praktek mandiri, dan jejaring faskes lainnya, yang terjalin baik.

Kegiatan Penyediaan sarana prasarana klinik pelayanan KB (DAK) akan meningkatkan persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan KB di Faskes. Melalui penyediaan sarana prasarana klinik pelayanan KB (DAK) di tahun 2019, persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana bertambah 6,27% menjadi 43,48%.

Selain itu, untuk meningkatkan jumlah kesertaan masyarakat ber-KB, terutama pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), maka diberikan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan menggunakan Mobil Pelayanan KB berupa kendaraan bus yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Jumlah orang yang mendapat pelayanan kontrasepsi KB metode MOP, IUD dan Implant di mobil pelayanan pada tahun 2018 mencapai 369 orang. Pada tahun 2019, jumlah orang yang mendapat Pelayanan

Pemasangan Kontrasepsi KB metode MOP, IUD dan Implant di Mobil pelayanan KB mencapai 343 orang atau 99,13% dari target 346 orang.

Pelaksanaan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri diukur dengan indikator jumlah peserta kader PPKBK dan Sub PPBK yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat, dan persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif. Jumlah kader PPKBK Kota Pasuruan sebanyak 34 orang dan jumlah kader Sub PPKBK Kota Pasuruan sebanyak 295 orang. Total jumlah kader PPKBK dan Sub PPKBK Kota Pasuruan sebesar 329 orang semuanya aktif melakukan pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang terdaftar tahun 2019 sebanyak 31 kelompok, namun pada akhir tahun 2019 yang masih aktif tinggal 28 kelompok (90,32%). Dari target 75,27% untuk persentase persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif terealisasi 90,32% atau tercapai 119,99%.

Pelaksanaan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga diukur dengan indikator jumlah kelompok tribina yang aktif, jumlah UPPKS yang aktif, serta persentase mitra program yang aktif.

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga maka dibentuklah kelompok keluarga yang terdiri dari Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). BKB, BKR dan BKL selanjutnya disebut sebagai Kelompok Tribina.

Jumlah kelompok Tribina yang terdaftar tahun 2019 sebanyak 147 kelompok. Target jumlah kelompok Tribina yang aktif tahun 2019 adalah sebesar 116 kelompok, terealisasi sebesar 107 kelompok sehingga tercapai 92,24%.

Jumlah kelompok UPPKS yang terdaftar tahun 2019 sebanyak 69 kelompok. Target jumlah kelompok UPPKS yang aktif tahun 2019 adalah sebesar 69 kelompok, terealisasi sebesar 69 kelompok sehingga tercapai 100%.

Mitra Program peningkatan ketahanan keluarga yaitu terdiri dari Kelompok Juang Kencana, Saka Kencana (Satuan Karya Keluarga Berencana), IPEKB (Ikatan Penyuluh KB), Pusyan Gatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), AKU (Assosiasi Kelompok UPPKS) dan Forum Tribina. Namun mitra program yang aktif tahun 2019 hanya IPEKB, Pusyan Gatra dan AKU. Sehingga dari target persentase mitra program yang aktif sebesar 80% terealisasi sebesar 50%, tercapai 62,5%.

Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Jumlah kelurahan berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional dengan target 1 kelurahan tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tidak mengadakan lomba KB/KS seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga pemenang lomba KB/KS yang ada di Kelurahan tidak dapat mengikuti lomba di tingkat propinsi.

Capaian kinerja indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, serta Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan, antara lain merupakan kontribusi akumulasi dari 22 kegiatan, yang lebih terperinci disajikan pada lampiran.

Pada bagian berikut, akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2019. Analisis didasarkan, antara lain, dari kinerja kegiatan yang diduga memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat pada program keluarga berencana.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Keluarga Berencana				
	Outcome :				
	Jumlah Peserta KB Baru	Peserta KB	4.480	4.991	111.41
	Persentase kader yang mendapatkan sarana dan	%	20,06	18,24	90,93
	prasarana Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang	%	20,93	43,48	207,74
	mendapatkan sarana dan prasarana	70	20,93	43,40	201,14
	Anggaran :	Rp.Ribu	1.805.342	1.560.534	86.44
2	Program Pembinaan peran serta masyaarakat	'			
	dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				
	Outcome :				
	Jumlah peserta kader PPKBK dan Sub PPKBK	%	100	100	100
	yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR				
	yang mandiri kepada masyarakat				
	Jumlah persentase Pusat Informasi dan	%	75,27	90.32	119.99
	Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	D D"	000 705	070.040	07.44
2	Anggaran :	RpRibu	388.795	378.849	97.44
3	Program Penyiapan Tenaga Pendamping				
	Kelompok Bina Keluarga Outcome :				
	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	Kelompok	116	107	92.24
	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	Kelompok	69	69	100
	Persentase mitra program yang aktif	%	80	50	62.5
	Anggaran :	Rp.Ribu	279.200	252.800	90.54
4	Program Peningkatan Partisipasi	140.1100	2,0.200	202.000	00.01
	Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan				
	Outcome :				
	Jumlah kelurahan berprestasi di tingkat	Kelurahan	1	0	0
	Provinsi/Nasional				
	Anggaran :	RpRibu	1.070.213	817.801	76.41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2019

# C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada tahun 2019, yakni :

- Belum akuratnya data yang disampaikan PLKB sebagai sasaran pelaksanaan program KKBPK.
- Sempitnya waktu pendataan sehingga cakupan data yang diperoleh belum valid dan optimal.
- 3. Belum optimalnya kemampuan sebagian SDM PPKBK / Sub PPKBK di masing-masing kelurahan dalam pelaksanaan program KKBPK.
- 4. Kurang optimalnya pemutakhiran data kependudukan (PK 2015) karena banyaknya data PK 2015 yang belum terentry secara online ke dalam aplikasi.
- 5. Belum optimalnya pemahaman/kesadaran masyarakat dalam berKB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
- 6. Rendahnya kesadaran masyarakat terutama keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk terlibat dalam kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Tribina, UPPKS, PIK Remaja).

#### C.2. Solusi:

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- Perlunya update data dari PLKB guna peningkatan capaian sasaran kinerja program KKBPK.
- 2. Perlu adanya intensitas komunikasi dengan pemerintah guna koordinasi terkait rentang waktu pendataan.
- 3. Pembinaan dan pelatihan secara intensif untuk PPKBK dan Sub PPKBK agar memiliki kompetensi yang cukup untuk mendukung program KKBPK.
- 4. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pemutakhiran data.
- 5. Sosialisasi ke masyarakat secara langsung maupun bekerja sama dengan tokoh masyarakat tentang manfaat berKB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
- 6. Perlu peningkatan peran PKB/PLKB dalam mendorong dan mengajak Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk terlibat aktif dalam kelompok atau anggota kegiatan ketahanan keluarga (Tribina, UPPKS, PIK Remaja).

## D. Penghargaan

1. Juara I Lomba Pengelolaan Kampung KB Percontohan Kategori Perkotaan Tingkat Provinsi Tahun 2019 oleh kampung kb percontohan Panggungrejo.

# 2.10. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan, diarahkan untuk peningkatan pelayanan perhubungan, yang pada akhirnya akan menciptakan keamanan, kenyamanan dalam penggunaan prasarana dan sarana transportasi serta lancarnya jalan roda perekonomian, urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan perhubungan, yang pada akhirnya akan menciptakan keamanan, kenyamanan dalam penggunaan prasarana dan sarana transportasi serta lancarnya jalan roda perekonomian, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi V, yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan selaku *leading sector* dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan di darat maupun di laut selalu berkoordinasi dengan instansi terkait maupun organisasi yang bergerak di Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan guna terwujudnya tujuan dari Urusan Perhubungan yaitu meningkatnya lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, dan terkendali dengan indikator tujuan Rencana Strategis yaitu Persentase Jalan dan Sarana Pendukungnya dalam Kondisi Mantap. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.34
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah	Per 1000	10,54	9,55	90,61
	Kendaraan Bermotor	Kendaraan			

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja pada Urusan Perhubungan di wilayah Kota Pasuruan ditetapkan yaitu sebesar 10,54. Dengan total panjang jalan Kota Pasuruan tahun 2019 adalah 95.089 km yang terbagi atas panjang jalan nasional sepanjang 14.756 km, panjang jalan provinsi sepanjang 1.400 km, dan panjang jalan kota sepanjang 78.933 km lalu kemudian total panjang jalan tersebut dibagi dengan jumlah kendaraan bermotor, maka didapatkan realisasi yang dilaksanakan adalah sebesar 9,55 atas target indikator, sehingga capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan terhadap target indikator adalah sebesar 90,61%

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program dan kegiatan guna mendukung pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2019 adalah 2 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.061.974.400,00 dan jumlah serapan anggaran adalah sebesar Rp20.048.237.685,00 atau sebesar 83,32 persen pada tahun 2019.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi diukur dengan indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Pada tahun 2019 ditargetkan capaian indikator kinerja sebesar 60% dengan realisasi sebesar 32,33%. Untuk mencapai target penurunan hingga 60% pada tahun 2019, Dinas Perhubungan mengoptimalkan pelaksanaan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Program dimaksud diperuntukkan antara lain untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan berupa rambu rambu, marka jalan, zebra cross, marka parkir, trafic light.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan indikator Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum, pada tahun 2019 di targetkan sebesar 67% dengan capaian realisasi sebesar 54,95%. Capaian atas target dari indikator di atas didukung oleh pengawasan dan pembinaan yang secara rutin dilakukan, serta adanya jalinan komunikasi yang baik dan intensif dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan penyelenggaraan angkutan umum.

Kegiatan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan. Jumlah angka kecelakaan pada tahun 2017 diketahui mencapai 708 kasus, adanya Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat, berdampak pada penurunan angka kecelakaan. Pada tahun 2018 angka kecelakaan sebesar 472 kasus atau terjadi penurunan angka kecelakaan sebesar 33,33%. Pada tahun 2019 jumlah angka kecelakaan yang terjadi sebanyak 319 kasus atau terjadi penurunan sebanyak 32,42%.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Dinas Perhubungan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara *drive thru*, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor, serta untuk mencegah adanya calo atas pengurusan KIR pada UPT Pengujian Kendaraan bermotor.

Kelancaran dan keselamatan bagi pengguna transportasi jalan merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Guna memacu pengemudi angkutan umum agar lebih tertib dan disiplin, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan melaksanakan ajang Pemilihan Duta Transportasi untuk mengikuti pemilihan pengemudi teladan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi tentang peraturan perundangan mengenai angkutan umum di jalan dan keselamatan berkendara.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.35

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perhubungan

	1 7				
No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengendali dan Pengamanan Lalu Lintas				
	Outcome : Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	60	32,42	54,03
	Anggaran	Rp.	23.759.043.900	19.879.686.285,00	83,67
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Outcome : Persentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	67	54,95	82,09
	Anggaran	Rp.	302.930.500	168.551.400,00	55,64

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Meskipun Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut pada tahun 2019, antara lain:

- Diperlukan penyempurnaan pada pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam menunjang drive thru.
- 2. Jumlah angkutan umum kota aktif yang cenderung menurun.
- 3. Masih kurangnya sarana penunjang keselamatan pelayaran angkutan laut.
- 4. Masih belum ada regulasi untuk mengatur moda transportasi daring yang sewaktu-waktu dapat berpotensi menimbulkan konflik.

### C.2. Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka langkah-langkah solusi yang dilakukan adalah :

 Melakukan optimalisasi pada sistem drive thru pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Melakukan penyesuaian rute agar pengemudi atau pemilik angkutan umum kota dapat mendapatkan keuntungan lebih sehingga menarik minat kembali para pengemudi maupun pemilik angkutan umum kota untuk menjalankan armadanya.
- 3. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan keselamatan bagi angkutan laut sehingga pemenuhan kebutuhan serta pemeliharaan akan fasilitas keselamatan dapat tercukupi dan tepat sasaran.
- 4. Menyusun perda yang mengatur tentang moda transportasi *online*, sehingga tidak menimbulkan konflik yang sering terjadi antara penyedia angkutan konvensional dengan penyedia angkutan *online*.

### 2.11. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika, diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik dan meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, urusan Komunikasi Dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

#### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke 6 yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik"—, Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa dan Program Pengembangan Data dan Aplikasi E – Government.

Capaian target indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ada dua yang menunjang system pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasiskan TI (Teknologi Informasi) yang meliputi :

Jumlah SKPD yang mengaplikasikan Teknologi Informasi yang mempunyai target 39 SKPD terrealisasi 41 SKPD di tahun 2019 sehingga untuk capaian dari tahun sebelumnya sebesar 105,13%. Jumlah SKPD yang mengaplikasikan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan berjumlah 41 SKPD. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah website SKPD yaitu 41 website sehingga ada kenaikan capaian prosentase sebesar 5,13% atau tercapai melampaui target sebesar 105,13% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD telah mengaplikasikan teknologi informasi sejumlah 41 SKPD. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.36

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Informatika

	,	, ,,			
No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah SKPD yang mengaplikasikan	SKPD	39	41	105,13
	Teknologi Informasi				

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Untuk urusan mendukung komunikasi dan informatika ada dua program diantaranya program pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa dan program pengembangan data dan aplikasi e-goverment dengan total jumlah anggaran sebesar Rp15.904.371.475,00 dan terealisasi sebesar Rp14.192.785.265,00 dari seluruh total anggaran atau sebesar 89,43%.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa terdiri 6 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.4.146.721.275,00 terealisasi sebesar Rp.3.725.346.253,00 atau tingkat serapannya mencapai 89,84%.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa berisi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait hasil pembangunan dan potensi produk unggulan Pemerintah Kota Pasuruan, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pemberdayaan TIK untuk masyarakat, pertunjukan rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai publik

relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat informasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Program pengembangan informasi, komunikasi dan media massa terdiri dari beberapa indikator antara lain :

- Pertumbuhan website PD dengan konten berkualitas dengan target 50% teralisasi 50% dengan capaian sebesar 100% ditunjang jumlah pemberitaan informasi hasil pembangunan dan potensi produk unggulan Pemerintah Kota Pasuruan sebesar 1.217 pemberitaan baik media cetak, TV, radio, online, website, dan sebanyak 10 PD yang aktif mengisi website dari target 20 PD.
- 2. Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu dengan target 60% terealisasi 80% pada tahun 2019 diperoleh capaian sebesar 133,33% dengan ditunjang Penyebarluasan informasi kepada masyarakat, antara lain: Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan, Penerbitan Majalah Pasuruan Bangkit, Publikasi Melalui Media Massa dan siaran Langsung Radio Ramapati. Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu memberikan hasil capaian sebesar 100%, capaian tersebut melebihi target indikator dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan media antara lain media online, media elektronik, media cetak (Bhirawa, Radar Bromo, Surabaya Pagi, Harian Bangsa, Duta Bangsa), radio (Radio Warna, Radio Ramapati), media online (Times Indonesia, Warta Bromo, Kabarpas, Bangsa Online), TV (JTV, TV 9, SBO).
- 3. Pertumbuhan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif yang memiliki blog dengan target 47,1 terealiasi 72,7 pada tahun 2019 diperoleh capaian sebesar 154,35% dengan ditunjang komitmen dan kesadaran masing-masing kelurahan akan pentingnya KIM.

Program pengembangan data dan aplikasi e-goverment terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp11.757.650.200,00 terealisasi sebesar Rp.10.467.439.012,00 atau tingkat serapannya mencapai 89,03%.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Pasuruan pada tahun 2019 melaksanakan Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-government dengan beberapa indikator: peningkatan aplikasi yang dikelola, pengaduan masyarakat online ditindaklanjuti, pengaduan kerusakan jaringan internet dan server ditindaklanjuti sesuai SOP, dan Layanan Sistem Pemerintahan Elektronik/SPBE. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Adapun dasar hukum SPBE adalah Perpres 95 Tahun 2011 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang evaluasinya mengacu pada Permenpan 5 Tahun 2018. Hasil dari program tersebut adalah Nilai Indeks SPBE, indeks tersebut menggambarkan tingkat kematangan (Maturity Level) dari pelaksanaan SPBE. Tahun 2019, Pemerintah Kota Pasuruan memiliki target Indeks Maturitas SPBE sebesar 1,5 point dan dengan capaian realisasi sebesar 2,38 point.

Program pengembangan data dan aplikasi e-goverment terdiri dari beberapa indikator antara lain

- 1. Persentase peningkatan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan target 37,5% teralisasi 40% dengan capaian sebesar 106,66% didukung dari Tingkat keberhasilan yang telah dicapai sebagai berikut: 18 Aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pasuruan dan 42 website yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pasuruan.
- Persentase pengaduan masyarakat online yang ditindaklanjuti dengan target 100% teralisasi 100% dengan capaian sebesar 100% didukung dari pengaduan melalui media online seperti twitter, facebook dan aplikasi e-lapor (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat).

- 3. Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP dengan target 100% teralisasi 100% dengan capaian sebesar 100% dengan cakupan layanan pada 68 laporan gangguan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP, sehingga pengaduan gangguan jaringan internet dan server pada 41 OPD, 8 Puskesmas dan 34 Kelurahan dapat tertangani dengan baik dan dalam Respon time yang cukup singkat.
- 4. Indeks tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 1,82 point teralisasi 2,14 point dengan capaian sebesar 118,9% didukung Aspek Rencana Induk pada Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan SPBE.
- 5. Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,15 point teralisasi 2,64 point dengan capaian sebesar 82,5% didukung pembentukan tim pengarah SPBE, kebijakan layanan naskah dinas dilingkungan
- 6. pemerintah Kota Pasuruan, terbentuknya tim evaluator pelaksanaan SPBE, Master Plan Teknologi Informasi, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik pemerintah Kota Pasuruan dan sudah terlaksananya pembangunan Media Command Centre (MCC) sebagai salah satu penunjang tercapainya indikator Integrasi Data dan Pusat Data.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.37
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Program
Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Informasi,				
	Komunikasi dan Media Massa				
	Outcome:				
	Pertumbuhan website PD dengan konten	persen	50	50	100
	berkualitas				
	Persentase informasi pembangunan yang	persen	60	80	133,33
	dipublikasikan melalui media massa tepat waktu				
	Pertumbuhan KIM yang aktif yang memiliki blog	persen	47,1	72,7	154,35
	Anggaran :		4.146.721.275	3.725.346.253	
					89,84

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-				
	government				
	Outcome :				
	Persentase peningkatan aplikasi yang dikelola oleh	Persen	37.50	40	106,66
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.				
	Persentase pengaduan masyarakat online yang	Persen	100	100	100
	ditindaklanjuti.				
	Perosentase pengaduan kerusakan jaringan	Persen	100	100	100
	internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai				
	SOP.				
	Indeks tata kelola Sisten Pemerintahan Berbasis	Point	1,8	2,14	118,9
	Elektronik (SPBE)				
	Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis	Point	3,2	2,64	82,5
	Elektronik (SPBE)				
	Anggaran :	Rp.	11.757.650.200	10.467.439.012	89,03

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019

## C. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Beberapa hambatan yang ditemuai dalam pencapaian kinerja urusan antara lain:

- Kurang optimalnya kegiatan publikasi dan informasi program kegiatan tar setiap
   Perangkat Daerah melalui website.
- Belum terintegrasi beberapa aplikasi yang dimiliki masing-masing PD (Perangkat Daerah) dalam mendukung satu data.

## C.2. Solusi

Adapun Solusi yang diharapkan antara lain:

- 1. Meningkatkan kinerja pengelola website di masing-masing perangkat daerah;
- 2. Meningkatkan implementasi komitmen PD dalam pengintegrasian aplikasi.

# 2.12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja koperasi dan usaha kecil mikro, urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Mikro melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja koperasi dan usaha kecil mikro, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke-IV, yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak. Capaian Presentase Koperasi Aktif di Tahun 2019 sebesar 34,64%. Nilai tersebut didapat dari Jumlah Koperasi aktif Tahun 2019 sebanyak 115 dari total Koperasi 332. Target 2019 belum tercapai karena ada koperasi yang tidak melaksanakan RAT lebih dari 3 tahun, adanya koperasi yang pindah badan hukumnya kewilayah Kabupaten.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memfasilitasi pendirian koperasi dan pembinaan UKM, namun belum ada kesadaran masyarakat/kelompok untuk mendirikan koperasi. Pertumbuhan Koperasi baru sejumlah 1 koperasi di tahun 2019.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro adalah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator kinerja, Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.38**Capain Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Aktif	%	36,47	34,64	94,98
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	7,94	5,19	65,37

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun anggaran 2019, didukung oleh 2 program dan 16 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.036.575.360,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.756.188.968,00, atau serapannya mencapai 57,83%.

Pada bagian berikut, disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2019, yang mendukung Indikator Kinerja Utama. Analisis ini didasarkan antara lain, dari kinerja kegiatan yang memiliki kontribusi menonjol, ataupun kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada program Pemberdayaan Koperasi dan Program Pengembangan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.39**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program/Indikator/anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Pemberdayaan Koperasi				
	Outcome:				
	Presentase Pertumbuhan Koperasi aktif	%	4,1	0,88	21,46
	Anggaran	Rp.ribu	1,007,545	949,722	94,26
II	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Usaha Mikro</b> Outcome :				
	Presentase peningkatan omset usaha Mikro Ke usaha Kecil	%	3,84	1,68	43,75
<u> </u>	Anggaran	Rp.ribu	1,064,655	801.957	39,52

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi diukur dengan indikator Presentase pertumbuhan koperasi aktif ditargetkan 4,1 dan terealisasi 0,88 atau tercapai 21,46%. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh adanya kerjasama penguatan jaringan koperasi, pembinaan ksp/usp koperasi, dan peningkatan kapasitas pengelola koperasi, serta monitoring dan evaluasi dalam pengawasan, hal ini merupakan capaian untuk meningkatkan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT di Tahun 2019. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha dan tetap fokus dengan

menyelenggarakan pembinaan, pelatihan manajemen keuangan koperasi, bimbingan teknis dan penyuluhan konsultasi kepada koperasi-koperasi di Kota Pasuruan.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro diukur dengan indikator Presentase Peningkatan omset usaha mikro ke usaha kecil. Pada tahun 2019, Presentase Peningkatan omset usaha mikro ke usaha kecil ditargetkan 3,84 dan terealisasi 1,68 atau tercapai 43,75%. Kondisi ini sangat baik bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Pasuruan.

Untuk indikator peningkatan usaha mikro ke usaha kecil dari Tahun 2017 dengan target 3,37% sehingga terealisasi 3,17%, sedangkan di Tahun 2018 dengan target 3,38% dan realisasi 3,26% dan di Tahun 2019 dengan target 3,95% terealisasi 1,53%.

Ketercapaian Indikator Program pemberdayaan Usaha Mikro didukung oleh kegiatan antara lain Pelatihan Industri makanan dan minuman olahan, pelatihan kerajinan usaha mikro, Promosi produk usaha mikro, fasilitasi kemitraan bagi usaha mikro, pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro.

### C. Permasalahan dan Solusi:

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif, namun dalam pencapaiannya terdapat beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain:

- a) Rendahnya tata kelola kelembagaan dan tata laksana organisasi yang dilaksanakan koperasi.
- b) Terbatasnya jenis usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Kota Pasuruan.
- c) Rendahnya kompetensi SDM pengolah koperasi.
- d) Tingkat produktivitas koperasi masih rendah.

- e) Terbatasnya kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya.
- f) Belum tersedianya sistem pengendalian internal (SPI) yang ada di Koperasi, antara lain Sistem Operasional Manajemen (SOM) dan Sistem Operasional prosedur (SOP).
- g) Belum optimalnya pengetahuan kewirausahaan bagi kelompok UMKM
- h) Para pelaku usaha rata-rata mereka belum memiliki strategi pemasaran yang efektif, sehingga sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan (buyer) pelanggan.
- i) Kurangnya kemampuan pelaku UKM untuk melegalitaskan Produk dan mematenkan Merck serta kualitas produk.
- j) Belum berfungsinya Gedung PLUT dari Kementrian Koperasi dan UKM pelaku Usaha Mikro di Kota Pasuruan.

#### C.2. Solusi

- a) Peningkatan kualitas tata kelola dan tata laksana organisasi koperasi.
- b) Peningkatan kualitas usaha koperasi yang sudah ada dan pengembangan jenis usaha koperasi.
- c) Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi.
- d) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Koperasi secara berkelanjutan baik dari sisi kelembagaan maupun usaha-usaha.
- e) Peningkatan komunikasi kualitas pelayanan koperasi terhadap anggotanya
- f) Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) serta penyusunan system operasional prosedur (SOP) dan system operasional manajemen (SOM).
- g) Peningkatan bimbingan teknis ( bimtek ) berupa pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha UMKM, serta pengembangan klinik usaha mikro;
- h) Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran;
- i) Meningkatkan kemampuan Managerial dan Profesionalitas para pelaku usaha keuangan agar dalam pengembangan organisasi dan usaha sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j) Penyelesaian pembangunan gedung PLUT di tahun 2020.

# 2.13. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, diarahkan untuk memfasilitasi adanya investasi dengan menyajikan potensi dan peluang investasi dengan dukungan stabilitas dan kondusifitas daerah, urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi adanya investasi dengan menyajikan potensi dan peluang investasi dengan dukungan stabilitas dan kondusifitas daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke-IV, yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal adalah meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja. Dengan dukungan para investor melalui masuknya kran (aliran) investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan adanya lapangan pekerjaan menjadikan produktivitas masyarakat meningkat sehingga kemajuan perekonomian bagi daerah bisa tercapai. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.40
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan investasi	Prosentase	3,18	1,4	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Pada Tahun 2019, Pertumbuhan investasi di kota Pasuruan ditargetkan sebesar 3,18,% dan terealisasi sebesar 1,4% atau mencapai 45% dari target. Nilai persentase pertumbuhan investasi diukur berdasarkan perbandingan nilai realisasi investasi tahun 2019 dengan nilai realisasi investasi tahun sebelumnya (2018)..

Pertumbuhan investasi ditahun 2019 belum bisa mencapai target, jika dilihat dari trend pertumbuhan nilai investasi yang ada, maka nilai realisasi investasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 bisa dikatakan stagnan, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian regional juga mengalami stagnasi. Selain itu penyebab lainnya adalah kondisi penataan pola ruang dalam RTRW Kota Pasuruan 2011-2031 yang masih belum cukup responsif sehingga kedepan perlu ada peninjauan kembali terhadap RTRW.

Nilai realisasi investasi Kota Pasuruan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 nilai investasi yang dihasilkan sebesar Rp.450.439.314.196,00, untuk tahun 2017 sebesar Rp.458.193.211.600,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.460.937.525.000,00 sedangkan ditahun 2019 Rp.467.244.622.500,00 sehingga pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,72% dan untuk tahun 2017 ke 2018 pertumbuhan realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 0,6% terakhir untuk kenaikan pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,4%

Dari kegiatan Penyelenggaraan perijinan pada tahun 2019, jumlah ijin yang telah diterbitkan surat keputusan (SK) sebanyak 1792 ijin, untuk rata-rata waktu pengurusan perijinan diproses selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 DPMPTSP telah menerbitkan sebanyak 1665 SK dan pada tahun 2017 DPMPTSP telah menerbitkan sebanyak 2212 SK. Menurunnya jumlah ijin ditahun 2017 ke 2018 dikarenakan beberapa hal diantarannya yaitu adanya penyederhanaan jenis ijin dan penyederhanaan peraturan dari pemerintahan pusat pada tahun berkenaan. Sedangkan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah ijin dari tahun 2018 ke 2019 adalah karena sudah mulai teredukasinya masyarakat dengan baik akan pentingnya perijinan dan semakin mudahnya perijinan dengan menggunakan sistem OSS (Online Single Submission), dimana sistem OSS ini adalah perijinan berusaha yang terintegrasi dengan cepat dan murah melalui portal nasional, satu identitas perijinan berusaha dalam satu format ijin berusaha. Dari tiga tahun berturut-turut tersebut ijin penyelenggaraan pemasangan reklame berada di

urutan paling tinggi, disusul ijin mendirikan bangunan (IMB), dan yang ke tiga ijin usaha perdagangan (SIUP).

Kualitas pelayanan publik telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan di Indonesia. Sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan (DPMPTSP) melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengakomodir harapan masyarakat dalam rangka untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perijinan. Adapun survei dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

DPMPTSP melakukan pengukuran Survei kepuasan Masyarakat secara berkala yaitu setiap enam bulan sekali. Pada semester I tahun 2019 didapatkan nilai IKM sebesar 81,88 point, dan disemester II tahun 2019 didapatkan nilai IKM sebesar 82,86 point dengan mutu pelayanan B atau berkatogori baik. Adapun nilai ini berhasil melampaui dari target yang ditetapkan ditahun 2019 yaitu sebesar 82,75 point atau tercapai sebesar 100,13 persen (sumber: laporan SKM tahun 2019, DPMPTSP).

#### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 dimana pelaksanaannya didukung oleh 4 (empat) program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.377.775.400,00 dengan serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.812.382.692,00 atau sebesar 59 persen.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.41**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan
Penanaman Modal

No	Program/Indikator/Anggaran	Cotuon	Toract	Realisasi	Canaian				
NO		Satuan	Target	Realisasi	Capaian				
I	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
	Outcome :								
	Jumlah nilai realisasi investasi	milyar	453,86	467,245	103				
	Anggaran :	Rp.Ribu	489.607,4	405.942,4	83				
II	Program Peningkatan Kualitas Pelay	anan Perijinan							
	Outcome :	-							
	Pelayanan perijinan yang diselesaikan	Prosentase	70	95	135				
	sesuai SOP								
	Anggaran :	Rp.Ribu	552.268	139.689,8	25				
III	Program Pengembangan Data Poten	si Investasi dan	Perijinan						
	Outcome :		•						
	Capaian Penyebaran Informasi	Prosentase	70	80	114,29				
	Anggaran :	Rp.Ribu	197.700	152.992,5	77,39				
IV	Program Pengembangan Informasi p	elayanan Perijin	an dan Pengaduan	1					
	Outcome :	,	•						
	Masyarakat yang puas atas	Prosentase	70	84,75	121,07				
	pelayanan perijinan			,	,				
	Anggaran :	Rp.Ribu	138.200	113.758	82,3				

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan pertama Dinas yaitu meningkatkan Investasi. Realisasi investasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.467.244.622.500,00 dari target sebesar Rp.453,860.000.000 dengan capaian sebesar 103%.

Berdasarkan nilai realisasi investasi Kota Pasuruan tahun 2019 sektor tertinggi berasal dari bidang perdagangan yaitu sebesar Rp.215.615.447.000,00 dan sektor terendah berasal dari bidang usaha pertambangan dan galian golongan C serta dari bidang perhotelan/losmen/penginapan yaitu masing-masing sebesar Rp.310.000.000,00. Adapun urutan 3 (tiga) sektor tertinggi pada tahun 2019 yaitu berasal dari bidang perdagangan selanjutnya bidang perindustrian dan terakhir berasal dari bidang jasa konstruksi.

Adapun berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung terciptanya iklim investasi antara lain kegiatan Pameran promosi potensi dan peluang investasi, Penjajakan kerjasama antar daerah bidang Penanaman Modal, Evaluasi dan pelaporan perkembangan investasi, temu usaha bidang penanaman modal dan Pembinaan dan pengawasan ijin dan non perijinan bidang penanaman modal. Hal ini didukung oleh

ketersediaannya anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja urusan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP siap melayani 70 jenis perijinan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Realisasi kinerja program ini adalah sebesar 95% dari target sebesar 70%. Adapun kinerja Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu penyelenggaraan pelayanan perijinan dan yang kedua adalah monitoring dan evaluasi perijinan dengan capaian indikator sebesar 135 persen. Tercapainya target indikator ini bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2019 hampir semua pelayanan perijinan dapat diselesaikan sesuai SOP (Standart Operasional Prosedure) yang ada. Dengan adanya OSS (Online Single Submission) yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2018 sesuai PP no 24 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi masyarakat luas dalam mengurus perijinan berusaha yang terintegrasi dengan cepat dan murah melalui portal nasional, satu identitas perijinan berusaha dalam satu format ijin berusaha. Penyerapan anggaran dengan capaian hanya sebesar 25 persen dikarenakan adanya beberapa pos yang tidak bisa diserap diantaranya Honorarium PNS disetiap kegiatan (anggaran tim teknis yang masuk dalam komponen TPP Tahun Anggaran 2019).

Program Pengembangan Data Potensi Investasi dan Perijinan. Adapun kinerja Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan buku profil perijinan dan investasi, penyebarluasan informasi perijinan dan pengaduan, pemeliharaan dan operasional sistem informasi perijinan dan pengaduan dengan capaian indikator sebesar 114,29 persen, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan capaian penyebaran informasi yang dilakukukan telah berhasil. Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan informasi perijinan dan pengaduan dilakukan pada beberapa bentuk media, khususnya media cetak dan media elektronik diantaranya melalui pemasangan roll banner, spanduk dan baliho total sebanyak 17 buah yang ditempatkan di tempat-

tempat strategis wilayah kota Pasuruan seperti di dalam kantor DPMPTSP, pertigaan dan perempatan jalan. Untuk leaflet petunjuk pelayanan informasi telah diterbitkan sebanyak 1000 (seribu) lembar, sebagian diletakkan di meja front Office untuk informasi masyarakat, sebagaian di gunakan pada waktu kegiatan Pameran Promosi dan Peluang Investasi baik didalam kota maupun diluar kota.

Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan dan Pengaduan Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dilaksanakanlah Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik. Dengan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan ada umpan balik dari masyarakat dan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Adapun kinerja Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan, penanganan pengaduan perijinan dan peningkatan mutu pelayanan perijinan dengan capaian indikator sebesar 121,07 persen, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan capaian penyebaran informasi yang dilakukan telah berhasil. Pada kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan disediakan fasilitasi untuk menampung dan menyelesaikan pengaduan yang masuk. Adapun keberhasilan dari kegiatan ini yaitu adanya komunikasi yang terbuka pihak pemohon dengan petugas pelayanan serta koordinasi penuh dengan pihak terkait masalah perijinan. Adapun Pelayanan pengaduan yang disediakan selain melalui front Office, juga dapat disampaikan melalui email, maupun melalui media sosial lainnya. Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi DPMPTSP sebagai bahan evaluasi dan tindaklanjut bagi perbaikan pelayanan.

#### C. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

# C.1. Permasalahan

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan perijinan tahun 2019. Adapun permasalahannya adalah:

- Kurangnya kesadaran pengusaha atas kewajiban pelaporan perkembangan penanaman modal dari kegiatan usahanya.
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan perijinan.
- 3. Regulasi teknis perijinan yang masih bersifat sektoral.
- 4. Sinergisitas antar OPD teknis yang belum optimal
- 5. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perijinan, khususnya perijinan usaha elektronik terintegrasi / Online single submission (OSS)

### C.2. Solusi:

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan penanaman modal di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- Program sosialisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus terhadap masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme perijinan dan penanaman modal.
- 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam melaksanakan pelayanan perijinan.
- 3. Reviu regulasi terkait pelayanan perijinan.
- 4. Mengoptimalkan sinergisitas antar OPD terkait dalam rangka penguatan iklim investasi
- 5. Meningkatkan sosialisasi OSS kepada masyarakat.

# 2.14. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan Dan Olah Raga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta memasyarakatkan olahraga, urusan Kepemudaan Dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

# A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta memasyarakatkan olahraga, yang pada akhirnya akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga didukung misi I yaitu meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau.

Target Capaian urusan Kepemudaan pada pemuda pelopor yang berprestasi pada tahun 2019 adalah 17 orang tetapi pada realisasi bisa mencapai 18 orang (105,88%) dikarenakan kerjasama yang baik antara pemuda dan instansi terkait yang menangani kepemudaan. Sedangkan target capaian kegiatan olahraga dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat provinsi dari target 29 atlit terealisasi 156 atlit sehingga mencapai 537,93% dan di tingkat nasional dari target 9 atlit terealisasi 122 atlit sehingga mencapai 1.355,55% dikarenakan banyaknya atlit dari cabor yang mengikuti event/pertandingan dan meraih kejuaraan baik ditingkat propinsi dan nasional. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.42**Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

		•		_	
N	lo Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	Pemuda	17	18	105,88
2	. Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat provinsi	Atlit	29	156	537,93
3	Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat Nasional	Atlit	9	122	1.355,55

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan KONI, 2019

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pada tahun anggaran 2019 yang pelaksanaannya didukung oleh 3 program antara lain Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan 16 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.745.153.300,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.4.914.305.122,00 atau sebesar 85,53%.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program peningkatan peran serta kepemudaan dengan target 13,50% terealisasi 12% sehingga mencapai 88,88% diperoleh dari hasil jumlah pemuda pelopor berprestasi dalam kompetensi pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional sebanyak 18 orang (dari 20 orang pemuda pelopor berprestasi yang ada di kota Pasuruan) dan indikator kedua program peningkatan peran serta kepemudaan, persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar dengan target 68% terealisasi 100% sehingga mencapai 147,06% diperoleh dari hasil jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 20 organisasi yang terealisasi serta di dukung dengan 5 (lima) kegatan yang terdri dari Pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka, Pemilihan Pemuda Pelopor, Sarasehan Pemuda Peningkatan Peran Aktif Pemuda, Jambore Pemuda Indonesia Daerah dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan indikator Persentase Cabang Olahraga yang mengikutsertakan atlitnya dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional dengan target 56,66% terealisasi 97,05% sehingga capaiannya 171,30% dari jumlah kompetisi cabang olahraga yang diikuti, ditingkat provinsi dan nasional sebanyak 33 cabor dari 34 jenis cabor yang ada. Untuk indikator kedua, presentase kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga aktif dengan target 41% terealisasi 79,41% sehingga capaiannya sebesar 193,69% dari jumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan olahraga aktif sebanyak 27 kelurahan dari 34 kelurahan yang ada di Kota Pasuruan dan didukung dengan 8 ( delapan ) kegiatan yang terdiri dari Penyelenggaraan Lomba – Lomba Olahraga Masyarakat ( Non Prestasi ) , Fasilitasi Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Hibah , Updating Data KlubOlahraga di Kota Pasuruan, Senam Kesegaran Jasmani, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pemasyarakatan Olahraga, Fasilitasi POSPEDA dan Fasilitasi Event Olahraga Penyandang Difabel.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan indikator jumlah sarpras dalam kondisi baik dari target 6 sarpras olahraga terealisasi 6 sarpras olahraga sehingga mencapai 100%. Lapangan yang dipelihara ada 4 Sarpras yaitu

GOR UNSUR, Stadion UNSUR, Lap. Wijaya dan Lap. Tenis Gradika sedangkan lapangan yang ditingkatkan ada 2 Sarpras yaitu Lapangan Petahunan dan Lapangan Krampyangan. Dan didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari Penyediaan Jasa Kebutuhan Air dan Listrik Prasarana dan Sarana Olahraga, Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga, Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.43
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan				
	Capaianprogram :				
	Persentase peningkatan keikutsertaan pemuda	Persen	13,50	12	88,88
	dalam kompetensi pemuda berprestasi tingkat				
	provinsi dan nasional	D	CO	400	447.00
	Capaian Program :	Persen	68	100	147,06
	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar Anggaran	Rupiah	779.042.500	746.595.500	95,84
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	ιταριατί	113.042.300	740.555.500	33,04
_	Olahraga				
	CapaianProgram :				
	Persentase cabang olahraga yang mengikut	Persen	56,66	97,06	171,30
	sertakan atlitnya dalam kompetisi tingkat Provinsi				
	dan Nasional				
	CapaianProgram :	Persen	41	79.41	193,69
	Persentase Kelurahan yang melakukan kegiatan				
	olahraga aktif	Develop	4 255 657 000	4 400 407 000	00.00
2	Anggaran	Rupiah	1.355.657.900	1.198.107.900	88,38
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				
	Olah Raga Capaian Program : Jumlah sarpras dalam kondisi	Sarpras	6	6	100
	baik	Olahraga	U	U	100
	Anggaran	Rupiah	3.610.452.900	2.969.601.722	82,25

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan Dan Olah Raga beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang ada antara lain:

- belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelompok.
- 2. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana olahraga.

#### C.2. Solusi

Adapun solusi nya adalah

- 1. Memberdayakan generasi muda yang terencana, terarah untuk berperan secara aktif dalam kegiatan kepemudaan secara maksimal.
- 2. Membangun sarana prasarana olahraga sesuai kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan.

## D. Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan / Prestasi yang diperoleh oleh atlit pada cabang olahraga selama tahun 2019, ditingkat propinsi dan nasional antara lain pada kejuaraan yang di ikuti oleh cabang olahraga Karate, Pencak Silat, Selam, Renang, Menembak, Taekwondo, Wushu, Kempo, Catur, Bridge, Hockey, Basket, Tinju, Bulu Tangkis, Petanque, Bilyard, dan Kejuaraan Atletik Difabel, serta Kejuaraan POSPEDA. Adapun hasil kejuaraan / penghargaan yang diperoleh sebagai berikut:

- Medali Emas Sebanyak 28 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Karate Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 17 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Karate Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 16 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Karate Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 29 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Karate Tingkat Nasional
- Medali Perak Sebanyak 36 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Karate Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 42 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Karate Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 24 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat Tingkat Nasional
- Medali Perak Sebanyak 10 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat Tingkat Nasional

- Medali Perunggu Sebanyak 25 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 5 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Selam Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 5 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Selam Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 8 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Selam Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 10 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Selam Tingkat Nasional
- Medali Perak Sebanyak 13 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Selam Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 9 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Selam Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 57 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Renang Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 42 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Renang Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 25 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Renang Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 3 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Renang Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Renang Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 13 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Menembak Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 10 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Menembak Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 10 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Menembak Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 9 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Menembak Tingkat Nasional
- Medali Perak Sebanyak 7 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Menembak Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 7 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Menembak Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 25 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Taekwondo Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 24 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Taekwondo Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 8 buah pada Kejuaraan Cabang Taekwondo Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 9 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Taekwondo Tingkat Nasional

- Medali Perak Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Taekwondo Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Taekwondo Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 11 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Wushu Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 9 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Wushu Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 3 buah pada Kejuaraan Cabang Wushu Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Kempo Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Kempo Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Kempo Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Kempo Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 3 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Catur Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Catur Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Catur Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Catur Tingkat Nasional
- Medali Perak Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Bridge Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 4 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Bridge Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Bridge Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Hockey Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Hockey Tingkat Nasional
- Medali Perunggu Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Basket Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Basket Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Tinju Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 3 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Tinju Tingkat Propinsi

- Medali Emas Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tingkat Propinsi
- Medali Perak Sebanyak 5 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Senam Tingkat Propinsi
- Medali Emas Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Petanque Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Petanque Tingkat Propinsi
- Medali Perunggu Sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Petanque Tingkat Nasional
- Medali Emas Sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Cabang Olahraga Billyard Tingkat Propinsi
- Medali emas sebanyak 5 buah pada Kejuaraan Atletik event Olahraga Difabel Tingkat Propinsi Jawa Timur
- Medali perak sebanyak 2 buah pada Kejuaraan Atletik event Olahraga Difabel Tingkat Propinsi Jawa Timur
- Medali perunggu sebanyak 1 buah pada Kejuaraan Atletik event Olahraga Difabel Tingkat Propinsi Jawa Timur
- Medali Perak sebanyak 3 buah pada Kejuaraan POSPEDA Tingkat Propinsi Jawa Timur
- Terbaik ke-II Tingkat Propinsi Pemuda Pelopor bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, lingkungan dan Pariwisata.

**Tabel 3.44**Rekapitulasi Hasil Kejuaraan Semester I Dan II Tahun 2019

	CABANG OLAHRAGA		HASIL KEJURAAN TINGKAT									
NO			PROPINSI					IONAL				
		I	ll l	III	JML	- 1	II	III	JML			
1	Karate	28	17	16	61	29	36	42	107			
2	Pencak Silat	-	-	-	-	24	10	25	59			
3	Selam	5	5	8	18	10	13	9	32			
4	Renang	57	42	25	124	0	3	1	4			
5	Menembak	13	10	10	33	9	7	7	23			
6	Taekwondo	25	24	8	57	9	1	2	12			
7	Wushu	11	9	3	23	-	-	-	-			
8	Kempo	2	0	2	4	0	1	1	2			
9	Catur	3	0	2	5	0	1	1	2			
10	Bridge	0	1	4	5	1	0	0	1			
11	Hockey	0	0	0		1	0	1	2			
12	Basket	0	0	1	1	0	1	0	1			
13	Tinju	2	3	0	5	0	0	0	0			
14	Bulutangkis	1	5	2	8	0	0	0	0			
15	Senam	0	0	2	2	0	0	0	0			

	CABANG OLAHRAGA	HASIL KEJURAAN TINGKAT									
NO			PROPINSI					NASIONAL			
		I	II	III	JML	ı	II	III	JML		
16	Petangue	2	0	1	3	0	0	2	2		
17	Billyard	1	0	0	1	0	0	0	0		
	JUMLAH	150	116	84	350	83	73	91	247		

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019

**Tabel 3.45**Rekapitulasi Hasil Kejuaraan Pospeda Tahun 2019

			HASIL						
NO	CABANG OLAHRAGA		PROPINSI			NASION	AL	JUMLAH	
		ı	II	III	ı	II	III		
1	Lari 300 Meter	-	1	-	-	-	-	1	
2	Lari 200 Meter	-	1	-	-	-	-	1	
3	Pencak Silat	-	1	-	-	-	-	1	
	JUMLAH	0	3	0				3	

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019

Tabel 3.46

Hasil Kejuaraan Atletik Event Olahraga Penyandang Difabel Yang Diselenggarakan Npci (Nasional Paralympian Comitte INDONESIA) Propinsi Jawa Timur Tahun 2019

NO	IENIO ATI ETII/	1./5	,	JUARA			ATAONAMA	WETER AND AN
NO	JENIS ATLETIK	L/P	1	II	Ш	JUMLAH	ATAS NAMA	KETERANGAN
1	TOLAK PELURU	Р	1	-	-	1	ZAHRO	·
2	TOLAK PELURU	L	-	-	1	1	ANDRI	
3	LARI 200 METER	L	1	-	-	1	M. SAIFUR	
4	LARI 200 METER	L	-	1	-	1	DHAFI	
5	LARI 100 METER	L	-	1	-	1	FARHAN	
6	LEMPAR CAKRAM	L	1	-	-	1	ANDRI	
7	LEMPAR CAKRAM	Р	1	-	-	1	ZAHRO	
8	LEMPAR LEMBING	Р	1	-	-	1	ZAHRO	
	JUMLAH		5	2	1	8		

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019

## 2.15. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang dibutuhkan oleh instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyediaan data statistik sektoral. Dalam pelaksanaan urusan statistik didukung misi ke VI yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Capaian target indikator kinerja urusan statistik diukur melalui cakupan pemanfaatan data statistik untuk mengukur indikator kinerja, dengan target 60,61%, terealisasi 40% dengan capaian sebesar 65,99%. Pencapaian ini didasarkan atas kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan data-data sebagai bahan dalam penyusunan suatu perencanaan atau kebijakan. Pada tahun 2019 ada 5 (lima) Perangkat Daerah yang memanfaatkan data tersebut dari target sebanyak 20 (dua puluh) Perangkat Daerah. Adapun data yang dimanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah meliputi: data sektoral yaitu indikator pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan industry serta indicator urusan pemerintah lainnya. Untuk memujudkan satu data pembagian kota pasuruan dengan percepatan publikasi data statistik sektoral sudah dikembangkan aplikasi e-sista (Sistem Informasi Statistik Sektoral) diharapkan semua perangkat daerah / PD sesuai dengan format yang ada mengisi secara mandiri data / indikator masing-masing urusan. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.47
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik

	, , ,	<del></del>			
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pemanfaatan data statistik untuk mengukur indikator kinerja.	persen	61,18	40	65,99

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Untuk urusan statistik ada satu program dengan total jumlah anggaran sebesar Rp479.286.780,00 dan terealisasi sebesar Rp210.051.439,00 dari seluruh total anggaran atau sebesar 43,83%.

Program pengembangan informasi data statistik terdiri 2 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.479.286.780,00 sampai dengan desember 2019 anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.210.051.439,00 atau tingkat serapannya mencapai 43,83%.

Program pengembangan informasi data statistik terdiri dari beberapa indikator antara lain :

- Pertumbuhan ketersediaan data sektoral yang valid dan tepat waktu dengan target 75% teralisasi 60% pada tahun 2019 diperoleh capaian sebesar 83,33% dengan ditunjang data-data sektoral hasil pembangunan yang diperoleh dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
- 2. Persentase data statistik pembangunan yang diunggah di website dengan target 88,89% teralisasi 70% pada tahun 2019 diperoleh capaian sebesar 78,75% dengan ditunjang dari hasil ketersediaan dokumen statistik yang memuat Indikator kinerja pembangunan Kota Pasuruan selama tahun 2019, Data historal hasi-hasil pembangunan di Kota Pasuruan periode tahun 2014 – 2019 dan dilaksanakannya kegiatan pembinaan petugas pengolah data statistik dan kegiatan pengendalian dan evaluasi statistik pembangunan.
- 3. Pertumbuhan pengunjung website pertahun dengan target 356 pengunjung teralisasi 250 pengunjung pada tahun 2019 diperoleh capaian sebesar 70,22% dengan ditunjang dari hasil domain utama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu https://pasuruankota.go.id yang telah dikunjungi.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.48
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Program Urusan Statistik

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Informasi Data Statistik. Indikator Program :		•		-
	Pertumbuhan ketersediaan data sektoral yang valid dan tepat waktu.	%	75	60	83,33
	Persentase data statistik pembangunan yang diunggah di website.	%	88,89	70	78,75
	Pertumbuhan pengunjung website pertahun.	pengunjung	356	250	70,22
	Anggaran :		479.286.780,00	210.051.439,00	43,83

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019

#### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan statistik beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian urusan antara lain sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral I dan sektoral II
- 2. Belum Optimalnya publikasi data statistik sektoral.
- 3. Belum Optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral bagi stakeholder.

#### C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan diatas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan di tahun-tahun yang datang, yakni:

- Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral I dan sektoral II, melalui koordinasi, survey mandiri dan kerja sama dengan pihak ke tiga.
- 2. Peningkatan publikasi data statistik sektoral,
- 3. Meningkatkan intensitas desiminasi data statistik sektoral.

# 2.16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan pelestarian bangunan sejarah, artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial, urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelestarian bangunan sejarah, artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak

Penyelenggaraan urusan kebudayaan memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang ada di masyarakat. Upaya pengembangan budaya lokal diwujudkan dengan memberikan ruang bagi seniman daerah untuk berkreasi dan berpatisipasi pada setiap even baik berskala regional maupun nasional. Pelaksanaan urusan ini didukung melalui misi ke 7 yaitu Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa, Berbudaya Yang Diliputi Harmoni Sosial Dan Kesalehan Sosial.

Indikator Kinerja pertama yaitu jumlah grup kesenian dan budaya yang ditargetkan 154 grup, terealisasi 127 grup dengan capaian 82,47%.

Indikator kinerja kedua jumlah even kesenian dan budaya yang ditargetkan 14 even, terealisasi sebanyak 19 even dengan capaian sebesar 135,71%. Hal ini didukung adanya upaya Pemerintah Kota Pasuruan menjaga kelompok-kelompok pelestari budaya lokal yang ada melalui kegiatan. Penyelenggaraan pagelaran seni budaya yang merupakan kegiatan tahunan terus diupayakan pengembangan kualitas maupun variasi jenis kegiatannya. Dengan demikian diharapkan bisa memacu dan memotivasi perkembangan kelompok-kelompok seni budaya dalam meningkatkan kualitas tampilan bahkan dapat memunculkan kreatifias mereka dalam menciptakan sebuah karya-karya seni budaya yang dapat dibanggakan Kota Pasuruan. Untuk menambah dan melaksanakan Festival Kolaborasi Seni Musik Tradisional, Lomba Tari Kreasi Budaya, Festival Karya Tari dan lain–lain, diharapkan dapat menjaga kesinambungan/konsistensi aktifitas para pelaku seni dan budaya.

Dan indikator kinerja ketiga jumlah cagar budaya yang dilestarikan yang ditargetkan sebanyak 19 bangunan, terealisasi sebesar 26 bangunan atau tercapai sebesar 136.84% dikarenakan pada tahun 2019 untuk benda-benda situs, kawasan cagar budaya ditambah makam/situs cagar budaya yang masuk juga dalam Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/127/423.011/2019 tentang Juru Kunci Makam Cagar Budaya, sehingga bertambah menjadi 19 bangunan cagar budaya. dilestarikan merupakan proses, cara dalam pelesatarian, perlindungan dari kerusakan dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuknya. Atas upaya tersebut maka keberadaan aslinya senantiasa selalu terpelihara.

Cagar budaya yang dilestarikan merupakan kekayaan daerah yang terdiri dari Bangunan situs/makam kuno sebanyak 8 makam yang dilestarikan yaitu:

- 1. Makam Mbah Wali Diran
  - --
- 2. Makam Mbah Darmoyudho
- 3. Makam Mbah Slagah
- 4. Makam Mbah Mas Kotip
- 5. Petilasan Untung Suropati
- 6. Makam Kyai Sepuh
- 7. Makam Habib Alwi
- 8. Makam Mbah Sulaiman

Sedangkan pada situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 18 Cagar Budaya yaitu:

- 1. Rumah Dinas Wakil Walikota
- 10. Rumah Singa

2. Gedung P3GI

- 11. Stasiun Pasuruan
- 3. Rumah Mebel Quick
- 12. GPIB PNIEL
- 4. Rumah Daroessalam
- 13. Gereja Katolik St. Antonius Padova

5. SDN Pekuncen

- 14. Markas Yon Zipur 10
- 6. Gedung Pancasila
- 15. Gedung Wolu
- 7. SMK Untung Suropati d/h 16. Harmoni Societet
- 16. Markas Kompi Bantuan Yon Zipur 10

8. SMPN 2

- 17. Masjid Agung Al Anwar
- 9. Klenteng Tjoe Tik Kiong
- 18. Rumah HT (Rumah Keluarga HAN)

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.49
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Grup Kesenian dan Budaya	Grup	154	127	82,47
2.	Jumlah Even Kesenian dan Budaya	Even	14	19	135,71
3.	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Gedung	19	26	136,84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

## B. Evaluasi Kinerja Program

Program yang dilaksanakan guna mendukung urusan kebudayaan dimana pelaksanaannya didukung oleh 2 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.133.279.650,00 dan serapan anggaran sebesar Rp.2.547.827.391,00 atau sebesar 81,32%. Dengan indikator jumlah cagar budaya yang dipelihara dan persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina.

Program Pengembangan Kemitraan dengan indikator persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina memiliki target 48 persen, terealisasi 79 persen atau tercapaian 164,34%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.50**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kebudayaan

	, , ,	,,			•
No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
	Outcome				
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dipelihara	Cagar Budaya	17	26	152,94
2.	Program Pengembangan Kemitraan				
	Outcome				
	Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	%	48	79	164,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain :

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya melestarikan cagar budaya.
- 2. Belum optimalnya tata kelola pemeliharaan cagar budaya.

- 3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya tradisional dan peninggalan sejarah.
- 4. Belum sinergisnya komunitas seni dengan pemerintah untuk dapat memperkenalkan komunitas dan karya seninya.
- 5. Minimnya penghargaan karya seni yang dipergunakan untuk mengangkat potensi daerah yang bernilai ekonomi.

### C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan kinerja adalah:

- Peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait perlunya pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya yang dapat menjadi nilai tambah ekonomi;
- 2. Perlunya kebijakan pemerintah daerah terkait tata kelola dan insentif pemeliharaan cagar budaya.
- 3. Meningkatkan kegiatan pelestarian seni budaya tradisional dan kretifitasnya dengan penyelenggaraan even-even secara intensif untuk menggugah minat masyarakat dalam penggalian potensi seni dan pelestarian seni budaya lokal.
- 4. Perlu membangun rasa empati terhadap seni budaya lokal guna peningkatan dan pengakuan profesi dan hasil karya seni.
- 5. Peningkatan apresiasi terhadap karya seni sebagai komoditas yang memiliki nilai jual.

## D. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh pada pelaksanaan urusan wajib kebudayaan dan kota pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51
Penghargaan yang diterima oleh urusan wajib kebudayaan dan Kota Pasuruan

	5 5 , 5		
NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Tahun 2019	Tingkat
1	Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Kota	Juara Harapan II Lomba	Tingkat
	Pasuruan Dalam Rangka Pekan Cipta Seni Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Lomba Seni Tari Kategori		Propinsi
	Usia 16-18 Tahun		
2	Piagam Penghargaan Anugrah Duta Seni Budaya	Kategori Abyakta Budaya	Tingkat
	Jawa Timur Tahun 2019 Diberikan Kepada	(Keberhasilan Dalam	Propinsi
	Pemerintah Kota Pasuruan	Meregenerasi Seniman)	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Tabel 3.52
Penghargaan yang diterima oleh Perorangan selama tahun 2019

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penghargaan / Prestasi Penerima	Juara	Tingkat
1	Dalam Rangka Pekan Cipta	Parrisca Indra		3 Penata	Tingkat
	Seni Provinsi Jawa Timur Lomba Seni Musik Tradisi Kategori Usia 16-18 Tahun	Perdana, S.Pd., M.Pd.		Musik Terbaik Non Rangking	Propinsi
2	Dalam Rangka Pekan Cipta Seni Provinsi Jawa Timur Lomba Seni Tari Kategori Usia 16-18 Tahun	Rizki Dewi Khasanah		Penari Putri Terbaik	Tingkat Propinsi
3	Dalam Rangka Audisi Penari Jawa Timur	Maudy Berliannita		Kategori 15 Penari Terbaik	Tingkat Propinsi
4	Dalam Rangka Audisi Penari Jawa Timur	Ratih Anggraeni		Kategori 25 Penari Unggulan	Tingkat Propinsi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

## 2.17. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan, diarahkan untuk meningkatkan minat dan gemar membaca bagi masyarakat, dalam upaya mencerdaskan masyarakat, melalui kegiatan gemar membaca, urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat dan gemar membaca bagi masyarakat, dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke I yaitu meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau dengan tujuan mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter.

indikator kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan diukur melalui dua indikator yaitu Prosentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan umum daerah dan Prosentase pertumbuhan buku koleksi perpustakaan umum daerah.

Indikator Prosentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan umum daerah dengan target 11,37% terealisasi 23,7% dengan capaian sebesar 209%. Didukung

dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 4.500 pengunjung dan terealisasi sebanyak 28.912. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- Adanya gedung baru yang memotivasi sekolah-sekolah berkunjung ke perpustakaan baru sehingga jumlahnya menjadi meningkat drastis.
- Adanya komunitas baca yang membantu sebagai relawan pendamping kunjungan ke perpustakaan.
- Adanya pertunjukan Badut Literasi setiap ada kunjungan dari PAUD dan TK.
- Adanya publikasi dan sosialisasi melalui perpustakaan keliling disekolah sekolah tentang gedung baru perpustakaan beserta fasilitasnya dan mempromosikan koleksi buku-buku yang terbaru.
- Adanya penambahan jadwal kegiatan perpustakan keliling yang tidak hanya kesekolah-sekolah namun juga ketempat-tempat fasilitas umum (Lapas, Puskesmas, Samsat, Gor, Alun-alun, Terminal Wisata Religi dan Taman Fasilitas Umum).

Indikator kinerja kedua adalah Prosentase pertumbuhan buku koleksi perpustakaan umum daerah dengan target 8,41% terealisasi 10,93% dengan capaian sebesar 129,96%, didukung dengan Koleksi buku perpustakaan umum daerah ditargetkan 605 buku terealisasi sebanyak 1.691 buku dan hibah buku dari Perpustakan Nasional sebanyak 1.850 buku. Sehingga sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah koleksi buku yang dimiliki sejumlah 24.109 eksemplar (8.232 judul). Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.53
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan umum daerah	Prosen	11,37	23,7	209
2	Prosentase pertumbuhan buku koleksi perpustakaan umum daerah	Prosen	8,41	10,93	129,96

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 6 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.764.829.350,00 terealisasi sebesar Rp.690.795.700,00 atau tingkat serapannya mencapai 90,32%.

Indikator kinerja pertama Prosentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan dengan target 80% terealisasi 81,06 dengan capaian sebesar 101,3% didukung dengan adanya layanan perpustakaan untuk menjangkau masyarakat yang cukup jauh dari gedung perpustakaan, maka diberikan layanan perpustakaan keliling dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda 4 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan untuk memberikan layanan perpustakaan, adanya kegiatan mendongeng serta sosiaisasi tentang minat baca dan literasi dari para pustakawan dan komunitas baca juga memberikan dampak positif.

Disamping itu Mobil perpustakaan Keliling secara rutin menjangkau titik-titik keramaian pada suatu wilayah, baik ke taman-taman maupun sekolah, yakni sebanyak 27 titik. Sepanjang tahun 2019, mobil perpustakaan keliling melayani ke titik-titik keramaian tersebut hingga 375 kali.

Melalui aktifitas baca buku, bedah buku hingga mendongeng masyarakat, terutama anak usia sekolah dan generasi muda, diajak untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan baca dan tulis mereka. Khususnya layanan mendongeng, sangat disukai oleh siswa PAUD dan TK. Secara psikologis dongeng membangun sugesti alam bawah sadar anak kecil untuk menjadi kerangka acuan nilai mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk.

Indikator kinerja kedua Prosentase pertumbuhan koleksi buku perpustakaan dengan target 10% terealisasi 11% dengan capaian 110% didukung pengadaan buku perpustakaan sehingga berkontribusi dalam menarik minat pengunjung..

Indikator kinerja ketiga Jumlah pengunjung perpustakaan yang ditargetkan 4.500 orang terealisasi sebesar 28.912 orang atau 642,5%. Didukung pengadaan buku berbagai macam klasifikasi dan subjek buku, baik sastra, filosofi hingga ketrampilan.

Koleksi buku yang semakin banyak, baik dalam jumlah maupun jenis ini, akan menarik minat pengunjung perpustakaan.

Untuk merangsang minat literasi masyarakat, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki kegiatan penyelenggaraan lomba minat baca dan budaya baca, yang dalam peaksanaannya meliputi 6 jenis lomba, yakni lomba perpustakaan kelurahan yang diikuti oleh 34 Kelurahan, lomba perustakaan SD/MI yang diikti oleh 86 sekolah SD/MI, lomba perpustakaan SMP/MTs yang diikuti oleh 47 sekolah SMP/MTs, lomba perpustakaan SMA/SMK/MA yang diikuti oleh 23 sekolah SMA/SMK/MA, lomba Bercerita tingkat SD/MI yang diikuti oleh 86 sekolah SD/MI dan lomba pengelola perpustakaan kelurahan yang diikuti oleh 34 peserta pengelola perpustakaan kelurahan.

Capaian kinerja indikator urusan Perpustakaan dan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, antara lain, merupakan kontribusi akumulasi dari 6 kegiatan, yang lebih terperinci disajikan pada lampiran. Pada bagian berikut, akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan pada tahun 2019. Analisis ini didasarkan, antara lain, dari kinerja kegiatan yang diduga memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.54**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perpustakaan

No.	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program pengembangan budaya baca				
	dan pembinaan perpustakaan				
	Outcome: prosentase masyarakat yang	%	80	81,06	101,3
	puas terhadap layanan perpustakaan				
	Prosentase pertumbuhan koleksi buku	%	10	11	110
	perpustakaan				
	Jumlah pengunjung Perpustakaan	Orang	4.500	28.912	642,5
	Anggaran	Rp.ribu	764.829.350	690.795.700	90,32

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayananan perpustakaan pada tahun 2019, yakni:

- Masih belum adanya ikon yang menjadi daya tarik dan daya saing perpustakaan umum daerah terhadap perpustakaan lain.
- 2. Belum optimalnya tata kelola perpustakaan dalam meningkatkan kinerjanya menuntaskan inventarisasi
  - a. Antisipasi jam kunjung SABTU MINGGU dan jadwal perpustakaan keliling di jam kerja dan diluar jam kerja
  - b. Tenaga IT
  - c. Tenaga sirkulasi

## C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan perpustakaan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1. Perlu adanya inovasi dalam menghadirkan ikon sebagai daya tarik dan daya saing perpustakaan yang tidak dimiliki perpustakaan lain.
- 2. Perlu adanya penambahan tenaga aparatur untuk menjangkau pelayanan kepada pengunjung diantaranya dalam mengantisipasi jam kunjung Sabtuminggu, dalam memenuhi jadwal perpustakaan keliling diluar jam kerja, dalam pelayanan digitalisasi dokumen.

### D. Penghargaan

Penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu melalui Lomba bercerita Bagi Siswa SD/MI se-Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:

 Juara Harapan I Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang di wakili oleh Ananda M. RIZAL BAKHRI siswa UPT SD Kebonsari Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan.

# 2.18. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan, diarahkan untuk pelestarian dan penataan arsip daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik dan benar, urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian dan penataan arsip daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik dan benar. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi VI yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Pengetahuan tentang kearsipan merupakan faktor yang menentukan kualitas pengelolaan arsip unit kerja. Melalui Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, maka akan terbuka wawasan dan pengetahuan pengelolaan arsip yang baku di masing-masing unit kerja. Untuk itu Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, sebagai upaya untuk mewujudkan budaya tertib arsip.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, senantiasa berupaya untuk mendorong meningkatkan kualitas penyelenggara kearsipan. Salah satu tugas dan fungsi Unit Kearsipan yaitu penataan dan pengelolaan arsip in aktif dari unit pengolah perangkat daerah. Penataan dan pengelolaan arsip in aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip guna memudahkan penemuan/pencairan kembali arsip yang dibutuhkan. Penataan dan pengelolaan arsip in aktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip in aktif dilaksanakan melalui beberapan kegiatan yaitu: pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip.

Pada tahun 2019 dibangun depo arsip dengan harapan untuk menunjang kinerja urusan kearsipan sebagai sarana penyimpanan arsip, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dan sebagai sarana temu bakti arsip melalui daftar pencarian

arsip, tetapi pembangunan tersebut belum tuntas dan belum dapat dimanfaatkan, sehingga perlu dianggarkan kembali.

Indikator prosentase arsip in aktif yang di kelola dengan target 27,66% terealisasi sebesar 27,66% dengan capaian 100%. Pencapaian ini dapat terwujud dikarenakan:

- a. Sumber Daya Manusia (tenaga pengolah arsip) yang telah dapat menyelesaikan penataan dan pengelolaan arsip in aktif sesuai dengan undang-undang kearsipan;
- b. Sarana prasarana yang tersedia guna penyimpanan arsip.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.55
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No.	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase arsip in aktif yang di kelola		%	27,66	27,66	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 5 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.418.259.299,00 terealisasi sebesar Rp.368.133.175,00 atau tingkat serapannya mencapai 88%.

Pelaksanaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan diukur dengan indikator Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku/ tertib arsip. Pada tahun 2019, Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku/tertib arsip ditargetkan sebesar 19 Unit Kerja. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh kesadaran unit kerja tentang pengelolaan arsip secara baku dan tertib arsip.

Dengan adanya Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, di harapkan untuk mendorong penataaan dan pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang sesuai Undang-undang Nomer 28 Tahun 2012 Tentang pelaksana undang-undang nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Pada tahun 2019 dengan indikator prosentase Unit kerja yang melaksankan pengelolaan arsip secara baku dengan target 19 unit kerja dapat terealisasi sebesar 19 unit kerja dengan capaian 100%. Pencapaian ini dapat terwujud dikarenakan:

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. Kesadaran dari masing-masing unit kerja dalam memenuhi sarana prasarana yang tersedia guna penyimpanan arsip.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.56

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kearsipan

No.	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				
	Outcome: Jumlah Unit kerja yang melaksankan pengelolaan arsip secara baku	Unit kerja	19	19	100%
	Anggaran	Rp.ribu	418.259.299,00	376.518.475,00	90%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

### C. Permasalahan dan Solusi Urusan

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

## C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam urusan Kearsipan pada tahun 2018, yakni:

- 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman bagi pemangku kepentingan tentang pentingnya arsip yang di sebabkan:
  - a) Kurangnya sosialisasi tentang kearsipan;
  - b) Pola penyimpanan arsip tidak sesuai standar.

- 2. Tidak tersedianya tenaga arsiparis pada setiap unit kerja
  - a) Belum tersedianya arsiparis, sehingga keselamatan arsip pada setiap instansi pencipta arsip tidak terjamin;
  - b) pertambahan volume arsip dari waktu ke waktu dari organisasi pencipta arsip tidak diimbangi dengan penarikan arsip in aktif;
  - c) Depo penyimpanan arsip sudah tidak bisa menampung karena sudah sangat penuh.
- 3. Hasil Audit/Monitoring Kearsipan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur:
  - a) Belum tercantumnya di klausul "mengingat" di setiap produk hukum belum mencantumkan ketentuan perundangan terkait kearsipan.
  - b) Belum tersusunnya SOP dalam penemuan kembali arsip.
  - c) Belum adanya layanan arsip statis.
  - d) Belum tersusunya Daftar Pencarian Arsip statis yang belum di serahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kota Pasuruan.
  - e) Belum menjadi simpul jaringan pada JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional);
  - f) Belum selesainya pembangunan Depo Arsip.

## C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan urusan kearsipan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- Meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan cara mengikut sertakan SDA pada berbagai diklat/bintek/seminar/workshop Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang nantinya diharapkan dapat mendorong kesadaran dan pemahaman bagi pemangku kepentingan terhadap kearsipan.
- 2. Menambah fasilitas penyimpanan arsip agar terhindar dari kerusakan arsip berbagai unsur (jamur, serangga, dll)

- 3. Hasil Audit/Monitoring Kearsipan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, yang belum ditindak lanjuti pada tahun 2019 ,akan ditindak lanjuti pada kegiatan tahun 2020, antara lain:
  - a) Perlunya dicantumkannya dalam klausul "mengingat" ketentuan perundangan terkait kearsipan pada setiap produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah.
  - b) Menyusun SOP penemuan kembali arsip.
  - c) Memberikan layanan arsip statis secara bertahap dan berkesinambungan.
  - d) Menyusun Daftar Pencarian Arsip statis yang belum di serahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kota Pasuruan;
  - e) Menjalin komunikasi untuk menjadi simpul jaringan pada JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional);
  - f) Perlu dilanjutkan pembangunan Depo Arsip pada tahun anggaran 2021.

### 3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan didukung oleh 7 (tujuh) urusan yang terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perdagangan, urusan perindustrian, dan urusan transmigrasi adapun penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

### 3.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan, diarahkan menunjang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil tangkap perikanan, urusan Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya

perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil tangkap perikanan. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke IV antara lain "Meningkatkan Pengembangan Perdagangan dan Indutri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak", Dinas Perikanan memiliki program dan kegiatan yang menunjang misi tersebut diantaranya peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, serta peningkatan nilai tambah hasil produk perikanan tangkap dan budidaya. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.57

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Produksi Tangkap	Ton	7.872,61	6.325,90	80,35
2.	Produksi Budidaya Air Payau	Ton	1.780,00	1.788,91	100,5
3.	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Ton	90,56	93,42	103,16
4.	Kontibusi sub sektor Perikanan pada PDRB	%	0,86	0,7	81,39
5.	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	34,56	34,86	100,55

Sumber: Dinas Perikanan, 2019

Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap ditargetkan sebesar 7.872,61 ton telah terealisasi sebesar 6.325,90 ton, dengan realisasi prosentase sebesar 80,35%. Produksi Perikanan budidaya air payau ditargetkan sebesar 1.780,00 ton dan telah terealisasikan sebesar 1.788,91 ton dengan realisasi prosentase sebesar 100,50%. Produksi Perikanan budidaya air tawar ditargetkan sebesar 90,56 ton dan telah terealisasi sebesar 93,42 ton dengan realisasi prosentase sebesar 103,16%. Realisasi kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB di tahun 2019 sebesar Rp57.899,82, Konsumsi ikan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 34,56 Kg/Kapita dan terealisasi sebesar 34,86 Kg/Kapita.

Tercapainya indikator kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan didukung dengan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan perikanan, didukung oleh pelaksanaan : 4 Program dan 14 Kegiatan dengan total anggaran senilai Rp.1.668.116.100,00 Penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.349.555.950,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 80,90%. Yang tidak terserap anggaran di tahun 2019 sebesar Rp.318.560.150,00 dikarenakan:

- 1) Gagal lelang pada Program Pengembangan budidaya perikanan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan kecil dan pembudidaya ikan), unit kegiatan pengembangan/rehabilitasi jalan produksi budidaya ikan di Kel. Kepel 1.484 mtr, senilai Rp.296.800.000,00
- Efesiensi anggaran perjalanan dinas, makanan dan minuman, narasumber, petugas kebersihan dan sisa nilai kontrak dari kegiatan yang ada, senilai Rp.21.760.150,00

Analisis ini didasarkan pada kinerja kegiatan yang mendukung akan tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya air payau/air tawar dan peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan tangkap serta peningkatan nilai tambah produk olahan budidaya.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.58

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Jaiuaii	raryet	i\caii3a3i	Capalali
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan				
	Tangkap				
	- Jumlah Prod. Perikanan Tangkap	Ton	7.872,61	6.325,90	80,35
	- Jumlah KUB Yang Naik Kelas	Kelompok	2	2	100,00
	- Anggaran	Rp0	123.115.000	122.565.000	99,55
2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
	- Jumlah Prod. Perikanan Budidaya	Ton	1.870,56	1.882,33	100,63
	<ul> <li>Jumlah POKDAKAN Yang Naik Kelas</li> </ul>	Kelompok	2	2	100,00
	- Anggaran	Rp0	1.247.131.000	939.160.950	75,31

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				
	<ul> <li>Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Tangkap</li> </ul>	Rp0	6.721.580.000	6.626.400.000	98,58
	<ul> <li>Jumlah Poklahsar Yang Naik Kelas</li> </ul>	Kelompok	2	0	0
	- Anggaran	Rp0	216.560.100	206.520.000	95,36
4.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	·			
	- Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Budidaya	Rp0	12.611.000.000	12.626.130.600	100,11
	- Anggaran	Rp0	81.310.000	81.310.000	100,00

Sumber: Dinas Perikanan, 2019

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu Penegakan Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap dan Peningkatan Ketrampilan dan Pemanfaatan Teknologi Penangkapan Ikan. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 7.7872,61 ton dan terealisasi sebesar 6.325,90 ton dengan prosentase 80,35% hal ini disebabkan karena terjadinya banjir bandang dan angin kencang yang mengakibatkan banyaknya kapal nelayan rusak dan banjang (peralatan penangkapan ikan) dilaut mengalami kerusakan juga, sedangkan jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang naik kelas ditargetkan sebanyak 2 kelompok dan terealisasi 3 kelompok dengan prosentase 150%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, didukung 7 kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Budidaya Perairan Tawar, Pengembangan Budidaya Perairan Payau, Pengembangan Budidaya Garam, Pembangunan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan budidaya, Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana produksi perikanan budidaya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK Reguler). Jumlah produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 1.870,56 ton dan terealisasi sebesar 1.882,33 ton dengan prosentase 100,63%. Sedangkan jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang naik kelas ditargetkan sebanyak 2 kelompok dan terealisasi 2 kelompok dengan prosentase 100%.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, didukung 3 kegiatan yaitu Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan Tangkap, Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Pengolah dan Pemasar Perikanan tangkap, Pemberdayaan dan Gelar Promosi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap. Target nilai tambah produk olahan perikanan tangkap sebesar Rp.6.721.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.626.400.000,00 dengan prosentase 98,58%. Sedangkan jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) yang naik kelas ditargetkan sebanyak 2 kelompok dan terealisasi 0 kelompok dengan prosentase 0%. Hal ini disebabkan karena jumlah poklahsar di Kota Pasuruan sebanyak 30 kelompok masih dalam proses dan masuk dikatagori kelas pemula

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, didukung 1 kegiatan yaitu Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan Budidaya. Target nilai tambah produk olahan perikanan budidaya sebesar Rp.12.611.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.625.130.600,00 dengan prosentase 100,11%

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Namun demikian masih ada kendala permasalahan yang perlu dihadapi dan ditemui dilapangan tahun 2019, diantaranya yaitu:

- 1. Belum semua nelayan menjadi anggota asuransi nelayan;
- 2. Belum tertata secara teratur bersandarnya kapal nelayan, baik kapal kecil maupun kapal besar;
- 3. Proses penjualan hasil tangkapan nelayan masih bergantung kepada tengkulak (Juragan Ikan);
- 4. Belum semua kelompok perikanan yang memiliki Badan Hukum Indonesia (BHI);

- 5. Masih langka-nya penyediaan pupuk subsidi untuk petani tambak
- 6. Belum berkembangnya pola pemasaran hasil olahan perikanan.
- 7. Belum optimalnya pengembangan teknologi budidaya perikanan.

### C.2. Solusi

Dari beberapa permasalahan yang ada, solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kesadaran nelayan terhadap asuransi mandiri.
- Dilakukan pengaturan bersandarnya kapal dan pembuatan kolam labuh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- 3. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 4. Peningkatan sosialisasi tentang manfaat Badan Hukum Indonesi (BHI) bagi Kelompok Perikanan.
- 5. Penghitungan dan penyampaian kebutuhan pupuk subsidi kepada pihak yang berwenang.
- 6. Peningkatan promosi produk hasil olahan perikanan utamanya Digital marketing
- 7. Pembinaan lebih intensif terkait tekonologi budidaya perikanan melalui sekolah lapang.

### 3.2. Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata, diarahkan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata berkonsep religi, edukatif maupun rekreatif, urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran

Penyelenggaraan urusan Pariwisata yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata berkonsep religi, edukatif maupun rekreatif. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke IV antara lain "Meningkatkan Pengembangan Perdagangan dan Indutri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak". Diharapkan,

destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan akan menciptakan pasar bagi UMKM, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.59

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kunjungan Wisata	Pengunjung	164.231	476.637	290,22%

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019

Indikator kinerja urusan pariwisata yaitu Jumlah Kunjungan Wisata dengan target sebanyak 164.231 dan terealisasi sebanyak 476.637 sehingga tercapai target sebesar 290,22%. Merupakan jumlah keseluruhan dari Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kota Pasuruan pada Tahun 2019 melalui pengambilan data dengan cara meminta data langsung ke obyek wisata dan sampling acak sederhana. Kunjungan wisata di Kota Pasuruan didominasi wisata religi dan taman tematik.

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Penyelenggaraan urusan pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran 2019, didukung oleh 2 (Dua) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.829.604.000 ( Tiga milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.215.049.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 83.9%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.60
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pariwisata

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				_
	Outcome : Jumlah Kerjasama dengan Media	Kerjasama	6	7	116,67%
	Anggaran	Rupiah	1.173.800.000	1,083.959.000	92.58%
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Outcome: Jumlah Destinasi/Event Pariwisata	Destinasi	17	20	133,33%
	Anggaran	Rupiah	2.658.804.000	2.1.31.090.000	80.15%

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019

Jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan adalah bentuk kerjasama dengan pihak (1) TMII, (2) Tim APEKSI Nasional, (3) Tim MTF, (4) Tim "Festival Makanan Khas Jawa Timur", (5) Tim "Pemilihan Raka-Raki", (6) Tim "Pawai Budaya JKPI", (7) Tim "Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Kota Pasuruan".

Jumlah destinasi wisata di Kota Pasuruan yaitu (1) Gedung P3GI, (2) Klenteng Tjoe Tik Kiong, (3) Alun-Alun Kota Pasuruan, (4) Pesta Panggung Hiburan Rakyat, (5) Prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan, (6) Pasuruan Jaman Bijen, (7) Wisata Meubel Bukir, (8) Taman Sekargadung, (9) Masjid Jami', (10) Kolam Renang Tirto Kencono, (11) Makam KH. Abdul Hamid, (12) Makam Mbah Slagah, (13) Pelabuhan Kota Pasuruan dan (14) Petilasan Untung Suropati. Pada tahun 2019 ada penambahan destinasi wisata yaitu (15) Taman Pekuncen, (16) Taman Lansia, (17) Taman GOR Untung Suropati, (18) Taman Hayati, (19) Taman Kota Pasuruan dan (20) Pedestrian Jalan Pahlawan sebagai kawasan kota pusaka.

#### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

### C.1. Permasalahan

Namun dalam perjalanan pelaksanaannya masih saja terjadi beberapa permasalahan yang timbul, hal ini dikarenakan adanya faktor intern dan ekstern. Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan pariwisata, antara lain:

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata, seperti halnya masalah kebersihan lingkungan dan kesehatan obyek wisata.
- 2. Kurangnya publikasi.
- 3. Kurangnya kesiapan masyarakat (dalam hal SDM).
- 4. Investasi yang belum banyak berkembang misalnya restoran, hotel dan jasa penyewaan transportasi.

## 5. Pengembangan dan penataan obyek wisata

### C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan diatas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan di tahun-tahun yang datang, yakni:

- 1. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata baik melalui peraturan maupun pendekatan persuasif.
- Pengelolaan kebersihan obyek wisata secara maksimal agar tercipta lingkungan yang sehat.
- 3. Perlu aturan yang mewajibkan setiap perda mengelola, mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif di daerah masing-masing.
- 4. Melaksanakan kegiatan promosi pariwisata yang baik dan efektif seperti halnya promosi destinasi dan pengawasan wisata melalui media sosial dan blog, melalui lomba promosi wisata.
- 5. Teknologi informasi yang memungkinkan turis lokal dan mancanegara mengakses info tentang wisata Kota Pasuruan.
- 6. Penataan obyek-obyek wisata, peningkatan sarana prasarana lebih baik lagi.

## D. Penghargaan

Penghargaan yang diterima untuk urusan pariwisata pada tahun 2019 adalah:

- 1. Festival Makanan Khas Jawa Timur Tahun 2019.
- Anugrah Duta Seni Dharma Budaya Jawa Timur 2019 di Anjungan TMII Jakarta "Abyakta Budaya" (Keberhasilan dalam meregenarasi Seniman)
- 3. Stan kecil terbaik Majapahit Travel Fair
- 4. 10 (sepuluh) besar Raki Jawa Timur

### 3.3. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan Pertanian, diarahkan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani, urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pertanian yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke IV antara lain "Meningkatkan Pengembangan Perdagangan dan Indutri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak". Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu sektor penggerak perkembangan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam lingkungan yang lebih sempit, pembangunan pertanian diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat tani pada faktor produksi diantaranya sumber modal, teknologi, bibit unggul, pupuk dan sistem distribusi sehingga berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan sektor Pertanian di Kota Pasuruan didukung oleh dua bidang yaitu bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan bidang peternakan.

Pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi perhatian utama adalah produksi tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Dalam hal ini produksi padi menjadi perhatian utama dalam mencukupi kebutuhan pangan di Kota Pasuruan. Produksi padi secara umum ditentukan oleh luas areal panen dan produktifitas. Pada Tahun 2019, untuk target produksi padi sebesar 16.508 Ton sedangkan hasilnya tercapai sebesar 17.223 Ton, dengan capaian realisasi 104.33%. Pengembangan tanaman hortikultura di Kota Pasuruan, telah diperhatikan namun penanganannya masih belum optimal. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.61

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Urusan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Produksi Padi	Ton	16.508	17.223	104.33
2	Produksi daging sapi	Ton	706,00	831,29	117.75

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Produksi Susu	Liter	24.100	24.333	100.97
4	Produksi Telur	Ton	129,00	143,71	111.40

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

Pada tahun 2018, produksi padi mencapai 17.913 ton. Dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan produksi sebesar 3.79% menjadi 17.233 Ton. Penurunan produksi padi ini dikarenakan luas tanam yang menurun di tahun 2018 seluas 2851 ha dan di tahun 2019 seluas 2586 ha.

Pada tahun 2019 bidang Peternakan mempunyai peran dalam peningkatan produksi daging, produksi susu dan produksi telur. Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) yang dalam hal ini produksi daging didapatkan dari pemotongan tercatat yaitu pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Kota Pasuruan dan tempat pemotongan unggas. Produksi susu didapatkan dari susu yang diproduksi dari sapi perah yang ada di Kota Pasuruan dan juga yang diperdagangkan. Produksi telur di dapatkan dari produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, itik dan entok) selama setahun dari populasi unggas di Kota Pasuruan, termasuk yang di tetaskan, rusak dan diperdagangkan di Kota Pasuruan.

Pada tahun 2019 target produksi daging 706.00 ton/tahun terealisasi 831,29 ton/tahun atau tercapai 117,75% disebabkan karena jumlah pemotongan sapi meningkat. Data realisasi produksi daging tahun 2018 adalah 749,73 ton/tahun. Perbandingan realisasi produksi daging antara tahun 2018 dengan tahun 2019 didapatkan pertumbuhan produksi daging meningkat sekitar 10,88%.

Target produksi susu tahun 2019 adalah 24.100 liter dan terealisasi 24.333 liter atau tercapai 100,97%. Hal ini disebabkan karena jumlah populasi sapi perah dalam masa produksi naik.

Data realisasi poduksi susu tahun 2018 adalah 26.418 liter sedangkan realisasi produksi susu tahun 2019 adalah 24.333 liter. Perbandingan Realisasi produksi susu antara tahun 2018 dengan tahun 2019 didapatkan bahwa terjadi penurunan produksi Susu sekitar 7,89%. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 kondisi sapi dalam keadaan

puncak produksi dan jumlah betina yang produksi lebih banyak dibandingkan jumlah sapi dengan umur masih muda dan jantan. Sedangkan pada tahun 2019 banyak betina dengan produktifitas yang kurang hal ini di sebabkan cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan tingkat stress yang tinggi terhadap ternak.

Target dari produksi telur tahun 2019 adalah 129.00 ton dan terealisasi 143,71 ton atau tercapai 111,40%. Hal ini disebabkan jumlah penyakit yang menyerang unggas dapat terkendali dan populasi ternak Ayam Ras Petelur yang berproduksi naik sekitar 14%.

Data realisasi Produksi telur tahun 2018 adalah 202,01 ton. Sedangkan data produksi telur tahun 2019 adalah 143,71 ton/tahun. Perbandingan realisasi produksi telur antara tahun 2018 dengan tahun 2019 terjadi penurunan produksi telur sekitar 28,86%. Tahun 2018 populasi ternak ayam ras petelur terjadi puncak produksi, sedangkan tahun 2019 terjadi *replacement* terhadap ayam ras petelur sehingga kondisi masih belum puncak produksi dan cuaca yang ekstrim salah satunya juga bisa menyebabkan terganggunya produksi telur yang mengakibatkan produksi telur tidak sesuai dengan standart pemeliharaan.

### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja urusan pertanian ini didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) program dan 19 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1,255,182,500,00 sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1,188,602,330,00 atau tingkat serapannya mencapai 95%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.62**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pertanian

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Peningkatan Produksi Pertanian Outcome : Jumlah Produktifitas Tanaman	Ton/Ha	6,5 Ton/Ha	6,6Ton/Ha	101.53
	Pangan Anggaran	Rp.Ribu	574.207.500	517.233.500	90
II	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan				
	Outcome:				

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Produksi Daging Sapi	Ton per tahun	706,00	831,29	118
	Produksi Susu	Liter per tahun	24.100	24.333	101
	Produksi Telur	Ton per tahun	129,00	143,71	111
	Populasi ternak Ruminasia	Ekor	4.200	4.298	102
	Populasi ternak Non Ruminansia	Ekor	88.300	115.069	130
	Anggaran	Rp.Ribu	445.040000	436,886,550	98

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

Pada tahun 2019 realisasi produktifitas tanaman pangan sebesar 6,6 Ton/Ha dengan pencapaian 101.53% dari target sebesar 6,5 Ton/Ha. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan penggunaan pemupukan berimbang sehingga realisasi produktifitas padi mengalami peningkatan.

Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas pertanian yang bersumber dari dana APBD yaitu kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian dengan sumber pembiayaan dari DAK.

Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dapat memfasilitasi petani dalam menyusun kebutuhan pupuk yang diperlukan untuk kegiatan budidaya pertanian. Dengan demikian kebutuhan pupuk dapat terpenuhi sehingga dapat menunjang keberhasilan kegiatan budidaya pertanian.

Pada tahun 2018 realisasi produktifitas tanaman padi sebesar 6,57 ton/ha. Dibandingkan dengan tahun 2019 pencapaian produktifitas padi mengalami peningkatan sebesar 0,07% menjadi 6,64 ton/ha. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktifitas padi ini dikarenakan adanya pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, intensifnya penyuluhan dan pendampingan.

Peningkatan sarana prasarana pertanian memiliki peranan penting terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Sarana dan prasarana pertanian tersebut antara lain pemilihan benih, pemenuhan pupuk, pemenuhan alat dan mesin pertanian, dan pemeliharaan infrastruktur pertanian. Dalam pemilihan benih, petani mulai menyesuaikan antara benih yang dipilih dengan kondisi iklim. Petani tidak lagi fanatik terhadap 1 jenis varietas padi. Pada saat musim penghujan, petani cenderung memilih varietas padi yang tahan terhadap rendaman dan serangan hama dan penyakit yang

banyak menyerang pada saat musim penghujan. Hal ini tidak terlepas dari penyuluhan – penyuluhan serta demplot yang membuka wawasan petani.

Tercukupinya alat dan mesin pertanian juga menjadi faktor penunjang peningkatan produksi pertanian. Saat ini terdapat 53 mesin olah lahan (*hand traktor*) yang diperbantukan kepada kelompok tani di Kota Pasuruan. Adanya mesin ini dapat mempercepat kegiatan pengolahan lahan sehingga proses penanaman padi dapat dilakukan lebih cepat.

Program peningkatan produksi hasil peternakan diukur dengan indikator produksi daging sapi, produksi susu, produksi telur, populasi ternak ruminansia dan populasi ternak non ruminansia.

Program peningkatan produksi hasil peternakan merupakan salah satu program yang bertujuan meningkatkan produksi peternakan, meningkatkan nilai tambah produk peternakan dan meningkatkan kemampuan kelompok peternak. Salah satu kegiatan yang mendukung dalam meningkatkan produksi peternakan adalah kegiatan agribisnis peternakan melalui kegiatan Inseminasi Buatan pada Kambing. Kegiatan ini di jalankan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas anakan di samping itu juga peningkatan populasi ternak kambing dapat terealiasi. Pada tahun 2018 populasi ternak kambing tercatat 3.104 ekor sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.142 ekor, didapatkan data populasi naik sekitar 1,00% dibandingkan tahun 2018. Peningkatan ini karena aktivitas kegiatan Pengembangan Budidaya Peternakan Ruminansia dengan menjalankan sosialisasi pengembangan budidaya kepada peternak Ruminansia khususnya kambing dan juga melaksankan kegiatan Inseminasi Buatan kambing. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi ternak kambing karena di samping peternak sedikit banyak sudah mengetahui cara pembudidayaan ternak kambing dengan baik juga dari hasil Inseminasi di dapatkan kualitas anak yang bagus dan beranak kembar. Mengingat kebutuhan ternak gurban di saat hari raya idul adha pemotongan di tahun 2019 tercatat sapi 404 ekor, kambing 2.303 ekor dan domba 23 ekor. Oleh sebab itu peningkatan populasi ternak ruminansia khususnya kambing di Kota Pasuruan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius guna meningkatkan populasi sehingga harapan kesejahteraan peternak dapat tercapai.

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan pertanian, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, antara lain:

- Kurangnya kesadaran pemilik lahan pertanian untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, saluran irigasi dan alat mesin pertanian (pompa air).
- 2. Kurangnya minat petani untuk melakukan budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan, meskipun nilai tambahnya cukup tinggi dibanding tanaman padi.
- 3. Belum optimalnya pelaksanaan sapta usaha tani.
- 4. Kurang aktif nya forum komunikasi antar kelompok tani.

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan pertanian, bidang peternakan, antara lain:

- Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok-kelompok peternakan terhadap pembudidayaan peternakan.
- Peternakan di perkotaan menjadi masalah tersendiri terhadap tata ruang wilayah.
- 3. Kurangnya pengetahuan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan olahan produk pangan asal hewan.
- 4. Kurangnya hygenitas daging dari tempat pemotongan hewan.

### C.2. Solusi

Solusi yang diupayakan untuk bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, adalah:

- Peningkatan pemahaman terhadap pemilik lahan tentang pemeliharaan sarpras pertanian.
- 2. Perlunya demplot budidaya hortikultura dan perkebunan untuk lahan percontohan bagi petani.
- 3. Perlunya pelatihan terkait teknologi pertanian.
- 4. Perlu adanya forum kelompok tani sebagai wadah antara petani dan Dinas Pertanian untuk bertukar informasi terkait permasalahan infrastruktur pertanian dan pemeliharaan alat mesin pertanian.

Solusi yang diupayakan untuk bidang peternakan, adalah:

- 1. Melaksanakan sosialisasi terhadap peternak atau komunitas hewan kesayangan terkait penyakit hewan menular, serta mengoptimalkan fungsi puskeswan.
- 2. Melakukan pembinaan terhadap peternak/kelompok ternak terhadap pembudidayaan peternakan.
- 3. Pemetaan dan penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensi ternak unggulan daerah.
- 4. Teknologi pasca panen Produk Pangan Asal hewan yang baru disosialisasikan ke Pelaku Usaha Peternakan.
- 5. Meningkatkan hygienitas terhadap ternak sebelum pemotongan dan sesudah pemotongan di tempat pemotongan hewan.

## 3.6. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan, baik melalui perbaikan sistem maupun prasarana dan sarana perdagangan, termasuk diantaranya adalah perlindungan konsumen, urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor perdagangan, baik melalui perbaikan sistem maupun prasarana dan sarana perdagangan, termasuk diantaranya adalah perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke IV antara lain "Meningkatkan Pengembangan Perdagangan dan Indutri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak".

Urusan perdagangan menduduki peran strategis dalam memfasilitasi, menggerakkan seluruh komponen mendorong dan perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan serta mempertahankan stabilitas perekonomian daerah, melalui dukungan terhadap kelancaran arus barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat serta mendorong pembentukan harga secara wajar. Pembangunan perdagangan salah satu aspek penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan usaha memperluas kesempatan kerja dalam peningkatan serta pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Sektor perdagangan di Kota Pasuruan lebih di dominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil menengah (UKM). Sektor UKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestic.

Dalam rangka mewujudkan daya saing perdagangan di Kota Pasuruan, kebijakan yang ditetapkan adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengembangkan akses pasar dalam negeri maupun internasional, peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian serta mewujudkan daerah tertib ukur. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.63
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	%	28,06	29,46	104,98

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

Pada tahun 2019 nilai Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pasuruan ditargetkan sebesar 28,06% dan terealisasi sebesar 29,46% dengan tingkat capaian sebesar 104,98%. Pertumbuhan ekonomi global berkontribusi pada perekonomian daerah, hal ini terlihat dengan adanya pencapaian nilai ekspor yang dilakukan pelaku usaha daerah khususnya pada sub industri pengolahan dan perluasan mitra dagang, sehingga mendukung daya beli konsumsi bagi masyarakat.

# B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan urusan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mempunyai 3 (tiga) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan selama tahun 2019. Alokasi anggaran untuk urusan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 adalah sebesar Rp.10.821.101.340,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.735.856.806,00 (80,73%) yang diterapkan melalui program dan kegiatan (sebagaimana tabel di bawah ini). Pada bagian berikut akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan pada beberapa program. Analisis ini didasarkan pada 3 (tiga) program yang memiliki kontribusi menonjol dari kegiatan-kegiatan pada program yang memiliki keterkaitan dengan indikator utama.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.64**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perdagangan

		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perlindungan Konsumen dan				
	Pengamanan Perdagangan				
	Outcome :		70,63	87.50	124
	Persentase pengendalian tertib niaga	%			
	Anggaran	Rp.	289.000.000	180.619.000	62.50%
	Persentase pengendalian tertib niaga		.,		62

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam				_
	Negeri				
	Outcome :	Rp.Mily	157.594	895.177**	568**
	Jumlah omset ekspor IKM				
	Anggaran	Rp	3.322.790.000	2.624.629.897	78,99%
3	Peningkatan layanan Perdagangan				
	dalam Negeri				
	Outcome :				
	Persentase PKL yang tertata	%	10	9	90%
	Persentase pasar berstandar SNI	%	20	-	-
	Anggaran	Rp	7.209.311.340	5.930.607.909	82.26%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

Prioritas bidang perdagangan tahun 2019 yaitu (1) meningkatnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi, (2) meningkatnya ekspor ke Luar Negeri, (3) meningkatnya kemampuan pelaku ekspor, (4) meningkatnya kualitas dan kuantitas Usaha dagang kecil menengah, (5) terciptanya pengukuran dalam transaksi perdagangan. Pada tahun 2019 pembangunan perdagangan difokuskan pada tujuan terwujudnya sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui APBD Kota Pasuruan tahun 2019 telah dialokasikan sebesar Rp.3.611.790.000,00 total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.805.248.897,00 atau sebesar 77% yang didukung oleh 2 (dua) program, yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan serta Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pada pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan pada beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan alat –alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP merupakan kegiatan fasilitasi yang diperuntukkan bagi setiap pelaku usaha yang memiliki alat timbangan baik besar maupun kecil dengan berbagai jenis alat UTTPnya. Target kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2019 adalah 1000 unit alat UTTP yang akan ditera ulang, akan tetapi dikarenakan Kota Pasuruan tidak bisa melakukan pelayanan kemetrologian secara mandiri dan telah dilakukan kerjasama dengan pihak luar

namun tidak terlaksana karena keterbatasan personil, maka realisasi kinerja yang dicapai adalah nol. Sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp.33.850.000 digunakan untuk kegiatan kalibrasi standar kemetrologian yang akan digunakan untuk pelayanan tera/tera ulang.

- 2. Perlindungan dan mediasi penyelesaian sengketa konsumen, Pada kegiatan tersebut diatas terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu mediasi penyelesaian sengketa konsumen dan sosialisasi penyelesaian sengketa konsumen. Target kinerja pelaksanaan pada sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa konsumen pada tahun 2019 adalah jumlah mediasi penyelesaian sengketa konsumen sebanyak 12 kali, akan tetapi didasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Perlindungan konsumen (sengketa konsumen) ada pada Daerah Provinsi. Sehingga tidak dapat dilaksanakan di daerah kabupaten/kota, maka realisasi kinerja yang dicapai adalah nol
- 3. Monitoring harga bahan pokok dan ketersediaan barang, Kegiatan tersebut memiliki output jumlah pemantauan jenis harga kebutuhan pokok dan jumlah pengawasan ketersediaan barang dan kualitas yang tercapai sebesar 100%
- 4. Pelayanan UPT Kemetrologian, Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk mensupport kegiatan pelayanan kemetrologian dimana menyediakan sarana dan prasarana kemetrologian dengan fokus pada pengadaan berupa Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Belanja Modal Pengadaan Timbangan. Untuk pengadaan komputer terdiri dari komputer 2 (dua) unit, printer dengan 1 (satu) unit dan UPS/Stabilizer sebanyak 1 (satu) unit.

Persentase pengendalian tertib niaga mencapai 87,50% dan ini lebih tinggi bila dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 70,63%.

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri diukur dengan indikator jumlah omzet ekspor IKM merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor IKM selama tahun 2019 yaitu dengan target Rp.157.594.000.000,00 terealisasi Rp.895.177.000.000,00. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain sarasehan pelaku usaha kecil dan menengah, penyusunan dan

pemutakhiran data usaha kecil dan menengah, fasilitasi pekan promosi, promosi produk unggulan, fasilitasi kemitraan usaha dan penyelenggaraan pasar murah. Salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya program ini adalah promosi produk unggulan daerah, dimana ini merupakan kegiatan yang memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha untuk dapat memasarkan produknya melalui keikutsertaan pameran baik domestik maupun internasional.

Sedangkan untuk kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019 yang belum dapat tercapai adalah fasilitas kemitraan usaha dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp.120.000.000,00. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terkait proses administrasi dalam penerbitan berkas kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pontianak.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan khususnya pada Bidang Pengelolaan Pasar di dukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Layanan Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2019 dengan anggaran yang tersedia Rp.7.209.311.340,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp.5.930.607.909,00 atau tingkat serapannya mencapai 82,26%.

Capaian indikator presentase jumlah PKL yang ditata adalah sebesar 90%. Salah satu untuk menata PKL adalah dengan melaksanakan pembinaan terkait ketertiban dan kebersihan. Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2019 sebanyak 50 orang dari total 538 PKL di Kota Pasuruan, dengan demikian jumlah PKL yang terbina tahun 2019 mencapai 9%. Sedangkan anggaran yang tersedia sebesar Rp.20.000.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp.19.250.000,00 atau sebesar 96%.

Terkait capaian indikator Persentase Pasar Berstandart SNI sebesar 20% dari 5 pasar yaitu Pasar Besar, Kebonagung, Karangketug, Gading dan Poncol. Untuk penerapan pasar ber SNI direncakanan pada pasar Kebonagung, namun sampai akhir tahun anggaran 2019 belum tercapai, disebabkan oleh.

Kondisi fisik sarana dan prasarana yang masih belum memadai untuk dapat mencapai status SNI

 Karakter umum dan pola kebiasaan dari SDM di pasar yang masih sulit untuk menerapkan standard perilaku Pasar Ber SNI.

Kondisi fisik sarana dan prasarana di 6 pasar memerlukan pemeliharaan baik secara ringan maupun berat. Untuk itu pada tahun 2019 telah dianggarkan untuk kegiatan tersebut melalui APBD Kota Pasuruan sebesar Rp.1.200.096.200,00 dan DAK Penugasan sebesar Rp.2.429.328.240,00 sehingga total anggaran sebesar Rp.3.629.424.440,00 namun didalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp.2.779.941.743,00. Dua faktor utama penyebab persentase realisasi sebesar 76,59% adalah:

- Belanja Pengadaan Tenda dengan anggaran Rp.150.000.000,00 tidak dilaksanakan karena penerima bantuan hibah tenda (Kelompok Paguyuban PKL) belum memiliki legalitas (BerBadan Hukum) KemenkumHam RI
- Kegiatan Rehabilitasi Atap Pasar Induk Pasar Kebonagung dengan anggaran
   Rp.300.000.000,00 tidak dilaksanakan karena telah dicover oleh kegiatan DAK
   Penugasan Revitalisasi Pasar Kebonagung

Terkait kinerja layanan pasar pada tahun 2019 meningkat, yang dapat dilihat dari peningkatan retribusi pasar sebesar 7,7% dari Rp.1.621.000.000,00 pada tahun 2018 menjadi Rp.1.747.000.000,00 pada 2019, sebagai kontribusi dari pembayaran tunggakan retribusi pada tahun sebelumnya sebesar Rp.99.600.000,00.

### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam urusan perdagangan, antara lain:

 Belum adanya kurasi produk yang akan diikutsertakan dalam pameran ( promosi produk ).

- 2. Terbatasnya kualitas produk IKM yang memenuhi standart
- 3. Adanya beberapa pelaku usaha yang mandiri tetapi masih mengantungkan promosi produk pada fasilitasi pemerintah.
- 4. Terdapat beberapa pelaku usaha yang belum mempunyai legalitas usaha.
- 5. Belum tersedianya sarana dan prasarana kemetrologian, dan sumber daya manusia kemetrologian yang memadai.
- 6. UPT. Kemetrologian belum memenuhi standar Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
- 6. Tertundanya pelaksanaan rencana rehab berat dan ringan di beberapa pasar.
- 7. Kurangnya kesadaran para pedagang dan PKL dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

### C.1. Solusi

- Melakukan kurasi produk ( sekitar 1-2 bulan ) sebelum dibawa ke pameran, sesuai dengan kelas pameran yang akan diikuti.
- 2. Meningkatkan kualitas produk bagi IKM dengan memberikan beberapa pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga memiliki daya saing.
- Mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas usahanya.
- 4. Mendorong para pelaku usaha untuk mandiri dalam promosi produknya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5. Melengkapi Sarana dan Prasarana UPT Kemetrologian secara bertahap.
- 6. Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan UPT Kemetrologian untuk memenuhi standard pelayanan tera dan tera ulang.
- 7. Pengalokasian rencana ulang rehab bangunan fisik melalui anggaran baik APBD maupun dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- 8. Kegiatan pembinaan terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima setiap tahun berkaitan dengan masalah retribusi, kesadaran ketertiban dan kebersihan lingkungan dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

#### 3.7. Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan Perindustrian, diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor perindustrian, baik melalui perbaikan sistem maupun prasarana dan sarana, urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Perindustrian yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor perindustrian, baik melalui perbaikan sistem maupun prasarana dan sarana. Dalam pelaksanaan urusan tersebut didukung misi ke IV antara lain " Meningkatkan Pengembangan Perdagangan dan Indutri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak".

Kota Pasuruan memiliki industri kecil dan menengah yang cukup berkembang seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian. Keberadaan industri kecil dan menengah turut memberikan kontribusi terhadap besaran PDRB Kota Pasuruan. Peningkatan kualitas sumber daya industri kecil dan menengah merupakan kata kunci yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan urusan perindustrian, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, relevan dengan perwujudan misi ke-IV, yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif.

Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas keberbagai sektor jasa, penyedia bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Selain itu sektor industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

Komoditas unggulan industri kecil dan menengah Kota Pasuruan antara lain adalah produk mebel/furniture, produk logam, makanan minuman, produk konveksi, batik, anyaman bambu dan alas kaki. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.65
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Sektor Perindustrian pada PDRB	%	21,14	20,04	94,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

Pada Tahun 2019 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Pasuruan ditargetkan sebesar 21,14% dan terealisasi sebesar 20,04% dengan tingkat capaian sebesar 94,79%. Penurunan realisasi ini dikarenakan beberapa hal diantaranya ada beberapa perusahaan yang tutup dan juga ada yang tidak beroperasi. Efek dari perusahaan yang tidak beroperasi ini mengakibatkan tenaga kerja produktif memilih bekerja di perusahaan yang ada di luar Kota Pasuruan.

# B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian target indikator kinerja Penyelenggaraan urusan perindustrian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2019 didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.796.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.772.711.774,00 atau sebesar 97,07 persen.

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Perindustrian di ukur dengan indikator Prosentase IKM yang berkembang. Prosentase IKM yang berkembang dimaksud adalah prosentase IKM yang berkembang dari segi peningkatan kemampuan dan kecakapan (skill) industri untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi produk IKM yang unggul. Dari 162 IKM yang dilatih dan dibina, terdapat 54 IKM telah mengalami perkembangan yang cukup baik.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.66
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perindustrian

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.				
	Outcome : Prosentase IKM berkembang	Persen	30	33,33	111.11
	Anggaran :	Rp.	796.000.000	772,711,774	97,07

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

Dari Tabel 4.4 diatas bisa dilihat Prosentase IKM yang berkembang mencapai 33,33% dan ini lebih tinggi bila dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 30%. Prosentase IKM yang berkembang ini didasarkan pada IKM yang telah dibina. Perkembangan IKM ini dilihat dari peningkatan skill atau kemampuan SDM pengrajin, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi atau standardisasi produk, produktivitas dan diversifikasi produk yang dihasilkan.

Capaian kinerja indikator urusan perindustrian merupakan kontribusi dari 11 kegiatan dari 1 Program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Hasil dan/atau capaian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah didukung oleh berbagai kegiatan pelatihan pengembangan produk Mebel, Logam, Makanan Olahan, Konveksi, Kerajinan dan Batik.

# C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

# C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan perindustrian antara lain:

- 1) Rendahnya kualitas SDM industri
- 2) Mahalnya ketersediaan bahan baku
- 3) Lemahnya daya saing
- 4) Terbatasnya jaringan pemasaran

- 5) Kurangnya akses permodalan
- 6) Legalitas usaha

#### C.2. Solusi

- 1) Memanfaatkan tenaga ahli dalam peningkatan kualitas SDM industri untuk pengembangan ketrampilan pelaku IKM .
- 2) Fasilitasi kerjasama dalam hal pemenuhan bahan baku dengan daerah penghasil bahan baku.
- 3) Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan standardisasi produk IKM serta diversifikasi/inovasi agar mempunyai daya saing di pasaran.
- 4) Peningkatan pelaku usaha dalam memanfaatkan aplikasi pemasaran secara online dengan tidak meninggalkan pemasaran offline.
- 5) Memfasilitasi IKM terhadap akses sumber pembiayaan ( Modal ).
- 6) Fasilitasi dan pendampingan IKM dalam melengkapi legalitas usahanya.

# 3.9. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha, urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

#### A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan transmigrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha didukung misi ke tiga yaitu menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif.

Capaian indikator urusan transmigrasi, yaitu jumlah transmigrasi yang diberangkatkan dengan target 5 KK terealisasi 1 KK transmigran dengan capaian 20%, dengan lokasi transmigrasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat bertempat di Desa Ramuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Adapun

Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.67

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	jumlah	5	1	20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2019.

## B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Dalam rangka melaksanakan urusan transmigrasi didukung oleh satu program dan tiga kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.172.965.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.114.542.689,00 atau tingkat serapannya mencapai 66,02%.

Pelaksanaan program transmigrasi regional diukur dengan indikator jumlah peserta tansmigran yang diberangkatkan dengan target 5 KK dan terealisasinya 1 KK atau capaian adalah 20%. Dari 2 KK calon transmigran yang mendaftar dan mengikuti seleksi di tingkat propinsi, sebanyak 1 KK dinyatakan tidak lolos seleksi.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.68**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Transmigrasi

Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah	5	1	20
KK			
Rp	172.965.000,00	114.542.689,00	66,22
•			
KK	5	1	20
Rp	41.195.000,00	9.930.000,00	24,1
KK	5	1	20
lokasi	1	1	100
Rp	112.440.000,00	88.816.689,00	78,99
orang	70	70	100
•			
KK	10	2	20
Rp	19.330.000,00	15.796.000,00	81,72
	Jumlah KK Rp KK Rp KK lokasi Rp orang	Satuan         Target           Jumlah         5           KK         Rp           Rp         172.965.000,00           KK         5           Rp         41.195.000,00           KK         5           lokasi         1           Rp         112.440.000,00           orang         70           KK         10	Satuan         Target         Realisasi           Jumlah KK         5         1           Rp         172.965.000,00         114.542.689,00           KK         5         1           Rp         41.195.000,00         9.930.000,00           KK         5         1           lokasi         1         1           Rp         112.440.000,00         88.816.689,00           orang         70         70           KK         10         2

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2019.

Kegiatan yang mendukung program transmigrasi regional dalam upayanya mencapai target indikator kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi, diantaranya adalah kegiatan penyuluhan tentang ketransmigrasian dengan indikator kegiatannya adalah jumlah masyarakat yang memahami tentang transmigrasi dengan target jumlah peserta sebanyak 70 orang dan terealisasi sebanyak 70 orang atau mencapai 100%. Sedangkan yang berminat dan mendaftar menjadi calon transmigran adalah sebanyak 2 KK yang selanjutnya mengikuti proses seleksi ditingkat propinsi dengan hasil dinyatakan lolos seleksi sebanyak 1 KK untuk selanjutnya diberangkatkan dan ditempatkan dilokasi transmigrasi.

## C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

# C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan transmigrasi, antara lain:

- Kurang minatnya masyarakat Kota Pasuruan untuk mengikuti program transmigrasi
- Beberapa daerah yang ditawarkan sebagai lokasi tujuan transmigrasi memiliki akses yang sulit dijangkau dan kondisi lahan yang diprediksi sulit untuk diolah menjadi lahan produktif,

#### C.2. Solusi

- 1). Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pasuruan tentang program transmigarasi regional kepada masyarakat.
- 2). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah propinsi Jawa
  Timur maupun daerah-daerah yang menjadi lokasi tujuan penempatan

transmigrasi untuk mendapatkan lokasi tujuan penempatan transmigrasi yang tepat serta peningkatan jaminan hidup dilokasi transmigrasi.

# 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pilihan didukung oleh 6 (enam) urusan yang terdiri dari urusan administrasi pemerintahan, urusan pengawasan, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan penelitian dan pengembangan, adapun penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

## 4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan Administrasi Pemerintahan, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kecamatan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke VI yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Sebagai bahan dari tuntutan Reformasi Birokrasi, maka perbaikan/reformasi dibidang manajemen publik dipandang sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai maksud tersebut, saat ini fokus pada aktivitas birokrasi seharusnya bukan lagi administratif tetapi harus bergeser kearah manajeman, jika demikian maka prinsip-prinsip efisien, efektifitas, maupun ekonomis (3E) dalam menjalankan seluruh aktivitas maupun penggunaan sumberdaya organisasi harus terukur.

Aktivitas yang terukur yang dilakukan didalam organisasi baik dalam pelaksanaan maupun hasilnya akan lebih dapat dipertanggung jawabkan dibandingkan bila tidak diterapkan sebuah system pengukuran yang obyektif, agar pengukuran kinerja tersebut mampu memenuhi prinsip dasar yang akuntabilitas dan

transparansi, maka hasil kinerja yang dicapai setiap instansi pemerintah dapat diakses dan dinilai dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk menunjang perbaikaan kinerja dapat diukur dengan indikator dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota yang memiliki target dengan nilai B, terealisasi dengan nilai B tercapai 100%.

Indikator Jumlah PD yang memiliki SOP dengan target 41 PD tercapai 100% dengan target PD yang ada sekarang. Indikator Jumlah UPP yang memiliki standart pelayanan publik dengan target 120 UPP tercapai 100% didukung dengan Kegiatan pembinaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun inovasi yang nantinya dapat diterapkan dalam langkah seharihari untuk berinovasi dalam meliputi berbagai macam konten. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.69
Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan

		<u>,                                      </u>			
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Laporan Akutabilitas Kinerja Pemrintah Kota	Statemen	В	В	100
2	Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	41	41	100
3	Jumlah UPP yang memiliki standart pelayanan publik	UPP	120	120	100
4	Jumlah SKPD yang menyusun laporan SPM	SPM	15	15	100

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kecamatan, 2019

#### B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Umum, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah fungsi penunjang, antara lain, ditunjang dengan 4 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran senilai Rp.28.162.632.000,00. terealisasi sebesar Rp.21.112.343.255,00 atau tercapai 75%.

Guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bag.umum sebagai pelaksana urusan pemerintahan fungsi penunjang didukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100% terealisasi sebesar 92%, program ini

didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan diantaranya adalah kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan kepala daerah, Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran, Penyediaan jasa keamanan Gedung perkantoran, dan Fasilitas Penunjang Kegiatan Upacara/Forum Silaturahmi Muspida/pimpinan Daerah dan Masyarakat.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan hal ini dilaksanakan oleh bag. Umum dengan indikator persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak dengan target 80% terealisasi sebesar 76% dengan capaian 95%, program ini ditunjang oleh 8 (Delapan) kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan dinas, Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan dan operasional rumah dinas sekretaris daerah beserta prasarana dan sarananya, Pemeliharaan dan operasional gedung beserta prasarana dan sarananya di lingkungan rumah dinas kepala daerah, Pemeliharaan dan operasional rumah dinas wakil kepala daerah beserta prasarana dan sarananya, Pemeliharaan dan operasional gedung rumah dinas kepala daerah beserta prasarana dan sarananya, Pemeliharaan dan operasional gedung sekretariat daerah beserta prasarana dan sarananya. Dalam hal ini terdapat kegiatan yang terjadi gagal tender pada proses evaluasi penyedia dikarenakan barang yang di minta masih dalam proses inden (barang impor) yaitu pengadaan mobil dinas bagi kepala daerah sedangkan untuk memulai proses lelang ulang waktu sudah tidak mencukupi sehingga tidak dapat memenuhi target penyerapan anggaran secara maksimal.

Program Peningkatan disiplin aparatur dengan indikator persentase aparatur yang menggunakan atribut kedinasan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 53% program ini didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tidak dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan karena Gagal tender yang disebabkan oleh adanya spesifikasi teknis yang tidak bisa dipenuhi

oleh penyedia, sedangkan untuk memulai proses lelang ulang waktu sudah tidak mencukupi, maka kegiatan tersebut tidak dapat terserap maksimal;

Akuntabilitas kinerja yang baik juga diperlukan dalam fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh bag.umum hal ini diwujudkan dalam Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator persentase laporan yang tersusun tepat waktu dengan target 100%, dan terealisasi sebesar 70% hal ini disebabkan penyelesaian pelaporan yang tidak tepat waktu.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah (Bagian Organisasi) ini, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.1.203.136.200,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.109.628.816 atau tingkat serapannya mencapai 92,23%.

Program peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP B dengan target 100% tercapai 100%, program ini didukung dengan Kegiatan Pembinaan Implementasi SAKIP merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan secara rutin pada setiap tahun karena terkait dengan pemahaman perangkat daerah tentang akutabilitas kinerja perangkat daerah yang sudah mulai mengena pada sasaran, terlihat bahwa dalam setiap kegiatan yang hampir sama dalam satu program telah di efisiensikan yang semula dari 214 program menjadi 126 program.

Program peningkatan pelayanaan publik dan ketatalaksanaan dengan indikator Persentase unit pelayanan publik yang sudah melaksanakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan dan sistem pelayanan publik serta inovasi dengan target 80% atau 96 UPP dari 120 UPP yang ada pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 93,3% atau 112 UPP yang telah melaksanakan standar pelayanan, maklumat pelayanan serta survey kepuasan masyarakat. Capaian dari Program peningkatan pelayanaan publik dan

ketatalaksanaan sebesar 116,3%, program ini didukung dengan Kegiatan pembinaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun inovasi yang nantinya dapat diterapkan dalam langkah sehari-hari untuk berinovasi dalam meliputi berbagai macam konten.

Program Penataan dan pengembangan jabatan dengan indikator persentase jabatan sesuai dengan analisis jabatan dan evaluasi jabatan perangkat daerah target 85% atau 296 jabatan dari 331 jabatan tercapai 100% atau 331 jabatan yang telah memiliki analisa jabatan dan evaluasi jabatan, sehingga capaian program Penataan dan pengembangan jabatan 117,6%. Dari 331 jabatan tersebut diatas masih terdapat 41 jabatan yang sedang dalam proses validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan penataan dan pengembangan jabatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan analisa dan evaluasi jabatan guna menentukan kelas jabatan, sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini, didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 13 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.983.691.200,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.756.901.969,00 atau tingkat serapannya mencapai 76,95%.

Capaian kinerja indikator Program Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan, antara lain :

- 1. Indikator Presentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan target 100%, terealisasi 73% dengan prosentase capaian 73%, tidak tercapainya indikator program dikarenakan ada salah satu kegiatan yang tidak dapat terserap.
- 2. Indikator Jumlah kecamatan dan kelurahan dengan kategori baik memiliki target 4 kecamatan 34 kelurahan, terealisasi 4 kecamatan 34 kelurahan dengan capaian 100%.

3. Indikator Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti memiliki target 100%, terealisasi 100% dengan capaian 100%.

Pada bagian berikut, akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan pada tahun 2019. Analis program ini di dasarkan, antara lain, dari kinerja kegiatan yang memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan.

Pelaksanaan koordinasi melalui forum sekretaris daerah seluruh Indonesia, dapat disampaikan bahwa Penyusunan perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum akan selalu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam urusan administrasi pemerintahan.

Selain itu, untuk kegiatan Penjajagan peluang kerjasama cukup dilakukan dengan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan yang harus ditidaklanjuti oleh PD, lembaga dan pihak ke 3 yang akan mengajukan kerjasama daerah guna mensinergikan dan mengimplementasikan melalui nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 8 kegiatan dimana 2 program dengan 3 kegiatan merupakan program dan kegiatan penunjang DBHCHT, dengan total anggaran senilai Rp.848.400.000,00 dimana Rp. 263.400.000,- bersumber dari APBD dan sebesar Rp.585.000.000,00 bersumber dari DBHCHT. Sampai dengan akhir Tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.749.361.966,00 atau tingkat serapannya mencapai Rp. 88,3 %.

Pelaksanaan program peningkatan kinerja pembangunan bidang ekonomi dan SDA diukur dengan indikator presentase rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan SDA yang ditindaklanjuti perangkat daerah. Pada Tahun 2019, prosentase

rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan SDA yang ditindaklanjuti perangkat daerah ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja dapat tercapai karena didukung oleh kerjasama dengan perangkat daerah sehingga rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan SDA dapat ditindaklanjuti dengan baik, terbukti dengan tercapainya target pada Tahun 2019 sebesar 85%.

Pelaksanaan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai diukur dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Pada Tahun 2019, jumlah peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan ditargetkan sebesar 4 pasal dan terealisasi sebesar 4 pasal sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja dapat tercapai karena didukung oleh kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dan media massa sehingga peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat tersampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, terbukti dengan tercapainya target pada Tahun 2019.

Pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal diukur dengan indikator persentase temuan barang kena cukai ilegal. Pada Tahun 2019, persentase temuan barang kena cukai ilegal ditargetkan sebesar 10 % dan terealisasi sebesar 0% yang berarti sudah tidak ditemukan rokok ilegal atau tanpa pita cukai di Kota Pasuruan. Capaian indikator kinerja dapat tercapai karena didukung oleh adanya pemahaman masyarakat yang baik terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA berperan secara tidak langsung dalam menangani indikator makro terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi karena hanya sebagai koordinator perangkat daerah terkait. Meskipun begitu, peran yang dimiliki cukup penting mengingat sebagai yang merekomendasikan kebijakan seperti pembentukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan melalui Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan baik itu Bidang

Penanaman Modal, BUMD dan Sarana Perekonomian, Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maupun Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.

Capaian kinerja urusan indikator makro (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) dan program peningkatan kinerja pembangunan bidang ekonomi dan SDA, antara lain merupakan kontribusi akumulasi dari 5 kegiatan, yang lebih terperinci disajikan pada lampiran. Pada bagian berikut, akan disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan indikator makro (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) pada Tahun 2019. Analisis ini antara lain didasarkan dari kinerja kegiatan yang memiliki kontribusi menonjol, ataupun dari kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada program peningkatan kinerja pembangunan bidang ekonomi dan SDA.

Inflasi atau gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena inflasi yang tak terkendali bisa membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu. Karena alasan itulah, maka di masing-masing daerah Kabupaten / Kota dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Harapan dari keberadaan TPID adalah memantau sedini mungkin ancaman inflasi di Kota Pasuruan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pada Tahun 2019 kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan dengan target 2 kali rapat koordinasi dan direalisasikan semua dengan 2 kali pelaksanaan rapat koordinasi.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan di dukung oleh pelaksanaan 1 Program dengan 7 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.785.363.500,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.651.058.400,00 atau tingkat serapannya mencapai 82,90%.

Pelaksanaan Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah kinerjanya diukur dengan indikator 1) Persentase rekomendasi kebijakan bidang

pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah dan 2) Persentase realisasi Perangkat Daerah yang mencapai 80%. Pada Tahun 2019, Persentase rekomendasi kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja dapat tercapai karena didukung oleh kerjasama dengan perangkat daerah sehingga rekomendasi kebijakan bidang pembangunan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Sedangkan indikator Persentase realisasi Perangkat Daerah yang mencapai 80%, dengan target 80% terealisasi 53,65% (terdapat 22 PD Dari 41 PD) dengan capaian 67%.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan, adalah sebagai berikut:

Program dan kegiatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan yang pelaksanaan didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.824.222.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.763.524.995,00 atau sebesar 92,64%.

Dengan target melaksanakan 160 paket pengadaan barang/jasa di tahun 2019, Pokja BLP telah dapat menyelesaikan 137 (dokumen) paket pengadaan atau 85,63% dari target dengan catatan 23 paket pekerjaan yang mengalami Gagal Lelang.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Pasuruan, didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.2.047.275.000,00, sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.222.194.700,00 atau tingkat serapannya 59,70%.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di ukur dengan Indikator:

- 1. Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah dengan target 75% terealisasi 90,50% prosentase capaian 120,67% capaian ini didukung oleh jejaring kinerja dengan komunikasi yang terjalin baik dengan dinas terkait untuk melaksanakan juknis dan bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat supaya dilaksanakan langsung ke masyarakat.
- 2. Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti perangkat daerah dengan target 75% terealisasi 59,59% prosentase capaian 79,45% capaian ini didukung oleh jejaring kinerja dengan komunikasi yang terjalin baik dengan dinas terkait untuk melaksanakan juknis dan bahan kebijakan bidang kemasyarakatan supaya dilaksanakan langsung ke masyarakat, peningkatan kegiatan religi di beberapa elemen dinas maupun kemasyarakatan, dan penyediaan bus untuk pelaksanaan ibadah haji.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, adalah sebagai berikut:

Program dan kegiatan guna mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pasuruan, pelaksanaannya didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.306.239.775,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan akhir tahun 2019 serapan anggarannya terealisasi sebesar Rp1.199.294.800,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 92 persen.

Hasil atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Kedinasan dengan target sebesar 85 terealisasi sebesar 85, sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal ini dapat diwujudkan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan PD terkait selaku *leading setor* suatu acara atau kegiatan sehingga penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dapat berjalan dengan baik lancar tanpa ada kendala berarti, sehingga nilai survey kepuasan pelayanan kedinasan dapat tercapai dengan maksimal.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 9 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.1.235.625.500,00. Sampai dengan akhir Tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.045.654.595,00 atau tingkat searapannya mencapai 84,63%. Adapun Indikator Capaian Program pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator kebijakan yang ditetapkan menjadi persentase rancangan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 85% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 117%. Selama tahun 2019 sebanyak 8 rancangan Perda diajukan oleh PD terkait dan dari jumlah Raperda tersebut 8 Raperda berhasil diundangkan menjadi Perda. Capaian tersebut diraih karena adanya kerjasama yang baik antara PD yang mengajukan Raperda dengan Bagian Hukum dalam pengajuan draft rancangan Perda. Sehingga Raperda dapat segera diajukan Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi dan diserahkan ke DPRD Kota Pasuruan untuk dilakukan pembahasan.
- 2. Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan Indikator persentase SKM pelayanan data produk hukum daerah dengan target 100%. terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Selama tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1950 buku referensi dan telah direalisasikan seluruhnya atau 100%. Capaian tersebut diraih karena adanya koordinasi dan kerjasama

yang baik antar sub bagian hukum Kota Pasuruan dalam menyediakan data dan pihak ketiga sebagai penyedia jasa percetakan. Buku-buku tersebut selain untuk Bagian Hukum juga telah didistribusikan kepada PD terkait.

3. Program Peningkatan Pemahaman Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan Indikator persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum dengan target sebesar 80%. terealisasi 90% dengan capaian 112,5%. Selama tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang hukum di 12 Kelurahan dimana ada 450 warga masyarakat yang mengikuti penyuluhan tentang hukum. Hal tersebut dicapai karena antusiasme masyarakat dan kerjasama yang baik dengan pihak Kelurahan.

Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan antara didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 8 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.18.938.026.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.10.741.890.588,00 atau tingkat serapan mencapai 56.72%.

Program dukungan layanan tugas pokok dan fungsi DPRD diukur dengan indikator indeks kepuasan anggota DPRD, dengan target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 77.31 atau tercapai 103%. didukung komunikasi yang intens antara anggota DPRD dan aparatur sipil negara yang ada di Sekretariat DPRD serta tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan anggota DPRD dalam mendukung kelancaran tugasnya.

Keberhasilan dari program dukungan layanan tugas pokok dan fungsi DPRD didukung kegiatan pelayanan study banding, fasilitasi hubungan komunikasi lewat media massa, penerbitan buletin DPRD Kota Pasuruan, jaring aspirasi masyarakat.

Pencapaian penyelenggara Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo didukung 1 program, adalah sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Gadingrejo didukung pelaksanaan 28 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.225.145.000,00,00. terealisasi sebesar Rp.1.212.785.500,00,00 atau tingkat serapannya mencapai 98,99%, diukur dengan indikator:

- a. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- b. Persentase Layanan Administrasi Umum dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- c. Persentase Layanan Administrasi Perijinan dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.

Pencapaian penyelenggara Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo didukung 1 program, adalah sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Panggungrejo didukung pelaksanaan 18 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.767.956.000,00. terealisasi sebesar Rp.749.405.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 98,99%, diukur dengan indikator:

- a. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang diberikan sesuai standard dengan Target: 100%
- Persentase Layanan Administrasi Umum yang diberikan sesuai standard dengan
   Target: 100%
- c. PersentaseLayanan Administrasi Perijinan yang diberikan sesuai standard dengan Target: 100%

Capaian indikator kinerja ini didukung Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan prima pada masyarakat sesuai standart pelayanan publik.

Pencapaian penyelenggara Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugulkidul didukung 1 program, adalah sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Bugulkidul didukung pelaksanaan 14 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.561.184.000,00. terealisasi sebesar Rp.553.686.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 98,66%, diukur dengan indikator:

- a. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- b. Persentase Layanan Administrasi Umum dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- c. Persentase Layanan Administrasi Perijinan dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan prima pada masyarakat sesuai standart pelayanan publik.

Pencapaian penyelenggara Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo didukung 1 program, adalah sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo didukung pelaksanaan 16 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.876.396.000,00. terealisasi sebesar Rp.863.557.600,00 atau tingkat serapannya mencapai 98,54%, diukur dengan indikator:

- a. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- b. Persentase Layanan Administrasi Umum dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- c. Persentase Layanan Administrasi Perijinan dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan prima pada masyarakat sesuai standart pelayanan publik.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.70

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Program/Indikator/Anggaran Satuan Target Realisasi				Capaian
	Bagian Umum				
1	Program Pelayanan				
	Administrasi Perkantoran				
	Outcome : % Nilai indek	%	100	92	92
	kepuasan pelayanan kedinasan				
	Anggaran	Rp.	6.134.885.750	5.618.702.652	
2	Program peningkatan sarana	•			
	dan prasarana aparatur				
	Outcome : Persentase sarana	%	80	76	95
	dan prasarana yang berfungsi				
	layak				
	Anggaran	Rp.	16.812.966.250	12.733.938.748	
3	Progran peningkatan disiplin	r			
	aparatur				
	Outcome: % peningkatan	%	80	53	66.25
	aparatur yang disiplin memakai				
	atribut kedinasan				
	Anggaran	Rp.	5.234.660.000	2.773.325.200	
4	Program peningkatan	•			
	pengembangan sistem				
	pelaporan capaian kinerja				
	dan keuangan				
	Outcome : persentase laporan	%	100	70	70
	yang tersusun tepat waktu				
	Anggaran	Rp.	19.880.000	13.915.100	
	Bagian Organisasi				
1	Program: Peningkatan				
	Akuntanbilitas Kinerja				
	Perangkat Daerah				
	Outcome: Persentase	%	100	100	100
	perangkat daerah yang				
	mendapat nilai SAKIP B				
	Anggaran	Rp.ribu	332.250	301.861	90,85
2	Program Peningkatan				
	Pelayanan Publik dan				
	Ketatalaksanaan				
	Outcome: Persentase unit	%	80	93,3	116,3
	pelayanan publik yang sudah				
	melaksanakan standart				
	pelayanan, maklumat				
	pelayanan, survey kepuasan				
	masyarakat, penglolaan				
	pengaduan dan sistem				
	pelayanan publik serta inovasi	<b>5</b> "	=00 =04	450.000	00.70
_	Anggaran	Rp.ribu	506.501	459.692	90,76
3	Program Penataan dan				
	pengembangan Jabatan	•	<b>^</b> -		4
	Outcome: Persentase jabatan	%	85	100	117,6
	sesuai dengan analisis jabatan				

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	dan evaluasi jabatan perangkat				
	daerah	Do ribu	364.384	348.074	05.52
	Anggaran	Rp.ribu	304.304	340.074	95,52
	Bagian Adm. Pemerintahan				
- 1	Program Peningkatan Kinerja				
	Bidang Pemerintahan.				
	Outcome: Persentase	Presentase	100	73	73
	rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang				
	ditindaklanjuti Perangkat				
	Daerah.				
	Outcome : Jumlah kecamatan	4	4 Kec, 34 Kel	4 Kec, 34 Kel	100
	dan kelurahan dengan kategori	Kecamatan			
	baik	34			
	Outcome : Persentase	Kelurahan	100	100	100
	Outcome : Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti.	Presentase	100	100	100
	Anggaran :	Rupiah	983.691.200	756.901.969	76,95
	, mggaran .	ιταριαπ	000.001.200	700.001.000	70,00
	Bagian Perekonomian dan SDA				
	Program Peningkatan Kinerja				
	Pembangunan Bidang				
	Ekonomi dan SDA	_			
	Outcome: Prosentase	Prosen	85	85	100
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan SDA yang				
	ditindaklanjuti Perangkat				
	Daerah				
	Anggaran	Rp ribu	263.400	216.774,716	82,3%
	Program Sosialisasi				
	Ketentuan di Bidang Cukai	DI	4	4	4000/
	Outcome: Jumlah peraturan perundang undangan di bidang	Pasal	4	4	100%
	cukai yang disampaikan kepada				
	masyarakat dan atau				
	pemangku kepentingan				
	Anggaran	Rp.Ribu	525.000	473.262,5	90%
	Pemberantasan Barang Kena				
	Cukai Ilegal Outcome: Persentase temuan	%	10	0	100%
	barang kena cukai ilegal	70	10	U	100%
	Anggaran	Rp.Ribu	60.000	59.324,75	99%
	D. C. D. L.				
ı	Bagian Pembangunan Program Peningkatan				
'	Administrasi Pembangunan				
	Outcome :				
	Persentase rekomendasi	%	80	80	100
	kebijakan bidan pembangunan				
	yang ditindaklanjuti PD	•		<b>-</b> 4.6=	27.22
	Persentase realisasi perangkat	%	80	53,65	67,06
	daerah yang mencapai 80%				

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Anggaran	Rp.Ribu	785.363	651.058	82,89
		·			
	Bagian Layanan Pengadaan				
	Program Peningkatan tertib				
	administrasi pelaksanaan Pelayanan Pengadaan				
	Barang dan Jasa Pemerintah				
	Daerah				
	Outcome :				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90	90	100%
	Pelayanan Barang dan Jasa				
	Persentase Perangkat Daerah	Persen	100%	90%	90%
	tertib administrasi pengadaan				
	barang dan jasa	Persen	100%	01 670/	04 670/
	Persentase Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang	reiseii	100 %	81,67%	81,67%
	berkompeten				
	Jumlah Lelang paket pekerjaan	Dokumen/	160	137	85.63%
	yang dilayani	Paket			
		Pekerjaan			
	Anggaran :	Rp.Ribu	824,822,500	763.524,995	92.64
	Danian Kassistanan Balaust				
	Bagian Kesejateraan Rakyat dan Kemasyarakatan				
	Program Peningkatan Kinerja				
	Pembangunan Bidang				
	Kesejahteraan Rakyat dan				
	Kemasyarakatan				
	Outcome :	Б	750/	00.500/	400.07
	Indikator Prosentase	Persen	75%	90,50%	120,67
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang				
	Ditindaklanjuti Perangkat				
	Daerah				
	Indikator Prosentase	Persen	75%	59,59%	79,45
	Rekomendasi Kebijakan Bidang				
	Kemasyarakatan yang				
	Ditindaklanjuti Perangkat				
	Daerah Anggaran	Rp.Ribu	2.047.275	1.222.194	59,70
	Anggaran	TQ.ITIDU	2.047.273	1.222.134	33,10
	Bagian Protokol dan				
	Kepemimpinan				
	Program: Peningkatan				
	Keprotokolan KDH /WKDH/				
	Sekda	Anaka	0E	0E	100
	Outcome: Nilai Survey Kepuasan	Angka	85	85	100
	Pelayanan Kedinasan				
	Anggaran	Rp.Ribu	1.306.239	1.199.294	92
		•			
	Bagian Hukum				
1	Program: Penataan Peraturan Perundang-				
	undangan				
	anaungun				

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase rancangan	%	85	100	117%
	kebijakan yang ditetapkan				
	menjadi peraturan perundang-				
	undangan	Do Dibu	E02 900 000	AAE A24 000	00 E00/
2	Anggaran Program: Pengelolaan	Rp.Ribu	502.800.000	445.431.000	88,59%
2	Jaringan Dokumentasi dan				
	Informasi Hukum				
	Persentase tersedianya bahan	%	100	100	100%
	referensi bagi SKPD dalam				
	melaksanakan tugas	D D''	407 400 000	405 000 005	00 000/
2	Anggaran	Rp.Ribu	197.168.000	195.899.995	99,36%
3	Program: Peningkatan Pemahaman Hukum,				
	Bantuan Hukum dan				
	Perlindungan Hak Asasi				
	Manusia				
	Persentase peningkatan	%	80	90	112%
	pemahaman mengenai produk				
	hukum	Do Dibu	E2E 6E7 E00	404 222 600	7E 100/
	Anggaran	Rp.Ribu	535.657.500	404.323.600	75,48%
	Sekretariat Dewan				
	Program Dukungan layanan				
	tugas pokok dan fungsi				
	DPRD				
	Outcome : Indeks kepuasan	Indeks	75	77.31	103
	anggota DPRD Anggaran	Rp.ribu	18.938.026	10.741.890	56.72%
	Anggaran	TQ.IIbu	10.330.020	10.741.030	30.7270
	Kecamatan Gadingrejo				
1	Program Peningkatan				
	Penyelenggaraan Otonomi				
	Daerah Kec. Gadingrejo Outcome :				
	Prosentase layanan	Persen	100	100	100
	administrasi kependudukan dan	1 013011	100	100	100
	capil yang diberikan sesuai				
	standart				
	Prosentase layanan	Persen	100	100	100
	administrasi perijinan yang				
	diberikan sesuai standart Prosentase layanan umum	Doroon	100	100	100
	Prosentase layanan umum yang diberikan sesuai standart	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	1.366.310.000	1.265.132.360	92,59
		·			
	Kecamatan Panggungrejo				
I	Program Peningkatan				
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan				
	Panggungrejo				
	Outcome :				
1.	Persentase layanan adm	Persen	100	100	100
	kependudukan dan capil yang				
	diberikan sesuai standard				

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase layanan adm umum	Persen	100	100	100
3.	yang diberikan sesuai standard Persentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	1.225.145.000,00	1.212.785.500	98,99
I	Kecamatan Bugulkidul Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Bugul Kidul Outcome :				
1.	Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	Persen	100%	100%	100%
2.	Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard	Persen	100%	100%	100%
3.	Persentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	Persen	100%	100%	100%
	Anggaran	Rp	561.184.000	231.954.150	41,33
1	Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo Outcome:				
1.	Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	Persen	100%	100%	100%
2.	Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard	Persen	100%	100%	100%
3.	Persentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	Persen	100%	100%	100%
0 /	Anggaran : Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pe	Rp	1.431.830.000	1.330.282.717	92,52

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kecamatan, 2019.

# Permasalahan dan Solusi Urusan

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Pemerintahan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

beberapa kendala yang dihadapi dalam pada tahun 2019, yakni:

- Dalam pelaksanaan program kegiatan pada Bagian Umum, pada beberapa program kegiatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan kurangnya disiplin aparat dalam memenuhi time scedule yang telah ditentukan, dan kompetensi sumber daya manusia pada bagian umum belum memenuhi standart kompetensi.
- 2. Kurangnya pemahaman unit pelayanan publik mengenai inovasi serta masih rendahnya minat penyelenggara unit penyelenggara publik untuk berinovasi.
- 3. Dalam penerapan SAKIP pada perangkat daerah masih kurangnya mengefisienkan program kegiatan.
- 4. Perlu adanya sistem evaluasi dan kinerja untuk menunjang efektifitas kinerja pegawai.
- 5. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap kinerjanya masih rendah.
- 6. Sudah terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan kelurahan (LPMK) di kota pasuruan, namun dalam praktik pelaksanaan dana kelurahan di kelurahan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik.
- 7. Masih belum bisa dilaksanakannya rekomendasi kebijakan secara penuh oleh perangkat daerah terkait
- 8. Adanya peraturan atau kebijakan dari pusat/kementerian yang sering berubah terkait kebijakan bidang ekonomi dan SDA sehingga sering terjadi perubahan pada fokus monitoring dan evaluasi
- 9. Masih seringnya terjadi inflasi secara mendadak terutama harga kebutuhan pokok yang tiba-tiba naik sehingga perekonomian masyarakat menjadi terganggu terutama menjelang hari-hari besar seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha maupun Hari Raya Natal dan Tahun Baru
- 10. Data pendukung monitoring pembangunan infrastruktur kurang akurat;
- 11. Data pendukung monitoring bidang perhubungan dan pekerjaan umum kurang lengkap;
- 12. Keterlambatan pengumpulan data laporan P1;

- 13. Beberapa daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja tidak didapatkan dari toko penyedia yang disurvey.
- 14. Perubahan regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perka LKPP) mengharuskan pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Pasuruan menyesuaikan dengan peraturan tersebut, sehinngga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang jasa
- 15. Pengumuman RUP oleh Perangkat daerah tidak tepat waktu
- 16. Keterbatasan Sarana dan prasarana kerja Pokja Pemilihan dan fasilitas Pelayanan pada Bagian Layanan Pengadaan belum memadai
- 17. Rendahnya tingkat keseriusan ASN dalam Ujian sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- 18. Masih kurangnya waktu pembahasan yang dilaksanakan
- 19. Juknis atau bahan kebijakan yang telah dihasilkan bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh dinas terkait.
- 20. Kurangnya personel/staf sehingga kesulitan membagi tugas jika ada jadwal kegiatan keprotokolan yang bersamaan;
- 21. Masih adanya beberapa perangkat daerah yang belum memiliki petugas pembawa acara (MC), dirigen lagu Indonesia Raya dan pembaca do'a sehingga apabila ada kegiatan seremonial sering meminta bantuan personil pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 22. Masih adanya beberapa perangkat daerah yang terlambat atau tidak melakukan koordinasi ketika akan melaksanakan suatu kegiatan yang mengundang kepala daerah atau pejabat Forkopimda sehingga persiapan dalam kegiatan keprotokolan menjadi terhambat.
- 23. Masih belum tahunya masyarakat akan suatu produk hukum daerah.
- 24. Selama ini kita lihat bagaimana komentar masyarakat awam tentang hukum itu sendiri bahwa hukum hanya diperuntukkan bagi mereka yang awam, sedangkan golongan tertentu dalam masyarakat dengan bebasnya mereka melanggar,

bahkan mereka dapat memesan klausul-klausul tertentu untuk melindungi kepentingan mereka, artinya kepastian hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang awam tentang hukum dan Hukum itu hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki kepentingan dengan aturan yang akan diberlakukan.

- 25. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- 26. Terbatasnya data Rencana Aksi Nasional di masing-masing OPD.
- 27. Rendahnya penyerapan anggaran yang dikarenakan sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota). Serta Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bernomor 019.3/101/SJ tanggal 8 Januari 2019 tentang Tata Cara Konsultasi Pemerintah Daerah ke Kemendagri.
- 28. Kurang responsif, Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- 29. Kurang informatif, Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
- 30. Kurang koordinasi, Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
- 31. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/

- aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu
- 32. Belum optimalnya unsur pelayanan dilingkup kecamatan dan kelurahan yang masih menyebabkan belum maksimalnya pelayanan.
- 33. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam upaya memaksimalkan lini pelayanan dilingkup kecamatan dan kelurahan.

#### C.2. Solusi

- melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan terkait dan dengan mengikutkan bintek-bintek terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang ada.
- 2. Perlu adanya fasilitasi/pendampingan bagi, unit pelayanan publiK agar bisa menciptakan inovasi.
- 3. Tetap dilaksanakan pendampingan dan monitoring tentang pengefisienana program kegiatan.
- 4. Telah dibangun aplikasi yang telah dapat memadahi seluruh aktifitas pegawai dan dapat diukur pada setiap bulannya.
- 5. Perlu dilaksanakannya pendampingan serta monitoring pada perangkat daerah mengenai peningkatan kinerja.
- 6. Perlu lebih mendorong perangkat daerah terkait untuk mengevaluasi berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan melalui perencanaan yang baik pada tahun sebelumnya agar bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya
- 7. Dalam pelaksanaan Dana Kelurahan di tahun 2019 kelurahan kelurahan di Kota Pasuruan masih menggunakan swakelola tipe I yaitu lewat penyedia dikarenakan Pokmas di kelurahan masih belum memenuhi syarat peraturan pengadaan barang dan jasa sehingga untuk tahun berikutnya Perlu disusun dan dibentuk Pokmas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8. Melakukan koordinasi dengan provinsi atau pusat untuk mengetahui rencana perubahan kebijakan terkait bidang ekonomi dan SDA sehingga bisa direncanakan terkait kegiatan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan

- 9. Mengupayakan terjalinnya koordinasi dan sinergi dengan sesama anggota TPID terutama yang diluar unsur pemerintah daerah seperti Polres, BI, Bulog, Kadin, BPS dan lainnya, bila perlu turun ke lapangan bersama perangkat daerah terkait ketika menjelang hari besar agar laju inflasi dapat terkendali dan tidak meresahkan masyarakat.
- 10. Pemantauan progress paket pekerjaan infrastruktur secara berkala dan berkesinambungan;
- 11. Diadakan rapat sinkronisasi dan penelitian data bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
- 12. Fasilitasi alternatif pengumpulan data laporan P1 melalui email atau software aplikasi);
- 13. Mencari alternatif data yang kurang melalui internet.Pengembangan Kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa secxara berkala dan berkelanjutan agar senantiasa mengikuti dinamisasi regulasi pengadaan barang/jasa
- 14. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan RUP agar OPD tepat waktu dalam mengumumkan RUP setelah persetujuan RAPBD antara Pemerintah daerah dan DPRD
- 15. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja Pokja pemilihan dan Fasilitas pelayanan pada Bagian Layanan Pengadaan diusulkan melalui penganggaran yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Pasuruan dan diprioritaskan pada Tahun Anggaran 2020
- 16. Rendahnya tingkat keseriusan ASN dalam mengikuti ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa, perlu diatur dalam regulasi Kepegawaian yang mengharuskan kepemilikan Sertifikat Pengadaan Barang Jasa bagi pengembangan karir dan Kesejahteraan ASN
- 17. Pelaksanaan pembahasan dilaksanakan dengan perencanaan terlebih dahulu yang tepat sehingga target kegiatan bisa tercapai
- 18. Melakukan koordinasi yang baik terhadap dinas terkait untuk melaksanakan hasil juknis dan bahan kebijakan yang telah di hasilkan oleh Bagian Administrasi

- Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan supaya di laksanakan langsung ke masyarakat
- 19. Menambah jumlah personil/pegawai untuk ditempatkan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan demi mencukupi kebutuhan tugas keprotokolan yang ada;
- 20. Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis pembawa acara, dirigen dan pembaca do'a yang diikuti oleh petugas dari masing-masing perangkat daerah yang nantinya akan ditugaskan pada setiap acara seremonial yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- 21. Lebih mengintensifkan komunikasi dengan setiap kepala perangkat daerah sehingga apabila setiap ada kegiatan yang sifatnya mengundang kepala daerah atau pejabat Forkopimda agar segera melakukan koordinasi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga pejabat yang diundang dapat terfasilitasi dengan baik.
- 22. Mengirimkan surat permintaan draft ke OPD untuk menindaklanjuti produk hukum daerah serta memberikan referensi peraturan perundang- undangan ke OPD sebagai bahan evaluasi
- 23. Mensosialisasikan produk hukum daerah melalui media cetak maupun elektronik.
- 24. Melakukan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat.
- 25. Mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun Lembaga Bantuan hukum tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- 26. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 27. Mengirimkan surat permintaan draft ke OPD untuk menindaklanjuti produk hukum daerah serta memberikan referensi peraturan perundang- undangan ke OPD sebagai bahan evaluasi
- 28. Mensosialisasikan produk hukum daerah melalui media cetak maupun elektronik.
- 29. Melakukan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat.

- 30. Mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun Lembaga Bantuan hukum tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- 31. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 32. Menindaklanjuti regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota). Serta Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bernomor 019.3/101/SJ tanggal 8 Januari 2019 tentang Tata Cara Konsultasi Pemerintah Daerah ke Kemendagri.
- 33. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP). Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
- 34. Peningkatan unsur pelayanan untuk melalui pemantapan ataupun inovasi kualitas pelayanan untuk pelayanan prima di lingkup kecamatan dan kelurahan.
- 35. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam peningakan kualitas pelayanan di lingkup kecamatan dan kelurahan.

# 4.2. Urusan Pengawasan

Penyeleranggaraan urusan Pengawasan diarahkan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dari pelanggaran hukum, serta memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah di daerah, melalui WASKAT (pengawasan melekat), urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dari pelanggaran hukum, serta memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah di daerah, melalui WASKAT (pengawasan melekat), dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke VI yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Pasuruan. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Pelaksanaan urusan tersebut didukung misi VI RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.

Keberhasilan dari urusan pengawasan ini dapat diukur dengan indikator opini laporan keuangan daerah, nilai laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota dan persentase nilai temuan yang ditindaklanjuti.

Indikator opini laporan keuangan daerah dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun target tersebut masih belum tercapai karena pada saat ini masih dalam tahap pemeriksaan *interim* oleh BPK atas laporan keuangan daerah.

Untuk indikator nilai laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah mempunyai target statemen B, realisasi B, persentase capaian 100%, inspektorat sebagai penyelenggara urusan pengawasan mempunyai tugas mendorong 33 PD untuk mencapai nilai diatas B.

Indikator persentase nilai temuan yang ditindaklajuti memiliki target 64,36%. Sedangkan untuk rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal (BPK) Tahun 2019 sebanyak 10 temuan dengan total 24 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan status sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6 rekomendasi atau 25% dari total rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan untuk status belum sesuai rekomendasi dalam proses tindaklanjut sebanyak 18 rekomendasi atau 75% dari total

rekomendasi yang ditindaklanjuti. Target temuan yang ditindaklanjuti ditetapkan sebesar 64,36%. Sehingga untuk temuan yang ditindaklanjuti capaiannya sebesar 93,22%. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.71

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	statemen	WTP	-	-
2	Nilai Laporan akuntanbilitas kinerja Pemerintah	statemen	В	В	100
3	Prosentase nilai temuan yang ditindak lanjuti	%	64,36	60	93,22

Sumber: Inspektorat, 2019.

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan ini. Antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.860.019.250,00 sampai dengan akhir tahun 2019 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.594.646.310,00 atau tingkat serapan sebesar 74,87%.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH diukur dengan indikator persentase penurunan temuan berulang, ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi 60% atau tercapai 100%. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, Reviu perencanaan, Reviu laporan keuangan daerah dan Monitoring pelaksanaan kegiatan PD yang dilakukan oleh Inspektorat, selain itu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH diukur dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pembinaan Pengawasan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan diukur dengan indikator persentase aparatur pengawas yang bersertifikat teknis substantif yang ditargetkan sebesar 80%, terealisasi 74,87% tercapai 92,66%. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh jumlah kegiatan

peningkatan level APIP yang terfasilitasi dan jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.72
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pengawasan

No.	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	-	-
	Outcome : persentase penurunan temuan berulang	%	60	74,87	124,78
	Anggaran  Program Peningkatan Profesionalisme	Rp.	555,619,250.00	415,999,228.00	74.87
2	Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	-	112.200.000,00	-	-
	Outcome : persentase aparatur pengawas yang bersertifikat teknis substantif	%	80	74.13	92,66
	Anggaran	Rp	304,400,000.00	225,657,832.00	74.13

Sumber: Inspektorat, 2019

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala merupakan upaya dalam meminimalisir terjadinya temuan berulang pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Kegiatan Evaluasi dan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif sehingga nilai SAKIP Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2019 mendapat Predikat B (Baik).

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, cepat dan tepat, hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI pada tahun pemeriksaan TA 2019 sampai dengan semester 1 sebanyak 10 temuan / 24 rekomendasi dari 24 rekomendasi 6 rekomendasi sudah ditindak lanjuti Selesai Sesuai Rekomendasi, dan 18 rekomendasi sudah ditindaklanjuti Belum Sesuai Rekomendasi.

## C. Permasalahan dan solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

- Masih adanya ketidakpatuhan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI.
- 2. Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) pada entitas PD yang terakumulasi menjadi kelemahan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Pasuruan. Hal lain yang cukup mempengaruhi yaitu bahwa mayoritas PD kurang memperhatikan atau belum memprioritaskan pelaksanaan tertib pengelolaan aset daerah.

#### C.2. Solusi

- 1. Penguatan peran lembaga pengawasan internal sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dan asistensi/pendampingan (consulting) pada entitas PD/lembaga agar tindak lanjut temuan dapat dituntaskan sesuai target waktu yang ditetapkan.
- Dibutuhkan upaya dan komitmen yang kuat khususnya para PD untuk menciptakan lingkungan pengendalian intern yang baik dengan menetapkan dan menerapkan SOP dan SPM serta meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara konsisten.

## 4.3. Urusan Perencanaan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan pembangunan diarahkan pada perwujudan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel, urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pengawasan dilaksanakan dalam rangka perwujudan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke VI yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel merupakan bagian dari kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan didukung misi ke-6, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.73

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Rencana	%	38,78	29,33	75,63%
	Pembangunan Daerah				
2	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Kota dalam	%	42,48	46,10	109%
	mendukung prioritas Nasional/Provinsi				
3	Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Tahunan dengan	%	100,00	100,00	100%
	Rencana Pembangunan Strategis tahun berkenaan				
4	Persentase kesesuaian RKPD dengan APBD	%	100,00	98,92	99%
5	Persentase ketercapaian target indikator kinerja daerah	%	83,71	66,67	80%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2019.

Indikator Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah dengan target sebesar 38,78% terealisasi sebesar 29,33% sehingga capaiannya sebesar 75,63%. Persentase ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif masih belum optimal karena adanya ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan tupoksi dan kewenangan perangkat daerah.

Indikator Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Kota dalam mendukung prioritas Nasional/Provinsi diukur melalui seberapa banyak jumlah program Perangkat Daerah di Kota Pasuruan yang mendukung prioritas nasional/provinsi. Pada tahun 2019, Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Kota dalam mendukung prioritas Nasional/Provinsi dengan target sebesar 42,48%

terealisasi 46,10% dengan capaian 109% yang berarti sebagian besar program Perangkat Daerah di Kota Pasuruan sudah mendukung prioritas nasional/provinsi.

Indikator Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Tahunan dengan Rencana Pembangunan Strategis tahun berkenaan diukur melalui jumlah program dalam RKPD dibagi Jumlah program strategis dalam RPJMD, dengan target sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program yang ada pada RKPD selaras dengan RPJMD.

Indikator Persentase kesesuaian RKPD dengan APBD dihitung berdasarkan jumlah program RKPD yang diakomodir dalam APBD dibagi dengan jumlah program RKPD, dengan target 100% terealisasi 98,92% tercapaian 99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruhnya program-program yang ada pada RKPD diakomodir dalam APBD.

Indikator Persentase ketercapaian target indikator kinerja daerah dihitung berdasarkan jumlah indikator kinerja daerah yang tercapai targetnya dibagi dengan jumlah seluruh indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah meliputi Indeks Pendidikan dengan target 0,7 terealisasi 0,68, Indeks Kesehatan dengan target 0,8 terealisasi 0,79, Tingkat Kemiskinan dengan target 6,88 terealisasi 6,46, Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5,98 terealisasi 5,06, Indeks Gini dengan target 0,3069 terealisasi 0,39, Pertumbuhan Ekonomi dengan target 6,23 terealisasi 5,56, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 64,2 terealisasi 66,34, Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 69,65 terealisasi 74 dan Indeks Pembangunan Manusia dengan target 75,93 terealisasi 75,25. Pada tahun 2019 diperoleh realisasi sebesar 66,67% dari target sebesar 83,71%, sehingga capaiannya sebesar 80%.

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikatornya meliputi urusan penunjang yaitu urusan perencanaan.

Pada tahun anggaran 2019, didukung oleh 5 program dan 29 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.263.873.500,00 Dengan serapan anggaran sebesar Rp.2.925.558.003,00 atau terserap sebesar 90%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.74
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggara Program Urusan Perencanaan

No	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
ı	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.ribu	390.439	342.366	87,69
	Prosentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam	%	23,17	20	86%
	perencanaan Bidang Ekonomi				
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD Bidang	%	83,53	100	120%
	Ekonomi	0/	04.00	400	4000/
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	81,86	100	122%
	Bidang Ekonomi Prosentase ketercapaian kinerja program PD Bidang	%	86,53	80	92%
	Ekonomi	/0	00,55	00	3Z /0
II	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp.ribu	514.875	413.107,3	80,23
	dan Pemerintahan	Принов	0141010	4101101,0	00,20
	Prosentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam	%	22,13	32,92	148%
	perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		,	,	
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD Bidang	%	86,42	100	116%
	Sosial Budaya dan Pemerintahan				
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	84,56	100	118%
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan				
	Prosentase ketercapaian kinerja program PD Bidang	%	80,87	84,78	105%
	Sosial Budaya dan Pemerintahan	D.,	676.050	CEO E 40	07 500/
III	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp.ribu	676.250	659.543	97,53%
	Prosentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam	%	25	35,07	140%
	perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan				
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD Bidang	%	82	100	122%
	Pengembangan Wilayah Perkotaan	0/	0.5	400	4400/
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	85	100	118%
	Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan Prosentase ketercapaian kinerja program PD Bidang	%	86	86	100%
	Pengembangan Wilayah Perkotaan	/0	00	00	100 /0
IV	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Rp.ribu	678.000	537.232	79%
	Daerah		0.0.00	••••	
	Prosentase usulan Masyarakat dalam Musrenbang yang	%	35	27	77%
	dianggarkan dalam kegiatan PD				
	Prosentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	98	97,3	99%
٧	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.ribu	1.004.310	974.811	97%
	Tingkat pemanfaatan hasil litbang untuk stakeholder	%	88,12	91	103%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2019

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Capaian kinerja indikator Prosentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan Bidang Ekonomi, dengan target sebesar 23,17% terealisasi 20% dengan capaian 86%. Hal ini dikarenakan adanya usulan masyarakat belum sesuai dengan tupoksi dan kewenangan PD.

Capaian kinerja indikator Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD Bidang Ekonomi, dengan target sebesar 83,53% terealisasi 100% dengan capaian 120%. Capaian kinerja indikator Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Ekonomi, dengan target sebesar 81,86% terealisasi 100% dengan capaian 122%.

Capaian kinerja indikator Prosentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Ekonomi, dengan target sebesar 86,53% terealisasi 80% dengan capaian 92%.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
 Capaian kinerja indikator Prosentase usulan Musrenbang Kota yang masuk
 dalam perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan target
 sebesar 22,13% terealisasi 32,92% dengan capaian 148%.

Capaian kinerja indikator Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan target sebesar 86,42% terealisasi 100% dengan capaian 116%.

Capaian kinerja indikator Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan target sebesar 84,56% terealisasi 100% dengan capaian 118%.

Capaian kinerja indikator Prosentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan target sebesar 80,87% terealisasi 84,78% dengan capaian 105%.

3. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,

Capaian kinerja indikator Prosentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan, dengan target sebesar 25% terealisasi 35,07% dengan capaian 140%.

Capaian kinerja indikator Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan, dengan target sebesar 82% terealisasi 100% dengan capaian 122%.

Capaian kinerja indikator Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan, dengan target sebesar 85% terealisasi 100% dengan capaian 118%.

Capaian kinerja indikator Prosentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan, dengan target sebesar 86% terealisasi 86% dengan capaian 100%.

# 4. Program Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Capaian kinerja indikator Prosentase usulan Masyarakat dalam Musrenbang yang dianggarkan dalam kegiatan PD, dengan target sebesar 35% terealisasi 27% dengan capaian 77%.

Capaian kinerja indikator Prosentase keselarasan RKPD dengan Renja PD, dengan target sebesar 98% terealisasi 97,3% dengan capaian 99%.

# 5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Capaian kinerja indikator Tingkat pemanfaatan hasil litbang untuk stakeholder, dengan target sebesar 88,12% terealisasi 91% dengan capaian 103%

## C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

## C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, antara lain:

- Masih adanya usulan musrenbangkel yang tidak sesuai dengan tupoksi dan kewenangan perangkat daerah.
- 2. Belum optimalnya penerapan e-planing dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- 3. Belum seluruh PD dalam usulan perencanaan yang memperhatikan Proses Bisnis.

#### C.2. Solusi

Solusi atas permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi, kewenangan serta peran perangkat daerah pengampu usulan dalam musrenbangkel dengan menyusun panduan usulan kegiatan perangkat daerah.
- 2. Peningkatan kualitas operasional e-planing melalui penyempurnaan fitur eplanning dan peningkatan kapasitas operator e-planning di semua tingkatan.
- 3. Penyusunan usulan perencanaan melalui penyusunan proses bisnis terlebih dahulu agar usulan lebih berkualitas.

## 4.4. Urusan Keuangan

Penyelenggaraan urusan Keuangan diarahkan pada peningkatan perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

## A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Keuangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke

VI yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik". Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang berperan, di antaranya adalah:

Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi; Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan Pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dilihat bahwa Rasio ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 82,10%, persentase ini dihitung berdasarkan besaran nilai dana transfer tahun 2019 sebesar Rp.718.137.607.813,00 yang dibandingkan dengan nilai total Pendapatan

Daerah tahun 2019 sebesar Rp.874.696.792.166,46 hal ini menunjukkan bahwa kota Pasuruan berhasil menurunkan angka ketergantungan keuangan Daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan 'Opini laporan keuangan daerah' ditargetkan mendapatkan opini WTP. Tetapi sampai dengan disampaikannya LKPJ ini, belum mendapatkan opini dari BPK.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumbersumber pendanaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Dapat dilihat bahwa nilai Realisasi PAD mencapai Rp.156.559.184.293,46 atau 108,77% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.143.936.741.210,84. Dalam upaya pencapaian target kinerja Bapenda sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang berperan, di antaranya adalah:

- 1. Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah;
- 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi;
- 3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan
- 4. Pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.75

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan

		,	)		<i>)</i>
No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio ketergantungan keuangan daerah	%	84,22	82,10	102.6
2.	Opini laporan keuangan daerah	statemen	WTP	-	-
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp.juta	143.936	156.559	108,77

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, 2019.

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan ini antara lain, didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 46 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.3.593.800.655,00 sampai dengan akhir tahun 2019, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.2.395.325.712,00 atau tingkat serapannya mencapai 67%.

Pencapaian target kinerja APBD pada BPKA Kota Pasuruan dikarenakan adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh personil BPKA sesuai kompetensinya masing-masing untuk mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui beberapa program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan, Pada program ini jumlah anggaran sebesar Rp.1.377.675.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.881.513.852,00 atau sebesar 63,99%. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan didukung oleh 13 kegiatan. Pada program ini untuk kegiatan Monitoring Laporan Keuangan tidak terealisasi (0%), hal ini dikarenakan terkendala dengan belum terbentuknya Tim Monitoring laporan keuangan daerah.
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran, Pada program ini jumlah anggaran sebesar Rp.1.377.675.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.881.513.852,00 atau sebesar 70,60%. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran didukung oleh 8 kegiatan.
- c. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, Pada program ini jumlah anggaran sebesar Rp.1.209.611.465,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.803.164.252,00 atau sebesar 66,40%. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah didukung oleh 9 kegiatan. Pada program ini ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi perkiraan anggaran, yaitu:

- Pendampingan manajemen barang milik daerah terealisasi sebesar 38,08%, dikarenakan adanya kebijakan dari BPKP Pusat yang membatasi BPKP Perwakilan untuk melakukan pendampingan ke Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi tim penghapusan barang milik daerah terealisasi sebesar 24,97%,
   dikarenakan persetujuan Gubernur Jawa Timur dengan pelaksanaan kegiatan tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya.
- Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah terealisasi 15,95%, dikarenakan adanya kegiatan jasa konsultasi berupa appraisal untuk penentuan harga sewa tidak dilakukan mengingat kegiatan sewa yang akan di apprasial diperpanjang kerjasamanya.
- Penilaian Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan terealisasi 28,34%, dikarenakan untuk penilaian tanah yang dipergunakan penyusunan neraca dan/atau pemanfaatan aset tidak diperlukan jasa konsultasi dari KJPP sehingga dapat dilaksanakan sendiri dengan berpedoman pada nilai NJOP/PBB pada tahun berjalan.

Capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan ini antara lain, didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 14 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.2.334.119.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.088.490.570,00 atau tingkat serapannya mencapai 89,48%.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan keuangan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pada program ini jumlah anggaran sebesar Rp.1.601.664.000,00 dengan serapan Rp.1.493.002.250,00 atau sebesar 93,22%. Indikator persentase peningkatan penerimaan pajak daerah dengan target 4% terealisasi 10,86%

dengan capaian 271,5% keberhasilan ini didukung 10 kegiatan. Pada program ini ada 1 kegiatan yang serapan anggarannya masih dibawah target yaitu kegiatan Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD yang dianggarkan Rp.56.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.469.500,00 atau sebesar 55,40%. Hal ini dikarenakan ada Honor Pengarah untuk Walikota/Wakil Walikota tidak terserap.

2. Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah, Pada program ini jumlah anggaran sebesar Rp.732.455.000,00 dengan serapan Rp.595.488.320,00 atau sebesar 81,30%. dengan indikator Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah dengan target 81,74% terealisasi 93,76% dengan capaian 114,71%, untuk indikator Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dengan target 83,13% terealisasi 85,4% dengan capaian 102,73%. Program Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah didukung 4 kegiatan. Pada program ini untuk kegiatan Pemungutan Pajak Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.216.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.149.619.820,00 atau sebesar 69,08%, Hal ini dikarenakan terdapat honor lembur PNS yang tidak dapat direalisasikan. Sedangkan untuk kegiatan Monitoring dan evaluasi pelayanan pajak daerah yang dianggarkan sebesar Rp.237.155.000,00 terealisasi Rp.179.151.500,00 atau sebesar 75,54%, Hal ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan menyesuaikan dengan penyetoran pipil (tanda bukti SPPT telah diterimakan) masing-masing petugas dari kelurahan di 4 Kecamatan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.76

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Keuangan

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	BPKAD				
I	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan				
	Outcome : Persentase laporan keuangan PD sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	%	100	100	100
	Anggaran	Rp.ribu	1.377.675	881.513	63,99

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
II	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran		<u> </u>		•
	Outcome : Persentase realisasi kegiatan yang	%	100	100	100
	dilaksanakan PD dengan realisasi diatas 90%				
	Anggaran	Rp.ribu	1.006.514	710.647	70,60
Ш	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah				
	Outcome : Persentase PD yang tertib administrasi	%	100	100	100
	barang/aset daerah sesuai Permendagri No. 19 tahun				
	2016				
	BAPENDA				
1	Program Peningkatan, Pengembangan dan				
	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
	Outcome: Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak	Persen	4	10,86	271,5
	Daerah				
	Anggaran	Rp.ribu	1.601.664,00	1.493.002,25	93,22
2	Program Peningkatan Pelayanan dan Penagihan				
	Pajak Daerah				
	Outcome: Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah	Persen	81,74	93,76	114,71
	Outcome: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	83,13	85,4	102,73
	Anggaran	Rp.ribu	732.455,00	595.488,32	81,30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, 2019

## C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

## C.1. Permasalahan

- 1) Ketidaktepatan penyampaian pelaporan dari beberapa PD;
- PD belum disiplin melaksanakan realisasi anggaran sesuai anggaran kas dan time schedule yang telah ditentukan;
- Adanya PD dalam mengumpulkan data melewati batas waktu yang sudah ditentukan guna penyusunan rancangan, Penjabaran, baik APBD ataupun APBD Perubahan.
- 4) Belum optimalnya pencatatan data aset BMD secara sistematis menurut ketentuan Permendagri Nomor 16 tahun 2016;

- 5) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak baru dalam memenuhi kewajibannya, yang berakibat tertundanya penerimaan daerah (khususnya potensi Pajak Rumah Makan dan Warung, serta Parkir).
- 6) Adanya data data WP/WPD pada saat penyerahan kewenangan dari KPP Pratama kepada pemerintah daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan tidak disertai data daftar Wajib Pajak yang menunggak.

#### C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Memberikan dukungan dan membangun komitmen agar tidak terjadi pelaporan yang terlambat, dan melakukan peringatan dini dan teguran bila dirasakan akan terjadi keterlambatan pelaporan pada PD tertentu.
- Perlu menyusun budget kas yang cermat, melaksanakan dengan tepat waktu dan mempertanggung jawabkan dengan cepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku serta realisasi anggaran sesuai anggaran kas dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- 3) Membangun komunikasi dan peningkatan komitmen PD terhadap pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan rancangan, penjabaran dalam penyusunan APBD ataupun APBD Perubahan.
- 4) Perlunya pemutakhiran data Aset BMD dengan instansi terkait.
- Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan melaksanakan pembaruan terhadap metode pengumpulan dan pengolahan data WPD dan Obyek Pajak sehingga data yang tersedia menjadi lebih valid dan selalu update.
- 6) Mengadakan penelusuran kembali bekerja sama dengan pihak KPP Pratama terkait WP/WPD yang menunggak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, guna mengambil sikap dilanjutkan penagihan atau dihapuskan.

# 4.5. Urusan Kepegawaian

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian diarahkan pada pada peningkatan sumberdaya aparatur dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur untuk mendukung kinerja perangkat daerah, urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi VI yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik", maka Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas (profesional, memiliki etika dasar profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme) dan bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, fokus implementasinya mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan, yaitu Penataan Birokrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik.

Pembangunan urusan tersebut didukung misi ke 6 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.

Indikator Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Pim IV, III, II dengan target 40% terealisasi 37% dengan capaian 92,5% didukung dengan pengiriman peserta Diklat PIM, 30 peserta Diklat Pim IV, 5 peserta Diklat Pim III, dan 2 peserta Diklat Pim II. Sampai dengan tahun 2019 jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat sebanyak 96 dari total 585 pejabat struktural. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.77**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Pim IV,	%	40	37	92,5
	III, II				
	- PIM IV	%	30	30	100
	- PIM III	%	5	5	100
	- PIM II	%	5	2	40

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2019.

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program dan kegiatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2019, pelaksanaannya didukung oleh 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur (5 kegiatan) dengan anggaran Rp.2.376.181.000,00 terealisasi sebesar Rp.761.505.000,00 atau 32% dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (7 kegiatan) dengan anggaran Rp.5.348.180.200,00 terealisasi Rp.4.087.924.047 atau 76,43%.

Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur dengan indikator Persentase Pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan target 81% terealisasi 93% dengan capaian 114,8%, didukung oleh pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka, mutasi/rotasi, administrator melalui penilaian assesment sedangkan jabatan pengawas melalui baperjakat.

Indikator kedua Persentase JFT yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan target 81% terealisasi 81% dengan capaian 100%, didukung oleh proses penerbitan penetapan angka kredit tim penilai JFT.

Indikator ketiga Persentase Formasi yang Terisi dengan target 81% terealisasi 29,5% dengan capaian 36,42%, didukung dari formasi yang diusulkan sebanyak 888 formasi disetujui Menpan-RB sebanyak 256 formasi setelah diadakan ujian seleksi SKD dan SKB lulus sebanyak 238 orang dan yang mengundurkan diri sebanyak 2 orang.

Dari pelaksanaan kegiatan dalam program penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur dengan target sebesar 82% dapat direalisasikan sebesar 62 atau dengan capaian 75,61%. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Kegiatan seleksi penerimaan CPNS sebanyak 2702 pendaftar, sedangkan kebutuhan untuk CPNS sebanyak 305 orang dalam 165 formasi dan kebutuhan untuk PPPK tahun 2019 sebanyak 310 orang hal tersebut dilaksanakan pengumuman melalui website dan formasi CPNS yang dibuka untuk tenaga-tenaga bidang pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. sedangkan untuk uji kompetensi pejabat eselon II target 14 peserta terealisasi 14 peserta atau 100%.

Kemudian dalam Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, dengan rincian 242 peserta Diklat Prajabatan dan Latsar, 30 peserta Diklat Pim IV, 5 peserta Diklat Pim III, dan 2 peserta Diklat Pim III. Untuk Uji Kompetensi pada tahun 2019 Jabatan pelaksana dari target 2 peserta terealisasi menjadi 32 peserta dikarenakan banyaknya usulan dari PD yang mengajukan kenaikan kelas jabatan.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat dengan predikat memuaskan dengan target 81% terealisasi 100% dengan capaian 123%, didukung oleh kelulusan semua peserta diklat dengan predikat memuaskan.

Indikator kedua Persentase terupdatenya data Aparatur dengan target 85,5% terealisasi 100% dengan capaian 116%, didukung oleh terupdatenya data seluruh pegawai sebanyak 3.248 pegawai.

Indikator ketiga Persentase nilai SKP diatas 78, dengan target 81% terealisasi 84% dengan capaian 103%, didukung oleh data nilai SKP dari 2.728 pegawai.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.78**Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kepegawaian

	1 3 , ,	<del></del>			
No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen	•			
	Aparatur				
	Outcome: Persentase Kebutuhan Formasi ASN	%	82	62	75,61
	Outcome: Persentase Pejabat yang ditempatkan	%	81	93	114,8
	sesuai kompetensi				
	Outcome: Persentase JFT yang ditempatkan sesuai	%	81	81	100
	kompetensi				
	Outcome: Persentase Formasi yang Terisi	%	81	29.5	36,42
	Anggaran	Rp.	2.376.181.000	761.505.000	32,04
2	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya	·			
	Aparatur				
	Outcome: Persentase Pejabat yang Lulus Uji				
	Kompetensi				
	- Jabatan Pelaksana	orang	2	32	Melebihi
	- Pejabat eselon II	orang	14	14	100
	Outcome: Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat	%	81	100	123
	dengan predikat memuaskan				
	Outcome: Persentase terupdatenya data Aparatur	%	85,5	100	116

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Outcome: Persentase nilai SKP diatas 78	%	81	84	103
	Anggaran	Rp.	5.348.180.200	4.087.924.047	76,43

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2019.

## C. Permasalahan dan solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

- Kurang sesuainya jenis diklat yang ditawarkan oleh badan diklat propinsi jawa timur dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pasuruan;
- 2) Belum optimalnya pelayanan kepegawaian.

#### C.2. Solusi

Solusi yang diupayakan adalah:

- 1) Mengusulkan kebutuhan Diklat berdasarkan analisis kebutuhan Diklat;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian.

# 4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan diarahkan pada meningkatnya pemanfaatan hasil litbang perencanaan pembangunan oleh pemangku kepentingan. urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

# A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatnya pemanfaatan hasil litbang perencanaan pembangunan oleh pemangku kepentingan. Dimana dokumen litbang tersebut digunakan sebagai dasar perangkat daerah untuk melakukan inovasi pembangunan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke VI yaitu "meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Dinamika perkembangan masyarakat di era globalisasi ini menuntut pelayanan publik yang sederhana, cepat dan transparan. Peran bidang penelitian dan pengembangan pada Bappelitbangda adalah melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan terhadap sesuatu obyek yang mempunyai nilai tambah yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indikator Persentase pemanfaatan dokumen hasil litbang pembangunan oleh pemangku-kepentingan dengan target 43,24% terealisasi 40% dengan capaian 93%, Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah tersedianya tenaga ahli kelitbangan yang kompeten. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.79
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemanfaatan dokumen litbang pembangunan oleh	%	43,24	40,00	93%
	pemangku-kepentingan				

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020.

# B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung dengan 1 program dan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.004.309.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.974.810.200,00 atau terserap sebesar 97%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.80

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perencanaan

No	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
ı	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.ribu	1.004.310	974.811	97%
	Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk Perangkat Daerah	%	88,12	75,64	85,84%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2019.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah:

Pada tahun 2019, anggaran yang dialokasikan untuk program penelitian dan pengembangan daerah adalah senilai Rp.1.004.309.500,00 yang terealisasikan senilai Rp.974.810.200,00 atau terserap sebesar 97,06%. Tingkat serapan anggaran merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian target indikator outcome dari program penelitian dan pengembangan daerah. Persentase pemanfaatan hasil litbang oleh stakeholders, ditargetkan sebesar 88,12% dan terealisasikan sebesar 75,64% atau tingkat capaiannya sebesar 85,84%.

Untuk mendukung tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan, maka strategi yang dipilih adalah merancang kegiatan litbang yang bersifat terapan, untuk memberikan contoh pola-pola baru bagi Perangkat Daerah (PD). Strategi ini terwujud dalam kegiatan pengembangan jejaring kerja pelaku ekonomi kreatif, penyusunan katalog hingga penyelenggaraan festival. Strategi ini juga masih didukung dengan kegiatan kelitbangan yang bersifat kajian maupun pengembangan. Kegiatan yang bersifat kajian antara lain: pelibatan LPMK dalam pembangunan kelurahan, penyusunan studi kelayakan, penyusunan ASB hingga pengembangan city branding.

#### C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

#### C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan pada tahun 2019, antara lain:

 Beberapa PD masih terkendala waktu dan sumberdaya dalam menerapkan hasil kelitbangan, serta Masih adanya kendala teknis administratif keuangan dalam eksekusi rekomendasi hasil kelitbangan, utamanya yang bersifat terobosan dan merupakan hal baru.

## C.2. Solusi

Solusi atas permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

 Peningkatan komunikasi dan koordinasi, penerapan hasil kelitbangan agar menjadi benih inovasi dengan berbagai pemangku-kepentingan agar penerapan hasil kelitbangan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah inovasi.

# 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

## 3.2.1. Strategi

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Upaya perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2016–2021, diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat. Hal ini terejewantah dalam strategi pokok pembangunan sebagai berikut:

# 1. Pemberdayaan masyarakat *(empowering)*

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk demokrasi partisipatoris, sebagai alternatif terhadap demokrasi representatif, di mana potensi masyarakat bisa diberdayakan melalui "ruang publik". Namun demikian, pemberdayaan masyarakat bukan membuat mereka menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity)*. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), Setiap manusia atau masyarakat pasti memiliki potensi. Kalau tidak, ia sudah punah. Upaya pengembangan (enabling) diarahkan untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering), Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata untuk menyediakan berbagai masukan (input) dan membuka akses ke berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Masukan (input) pemberdayaan menyangkut penyediaan infrastruktur dasar (seperti: jalan, listrik, komunikasi, irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan). Peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya ekonomi; merupakan upaya untuk membuka peluang masyarakat agar semakin berdaya.
- c. Melindungi potensi masyarakat agar dapat berkembang (*protecting*)

  Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya

dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti menutup interaksi, karena justru akan mengerdilkan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan *(empowering)* pada pembangunan lima tahun ini difokuskan pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat, melalui penyusunan kebijakan yang mengarah pada perluasan lapangan kerja (pro job).

# 2. Keberpihakan pada masyarakat miskin (pro poor)

Dari aspek ekonomi dan sosial, strategi ini ditumpukan pada revitalisasi kewirausahaan pada sektor-sektor ekonomi strategis, khususnya peran industri kerajinan rumah tangga mebel dan logam, serta pasar-pasar tradisional; menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar penduduk Kota Pasuruan menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor ini.

Dari aspek sosial, strategi ini ditumpukan pada pengembangan karakter kerelawanan sosial, yang ditumbuhkan dari nilai-nilai kearifan lokal. Religiusitas kehidupan masyarakat Kota Pasuruan, yang dilingkupi dengan nilai-nilai kesalehan sosial, merupakan modal sosial (social capital) yang cukup vital dalam membangun karakter kerelawanan sosial, yakni sebuah sifat dalam kehidupan sosial, yang mencerminkan kemauan untuk saling tolong-menolong satu sama lain.

# 3. Pemerataan pertumbuhan ekonomi (growth with equity),

Pemerataan pertumbuhan ekonomi mengandung unsur *pro-poor, pro-growth, pro-job*, dan *pro-environment*. Pertumbuhan ekonomi *(pro-growth)* harus dapat menciptakan lapangan kerja *(pro-job)*, dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin *(pro-poor)*, serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan *(pro-environment)*. Sementara itu, pelaksanaan strategi pertumbuhan yang *pro-job, pro-poor*, dan *pro-environment*, masing-masing diharapkan memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripadaproporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin.

# 3.2.2. Arah Kebijakan

Pemberdayaan, keberpihakan pada masyarakat miskin dan pemerataan pertumbuhan ekonomi merupakan strategi utama pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, yang pelaksanaannya dipandu dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
- 2. Pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- 3. Pelaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
- 4. Optimasi realisasi usulan program pembangunan aspirasi masyarakat, yang dijaring melalui musrenbang dan ruang publik lainnya, dengan memperhatikan efektivitas program dan ketersediaan anggaran.
- 5. Prioritasi pelaksanaan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- 6. Prioiritasi pelaksanaan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukunganpencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, ProEnvirontment*, SDG's dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan(misal, anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, anggaran kesehatan minimal 10%, dll.), serta pendampingan program-programpemerintah pusat.
- 7. Peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- 8. Pembangunan infrastrukur yang saling terkoneksi, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan menyeimbangkan pengembangan ekonomi wilayah.
- 9. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat perkembangan wilayah.

# 3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan strategis Kota Pasuruan, serta dinamika pembangunan yang tercermin dari permasalahan dan isu stretagis terkini, maka dirumuskan tema pembangunan RKPD Kota Pasuruan tahun 2019, yaitu: "Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi Dan Pemantapan Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan".

Perumusan tema tersebut, disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan tema RKP tahun 2019, yakni: "Pemerataan Pembangunan Melalui Pertumbuhan yang Berkualitas". Selain itu juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema RKPD Provinsi Jawa Timur, yaitu: "Pembangunan Sumberdaya Manusia Jawa Timur Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi".

Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2019 adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dicapai melalui peningkatan peran kepada pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya pada sektor ekonomi utama. Tanpa bermaksud mengesampingkan peran usaha besar dan menengah, pemberian peran yang lebih besar kepada usaha mikro dan kecil ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Pasuruan cukup dominan (hampir 93%). Selain itu, karakteristik usaha mikro dan kecil yang bersifat padat karya, menjadikannya sebagai penyedia lapangan kerja terbesar (hampir 62%) di Kota Pasuruan.

Usaha mikro dan kecil yang menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi adalah industri mebel, industri logam, industri mamin, industri kerajinan dan industri konveksi. Untuk itu, akan dilaksanakan program dan kegiatan terkait pengembangan produk, pemasaran hingga pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.

# 2. Investasi dan pemantapan infrastruktur

Kemudahan investasi dan ketersediaan infrastruktur yang layak merupakan akselerator pertumbuhan ekonomi. Kemudahan investasi diberikan dalam bentuk kepastian layanan perijinan, baik dalam persyaratan, waktu, maupun biaya.

Pengalihan seluruh perijinan ke DPMPTSP dan pelayanan perijinan online merupakan upaya lainnya untuk memudahkan investor dalam melakukan investasi. Selain itu, untuk memberikan kepastian investasi, juga disusun rencana peruntukan ruang bagi aktivitas industri.

Konektivitas menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui pembangunan jalan lingkar utara, pengembangan pelabuhan dan pelabuhan pendaratan ikan. Konektivitas ini akan ditunjang dengan penyediaan perumahan beserta prasarana sarana dan utilitas pendukungnya secara layak. Terutama adalah perluasan cakupan layanan air bersih, sanitasi (termasuk pengolahan sampah) dan penerangan jalan.

# 3. Pemerataan pembangunan

Pemerataan pembangunan merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan, baik dari perspektif kelompok pendapatan maupun wilayah. Pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan, utamanya, dicapai melalui program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sementara kesenjangan wilayah, ditanggulangi melalui pengembangan wilayah dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan baru, yang didukung dengan konektivitas dan infrastruktur yang layak.

Esensi tema pembangunan tersebut, dijabarkan lebih rinci ke dalam prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2019, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur tahun 2019. Selain itu, penyusunan prioritas pembangunan Kota Pasuruan juga memperhatikan arahan pembangunan Kota Pasuruan tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kinerja sektor jasa, meliputi: pendidikan, penyediaan akomodasi dan mamin, informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan.
- 2. Pengembangan sektor unggulan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 4. Peningkatan investasi untuk untuk membuka lapangan kerja.
- 5. Modernisasi infrastruktur dan kualitas SDM.

## 6. Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi diseluruh sektor.

Memperhatikan tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2019 dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta RKP, maka disusun prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2019, sebagaimana tersaji pada berikut.

**Tabel 3.81**Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan
Tahun 2019

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA PASURUAN
Pembangunan nasional	Peningkan kualitas SDM melalui	Pembangunan manusia melalui
melalui pengurangan	peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	kesejahteraan sosial dan pelayanan
kemiskinan dan peningkatan	ketenagakejaan dan penanggulangan	dasar
pelayanan dasar	kemiskinan	
Pengurangan kesenjangan	Pemertaan pembangunanantar wilayah	Pemerataan pembangunan melalui
antar wilayah melalui	melalui pengembangan infrastruktur	konektivitas, infrastruktur serta
penguatan konektivitas dan	ekonomi dan teknologi infromasi untuk	pengembangan wilayah untuk
kemaritiman	menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan	membangkitkan pusat pertumbuhan
Peningkatan nilai tambah	Peningkatan agro industri melalui nilai	Peningkatan nilai tambah ekonomi
ekonomi melalui pertanian,	tambah pengembangan agro maritim serta	melalui industri, perdagangan, jasa
indutri dan jasa produksi	akselarasi kepariwisataan	dan sektor ekonomi potensial lainnya
Pemantapan ketahanan	Peningkatan ketahanan pangan & energi	Peningkatan ketahanan pangan dan
energi, pangandan sumber	serta tata kelola sumber daya air &	kelestarian lingkungan
daya air	pelestarian sumber daya alam dan	
	lingkungan hidup yang berkelanjutan	
Stabilitas keamanan	Peningkatan ketentraman & ketertiban serta	Peningkatan ketentraman dan
nasional dan kesuksesan	kesuksesan pelaksanaan pemilu	ketertiban melalui kerukunan hidup
pemilu		bermasyarakat dan berbangsa

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kota Pasuruan tahun 2019

# 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2018

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, DPRD Kota Pasuruan telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018. Sehingga selanjutnya kewajiban DPRD menurut pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 adalah memberikan rekomendasi sebagai masukan dalam:

- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Berikut adalah rekomendasi DPRD Kota Pasuruan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pasuruan tahun 2018 beserta tanggapan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang diuraikan sebagai berikut:

## 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

## 1.1. Urusan Pendidikan

Berkenaan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, Pemerintah Kota menyelenggarakan pendidikan inklusi, namun kondisi sampai saat ini masih jauh dari ideal sehingga perlu ditingkatkan sarana prasarana serta SDM yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

### Tanggapan:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan inklusi Pemerintah Kota Pasuruan telah berupaya ditahun 2019 dalam peningkatan sarana prasarana dan SDM Guru Inklusi dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah umum, yang memberi kesempatan untuk belajar secara bersama dengan siswa lainnya, Terkait dengan peningkatan sarana prasarana, sudah mulai diperthatikan pelayanannya dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan sarana prasarana pendidikan inklusif
- Fasilitasi antar jemput peserta didik berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu
- c. Terkait dengan pengadaan sarana prasarana yang disyaratkan dalam inklusif di tahun 2019 sebanyak 10 Sekolah (5 lembaga SD dan 5 lembaga SMP), dan untuk bantuan media pendidikan inklusif baru 11 sekolah (6 lembaga SD dan 5 lembaga SMP), dan akan dipenuhi secara bertahap.

Terkait dengan peningkatan SDM Guru Inklusi, sudah mulai diperthatikan pelayanannya dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pelatihan guru pembimbing khusus, pelatihan kepada guru kelas SD dan guru mapel SMP tentang pembelajaran kelas inklusif
- b. Pendampingan Guru pembimbing khusus melalui pengawas sekolah (KKGs/MGMPS dan UNICEF).
- c. Pengadaan guru inklusif ASN
- d. Pemberian jasa pendampingan bagi Guru pembimbing Khusus
- e. Assesmen calon peserta didik baru
- f. Psikotes bagi peserta didik berkebutuhan khusus
- q. Pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus
- h. Fasilitasi forum komunikasi orang tua peserta didik berkebutuhan khusus
- i. Terkait pengadaan SDM yang sesuai disiplil ilmunya, dapat disampaikan bahwa telah dilaksanakan pelatihan bagi Guru Pembimbing khusus, yaitu pelatihan kepada guru kelas SD dan guru mapel SMP tentang pembelajaran kelas inklusif, dan pengadaan guru inklusif ASN sebanyak 32 orang guru sudah bertugas di beberapa sekolah.

# 1.2. Urusan Kesehatan

## Dinas Kesehatan

- Kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter, tenaga administrasi dan apoteker pada Puskesmas agar dicukupi.

# <u>Tanggapan</u>:

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kekurangan dokter, tenaga administrasi dan apoteker pada puskesmas Untuk kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter, apoteker dan tenaga administrasi puskesmas sudah diusulkan pada formasi rekruitmen CPNS tahun 2018 dan 2019 sejumlah 125 orang, telah terpenuhi sejumlah 70 orang.

#### RSUD dr. R. Soedarsono

Masih banyak keluhan dari pasien RSUD terhadap pelayanan di RSUD. Oleh sebab itu perlu optimalisasi pelayanan yang sesuai dengan SOP untuk mengubah perspektif masyarakat atas pelayanan di RSUD, sehingga meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik instansi Pemerintah

# Tanggapan:

Jumlah Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dimiliki oleh RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk mendukung kualitas pelayanan yaitu 643 SOP, terdiri dari SOP administrasi, SOP Pelayanan Medik dan SOP Pelayanan Non Medik. Evaluasi SOP dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan dan maksimal tiap 3 (tiga) tahun sekali. Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan SOP tersebut dilaksanakan setiap hari oleh Kepala Unit Kerja masing-masing, bila ada catatancatatan yang ke depan memerlukan perbaikan di inventarisir dan di tindak lanjuti penyempurnaan SOP.

RSUD terus berupaya berbenah meningkatkan kualitas pelayanannya untuk selalu bisa mengakomodir tingkat kepuasan dan kebutuhan masyarakat yang selalu dinamis dan terus meningkat. Guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan maka RSUD setiap tahun melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh pihak indenpenden sehingga nilai yang dihasilkan lebih obyektif, Nilai IKM pada tahun 2019 diperoleh sebesar 78,27 dengan predikat Nilai Mutu Pelayanan B, namun demikian masih tetap harus ditingkatkan.

# - Pemeliharaan terhadap fasilitas rawat inap agar ditingkatkan.

# Tanggapan:

RSUD dr. R. Soedarsono sudah mengalokasikan Rencana Kerja Anggaran untuk kegiatan pemeliharan dan pembangunan gedung/sarana/prasarana rumah sakit baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ataupun dari Pendapatan BLUD Tahun anggaran 2019, dari anggaran BLUD sebesar Rp.1.141.572.004,-, dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sebesar Rp.10.575.082.000,- dan dari DBHCHT sebesar Rp.4.155.886.000,- dengan total anggaran Rp.15.872.540.004,- dengan realisasi sebesar Rp.14.197.433.659,-, kekurangan akan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan dan prioritas pembiayaan. Anggaran dan realisasi pemeliharaan rawat inap selalu menjadi prioritas dan pembiayaannya ditangani sesuai dengan kemampuan.

# - Kebutuhan dokter terutama dokter spesialis agar dipenuhi.

# <u>Tanggapan</u>:

Terkait dengan kebutuhan dokter terutama dokter spesialis telah memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, RSUD dr. R. Soedarsono merupakan rumah sakit tipe C yang memiliki dokter spesialis sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Standar Permenkes (orang)	Yang Dimiliki RSUD (orang)
1	Dokter Layanan Primer	6	16
2	Dokter Gigi	+/-	3
3	Dokter Spesialis		
	Spesialis Dasar		
а	Penyakit Dalam	2	3
b	Anak	2	3
С	Bedah	2	2
d	Obstetri dan ginekologi	2	3
	Spesialis Lain		
а	Mata	+/-	2
b	THT-KL	+/-	1
С	Saraf	+/-	1
d	Jantung dan Pembuluh Darah	+/-	1
е	Kulit dan Kelamin	+/-	1
f	Kedokteran Jiwa	+/-	1
g	Paru	+/-	2
ň	Orthopedi dan traumatology	+/-	1
i	Urologi	+/-	-
i	Konservasi/endodonsi	+/-	-
k	Periodonti	+/-	-

No.	Jenis Pelayanan	Standar Permenkes (orang)	Yang Dimiliki RSUD (orang)
	Pedodonti	+/-	-
	Spesialis Penunjang		
а	Anestesi	1	2
b	Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	1
С	Radiologi	+/-	1
d	Patologi Klinik	+/-	1
е	Patologi Anatomi	+/-	-
f	Mikrobiologi Klinik	+/-	-

# - Penyelesaian pembangunan gedung OK Central.

### Tanggapan:

Gedung OK Central direncanakan dibangun 2 lantai yang terdiri dari 9 ruang operasi dengan melalui pertimbangan pengembangan rumah sakit tipe B. Pembangunan gedung OK Central dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahun 2017 untuk lantai 1 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan kemudian dilanjutkan di tahun 2018 untuk lantai 2 melalui anggaran BLUD. Tahap pembangunan lanjutan di tahun 2019 berorientasi pada penyempurnaan akhir konstruksi dan pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) untuk 2 ruangan operasi. Kekurangan MOT untuk 7 ruang operasi diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, akan tetapi tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Mengingat keterbatasan anggaran Rumah Sakit maka akan usulkan kembali di tahun 2021.

## - Untuk gedung hemodialisa agar segera difungsikan.

#### <u>Tanggapan</u>:

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PRENEFRI) Wilayah Jawa Timur sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk operasional unit layanan hemodialisa. Untuk saat ini RSUD dr. R. Soedarsono tengah menunggu proses perijinan sebagai kelengkapan standar administrasi beroperasinya unit layanan hemodialisa.

# 1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pembebasan lahan untuk JLU agar segera diselesaikan.

# Tanggapan:

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pasuruan mengupayakan penerbitan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya dilaksanakan pembebasan lahan untuk JLU.

b. Raperda perubahan RTRW harus terealisasi di tahun 2019.

# Tanggapan:

Terkait revisi RTRW, saat ini Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas PUPR sudah melaksanakan Konsultasi Publik. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan persetujuan substansi di Kementrian ATR/BPN, dengan syarat:

- Memperoleh rekomendasi Gubernur untuk pemenuhan daftar simak;
- Rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk peta revisi RTRW.
- c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik.

### <u>Tanggapan</u>:

Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas PUPR adalah:

- Memilih penyedia jasa dengan lebih selektif dengan menerapkan sistem penilaian (rapor);
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan konsultan pengawas;
- Melibatkan APIP dalam setiap pekerjaan fisik.

## 1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Kegiatan fasilitasi tim penyerahan PSU perumahan kepada Pemkot yang masih sedikit kurang didukung oleh pengembang dan masyarakat. Dinas harus segera mengambil sikap tegas dan mendorong pengembang serta masyarakat untuk memperlancar kegiatan ini.

#### Tanggapan :

 Melakukan sosialisasi dan fasilitasi penyerahan PSU kepada masyarakat dan pengembang.

- Pemerintah daerah telah memasang papan pengumuman terhadap perumahan yang sudah maupun belum diserahkan PSU nya kepada pemerintah Kota Pasuruan sekaligus sebagai media sosialisasi kepada warga penghuninya
- Meningkatkan koordinasi untuk penanganan PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah meliputi:
  - O Dinas PUPR dalam penyusunan rekomendasi dan site plannya
  - DPMPTSP dalam hal perijinannya
  - O BPN dalam hal kemudahan pemecahan sertifikat; dan
  - Instansi terkait lainnya.
- Melakukan revisi Perwali nomor 47 tahun 2014 menjadi Perwali nomor 43 tahun 2019 tentang tata cara penyerahan PSU perumahan dan permukiman kepada pemerintah Kota Pasuruan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Pasuruan.
- b. Bagaimana cara menentukan besaran tarif dan dasar hukum terkait penarikan retribusi rusuwa di Tembokrejo?

# Tanggapan:

Untuk menentukan besaran tarif sewa rusuwa tembokrejo didasarkan pada Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 01/PRT/N/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun, sedang dasar hukum penarikan retribusi mengacu pada Peraturan Walikota Pasuruan nomor 02 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan nomor 61 tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan Rumah Sederhana Sewa milik Pemerintah Kota Pasuruan, dan hal ini akan ditinjau kembali komponen substansinya.

# 1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

# 1. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

a. Perlu pengadaan bangunan untuk dapur umum beserta alat-alat kebutuhan memasak untuk penanganan musibah banjir.

# Tanggapan:

Terkait dengan pengadaan dapur umum beserta alat-alat kebutuhan memasak diampu oleh dinas sosial, untuk penanganan musibah banjir juga sudah tersedia mobil dapur lapangan yang dimiliki oleh BPBD.

b. Dalam melakukan penanggulangan bencana terutama kebakaran, BPBD belum optimal karena memang sebagian mobil damkar tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Oleh sebab itu perlu armada baru berupa mobil damkar untuk menunjang BPBD menjalankan tugasnya.

### Tanggapan:

Pada tahun 2019 sudah dianggarkan untuk pengadaan mobil Damkar dan sudah terealisasi tahun 2019. Tahun 2021 di BPBD diusulkan pengadaan armada water supply untuk *support* mobil Damkar dan motor roda tiga supaya dapat menjangkau permukiman yang sempit akses jalannya.

# 2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Perlu pembenahan infrastruktur mengingat kondisi existing kantor satpol PP jauh dari layak, ideal dan memadai, ruang aktivitas personil baik personil Trantib maupun personil Linmas tidak memadai, ruang penyidikan/penindakan untuk penampungan sementara hasil penertiban dan operasi-operasi razia lain baik orang dan barang masih belum tersedia.

## Tanggapan:

Terkait pembenahan infrastruktur Kantor Satpol PP telah di tindaklanjuti pada tahun 2019 namun gagal lelang, tetapi akan diupayakan ke depan dengan membangun pada lokasi yang memadai.

b. Dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah serta kegiatan dan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Satpol PP maka jumlah personil yang sangat jauh dari ideal dan memadai. Jumlah ideal staf adalah 210 orang dengan jumlah personil pasukan 140 orang, sementara jumlah existing staf saat ini 100 orang dengan jumlah personil pasukan 24 orang.

# Tanggapan:

Berdasar dari Permendagri No. 60 tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, standar jumlah ideal satuan polisi pamong praja kota pasuruan akan dipenuhi secara bertahap seiring droping cpns dari pemerintah.

c. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibenahi dan ditingkatkan khususnya yang terkait dengan penanganan penyidikan, penindakan dan penertiban serta kebugaran baik pada materi bela diri mapupun olah raga.

# <u>Tanggapan</u>:

Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur satuan polisi pamong praja, kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tetap/rutin akan dilakukan (kesamaptaan), untuk bela diri akan diupayakan dan khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan diprogramkan.

d. Adanya tunjangan khusus selain tunjangan perbaikan penghasilan bagi semua staf Satuan Polisi Pamong Praja.

## Tanggapan:

Tunjangan khusus Satuan Polisi Pamong Praja telah diperhitungkan melalui tunjangan perbaikan penghasilan.

## 1.7. Urusan Sosial

a. Segera dilakukan pengadaan rumah singgah bagi pembinaan anak jalanan.

### Tanggapan :

Untuk sementara rumah singgah bagi penanganan PMKS di Kota Pasuruan bertempat di eks kantor kelurahan petamanan. Rencana ke depan akan menjadi prioritas Pemerintah Kota Pasuruan dalam rencana pembangunan Tahun 2021/2022.

b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terkait updating data dan lainnya agar lebih ditertibkan dengan koordinasi dengan instansi terkait.

# Tanggapan:

Koordinasi terkait updating data PMKS dan lainnya sudah dilaksanakan secara intens dan berkelanjutan dengan instansi terkait dengan mengacu pada Permensos nomor 8 tahun 2012 tentang pendataan PMKS dan PSKS sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan sosial.

# 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

# 2.1. Urusan Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan JOB FAIR secara langsung melibatkan perusahaan dan dilaksanakan secara rutin.

# <u>Tanggapan</u>:

Kegiatan Job Fair merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dengan melibatkan perusahaan di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya sebagai upaya mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan.

b. Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja agar dikoordinasikan dengan Dinas terkait agar peserta yang lulus pelatihan dapat langsung menjalankan usaha sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

# Tanggapan:

Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja yang telah lulus dan mendirikan usaha akan dikoordinasikan dengan Dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) akan mendapat pelatihan lebih lanjut (manajemen dan kematangan produk).

c. Perlunya pengembangan kewirausahaan masyarakat dengan program-program teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru.

### Tanggapan :

Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan mempunyai kegiatan pembinaan terhadap Wirausaha Baru dan Usaha Mandiri Sektor Informal serta pembinaan Tenga Kerja Mandiri Terdidik, yang ditujukan kepada peserta pelatihan yang sudah lulus dan berwirausaha. Pelatihan yang dimaksud adalah tentang manajemen

kewirausahaan dan pemasaran secara berkelanjutan sebagai usaha dalam pengembangan kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan

# 2.3. Urusan Pangan

Perlu peningkatan diversifikasi pangan dan pangan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan

#### Tanggapan:

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan telah dilaksanakan beberapa kegiatan, meliputi:

- Promosi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, yang berisi lomba olahan pangan lokal, gelar produk pangan, mensosialisasikan contoh jajanan sehat kepada kantin sekolah.
- Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berupa Pelatihan Pengolahan Pangan Dari Bahan Pangan Lokal.
- Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Tanaman Hidroponik Dan Tanaman Unggulan.

# 2.5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Perlu ditinjau kembali terkait besaran retribusi jasa umum untuk kebersihan sampah hotel dan rumah makan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan di lapangan.

#### Tanggapan:

Telah ditinjau kembali dan ditetapkan perubahannya melalui Peraturan Walikota Pasuruan nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Perwali dimaksud telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 april 2019

b. Perlu dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait penempatan TPS 3R yang akan diletakkan di dekat rumah warga karena sebenarnya sudah tidak menimbulkan bau dan sudah ada petugas lengkap.

Sosialisasi telah dilakukan kepada warga sekitar terkait penempatan TPS 3R.

c. Pengembangan dan pembinaan kader lingkungan lebih dimaksimalkan untuk membuat pilot project salah satu ruas jalan di setiap kecamatan.

#### Tanggapan:

Pembinaan kader lingkungan telah dilakukan secara berkala termasuk evaluasinya.

d. Perlu dibentuk tim saber sampah untuk menangani permasalahan sampah di lingkungan warga masyarakat dan sekaligus sosialisasi mengenai kebersihan diri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

#### Tanggapan:

Pada tahun 2019 sudah terbentuk 5 tim saber sampah, sedangkan untuk sosialisasi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan oleh DLHKP

# 2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Capian akta kelahiran pada Tahun 2017 98% pada Tahun 2018 diharapkan 100% dengan membuka Pelayanan di 24 tempat persalinan

#### Tanggapan:

Capaian akta kelahiran untuk usia 0-1 tahun pada tahun 2018 sudah 100%, dan untuk titik layanan persalinan di tahun 2018 terdapat 28 tempat persalinan.

b. Percepatan Pelayanan Kependudukan terkendala oleh peraturan yang mengharuskan melalui RT, RW dan Kelurahan. Untuk itu perlu adanya terobosan hukum untuk memangkas alur pelayanan.

#### Tanggapan:

Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang memangkas prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan berbasis *customer base*, sehingga pengurusan dokumen kependudukan yang memerlukan pengantar RT/RW, kelurahan hanya dalam pelayanan Pecatatan Biodata penduduk, sedangkan

pelayanan administrasi kependudukan lainnya tidak lagi diperlukan pengantar dari RT/RW/Kelurahan.

Perlu adanya anggaran lembur PNS khususnya untuk pelayanan pada hari Sabtu c. dan Minggu

#### Tanggapan:

Lembur PNS terkait layanan akta kelahiran usia 0-18 tahun ke atas dan penjangkauan akta kelahiran semua penduduk kota pasuruan yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di hari Sabtu dan Minggu telah masuk komponen TPP.

d. Perlu adanya rehab gedung dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada masyarakat.

#### Tanggapan:

Untuk rehab gedung selama ini sudah dilaksanakan melalui pemeliharaan sesuai kondisi bangunan.

# 2.10. Urusan Perhubungan

Perlu penambahan sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.

#### Tanggapan:

Pemenuhan sarana prasarana yang diantaranya APILL dan Lampu penerangan jalan umum serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan akan dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.

Penertiban parkir berlangganan agar terus dilakukan. b.

#### Tanggapan

III *256* 

Saran dan masukan terkait pemberlakuan penertiban parkir berlangganan di perhatikan dan dilanjutkan.

Agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan lancar c. diperlukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas terkait, pengelola parkir dan warga masyarakat.

Saran dan masukan terkait perlunya penataan, penertiban dan pengawasan pengelolaan parkir antara dinas terkait, pengelola parkir dan warga masyarakat akan ditingkatkan.

d. Untuk pemeliharaan PJU di tahun 2018 belum optimal, ini dapat dilihat dari banyaknya PJU yang padam, begitu juga PJU yang ada di perbatasan dengan wilayah Kab. Pasuruan banyak yang kondisinya padam dan tiangnya juga harus dilakukan pemeliharaan. Diharapkan di tahun 2019 harus lebih optimal dari pada tahun 2018 baik dari komponen maupun kualitas PJU.

#### Tanggapan:

Terkait pemeliharaan PJU Ditahun 2019 telah diperhatikan dan dilaksanakan perbaikan kondisi tapi masih belum optimal sehingga akan ditingkatkan.

e. Tentang kendaraan yang melebihi kelas jalan, hendaknya Dishub bisa mengkoordinasikannya dengan forum Dishub sehingga kerusakan jalan dapat dihindari.

# Tanggapan:

Terkait dengan penertiban kendaraan yang melebihi kelas jalan telah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian baik melalui rekayasa lalulintas maupun penegakan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai kewenangan.

#### 2.11. Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik

Progres pengadaan *media center* terkendala oleh belum tersedianya kantor dan saat ini masih tergabung dengan kantor Dinas Perhubungan. Perlu adanya kantor baru bagi Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik untuk mendukung Program Smart City.

#### Tanggapan :

Untuk sementara *Media Center* telah ditempatkan pada lokasi dinas perpustakaan dan arsip (Jl. Pahlawan). Ke depan Dinas Kominfo akan menempati eks Dinas Perpustakaan dan Arsip, seiring pindahnya kantor perpustakaan dan arsip ke bangunan baru di lingkungan RTH Sekargadung.

# 2.12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Perlunya pembinaan dan pengembangan SDM untuk kepengurusan koperasi.

## Tanggapan:

Pembinaan dan pengembangan SDM pengurus koperasi telah dilakukan secara intens dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengawas.

b. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan koperasi untuk kelompok usaha di bidang mebel dan perikanan.

#### Tanggapan:

Sosialisasi pada kelompok mebel sudah dilaksanakan, akan tetapi hasil pertemuan dan sosialisasi belum ada tindak lanjutnya, demikian juga untuk kelompok usaha bidang perikanan.

c. Perlunya pembinaan koperasi yang kurang aktif.

#### Tanggapan:

Pembinaan koperasi yang kurang aktif telah ditindaklanjuti, melalui pelaksanaan program/kegiatan bidang koperasi.

d. Perlu dilakukan pengelompokkan UMKM sesuai dengan bidangnya karena pengembangan industri kecil dan menengah aplikasinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

#### Tanggapan:

Pengelompokan UMKM telah di tindak lanjuti sesuai bidangnya, sedang pengembangan industri kecil dan menengah ditangani oleh dinas perindustrian dan perdagangan.

#### 2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

 Kepengurusan semua cabang olahraga agar segera ditertibkan dengan koordinasi dengan KONI terkait dengan dualisme pengurus, pengurus non aktif dan rangkap jabatan.

Terima kasih saran tentang adanya rangkap jabatan dalam Cabor di KONI Kota Pasuruan bias diterima dan di tahun 2020 ini menjadi target kami agar tidak terjadi rangkap jabatan dalam kepengurusan Cabor di Koni Kota Pasuruan

b. Terkait dengan hibah kepada PSSI yang akhirnya diberikan kepada cabor khususnya sepakbola diminta memerhatikan status badan hukum Persekap.

#### Tanggapan:

Bahwa alokasi dana hibah yang diberikan kepada PSSI senantiasa dikoordinasikan dengan KONI agar pemberian hibah ini sesuai dengan ketentuan yang ada dan atau sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

c. Pembinaan atlet berprestasi dalam bentuk beasiswa belajar atau uang pembinaan.

#### Tanggapan:

Reward bagi atlit berprestasi telah dilaksanakan dan telah diberikan oleh KONI sebagai salah satu moivasi untuk mendorong prestasi para atlit agar lebih berprestasi namun untuk reward khusus beasiswa bagi pelajar ini perlu pengkajian yang lebih jauh dan perlu juga evaluasi yang lebih matang karena ini menyangkut masalah pendanaan yang dibutuhkan

d. Pemerintah daerah harus memberikan ruang terhadap peran pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di segala bidang.

# Tanggapan:

- Pemerintah memberikan fasilitas kepada pemuda diantaranya adalah fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau, sebagai sarana rekreasi
- Kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan kota pasuruan
- Dilibatkan dalam pembinaan dan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya
- Memberikan fasilitasi dalam rangka pengembangan seni dan budaya, melalui event-event seni dan budaya

Diikuti dalam pemilihan pemuda pelopor baik tingkat daerah, tingkat propinsi dan tingkat nasional

#### 3. Urusan Pilihan

# 3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Mengupayakan pengadaan tanah menuju TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang membutuhkan dokumen sertifikat asli dan surat pernyataan kesanggupan untuk dijual ke Pemerintah Kota Pasuruan.

# Tanggapan:

Berdasarkan rekomendasi dari BPK bahwa kegiatan Pengadaan Tanah menuju TPI adalah wewenang dari Dinas PUPR. Dinas Perikanan telah melakukan sebagian pekerjaan terkait proses pengadaan tanah menuju TPI tersebut. Diantaranya yaitu pekerjaan Apraisal, pengumpulan dokumen sertifikat asli pemilik tanah dan kesanggupan untuk menjual kepada Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun seluruh dokumen tersebut telah disampaikan pada Dinas PUPR (dalam bentuk copy). Perlu kami sampaikan bahwa terdapat 1 dokumen sertifikat yang tidak bisa ditunjukkan oleh pemilik tanah.

b. Lebih proaktif untuk mengajukan bantuan peralatan tangkap untuk nelayan produktif ke pemerintah pusat agar masyarakat nelayan tidak menggunakan alat tangkap yang berbahaya.

#### Tanggapan:

Dinas Perikanan telah proaktif mengajukan bantuan bagi nelayan pemakai alat tangkap terlarang. Nelayan tersebut telah mendapatkan replacement (penggantian) alat tangkap dari Pemerintah Pusat. Replacement tersebut dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 untuk nelayan cantrang dan trawl.

# 3.3. Urusan Pertanian

 a. Turunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Perlu solusi untuk mengatasi persoalan ini.

Kurangnya pengetahuan tentang ilmu Pertanian menjadi tidak adanya kemauan untuk berperan sebagai petani dan berpola piker pekerjaannya berat dan hasilnya juga tidak sesuai keinginan makanya perlu edukasi dan inovasi mengenai budidaya, pengolahan produk, dan manajemen pemasaran sehingga profesi bidang Pertanian dapat menghasilkan pendapatan yang bisa mensejahterakan pelaku didalamnya. Misal: menggalakkan kembali teknologi mina padi, system jajarlegowo, teknologi hidroponik, tabu lampot, aquaponik.

b. Meningkatkan daya saing produk pangan dan pertanian dengan modernisasi peralatan dan penyediaan bibit unggul.

#### Tanggapan:

Perlu inovasi produk atau varietas yang unggul dan menggunakan alat spesifiklokasi yang berstandar SNI.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan RPH Blandongan menjadi lebih modern dan penampungan yang masih tradisional.

#### Tanggapan :

Pemanfaatan *railling system* (modern) *railling system* (modern) belum dapat dimanfaatkan karena:

- Secara perhitungan biaya pemanfaatan RPH *railling system* (modern) satu hari minimal jumlah pemotongan 30 ekor namun kenyataan rataan pemotongan perhari RPH Kota Pasuruan adalah 8 ekor, itu yang memanfaatkan hanya jagal Kota Pasuruan yang ditahun 2019 berjumlah 7 orang jagal aktif (melakukan pemotongan tiap hari) adapun ditahun 2020 menjadi 6 jagal aktif.
- Untuk menjalankan RPH railling system (modern) perlu perbaikan bangunan dan penggantian peralatan mengingat RPH ini dibangun tahun 1999 2000 ( Dasarnya DIPA Pembangunan RPH Kota Pasuruan) dikarenakan sesuai aturan yang baru semua bangunan RPH tidak boleh ada siku (lengkung), lantai pemotongan harus coating, ruang pelayuan berpendingin serta memiliki chilling room dan Blast room.

# 3.6. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Gaji pegawai kontrak/informal di lingkungan Disperindag yang tidak terbayar selama 3 bulan segera diselesaikan agar tidak menghambat kinerja dan pelayanan yang diberikan.

#### Tanggapan:

Gaji pegawai informal (bukan pegawai kontrak) yang ada lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan pada tahun 2018 (selama tiga bulan) telah terbayarkan secara keseluruhan walau terlambat. Hal ini terjadi karena adanya ketidak sesuaian satuan besaran honor di DPA dengan SK pedoman kerja pelaksanaan tugas 2018, sehingga butuh proses penyesuaian.

# 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

#### 4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

a. Untuk meminimalisir terjadinya kegagalan lelang paket pekerjaan, hendaknya BLP meninjau kembali SOP pengadaan barang/jasa misalnya dengan memberi batas waktu bagi perangkat daerah untuk memasukkan RUP. Karena melihat hasil pembahasan, ada perangkat daerah yang baru mengusulkan pengadaan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga untuk melakukan lelang ulang dan pelaksanaan pekerjaan waktunya mendesak.

# Tanggapan :

- Terkait dengan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) perangkat daerah di aplikasi system informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), bagian layanan pengadaan melalui surat edaran walikota menginstruksikan perangkat daerah untuk menyiapkan rencana umum pengadaan setelah Raperda tentang APBD disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta mengumumkan RUP melalui SIRUP agar penyedia bisa menyiapkan diri untuk mengikuti proses tender/seleksi;
- Berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, jadwal pemilihan penyedia sudah disusun, direncanakan dan diumumkan oleh perangkat daerah pada aplikasi SIRUP. Proses pemilihan penyedia

dilaksanakan setelah PPK pada PD membuat paket dan mengirim paket pekerjaan melalui SPSE ke UKPBJ.

b. Adanya kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2017 yaitu kegiatan Sertifikasi Tanah Wakaf dikarenakan tidak adanya pengajuan dari masyarakat. Untuk itu perlu adanya database tanah wakaf se-Kota Pasuruan yang belum bersetifikat agar Bagian Administrasi Pemerintahan tidak menunggu pengajuan dalam proses Sertifikasi Tanah wakaf.

#### Tanggapan:

Terkait dengan kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2018 yaitu kegiatan sertifikasi tanah wakaf yang dikarenakan tidak adanya pengajuan dari masyarakat, bahwa kegiatan sertifikiasi tanah wakaf mulai tahun 2017 berdasarkan tupoksi sudah tidak berada di bagian administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kota pasuruan, tetapi di alihkan ke bidang asset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota pasuruan.

#### 4.3. Urusan Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan daerah hendaknya Pokok-Pokok Pikiran DPRD diakomodir semaksimal mungkin untuk masuk dalam RKPD

#### <u>Tanqqapan : </u>

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam urusan perencanaan telah diakomodir semaksimal mungkin sesuai dengan sasaran pembangunan yang termaktub dalam RPJMD dan mengacu pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, keselarasan program dengan provinsi dan nasional, serta hasil klasifikasi kewenangan.

#### 4.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Untuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan program CSR/TSP untuk pengembangan Kota Pasuruan yang terserap hanya 86,37% mestinya bisa terserap lebih maksimal karena nilai CSR yang sudah pasti.

Untuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan CSR/TSP untuk pengembangan kota pasuruan yang masih tererap hanya 86,37% mestinya bisa terserap lebih maksimal karena nilai CSR yang sudah pasti. Hal ini menjadi perhatian dan evaluasi forum CSR.

# BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2019 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

# BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019 ini, sistematika penulisannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Uraian-uraian tersebut merupakan uraian kinerja urusan dan kinerja program aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai pelaksanaan urusan dalam kurun waktu anggaran tahun 2019.

Tanggungjawab Walikota sebagai Kepala Daerah yang mengemban amanah masyarakat Kota Pasuruan di akhir tahun anggaran, diwujudkan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Dari Rakyat hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini diharapkan adanya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dan pertimbangan di masa yang akan datang, dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pasuruan.

Menyadari sepenuhnya, sebagai Kepala Daerah tak luput dari adanya kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan selama Tahun Anggaran 2019, baik karena faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan waktu dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kendati telah berupaya secara optimal. Untuk itu semuanya kami serahkan penilaiannya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan seobyektif mungkin.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi nantinya akan dicermati, diperhatikan, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti guna terwujudnya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi pembangunan di Kota Pasuruan dapat terwujud.

Segenap keberhasilan, prestasi maupun keterlambatan dan ketidak-sempurnaan dalam pengelolaan selama tahun 2019 telah disampaikan di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi penyemangat dan pengingat dalam tugas untuk tahuntahun yang akan datang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga *Allah SWT* akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dan semoga selalu meridhoi setiap usaha dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat. Tak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasama yang baik dari seluruh pihak selama ini termasuk para alim ulama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan segenap komponen masyarakat atas masukan, saran dan kritiknya, semoga yang telah, sedang dan akan kita perbuat mendapat ridlho dari *Allah SWT*. Amin.

Sekian dan terimakasih.

Pasuruan, Maret 2019
WAKIL WALIKOTA PASURUAN

**RAHARTO TENO PRASETYO**